



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2025-2045

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2024**



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamankan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan Program Bupati.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan

menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal **26 Agustus** 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal **26 Agustus** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



LEAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024
NOMOR **41**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN, PROVINSI LAMPUNG **03/1525/LS/2024**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional, telah terdapat suatu pedoman/landasan hukum dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan mengenai sasaran, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga perencanaan pembangunan baik rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah berada dalam suatu kesatuan/sinergis.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional, sedangkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan ini, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan rencana pembangunan Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan dari tahun 2025 – 2045. Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lampung selatan Tahun 2025 – 2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan atau periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan pembentukan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- a. untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat;
- b. untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- c. untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, berakhlak mulia, mandiri, bebas maju dan sejahtera yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan; dan
- d. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan perencanaan lainnya di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan.

RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 – 2045 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Lampung Selatan yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang terpilih oleh rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah. RPJMD tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya. Namun demikian, Kepala Daerah terpilih tetap memiliki ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya

melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 – 2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	1-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	1-6
1.4 Maksud dan Tujuan	1-7
1.5 Sistematika Penulisan	1-8
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	2-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-56
2.3 Aspek Daya Saing.....	2-77
2.4 Aspek Pelayanan Umum	2-110
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	2-116
2.6 Trend Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	2-134
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	2-143
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	3-1
3.1 Permasalahan	3-1
3.2 Isu Strategis	3-18
BAB 4 VISI DAN MISI DAERAH	4-1
4.1 Visi Pembangunan.....	4-1
4.2 Sasaran Visi	4-3
4.3 Misi	4-6
4.4 Upaya Super Prioritas (<i>Game Changer</i>) Pembangunan Daerah 2025-2045	4-7
BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH.....	5-1
5.1 Arah Kebijakan	5-1
5.2 Sasaran Pokok.....	5-48

5.3	Arah Kebijakan Dalam Implementasi Kerangka Transformasi Pada Misi 6	5-100
5.4	Misi ke-7 Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	5-101
5.5	Misi Ke 8 Kestinambungan Pembangunan	5-103
5.6	Rincian Sasaran Visi Dan Misi Daerah	5-105
5.7	Rincian Sasaran Indikator Utama Pembangunan Daerah ...	5-109
BAB 6 PENUTUP		6-1
6.1	Kaidah Pelaksanaan	6-1
6.2	Pembiayaan Pembangunan	6-8

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Menurut Kecamatan, 2023	2-1
Tabel 2.2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung, 2023	2-8
Tabel 2.3 Kawasan Bencana dan Jalur Evakuasi Bencana di Kabupaten Lampung Selatan	2-10
Tabel 2.4 Data Bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023	2-11
Tabel 2.5 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lampung Selatan	2-13
Tabel 2.6 Presentase Penutupan Lahan di Kabupaten Lampung Selatan	2-24
Tabel 2.7 Luasan Daya Tampung Lahan Perkecamatan	2-27
Tabel 2.8 Rekapitulasi Luas Penggunaan Lahan Terhadap Daya Dukung Air	2-28
Tabel 2.9 Daya Dukung Air Permukaan Kabupaten Lampung Selatan	2-29
Tabel 2.10 Daya Dukung Pangan	2-30
Tabel 2.11 Neraca Harian Pengelolaan Sampah	2-31
Tabel 2.12 Luas Klasifikasi Fungsi Penyediaan Pangan di Kab. Lampung Selatan	2-34
Tabel 2.13 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Lampung Selatan	2-35
Tabel 2.14 Luas Klasifikasi Fungsi Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Lampung Selatan	2-35
Tabel 2.15 Luas Klasifikasi Fungsi Penyediaan Serat/fiber di Kab. Lampung Selatan	2-38
Tabel 2.16 Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh)	2-39
Tabel 2.17 Emisi GRK dan Target Mitigasi Penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung	2-42

Tabel 2.18 Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Kabupaten Lampung Selatan	2-43
Tabel 2.19 Kegiatan Tambang Kabupaten Lampung Selatan	2-44
Tabel 2.20 Luas Eksisting Kawasan Lindung di Kabupaten Lampung Selatan	2-49
Tabel 2.21 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	2-50
Tabel 2.22 Indeks Ketahanan Daerah	2-50
Tabel 2.23 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Daerah ...	2-51
Tabel 2.24 Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023	2-52
Tabel 2.25 Kepadatan Penduduk Lampung Selatan, 2023	2-53
Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Selatan, 2023.....	2-55
Tabel 2.27 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023	2-57
Tabel 2.28 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional 2019-2023	2-58
Tabel 2.29 Gini Rasio Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023	2-59
Tabel 2.30 Presentase Penduduk Miskin	2-61
Tabel 2.31 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin serta Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan	2-62
Tabel 2.32 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019-2022	2-66
Tabel 2.33 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Selatan, 2019-2023	2-67
Tabel 2.34 Angka Harapan Hidup di Lampung Selatan (LF SP2020), 2020-2023	2-68
Tabel 2.35 Rata-rata pengeluaran per Kapita Kabupaten Lampung Selatan (Ribuan Rupiah/Tahun), 2019-2023	2-69

Tabel 2.36 Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lampung Selatan, 2019-2023	2-69
Tabel 2.37 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 2019-2023	2-74
Tabel 2.38. Prevalensi Stunting di Kabupaten Lampung Selatan.....	2-75
Tabel 2.39. Insidensi Tuberkulosis di Kabupaten Lampung Selatan.	2-76
Tabel 2.40 Jumlah Penderita Penyakit Menular Tahun 2019-2023 ..	2-76
Tabel 2.41 Angka Kesakitan.....	2-77
Tabel 2.42 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah).....	2-78
Tabel 2.43 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah).....	2-79
Tabel 2.44 Kontribusi Sektor PDRB berdasarkan Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023	2-80
Tabel 2.45 Sektor Basis berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2019-2023	2-81
Tabel 2.46 PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023 (Rp/Jiwa)	2-82
Tabel 2.47 Kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan 2019-2023.....	2-83
Tabel 2.48 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan	2-84
Tabel 2.49 Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Kabupaten Lampung Selatan	2-85
Tabel 2.50 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2019-2023	2-87
Tabel 2.51 Persentase Jumlah Masyarakat yang Minat Membaca di Perpustakaan.....	2-88
Tabel 2.52 Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2019-2023.....	2-89
Tabel 2.53 Angka Kelulusan (AL) Tahun 2019-2023	2-89
Tabel 2.54 Angka Ketergantungan, 2019-2023	2-90
Tabel 2.55 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	2-91

Tabel 2.56 Jumlah Sekolah di Setiap Jenjang Pendidikan di Setiap Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan, 2023	2-92
Tabel 2.57 Rasio Ketersedian Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Selatan, 2023	2-93
Tabel 2.58 Rasio Ketersedian Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Lampung Selatan, 2023	2-94
Tabel 2.59 Rasio Posyandu Per-Satuan Balita, 2019-2023	2-94
Tabel 2.60 Rasio Pelayanan Unit Kesehatan Per-Satuan Penduduk, 2019-2023	2-95
Tabel 2.61 Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk, 2019-2023 ...	2-96
Tabel 2.62 Panjang Jalandi Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020- 2023 (km).....	2-96
Tabel 2.63 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Utama yang Digunakan Tahun 2023.....	2-103
Tabel 2.64 Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Lampung Selatan.....	2-105
Tabel 2.65 Capaian Skor IDSD Kabupaten Lampung Selatan, 2023	2-106
Tabel 2.66 Indeks Kerukunan Umat Beragama	2-107
Tabel 2.67 Incremental Cash Output Ratio, Kabupaten Lampung Selatan 2019-2023.....	2-108
Tabel 2.68 Jumlah Nilai Investasi Tahun 2020-2023	2-108
Tabel 2.69 Jumlah Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Tingkat Kepolisian di Kabupaten Lampung Selatan, 2021-2023	2-110
Tabel 2.70 Indeks Inovasi Daerah	2-112
Tabel 2.71 Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025	2-117
Tabel 2.72 Proyeksi Jumlah Penduduk Lampung Selatan 2025-2045 per Kecamatan	2-135
Tabel 2.73 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	2-135
Tabel 2.74 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur .	2-135

Tabel 2.75 Proyeksi Kebutuhan Listrik (Kwh)	2-138
Tabel 2.76 Proyeksi Kebutuhan Air Minum	2-138
Tabel 2.77 Proyeksi Timbunan Sampah	2-138
Tabel 2.78 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Posyandu)	2-139
Tabel 2.79 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Puskesmas) ..	2-139
Tabel 2.80 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Tempat Praktik Dokter)	2-140
Tabel 2.81 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (TK)	2-140
Tabel 2.82 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (SD)	2-141
Tabel 2.83 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (SMP)	2-141
Tabel 2.84 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (SMA)	2-142
Tabel 2.85 Sebaran dan Luas Rencana Kawasan Pertambangan dan Energi, 2023	2-178
Tabel 2.86 Sebaran dan Luas Rencana Kawasan Industri, 2023	2-179
Tabel 2.87 Sebaran dan Luas Kawasan Pemukiman Perdesaan	2-181
Tabel 2.88 Sebaran dan Luas Kawasan Perkotaan	2-182
Tabel 3.1 Indeks Ketahanan Pangan Kab. Lampung Selatan Tahun 2020-2022	3-24
Tabel 3.2 Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Lampung Selatan 2019-2023	3-25
Tabel 3.3 Komoditas Pertanian di Lampung Selatan 2019-2023	3-25
Tabel 3.4 Komoditas Perikanan di Lampung Selatan 2019-2023	3-26
Tabel 3.5 Komoditas Sektor Peternakan di Lampung Selatan 2019-2023	3-27
Tabel 3.6 Perbandingan Hasil Penyusunan FSVA Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2023	3-29
Tabel 3.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Lampung Selatan Tahun 2021-2023	3-31
Tabel 3.8 Nilai Akuntabilitas dan Opini BPK Kabupaten Lampung Selatan 2019-2023	3-33
Tabel 3.9 Tabel Penilaian RB Kabupaten Lampung Selatan, 2023	3-33
Tabel 3.10 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan	3-36

Tabel 3.11 Jumlah Wisatawan Kabupaten Lampung Selatan, 2019-2023	3-39
Tabel 4.1 Sasaran Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Lampung dan RPJPD Kabupaten Lampung Selatan	4-3
Tabel 4.2 <i>Game Changer</i> Lampung Selatan	4-8
Tabel 5.1 Arah Kebijakan Transformasi Sosial	5-2
Tabel 5.2 Indikator Utama Pembangunan Transformasi Sosial	5-8
Tabel 5.3 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi.....	5-14
Tabel 5.4 Indikator Utama Pembangunan Transformasi Ekonomi....	5-18
Tabel 5.5 Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola	5-26
Tabel 5.6 Indikator Utama Pembangunan Transformasi Tata Kelola	5-28
Tabel 5.7 Arah Kebijakan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial dan Stabilitas Makroekonomi Daerah	5-30
Tabel 5.8 Indikator Utama Pembangunan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial dan Stabilitas Makroekonomi Daerah	5-33
Tabel 5.9 Arah Kebijakan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologis .	5-38
Tabel 5.10 Indikator Utama Pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologis	5-42
Tabel 5.11 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok.....	5-49
Tabel 5.12 Sasaran Pokok.....	5-88
Tabel 5.13 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi 6	5-100
Tabel 5.14 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi 7	5-102
Tabel 5.15 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi 8	5-103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1-6
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Selatan	2-3
Gambar 2.2 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Kabupaten Lampung Selatan Menurut Kecamatan, 2023.....	2-4
Gambar 2.3 Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten ...	2-5
Gambar 2.4 Peta Topografi Kabupaten Lampung Selatan.....	2-5
Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Lampung Selatan.....	2-7
Gambar 2.6 Peta Iklim Kabupaten Lampung Selatan	2-9
Gambar 2.7 Peta Potensi Rawan Bencana Kabupaten Lampung Selatan	2-10
Gambar 2.8 Peta Kerawanan Bencana BNPB Kabupaten Lampung Selatan	2-12
Gambar 2.9 Peta Kawasan Rawan Banjir	2-16
Gambar 2.10 Peta Potensi Tsunami Kabupaten Lampung Selatan ...	2-17
Gambar 2.11 Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lampung Selatan	2-18
Gambar 2.12 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Selatan	2-21
Gambar 2.13 Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Lampung Selatan	2-22
Gambar 2.14 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lampung Selatan	2-23
Gambar 2.15 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Di Kabupaten Lampung Selatan	2-24
Gambar 2.16 Peta Daya Dukung Lahan	2-26
Gambar 2.17 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan.....	2-35
Gambar 2.18 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air.....	2-37
Gambar 2.19 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Bakar (Fuel) Kayu dan Fosil	2-39

Gambar 2.20 Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	
Kabupaten Lampung Selatan	2-44
Gambar 2.21 Distribusi Penduduk Lampung Selatan, 2023	2-53
Gambar 2.22 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di	
Kabupaten Lampung Selatan, 2023.....	2-56
Gambar 2.23 Laju Inflasi Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan	
Nasional, 2019-2023	2-59
Gambar 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka, 2019-2023	2-64
Gambar 2.25 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Sensus	
Penduduk 2020 Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi	
Lampung dan Nasional Tahun 2020-2023.....	2-65
Gambar 2.26 Presentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Lampung	
Selatan Tahun 2019-2023	2-71
Gambar 2.27 Presentase Capaian UHC Kabupaten Lampung Selatan	
Tahun 2023.....	2-72
Gambar 2.28 Presentase Balita Gizi Kurang Kabupaten Lampung	
Selatan Tahun 2019-2023	2-73
Gambar 2.29 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2019-2023	2-86
Gambar 2.30 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2019-2023	2-87
Gambar 2.31 Panjang Jalan Menurut Permukaan Jalan.....	2-97
Gambar 2.32 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk, 2019-	
2023.....	2-99
Gambar 2.33 Persentase Kawasan Pemukiman yang belum Dapat	
Dilalui Kendaraan Roda Empat, 2019-2023	2-100
Gambar 2.34 Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (> 40	
KM/Jam), 2019-2023.....	2-100
Gambar 2.35 Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki	
Lima atau Bangunan Rumah Liar, 2019-2023	2-101
Gambar 2.36 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi, 2019-2023 ..	2-102
Gambar 2.37 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan	
Aliran Air Tidak Tersumbat, 2019-2023	2-102

Gambar 2.38 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik, 2019-2023.....	2-103
Gambar 2.39 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan, 2019-2023.....	2-104
Gambar 2.40 Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Pelanggan PDAM Tirta Jasa Tahun 2020—2023	2-105
Gambar 2.41 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah), 2019-2023	2-109
Gambar 2.42 Jumlah Penduduk Ber-KTP, 2019-2023	2-114
Gambar 2.43 Jumlah Bayi Berakte Kelahiran, 2019-2023	2-115
Gambar 2.44 Jumlah Pasangan Berakte Nikah, 2019-2023.....	2-115
Gambar 2.45 Sistem Jaringan Infrastruktur Transportasi	2-156
Gambar 2.46 Peta Kawasan Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan	2-178
Gambar 3.1 Arah Pembangunan Indonesia Emas 2045	3-19
Gambar 3.2 RLS Kabupaten Lampung Selatan 2011-2022	3-21
Gambar 3.3 UHH Kabupaten Lampung Selatan 2009-2045	3-21
Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Selatan 2011-2022.....	3-22
Gambar 3.5 Pengeluaran Rumah Tangga Untuk Makanan Kabupaten Lampung Selatan 2011-2020	3-24
Gambar 3.6 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.....	3-28
Gambar 3.7 Jumlah Kasus Penanganan Hukum Kabupaten Lampung Selatan 2023	3-35
Gambar 3.8 Manajemen Transportasi Publik	3-37
Gambar 3.9 Kepemilikan Modal Usaha Kabupaten Lampung Selatan 2023.....	3-40
Gambar 3.10 Jumlah Usaha Mikro Kabupaten Lampung Selatan 2020-2021	3-40
Gambar 3.11 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Lampung Selatan 2010-2022	3-41

Gambar 4.1 Kerangka Berfikir Perumusan Visi dan Misi	4-1
Gambar 5.1 Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	5-48

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang dinamis. Secara empiris, perencanaan dimaksudkan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi selama periode perencanaan tersebut. Selain itu, sebuah perencanaan juga ditujukan untuk memperjelas arah pembangunan sehingga kebijakan-kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara simultan.

Lebih lanjut, sebuah dokumen perencanaan merupakan sebuah pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam proses pembangunan baik ditingkat daerah maupun tingkat pusat. Hal ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengatur tentang Perencanaan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) serta Jangka Pendek (RKPD) baik pada level Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan yang periode perencanaan jangka panjangnya (RPJPD 2005-2025) akan berakhir, maka pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkewajiban untuk menyusun perencanaan jangka panjang pada periode berikutnya (RPJPD 2025-2045) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan dalam pasal 18 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Lebih jauh, RPJPD sendiri merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Proses penyusunan RPJPD dimulai dengan persiapan penyusunan RPJPD yang meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD; (b) orientasi mengenai RPJPD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Lampung Selatan yang telah disusun selanjutnya dilakukan konsultasi publik melalui Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD. Setelah melalui tahapan konsultasi publik, selanjutnya Bupati Lampung Selatan mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD kepada gubernur. Setelah mendapatkan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD, selanjutnya pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu melaksanakan Musyawarah Pembangunan RPJPD yang selanjutnya akan kembali dilakukan penyempurnaan yang pada tahapan akhirnya Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Selaras dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, Penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Selatan diarahkan pada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, dengan senantiasa memperhatikan aspek keseimbangan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan ruang dan lingkungan. Dengan mengusung Visi Lampung Selatan 2045 “Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan” yang ditransmisikan melalui 8 (delapan) Misi pembangunan, yaitu: (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Keluarga Berkualitas, Pemuda Tangguh serta Masyarakat Religius,

Perlu digaris bawahi, bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, maka RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045 diarahkan pada terwujudnya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Lampung.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

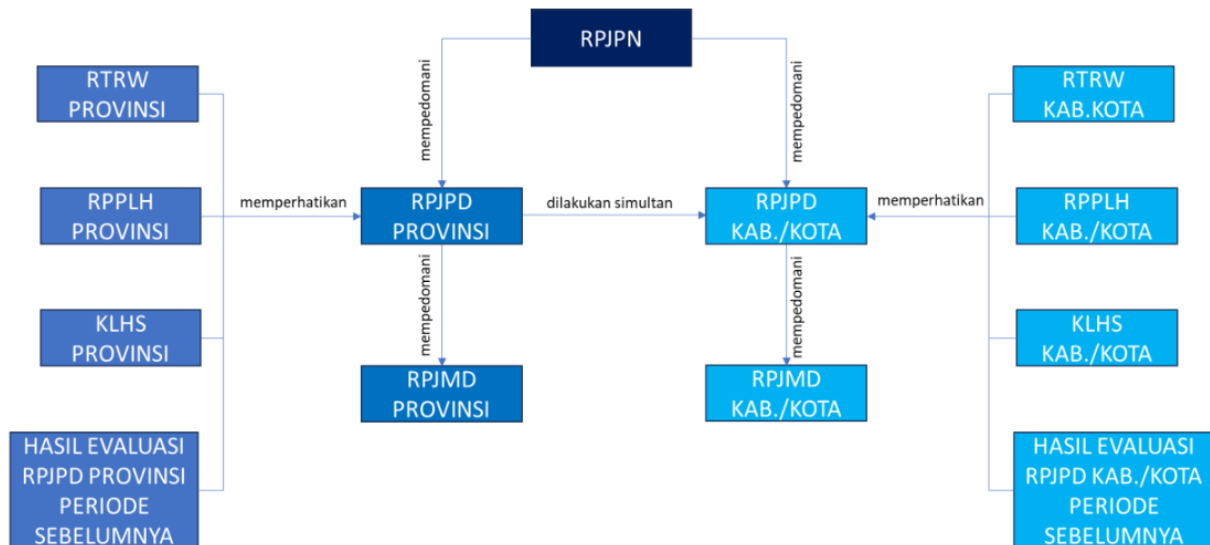
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 , Tambahan Lembar Negara Nomor 5068);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16. Surat Menteri Dalam Negeri 600.11.2/ 8755/ Bangda tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD ke dalam Dokumen RPJPD/ RPJMD;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023 2043);
18. Peraturan Daerah Kabupaten lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2031;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Gambar 1.1 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Intruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2045 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya diantaranya adalah RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045. Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan dokumen lain, dalam penyusunan RPJPD perlu memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan hasil evaluasi RPJPD Periode sebelumnya. Sementara itu, dalam penyusunan Dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu mempedomani RPJPD.

1.3.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan RPJPD menjelaskan bahwa KLHS RPJPD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJPD. Sehingga, dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045 perlu mempertimbangkan rumusan skenario pembangunan daerah yang

berasas berkelanjutan yang sebelumnya telah disusun dalam KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan.

1.3.2 Hubungan RPJPD Kabupaten Lampung Selatan dengan RTRW Kabupaten Lampung Selatan

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi penataan ruang kabupaten.

Adapun tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan ruang Kabupaten sebagai pintu gerbang investasi Provinsi yang berbasis pada kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, serta industri yang terintegrasi dan bersinergi dengan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan penataan ruang tersebut diwujudkan melalui strategi dan kebijakan yang dijabarkan pada tabel berikut ini.

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2025-2045;
1. Sebagai landasan penyusunan RJMD setiap 5 Tahun pada periode RPJMD;
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan selama periode Tahun 2025-2045;
3. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Adapun tujuan disusunnya RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025- 2045 adalah agar RPJPD:

- a. Menjadi landasan penyusunan RPJMD;
- b. Menjadi sumber instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
- c. Memberikan penjabaran visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- d. Menjadi dasar dalam upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
- e. Memberikan arah pada keseimbangan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola hukum dalam pembangunan yang berkelanjutan;
- f. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan pemerintah daerah sekitar dan pemerintah pusat;
- g. Memberikan kepastian ruang bagi partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional; dan
- h. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045 terdiri dari 6 bab sebagai berikut:

BAB 1	PENDAHULUAN
	Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.
BAB 2	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
	Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD 2005-2025, trend demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah .

BAB 3	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
--------------	---------------------------------------

Bab ini memuat permasalahan dan isu strategis daerah yang sedang dihadapi.

BAB 4	VISI DAN MISI DAERAH
--------------	-----------------------------

Bab ini menguraikan Visi dan Misi RPJPD 2025-2045

BAB 5	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
--------------	---

Bab ini memuat Arah Kebijakan dan sasaran pokok RPJPD 2025-2045.

BAB 6	PENUTUP
--------------	----------------

Bagian ini memuat kaidah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dengan ibu kota kabupaten terletak di Kecamatan Kalianda. Secara geografis Kabupaten Lampung Selatan terletak pada 105°14' Bujur Timur dan 5°15'-6° Lintang Selatan, yang merupakan wilayah kabupaten di Provinsi Lampung yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Mengingat letak yang demikian ini, daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis. Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih adalah 2.227,38 Km², yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Menurut Kecamatan, 2023

No	KECAMATAN	LUAS Km ²	Persentase
1	Kecamatan Bakauheni	60,15	2,70%
2	Kecamatan Candipuro	122,62	5,51%
3	Kecamatan Jati Agung	250,18	11,23%
4	Kecamatan Kalianda	176,00	7,90%
5	Kecamatan Katibung	161,97	7,27%
6	Kecamatan Ketapang	143,46	6,44%
7	Kecamatan Merbau Mataram	130,09	5,84%
8	Kecamatan Natar	261,08	11,72%
9	Kecamatan Palas	128,26	5,76%
10	Kecamatan Panengahan	106,30	4,77%
11	Kecamatan Rajabasa	120,96	5,43%
12	Kecamatan Sidomulyo	132,74	5,96%
13	Kecamatan Sragi	87,82	3,94%
14	Kecamatan Tanjung Bintang	165,94	7,45%
15	Kecamatan Tanjung Sari	96,29	4,32%
16	Kecamatan Way Panji	36,75	1,65%
17	Kecamatan Way Sulan	46,77	2,10%
	Kabupaten Lampung Selatan	2.227,38	100%

Sumber: Kepmendagri 100.1.1-6117 tahun 2022, diolah

Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas beberapa pulau. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan antara lain pulau: Krakatau, Sebesi, Sebuku, Rakata Tua, Legundi, Siuncal, Rimau dan Kandang. Bila ditinjau dari segi luas keadaan alamnya, maka Kabupaten Lampung Selatan mempunyai masa depan cerah untuk lebih berkembang lagi. Sampai saat ini Kabupaten Lampung Selatan telah mengalami pemekaran dua kali. Pertama berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 yang ditetapkan pada tanggal 3 Januari 1997 tentang pembentukan Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian yang ke dua berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran tanggal 10 Agustus 2007, yaitu pemekaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan, maka wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat: berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung serta Teluk Lampung;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah Utara: berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Timur;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Laut Jawa

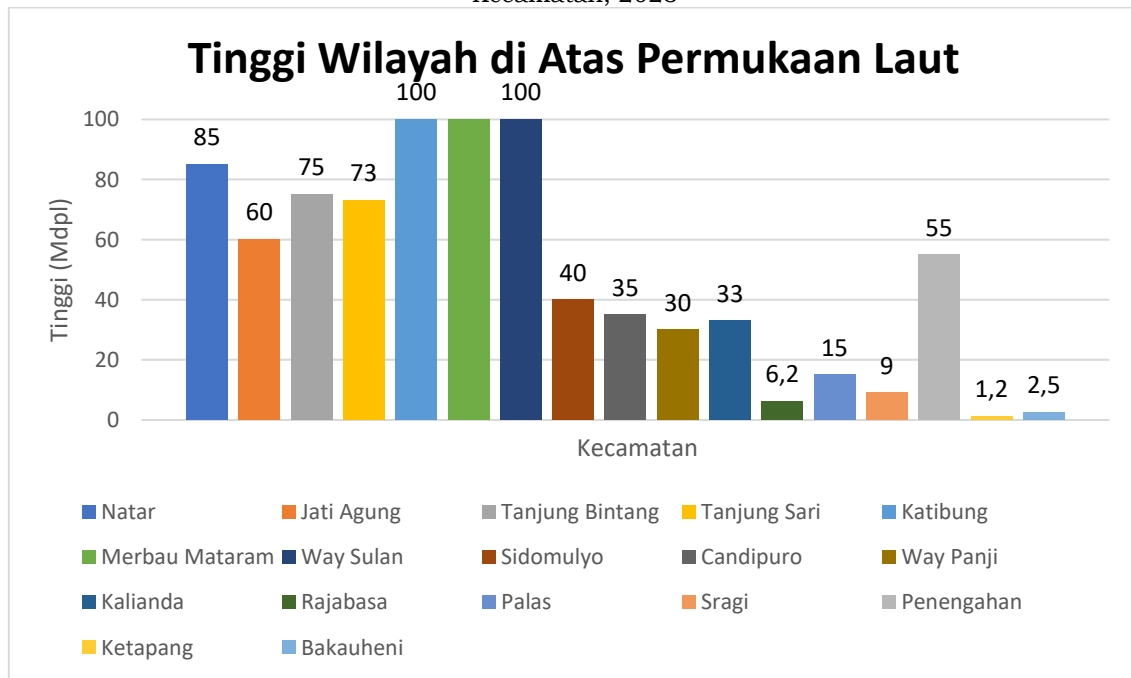
Terdapat sebuah pelabuhan penyeberangan Bakauheni dan Bandara Radin Inten II yang merupakan tempat transit penduduk dari Pulau Jawa dan wilayah lainnya ke Sumatera dan sebaliknya, atau dengan kata lain Pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera bagian selatan. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan juga merupakan daerah agraris dimana mata pencaharian pokok penduduknya berada di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan daerah terluas merupakan daerah dataran tropis yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Untuk mengetahui wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada peta di bawah ini.

[illegible]

2.1.1.1 Topografi

BAB 2-3

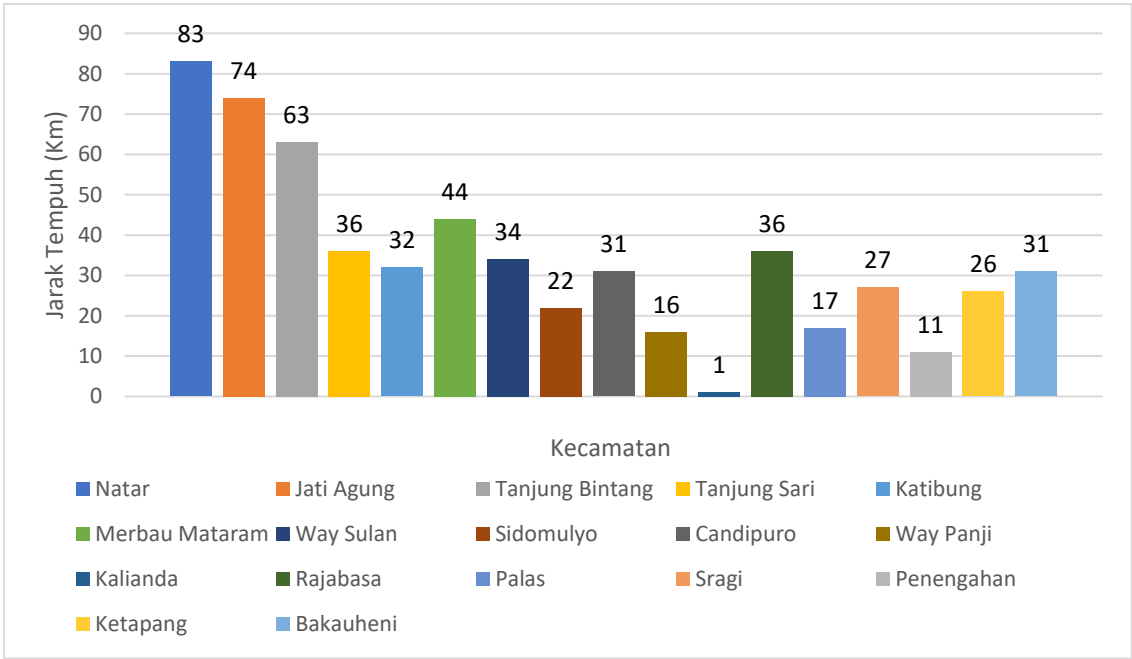
Gambar 2.2 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Kabupaten Lampung Selatan Menurut Kecamatan, 2023



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

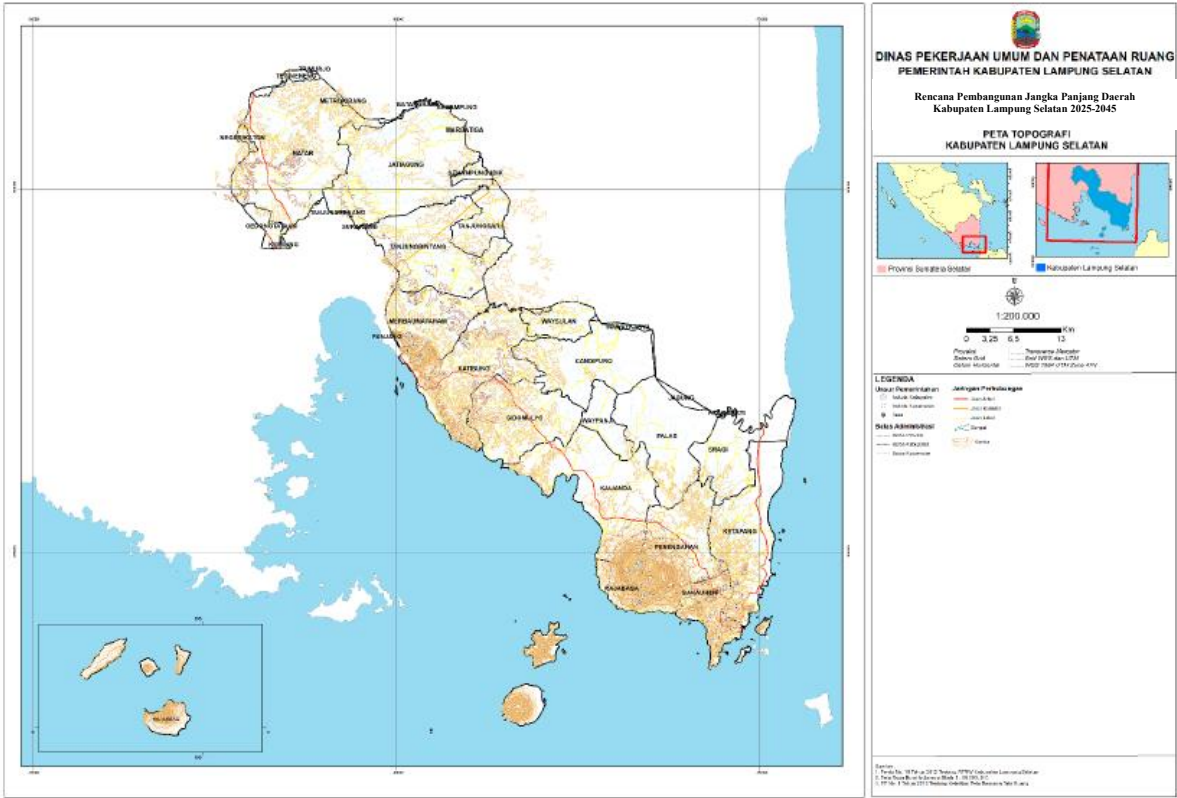
Sementara itu, jika dilihat dari jarak yang ditempuh oleh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan ke Ibukota Kabupaten (Gambar 2.3), masyarakat yang berada di Kecamatan Natar, Kecamatan Jati Agung, dan Kecamatan Tanjung Bintang harus menempuh jarak yang relatif jauh menuju ibukota kabupaten dengan jarak tempuh antara 60 - 85 Km. Hal ini membuat masyarakat di kecamatan-kecamatan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama jika ingin mengurus sesuatu hal di ibukota pemerintahan kabupaten yaitu Kecamatan Kalianda. Namun, saat ini telah beroperasi jalan tol lintas sumatera yang melalui perlintasan beberapa wilayah di Lampung Selatan dari Kecamatan Bakauheni sampai Kecamatan Natar sehingga dapat memangkas waktu tempuh menuju Ibukota Kabupaten di Kecamatan Kalianda. Sedangkan jarak tempuh untuk masyarakat Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Katibung, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Bakauheni ke Kalianda relatif lebih dekat, yaitu antara 30 – 60 Km. Sementara itu, Kecamatan Penengahan merupakan kecamatan terdekat dari ibukota pemerintahan hanya menempuh jarak 11 Km untuk mencapai ibukota pemerintahan.

Gambar 2.3 Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten



Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Gambar 2.4 Peta Topografi Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.1.1.2 Geohidrologi

Kondisi Hidrogeologi Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat dari kondisi Cekungan Air Tanah (CAT). Kondisi CAT Kabupaten Lampung Selatan, termasuk ke dalam dua cekungan yaitu CAT Metro – Kotabumi dan CAT Kalianda. CAT Metro – Kotabumi memiliki rata – rata imbuhan air tanah bebas mencapai $\pm 11.807.000.000$ m³ per tahunnya, dan imbuhan air tanah yang tertekan pada lapisan aquifernya mencapai $\pm 524.000.000$ m³ per tahunnya. CAT Metro – Kotabumi merupakan CAT yang dominan di Provinsi Lampung. Sedangkan CAT Kalianda memiliki rata – rata imbuhan air tanah bebas mencapai $\pm 128.000.000$ m³ per tahunnya, dan imbuhan air tanah yang tertekan pada lapisan aquifernya hanya $\pm 11.000.000$ m³ per tahunnya. CAT Kalianda hanya merupakan CAT yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan CAT Metro – Kotabumi.

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, antara lain:

- Tanah Latosol

Jenis tanah ini paling banyak terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, hampir menutupi seluruh wilayah barat dan sebagian besar dari bagian tengah. Tanah latosol berwarna coklat tua sampai kemerahmerahan adalah hasil pelapukan bahan induk kompleks turfinmedier. Penyebaran pada daerah bertopografi bergelombang sampai bergunung.

- Tanah Podsolik

Jenis tanah ini adalah hasil pelapukan dari bahan induk turfazam sedimen batuan plutonik yang bersifat asam, tersebar pada wilayah yang bertopografis berbukit sampai bergunung. Tanah podsolid berwarna merah kuning, juga terdapat di daerah yang luas, tersebar pada wilayah bagian utara Kabupaten Lampung Selatan.

- Tanah Andosol

Jenis tanah ini adalah pelapukan dari bahan induk kompleks turfinmedier dan basah, berwarna coklat sampai coklat kuning. Penyebarannya terdapat pada daerah bertopografis bergelombang sampai bergunung.

Selatan tidak terasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan. Secara rinci, pengamatan unsur iklim di wilayah Kabupaten Lampung Selatan sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

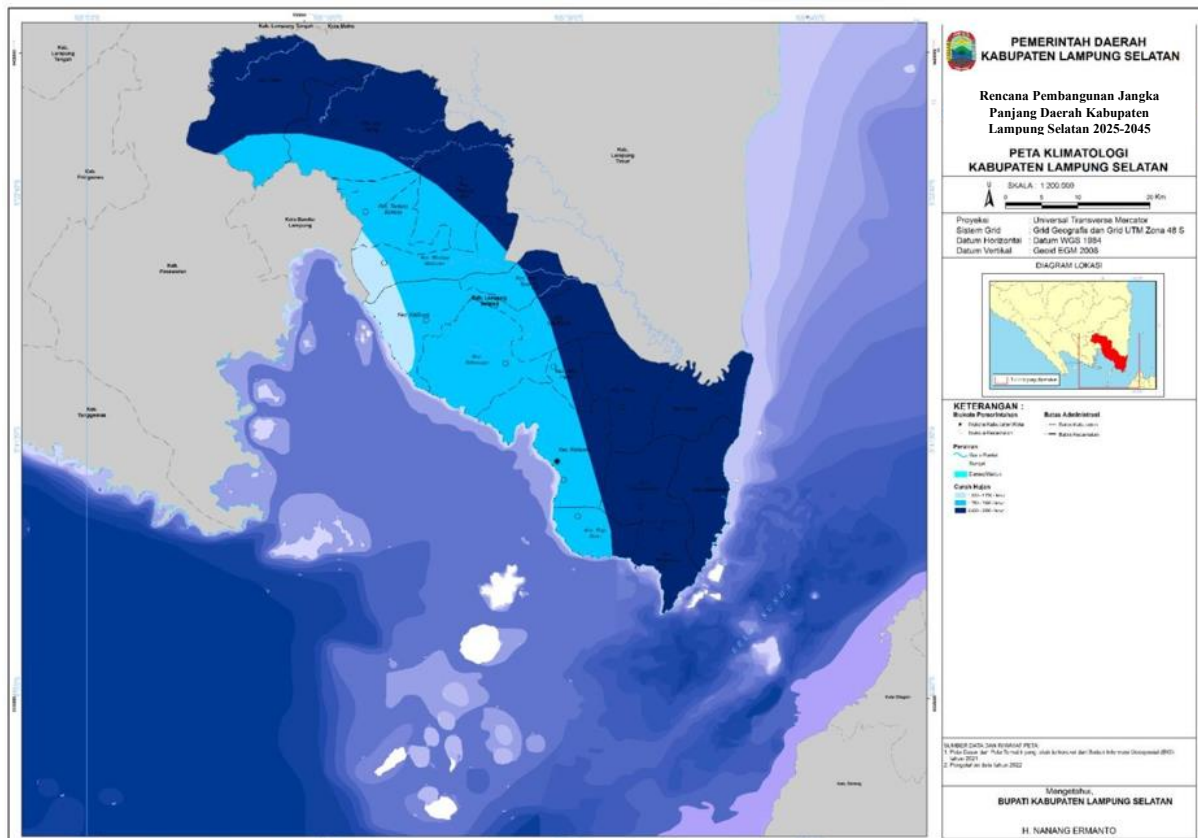
Tabel 2.2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung, 2023

Bulan	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	26,5	82,6	2,4	999,7	343,2	22	2,9
Februari	26,5	82,3	2,8	999,8	193,3	21	3,0
Maret	26,7	83,6	2,7	1000,5	292,4	21	5,4
April	27,8	77,3	2,9	999,3	70,9	8	6,3
Mei	28,1	79,8	2,9	1000,5	185,4	12	6,0
Juni	27,4	81,7	2,9	1000,4	123,2	11	5,4
Juli	27,1	79,7	3,0	1001,3	195,4	9	5,0
Agustus	27,2	76,3	3,8	1001,9	47,5	4	7,1
September	28,0	65,4	4,1	1001,2	2,0	2	8,3
Oktober	29,4	65,0	4,4	1001,4	2,4	2	8,8
November	28,5	75,6	2,8	1000,0	88,0	10	5,2
Desember	28,3	76,7	2,4	1000,3	101,5	13	0,6

Sumber: Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung, 2023

Tabel 2.2 di atas memberikan gambaran iklim di wilayah Lampung Selatan sepanjang tahun 2023 berdasarkan pengamatan Stasiun Meteorologi Radin Inten II. Rata-rata suhu di tahun 2022 berkisar antara 26 °C – 28 °C, dengan rata-rata kelembaban 77% - 83%. Sedangkan kecepatan angin berkisar 1,8 meter/detik – 2,6 meter/detik dengan tekanan udara rata-rata 1.000 mb. Curah hujan di wilayah Lampung Selatan sepanjang tahun 2023 sangat berfluktuatif, dimana di awal tahun pada bulan Januari curah hujan mencapai 343,2 mm dengan total mencapai 22 hari hujan turun, yang merupakan curah hujan dan jumlah hari terbesar di tahun 2023. Sementara pada bulan-bulan berikutnya sampai dengan bulan Agustus, curah hujan masih berkisar di atas 47,5 mm, yang menandakan akan terjadi musim kemarau. Namun mendekati akhir tahun, curah hujan kembali meningkat hingga mencapai 101,5 mm, yang merupakan bulan musim penghujan.

Gambar 2.6 Peta Iklim Kabupaten Lampung Selatan



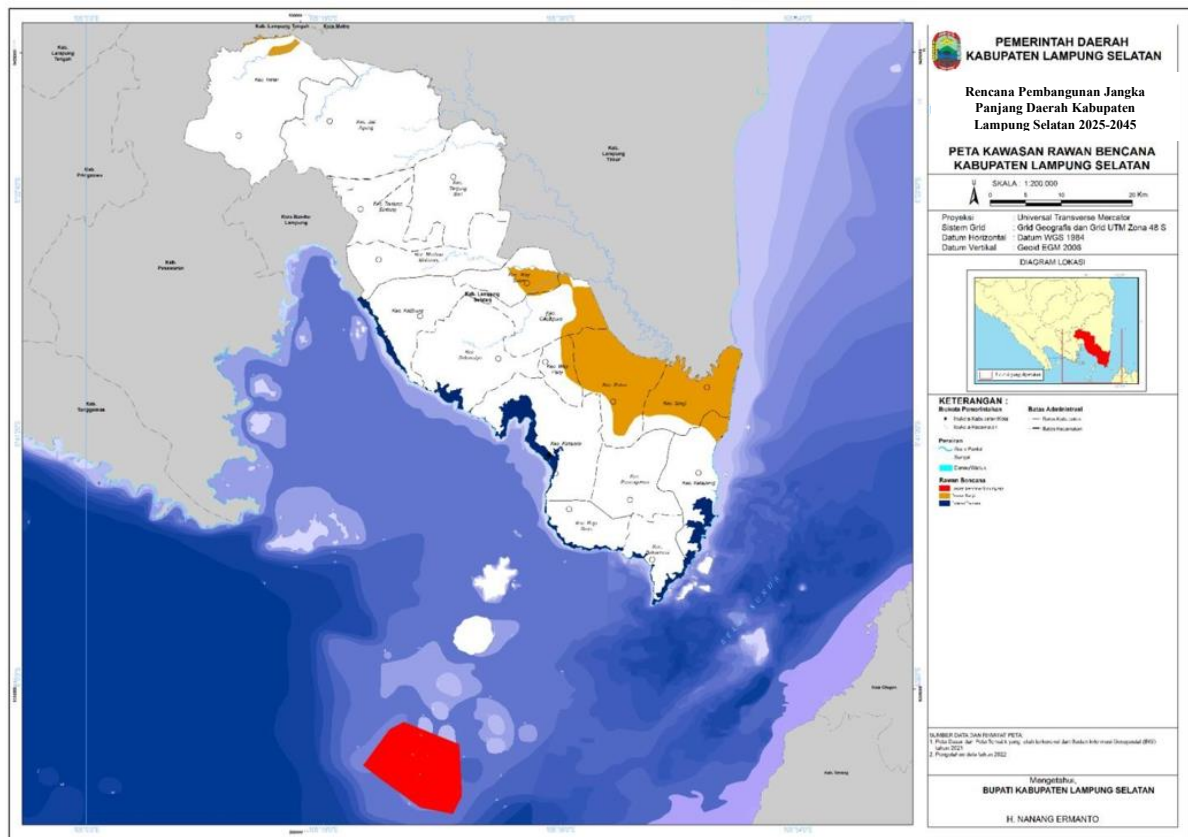
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.1.1.4 Risiko Dampak Bencana Di Kabupaten Lampung Selatan

Lampung Selatan merupakan kabupaten yang menduduki urutan ke-53 dari kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki indeks risiko bencana cukup tinggi (Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2018). Berdasarkan BMKG bahwa tipologi struktur tanah dibawah wilayah Provinsi Lampung yaitu sepanjang pantai barat dan pesisir Lampung Selatan merupakan lapisan lempengan patahan yang rawan terjadi bencana gempa bumi bahkan berpotensi tsunami. Patahan atau yang biasa disebut sesar tarahan berada di Lampung Selatan sepanjang kurang lebih 40 km dari Tarahan sampai dengan Natar saat ini dalam kondisi aktif (Suharno, 2018). Patahan (sesar tarahan) yang berada di Tarahan tersebut memicu gempa magnitudo (M) 3,8 pada koordinat 5.72 LS dan 105.36 BT tepatnya berada di laut pada jarak 25 km Barat Daya Lampung Selatan dengan kedalaman hiposenter 4 km (dangkal) pada Senin, 27 Januari 2020 (BMKG). Sampai dengan saat ini

potensi akan terjadinya bencana alam akan terus mengancam keselamatan masyarakat, untuk itu diperlukannya upaya mitigasi bencana.

Gambar 2.7 Peta Potensi Rawan Bencana Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Tabel 2.3 Kawasan Bencana dan Jalur Evakuasi Bencana di Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan (1)	Bencana (2)	Jalur Evakuasi Bencana (3)
1	Natar	Banjir	Tidak memerlukan jalur evakuasi mengingat banjir yang terjadi tidak berada di daerah permukiman
2	Katibung	Tsunami	Dievakuasi menuju Bukit Tarahan
3	Way Sulan	Banjir	Menuju Kecamatan Candipuro dievakuasi ke sekitar kantor Kecamatan Candipuro
4	Sidomulyo	Tsunami	Dievakuasi menuju sekitar jalan lintas Sumatera
5	Candipuro	Banjir	Dievakuasi ke sekitar kantor Kecamatan Candipuro
6	Way Panji	Banjir	Dievakuasi di Sukoharjo disekitar kantor Kecamatan Way Panji

No	Kecamatan	Bencana	Jalur Evakuasi Bencana
	(1)	(2)	(3)
7	Kalianda	Tsunami	Dievakuasi menuju kawasan perkantoran pemerintahan Kabupaten
8	Rajabasa	Tsunami	Dievakuasi menuju Gunung Rajabasa
		Gunung Api Krakatau	Dievakuasi menuju kantor Kecamatan Rajabasa
9	Palas	Banjir	Dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Palas
10	Sragi	Banjir	Dievakuasi mengarah ke Bangunrejo di sekitar kantor Kecamatan Ketapang
11	Ketapang	Tsunami	Dievakuasi di sekitar Menara Siger di Kecamatan Bakauheni
		Gunung Api Krakatau	Dievakuasi menuju kantor Kecamatan Ketapang
12	Bakauheni	Tsunami	Dievakuasi di sekitar Menara Siger di Kecamatan Bakauheni
		Gunung Api Krakatau	Dievakuasi menuju Kecamatan Penengahan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Tabel 2.4 Data Bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023

No	Bencana	2019	2020	2021	2022	2023
1	Banjir	38	43	46	*	*
2	Gempa Bumi	0	0	0	*	*
3	Tanah Longsor	2	0	1	*	*

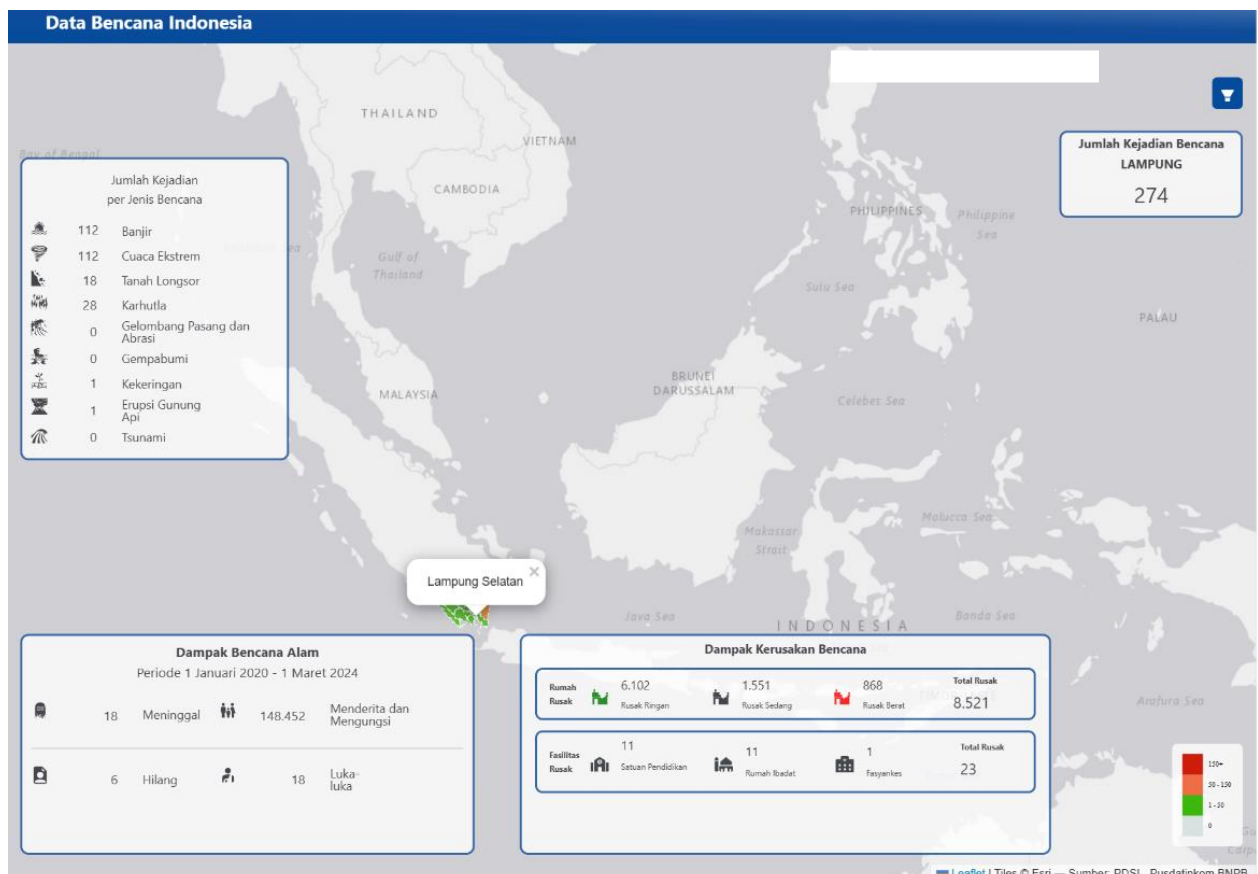
*Data tidak tersedia pada tahun tersebut

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Pada awal Tahun 2021 cuaca ekstrem yang melanda sebagian wilayah di Kabupaten Lampung Selatan mengakibatkan banjir di beberapa lokasi, dalam kurun waktu yang berdekatan dari tanggal 1-30 Januari 2022, banjir bandang mengakibatkan 167 rumah tergenang di Kecamatan Sidomulyo dengan rincian Desa Sidomulyo 47 rumah, Desa Sidowaluyo 15 rumah, Desa Talang Baru 2 rumah, Desa Sidorejo 62 rumah, Desa Sidodadi 41 rumah. Di Kecamatan Sragi banjir menimpa 79 Rumah. Pada tanggal 01 Februari 2020 terjadi banjir kembali di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi yang menimpa 40 rumah dan 20 Hektare tambak udang. Di Kalianda terjadi banjir dan rumah terendam dan mengalami rusak ringan sebanyak 23 rumah.

Menanggapi dampak bencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama TNI/POLRI, BASARNAS, dan para relawan melakukan penanganan pasca bencana salah satunya dengan membuat juga merevitalisasi saluran air dan gorong-gorong untuk mengantisipasi dampak banjir yang berulang.

Gambar 2.8 Peta Kerawanan Bencana BNPB Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Geoportal Bencana Indonesia BNPB (2023)

Berdasarkan data diatas memperlihatkan bahwa sepanjang periode 1 Januari 2020- 1 Maret 2024 terjadi 112 kejadian banjir 112 cuaca ekstrem, 18 tanah longsor dan 28 Karhutla di Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu terdapat 148.452 orang yang menderita dan mengungsi yang terdampak atas kejadian bencana alam di Kabupaten Lampung Selatan.

2.1.1.4.1 Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Tabel 2.5 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	187,20	187,20	187,20	176,14	167,23

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

Tabel diatas menunjukkan data capaian Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 2023 IRB Lampung Selatan mencapai 167,23 lebih rendah daripada tahun sebelumnya 176,14. Sesuai dengan pembagian kelas Tingkat Indeks Risiko Bencana, Kabupaten Lampung Selatan masih dalam taraf berisiko Tinggi.

Lampung Selatan merupakan kabupaten yang menduduki urutan ke-53 dari kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki indeks risiko bencana cukup tinggi. Berdasarkan data BMKG, bahwa tipologi struktur tanah dibawah wilayah Provinsi Lampung yaitu sepanjang pantai barat dan pesisir Lampung Selatan merupakan lapisan lempengan patahan yang rawan terjadi bencana gempa bumi bahkan berpotensi tsunami. Patahan atau yang biasa disebut sesar tarahan berada di Lampung Selatan sepanjang kurang lebih 40 km dari Tarahan sampai dengan Natar saat ini dalam kondisi aktif. Patahan (sesar tarahan) yang berada di Tarahan tersebut memicu gempa magnitudo (M) 3,8 pada koordinat 5.72 LS dan 105.36 BT tepatnya berada di laut pada jarak 25 km Barat Daya Lampung Selatan dengan kedalaman hiposenter 4 km (dangkal) pada Senin, 27 Januari 2020 (BMKG). Sampai dengan saat ini

potensi akan terjadinya bencana alam akan terus mengancam keselamatan masyarakat, untuk itu diperlukannya upaya mitigasi.

2.1.1.4.2 Gempa

Zonasi wilayah ancaman gempa bumi kelas tinggi

Sesar yang berada di Kabupaten Lampung Selatan merupakan sesar penyeimbang dari sesar utama yaitu sesar Semangko dan menurut data kejadian bencana 10 tahun terakhir, wilayah Kabupaten Lampung Selatan tidak pernah mengalami kejadian bencana gempa bumi yang menimbulkan korban jiwa atau kerusakan.

Zonasi wilayah ancaman gempa bumi kelas sedang

- a. Bakauheni, terdapat dua sesar atau patahan yang melintas di Kecamatan Bakauheni, yaitu sesar Peterjajar yang saat ini dalam kondisi aktif dan sesar Way Baka dengan status *capable fault* atau berpotensi aktif.
- b. Kalianda, berdasarkan hasil analisis, Kecamatan Kalianda bukan termasuk wilayah yang dilintasi oleh sesar atau patahan dan jumlah kepadatan penduduk Kecamatan Kalianda tergolong kedalam kelas ancaman rendah terhadap bencana gempa bumi.
- c. Penengahan, menurut data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung, aktivitas Sesar Peterjajar telah menyebabkan gempa bumi di Kecamatan Penengahan dan sekitarnya.
- d. Katibung, Kecamatan Katibung atau desa Tarahan merupakan wilayah yang dilintasi oleh sesar Tarahan. Aktivitas sesar ini sering menyebabkan kejadian bencana gempa bumi dengan magnitudo yang relatif kecil, tercatat pada tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 08.27 WIB aktivitas sesar Tarahan telah menyebabkan gempa berkekuatan magnitudo (M) 3,8 dengan episentrum berada dilaut pada jarak 25 km Barat Daya Lampung Selatan dan kedalaman 4 km.
- e. Natar, aktivitas sesar Tarahan yang membentang sepanjang 40 km dari desa Tarahan sampai dengan Kecamatan Natar sering kali

menyebabkan gempa bumi di wilayah ini yang berkekuatan magnitudo (M) 3,4 dengan skala intensitas I-II di Kecamatan Natar.

Zonasi wilayah ancaman gempa bumi kelas rendah

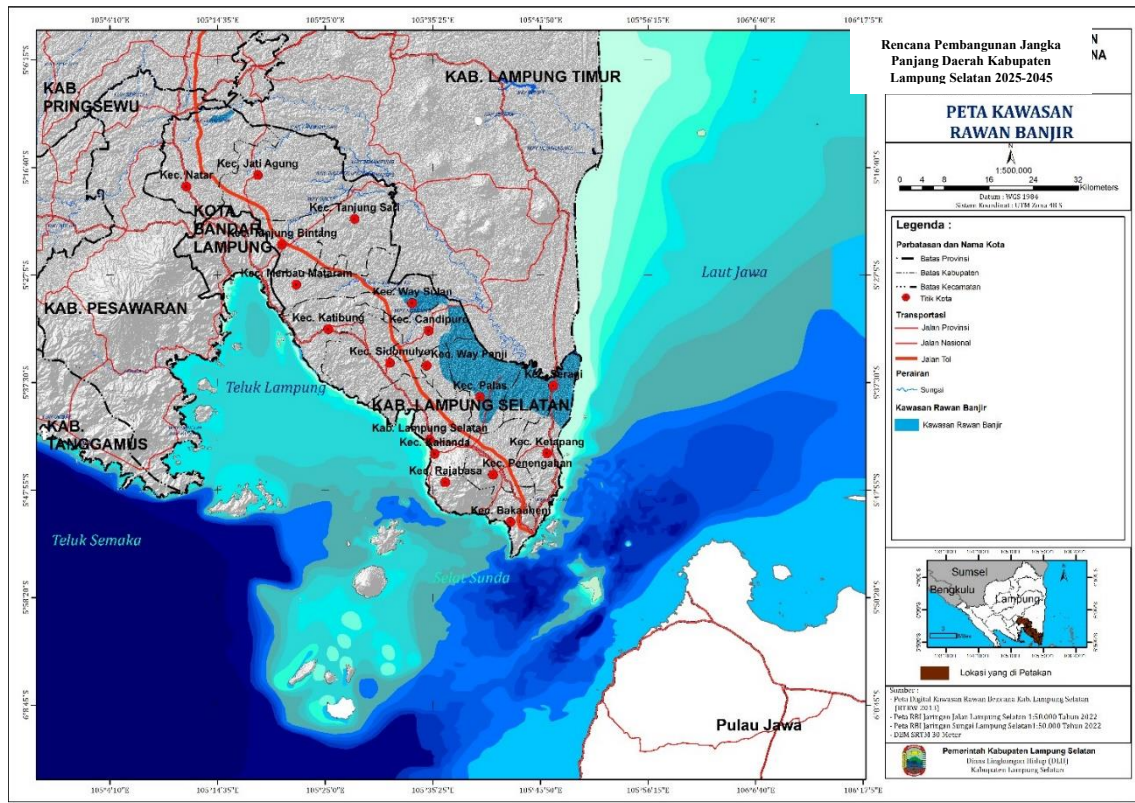
Beberapa wilayah kecamatan yang masuk kedalam zonasi kelas rendah terhadap ancaman bencana gempa bumi merupakan wilayah yang tidak dilintasi oleh sesar dan berdasarkan data kejadian bencana Kecamatan seperti Kecamatan Ketapang, Kecamatan Sragi, Kecamatan Palas, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Way Panji, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Tanjung Sari dan Kecamatan Jati Agung tidak pernah mengalami dampak bencana gempa bumi (Sari dkk, 2021).

2.1.1.4.3 Banjir

Terdapat beberapa sungai di Kabupaten Lampung Selatan yang sering menjadi penyebab banjir yaitu Sungai Way Katibung, sungai Way Sekampung dan sungai Way Pisang. Sungai Way Katibung membentang diantara empat Kecamatan yaitu Kecamatan Katibung, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Way Sulan dan Kecamatan Sidomulyo. Sungai Way Sekampung dan Sungai Way Pisang.

Peningkatan debit air yang sangat drastis yang terjadi di Sungai Way Sekampung seringkali menyebabkan bencana banjir di Kecamatan Sragi. Peningkatan debit air Sungai Way Sekampung dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, Intensitas curah hujan yang tinggi dalam kurun waktu yang lama dan pasang air laut. Hal ini yang menyebabkan air sungai meluap dan menggenangi wilayah Kecamatan Sragi. Ketika Sungai Way Sekampung mengalami peningkatan debit, hal ini akan berpengaruh terhadap Sungai Way Pisang, aliran Sungai yang seharusnya bergerak menuju Sungai Way Sekampung akan terhenti dan akan membuat debit air di Sungai Way Pisang mengalami penumpukan, kemudian meluap dan menggenangi wilayah Kecamatan Palas (Sari dkk, 2021). Daerah Kabupaten yang termasuk kedalam wilayah rawan bencana banjir dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.9 Peta Kawasan Rawan Banjir



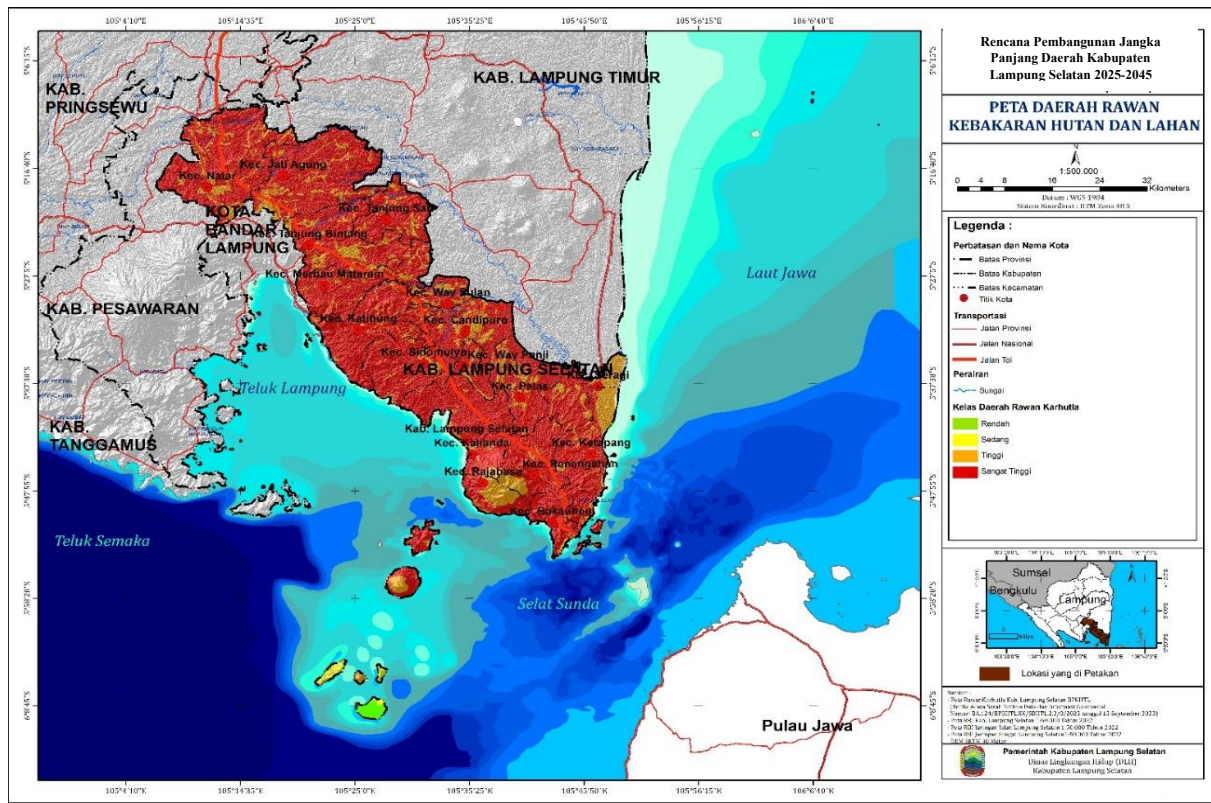
Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025 – 2045 Kabupaten Lampung Selatan, 2023

2.1.1.4.4 Tsunami

Jarak dari pusat gempa, jarak wilayah daratan Kabupaten Lampung Selatan dengan asumsi episentrum gempa bumi berada di lokasi Gunung Krakatau, menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan terletak pada jarak kurang dari 150 km. Kelereng topografi, Kabupaten Lampung Selatan merupakan dataran dengan kemiringan lereng kurang dari 10 %. Namun pada sebagian kecil wilayah (Kecamatan Sidomulyo), kelereng cukup bervariasi, yaitu antara 20% - 30%. Kelereng yang cukup curam terdapat Kecamatan Rajabasa di mana terdapat Gunung Rajabasa yang memiliki ketinggian mencapai 1.280 m dari permukaan laut. Jarak dari sungai, wilayah daratan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan jaraknya dari sungai yang berada di Kabupaten Lampung Selatan kurang dari 450 km. Keterlindungan lahan, secara umum wilayah daratan pantai Kabupaten Lampung Selatan tidak terlindung dari ancaman bahaya tsunami. Morfologi garis pantai, bagian Selatan Kabupaten Lampung Selatan merupakan wilayah Teluk Lampung karena itu morfologi pantainya merupakan pantai

El-Nino. Di sisi lain, faktor manusia mencakup penggunaan api dalam proses persiapan lahan, ketidakpuasan terhadap pengelolaan hutan, dan praktik ilegal seperti penebangan liar.

Gambar 2.11 Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lampung Selatan



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025 – 2045 Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Seluruh Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi terjadinya bencana karhutla, terutama wilayah yang berada dan berdekatan dengan kawasan hutan Gunung Rajabasa sebab memiliki kawasan hutan dan perkebunan yang berpotensi terbakar. Area-area ini termasuk Kebun karet dan Kelapa Sawit Unit Rejosari PTPN VII, Kebun Karet PTPN VII Unit Kedaton, dan perkebunan jagung masyarakat. Wilayah di kabupaten yang rawan akan bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada gambar di atas.

2.1.1.4.6 Cuaca Ekstrem

Bencana hidrometeorologi seperti cuaca ekstrem dan kekeringan dapat disebabkan karena anomali cuaca dan perubahan iklim. NASA (2023) menyatakan dengan terjadinya perubahan iklim global, berbagai cuaca

ekstrem di seluruh dunia turut terpengaruh. Gelombang panas yang mencatat rekor di daratan maupun di lautan, hujan lebat, banjir parah, kekeringan berkepanjangan, kebakaran hutan yang ekstrem, dan banjir selama badai semakin sering terjadi dan semakin intens. Tindakan manusia terutama dengan membakar bahan bakar fosil, telah mengakibatkan peningkatan gas rumah kaca secara signifikan di atmosfer.

Beberapa kasus angin puting beliung sebagai salah satu bencana cuaca ekstrem dengan kecepatan relatif rendah telah terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Kriteria bangunan rentan oleh angin puting beliung misalnya jenis bangunan yang terbuat dari material bambu dan kayu. Selain itu, jenis atap asbes juga dinilai rentan. Terlebih, rumah semi permanen dengan kualitas bangunan yang rendah dinilai menjadi kerentanan yang tinggi.

2.1.1.4.7 Kekeringan

Menurut BNPB (2012), kekeringan terbagi menjadi dua, yaitu kekeringan alamiah dan kekeringan antropogenik. Kekeringan alamiah disebabkan karena curah hujan yang kurang (kekeringan meteorologis), kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah (kekeringan hidrologis), kekurangan kandungan air di dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas (kekeringan pertanian), dan kekeringan sosial ekonomi. Sementara itu, kekeringan antropogenik disebabkan oleh ketidakpatuhan pada aturan, misalnya kebutuhan air lebih besar dari pasokan yang direncanakan, dan kerusakan Kawasan tangkapan air, sumber air, akibat perbuatan manusia.

Kekeringan turut menjadi perhatian potensi bencana di Kabupaten Lampung Selatan, mengingat sebagian besar masyarakat memiliki ketergantungan pada sektor pertanian dan perkebunan. Ini juga dibuktikan bahwa analisis BNPB (2022) menyatakan bahwa Kabupaten Lampung Selatan memiliki risiko tinggi terhadap kekeringan. Wilayah memiliki luas pertanian dan perkebunan seluas 175.95 Hektar, dengan 20% untuk persawahan, 45% untuk perkebunan, dan 30% untuk ladang. Selain

menjadi sentra pertanian padi yang luas, Kabupaten Lampung Selatan juga terkenal sebagai pusat produksi jagung dengan produksi mencapai 529.028 ton setiap tahun. Apabila kekeringan tidak dapat diatasi, maka akan menimbulkan kerugian yang signifikan dan terganggunya distribusi kebutuhan pangan. Selain itu, dampak kekeringan dapat memunculkan banjir bandang, pepohonan mati, tanah menjadi gundul yang pada musim hujan akan menjadi mudah tererosi dan banjir, lalu ada dampak urbanisasi dikarenakan hilangnya bahan pangan tanaman sehingga para petani kehilangan mata pencaharian, dan dampak kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan yang akan menjadi rentan terhadap penyakit.

2.1.1.4.8 Tanah Longsor

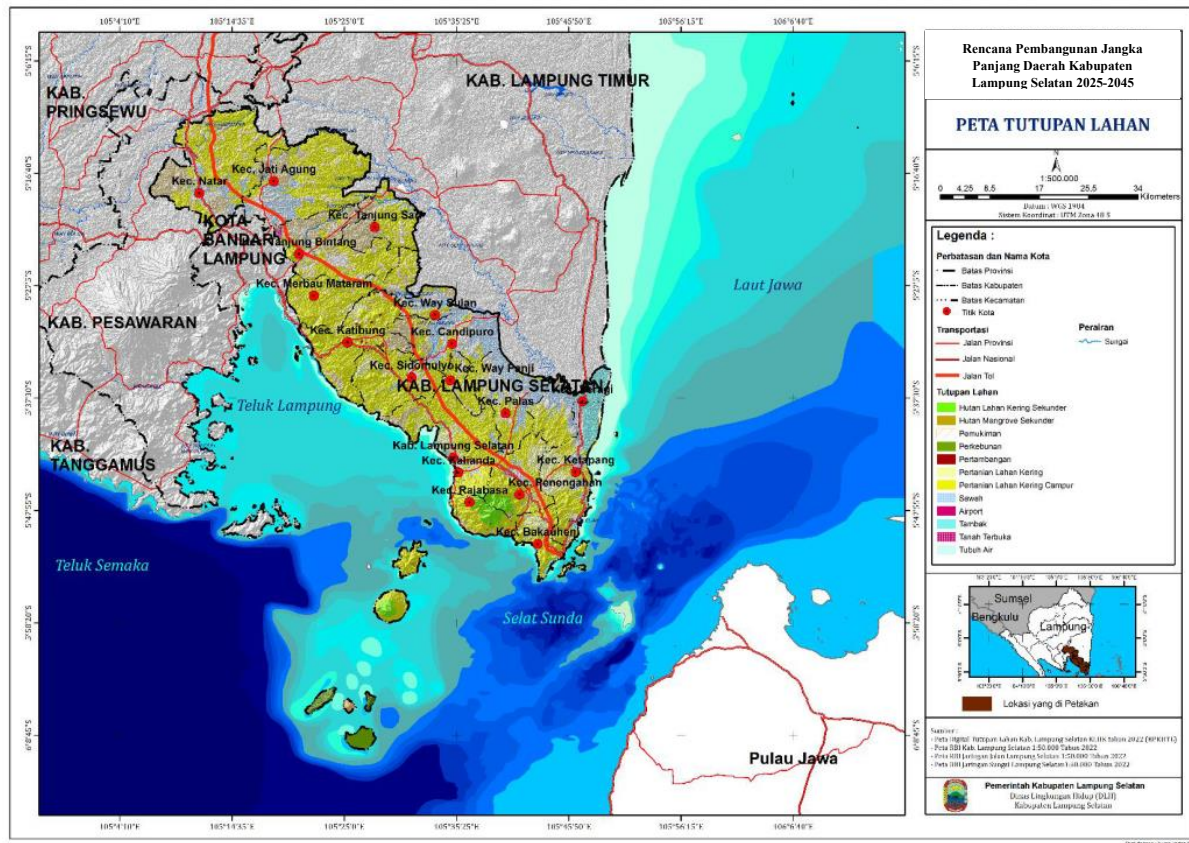
Potensi terjadinya longsor di Kabupaten Lampung Selatan memiliki ciri-ciri khusus yang perlu diperhatikan. Selain terkait dengan aktivitas gunungapi muda, seperti di sekitar Gunung Rajabasa yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 15%, ada juga kemungkinan terjadinya longsor akibat getaran sekunder yang diakibatkan oleh kendaraan berat seperti truk bermuatan. Hal ini dapat memicu ketidakstabilan lereng. Penting untuk memperhatikan hal ini terutama saat musim hujan, karena air yang meresap ke dalam tanah dapat meningkatkan beban pada lereng dan menyebabkan ketidakstabilan yang berpotensi memicu longsor. Risiko ini juga semakin tinggi karena adanya perkebunan dengan akar dangkal dan pemukiman. Ini dapat meningkatkan kemungkinan ketidakstabilan lereng saat musim hujan (RPB Kabupaten Lampung Selatan, 2021).

2.1.1.5 Penggunaan Lahan dan Kawasan

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah agraris dimana mata pencaharian pokok penduduknya berada di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan daerah terluas merupakan daerah dataran tropis yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Untuk lebih mengetahui kondisi penggunaan lahan dapat di lihat pada peta tutupan lahan yang merupakan hasil interpretasi liputan lahan citra lansat. Hasil peta tutupan lahan menunjukkan sebagian besar wilayah berwarna hijau yang menunjukkan

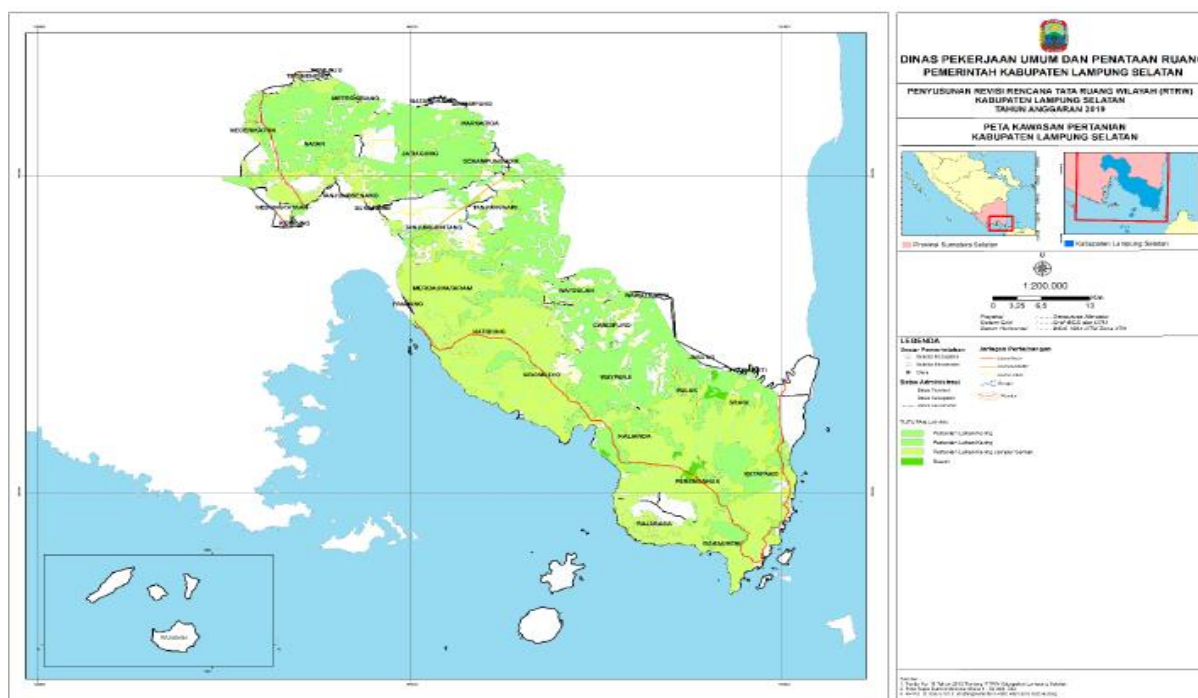
bahwa tutupan lahan masih tinggi walaupun lebih banyak pada tutupan lahan pertanian.

Gambar 2.12 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Gambar 2.13 Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Lampung Selatan



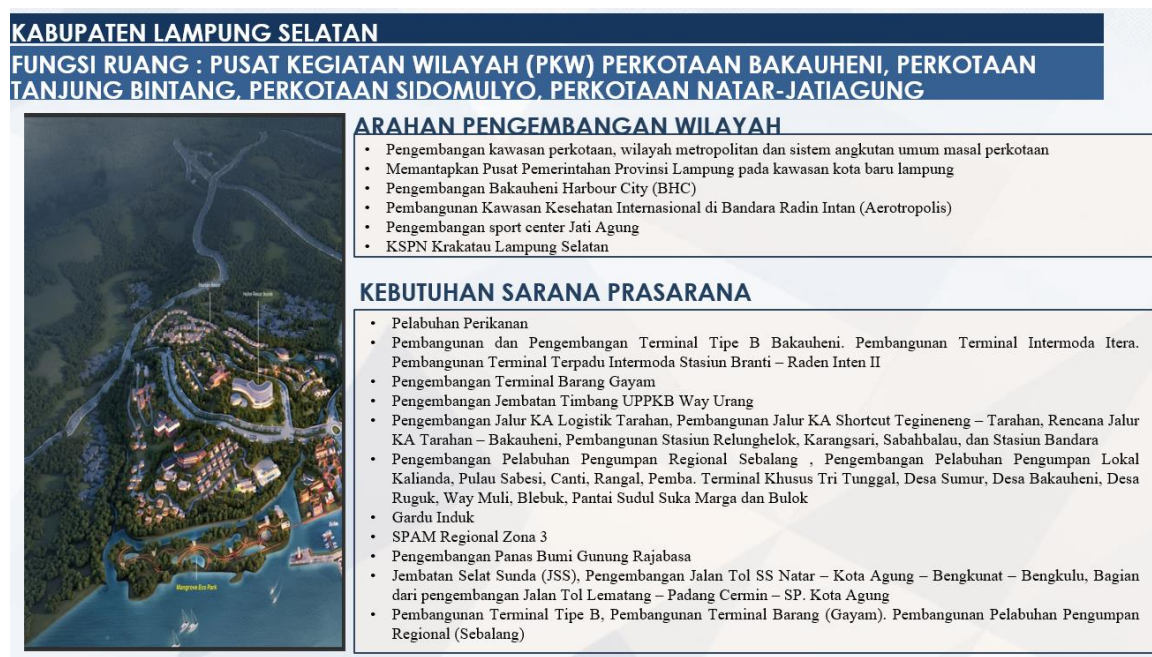
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Secara pemetaan, peta Kawasan pertanian menyebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Luasan lahan pertanian khususnya lahan pertanian sawah berada hanya pada beberapa Kawasan tertentu saja, terlihat pada warna hijau yang lebih terang. Lahan pertanian lainnya didominasi oleh lahan ladang atau Perkebunan.

Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki posisi strategi sebagai pintu masuk dan keluar ke daerah lainnya. Kabupaten Lampung Selatan juga dilewati oleh jalan tol, hal ini berpotensi sebagai tempat pengembangan industri. Beberapa Kawasan industri sudah banyak berkembang di Kabupaten Lampung Selatan. Pada peta Kawasan peruntukan industri, terdapat pada Kecamatan Tanjung Bintang dan Kecamatan Bakauheni.

BAB 2-23

Gambar 2.15 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Di Kabupaten Lampung Selatan



Sumber : Dokumen Rancangan RTRW Provinsi Lampung, 2023

2.1.1.6 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2014, daya dukung fungsi lindung mempunyai nilai minimal 0 dan nilai maksimal 1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin besar nilainya maka fungsi lindung semakin baik, begitu pula sebaliknya, yakni semakin rendah nilainya maka fungsi lindung semakin buruk. Berikut tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung berdasarkan pedoman tersebut.

Berikut adalah tabel yang digunakan untuk menghitung daya dukung fungsi lindung Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 2.6 Presentase Penutupan Lahan di Kabupaten Lampung Selatan

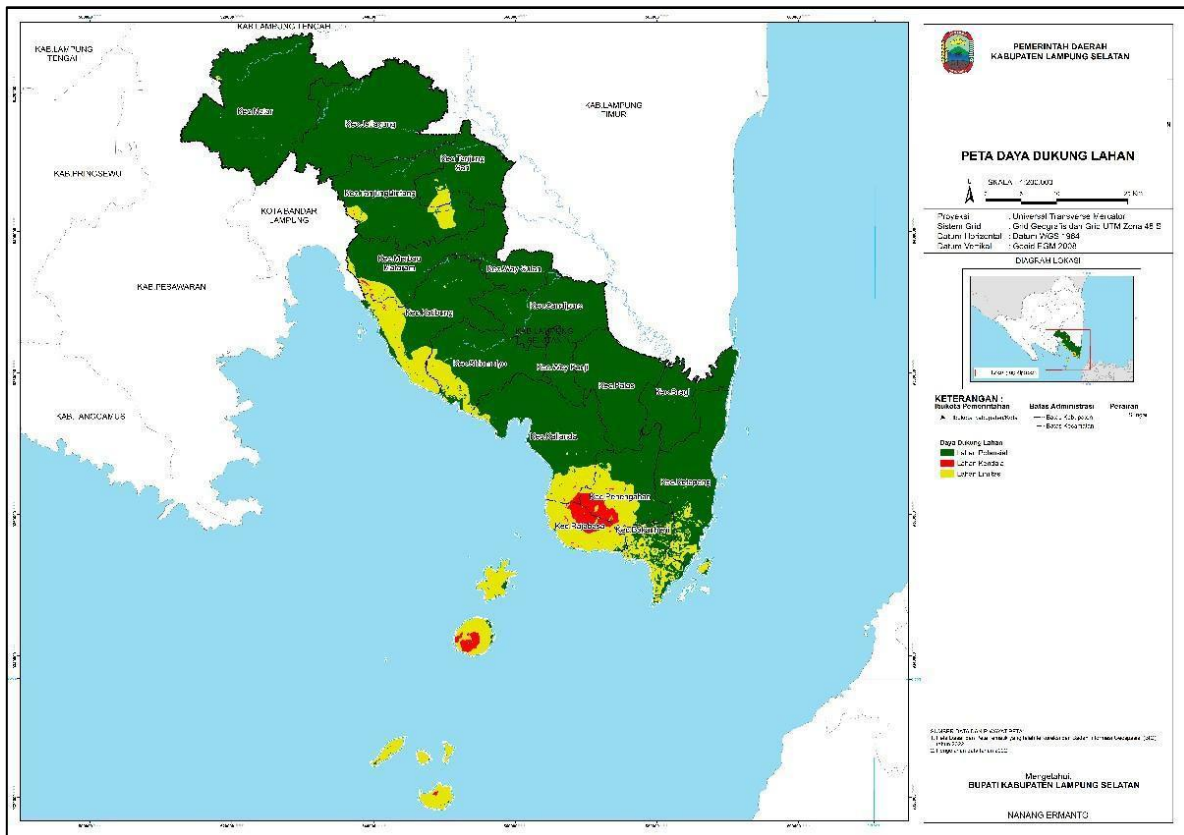
No	JENIS TUTUPAN LAHAN	Luas (Km ²)	Persen
1	Bandara	1,33	0,06%
2	Hutan dataran rendah	25,81	1,16%
3	Hutan mangrove sekunder	4,12	0,19%
4	Hutan sekunder	39,22	1,76%
5	Lahan kering tidak produktif	3,02	0,14%
6	Pemukiman	303,97	13,65%
7	Perkebunan	206,52	9,27%
8	Pertambangan	2,62	0,12%
9	Pertanian lahan kering	108,63	4,88%

No	JENIS TUTUPAN LAHAN	Luas (Km ²)	Persen
10	Pertanian lahan kering campur	1.228,06	55,13%
11	Sawah	237,35	10,66%
12	Tambak	46,09	2,07%
13	Tanah terbuka	9,65	0,43%
14	Tubuh air	0,87	0,04%
15	Lainnya	10,12	0,45%
	LUAS TOTAL	2.227,38	100,00%

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, 2024 (data diolah)

Secara umum daya dukung lahan dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kawasan potensial, kawasan kendala, dan kawasan limitasi. Kawasan potensial adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan terbangun. Sedangkan kawasan kendala adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan terbangun, tetapi memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam proses pembangunannya yang dapat diminimalisasi dengan adanya teknologi-teknologi yang digunakan dalam proses pembangunan. Sedangkan kawasan limitasi adalah kawasan yang tidak dimungkinkan untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya perkotaan yang dikarenakan keterbatasan yang ada tidak memungkinkan untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya perkotaan, dimana walaupun dapat dilakukan pembangunan pada beberapa kawasan akan membawa konsekuensi bagi pembangunan secara keseluruhan.

Gambar 2.16 Peta Daya Dukung Lahan



Sumber : Hasil Olahan ArcGIS menyesuaikan permen PU no 20 tahun 2007

2.1.1.6.1 Daya Tampung Lampung Selatan

Analisis Daya Tampung Lahan bertujuan untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk yang dapat ditampung di suatu wilayah. Analisis ini dilakukan dengan melihat luasan dari suatu yang digunakan untuk kawasan budidaya sehingga diketahui seberapa besar kemampuan kawasan budidaya dalam menampung penduduk.

Dalam menghitung daya tampung lahan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Daya Tampung Lahan (n)} = \frac{50\% (\text{Luas Lahan Total} - 30\% \text{ Luas Lahan Budidaya})}{0,01} \times 5$$

Sumber : Permen PU No. 20 Tahun 2007

Dengan rincian yaitu:

$n\%$ = Rasio Tutupan Lahan (Asumsi 50%) Luas Lahan = Luas Total Wilayah , 50 % = (30% Sarana dan 20% Prasarana/utilitas). Berdasarkan

rumus tersebut didapatkan daya tampung lahan tiap kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Luasan Daya Tampung Lahan Perkecamatan

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah	Proyeksi Penduduk tahun 2045	Daya Tampung
1	Natar	27.108,43	194.226	3.157.212
2	Jati Agung	23.411,77	304.349	3.533.996
3	Tanjung Bintang	17.147,87	126.304	1.245.826
4	Tanjung Sari	9.621,69	49.875	2.106.063
5	Katibung	16.201,94	106.761	1.424.612
6	Merbau Mataram	12.982,52	108.552	1.445.327
7	Way Sulan	4.566,27	35.810	839.584
8	Sidomulyo	13.249,29	118.152	2.104.621
9	Candipuro	12.359,77	76.161	1.247.997
10	Way Panji	3.672,04	25.391	491.252
11	Kalianda	17.441,02	132.780	2.144.434
12	Rajabasa	12.064,41	42.017	783.726
13	Palas	12.819,84	87.981	1.629.421
14	Sragi	8.777,20	51.853	1.254.456
15	Penengahan	10.807,50	76.830	1.378.208
16	Ketapang	14.336,68	74.288	1.340.067
17	Bakauheni	6.010,82	29.268	822.821
Total		222.579	1.640.598	26.949.623

Sumber: Kepmendagri 100.1.1-6117 tahun 2022, diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa daya tampung lahan di Kabupaten tiap Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dapat menampung jumlah penduduk sampai tahun 2045 yang akan datang.

2.1.1.6.2 Daya Dukung Air Permukaan Lampung Selatan

Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Menggunakan rumus :

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

dengan :

SA = Ketersediaan air permukaan

C = Koefisien limpasan

R = Curah hujan/tahun

A = Luas wilayah

10 = Faktor konversi dari mm.ha menjadi m³

Nilai koefisien limpasan untuk permukaan didapatkan dari Tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2.8 Rekapitulasi Luas Penggunaan Lahan Terhadap Daya Dukung Air

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien	Luas x Koefisien (Ha)
1	Empang	80	0,58	46
2	Gedung/Bangunan	128	0,21	27
3	Hutan Bakau/Mangrove	37	1,00	37
4	Hutan Rimba	11.857	1,00	11.857
5	Pelabuhan Udara Domestik	79	0,18	14
6	Perkebunan/Kebun	79.747	0,46	36.684
7	Permukiman dan Tempat Kegiatan	15.753	0,18	2.836
8	Rawa	38	0,21	8
9	Sawah	34.292	0,46	15.774
10	Sawah Tadah Hujan	267	0,46	123
11	Semak Belukar	11.133	0,21	2.338
12	Tambak	4.034	0,46	1.856
13	Tanah Kosong/Gundul	1.660	0,21	349
14	Tegalan/Ladang	62.849	0,21	13.198
	LUAS TOTAL	221.953		85.146

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Koefisien Total Daya Dukung Air Permukaan = $85.146/221.953 = 0,38$
Dengan asumsi kebutuhan air kriteria WHO sebesar 1000 m³/orang/ tahun maka ketersediaan air Kabupaten Lampung Selatan adalah:

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

dengan nilai

$$C = 0,38$$

$$R = 2024 \text{ mm/tahun (dari Tabel 3-3)}$$

$$A = 221.953 \text{ Ha}$$

Sehingga :

$$SA = 10 \times 0,38 \times 2024 \times 221.953 = 1.707.082.376 \text{ m}^3/\text{tahun}$$

Untuk total kebutuhan air di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2020 adalah jumlah penduduk x kebutuhan air menurut WHO sehingga :
Kebutuhan air = $1.064.200 \times 1000 = 1.064.200.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$. Hasil perhitungan daya dukung air Kabupaten Lampung Selatan perkecamatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.9 Daya Dukung Air Permukaan Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /thn)	Kebutuhan Air (m ³ /thn)	Selisih	Status
1	Natar	202.805.253	191.800.000	11.005.253	Belum Terlampaui
2	Jati Agung	182.846.974	128.600.000	54.246.974	Belum Terlampaui
3	Tanjung Bintang	130.705.483	82.200.000	48.505.483	Belum Terlampaui
4	Tanjung Sari	73.236.837	31.800.000	41.436.837	Belum Terlampaui
5	Katibung	122.121.566	72.600.000	49.521.566	Belum Terlampaui
6	Merbau Mataram	101.086.749	56.500.000	44.586.749	Belum Terlampaui
7	Way Sulan	32.630.301	24.300.000	8.330.301	Belum Terlampaui
8	Sidomulyo	94.232.198	65.300.000	28.932.198	Belum Terlampaui
9	Candipuro	100.559.056	57.600.000	42.959.056	Belum Terlampaui
10	Way Panji	27.797.535	18.100.000	9.697.535	Belum Terlampaui
11	Kalianda	135.965.957	94.100.000	41.865.957	Belum Terlampaui
12	Rajabasa	95.659.761	24.800.000	70.859.761	Belum Terlampaui

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /thn)	Kebutuhan Air (m ³ /thn)	Selisih	Status
13	Palas	98.631.949	60.900.000	37.731.949	Belum Terlampaui
14	Sragi	67.714.325	35.700.000	32.014.325	Belum Terlampaui
15	Penengahan	83.737.325	42.300.000	41.437.325	Belum Terlampaui
16	Ketapang	110.625.683	53.100.000	57.525.683	Belum Terlampaui
17	Bakauheni	46.725.424	24.500.000	22.225.424	Belum Terlampaui
T O T A L		1.707.082.376	1.064.200.000	642.882.376	Belum Terlampaui

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Berdasarkan Tabel tersebut diatas diketahui bahwa daya dukung air kabupaten Lampung Selatan belum terlampaui karena jumlah ketersediaan air > kebutuhan air dan mengalami surplus kebutuhan air sebesar yaitu selisih dari ketersediaan air dan kebutuhan air sebesar 642.882.376 m³/tahun.

2.1.1.6.3 Daya Dukung Penyediaan Pangan

Daya dukung pangan Kabupaten Lampung Selatan dilihat dari neraca beras sampai tahun 2022 mengalami surplus dengan nilai mencapai sebesar 4,09, meskipun adanya ancaman berkurangnya lahan pertanian akibat dari meningkatnya akan kebutuhan untuk lahan terbangun. Dari daya dukung pangan berdasarkan hitungan dengan menggunakan pendekatan neraca beras ternyata ketersediaan pangan beras Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 masih cukup melimpah dengan surplus 260.577 ton/tahun.

Tabel 2.10 Daya Dukung Pangan

No.	Daya Dukung Pangan	Tahun 2023
1	Luas lahan panen (Ha)	74.092
2	Produksi padi (ton)	345.034
3	Produktivitas lahan (ton/Ha/tahun)	4,66
4	Produksi beras (konversi GKG ke Beras 64,02%)	220.890
5	Jumlah penduduk (jiwa)	1.081.115

No.	Daya Dukung Pangan	Tahun 2023
6	Angka konsumsi beras (kg/orang/tahun)	78,12
7	Jumlah beras dikonsumsi (ton)	84.457
8	Daya Dukung Pangan	4,09
9	Surplus beras (ton/tahun)	260.577

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, 2023

2.1.1.6.4 Daya Dukung Persampahan

Neraca harian sampah dihitung berdasarkan jumlah timbunan sampah yang dihasilkan dalam suatu wilayah/kabupaten yang selanjutnya dihitung jumlah pengurangan dan penanganan sampah, sehingga dapat diketahui jumlah sampah yang terkelola dan jumlah sampah yang tidak terkelola. Berikut ini disajikan hasil analisis neraca harian pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 2.11 Neraca Harian Pengelolaan Sampah

No	KETERANGAN	Volume (Ton)	
		2022	2023
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH (kg/hari)	273.826	275.967
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH (kg/hari)	25.313	25.660
	<i>Persentase pengurangan dari sumber</i>	9,24%	9,30%
a	Pembatasan timbunan sampah	-	-
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	4.873	5.220
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber	20.440	20.440
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	86.626	105.426
	<i>Persentase penanganan sistem kota</i>	31,64%	38,20%
d	Pemilahan/Pengumpulan	-	-
e	Pengangkutan	-	-
	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)	-	-
	Sampah diangkut ke TPA (residu pengolahan)	-	-
f	Pengolahan	-	-

No	KETERANGAN	Volume (Ton)	
		2022	2023
	1. Sampah terolah menjadi bahan baku	-	-
	2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	-	-
g	Pemrosesan akhir	86.626	105.426
	Sampah yang terproses di TPA	86.626	105.426
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	111.939	131.086
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	<i>40,88%</i>	<i>47,50%</i>
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	161.887	144.881
	<i>Persentase sampah tidak dikelola</i>	<i>59,12%</i>	<i>52,50%</i>

Sumber : Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Berdasarkan neraca harian dapat terlihat bahwa jumlah sampah yang tidak dikelola lebih besar daripada sampah yang dikelola. Terjadi peningkatan jumlah sampah yang terkelola di sebesar 19.147 ton atau sebesar 17,11%. Juga ada penurunan persentase dari sampah yang tidak terkelola sebesar 17.007 ton atau menurun sebesar 10.51%. Peningkatan ini disebabkan dengan telah dioperasionalkannya TPA Tanjung Sari Natar secara optimal melalui peningkatan sarana dan prasana yang dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan di sekitar Natar dan Jati Agung.

Meskipun ada kemajuan positif dalam pengelolaan sampah berdasarkan data tersebut, hal tersebut sebaiknya menjadi catatan bagi pemerintah daerah perlu strategi khusus agar perbandingan sampah yang terkelola dan termanfaatkan semakin meningkat setiap tahun demi umur rencana TPA yang sesuai perencanaan yang ditetapkan.

2.1.1.6.5 Risiko Dan Dampak Kerusakan Lingkungan

Lampung Selatan merupakan kabupaten yang menduduki urutan ke-53 dari kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki indeks risiko bencana cukup tinggi (Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2018). Berdasarkan BMKG

bahwa tipologi struktur tanah dibawah wilayah Provinsi Lampung yaitu sepanjang pantai barat dan pesisir Lampung Selatan merupakan lapisan lempengan patahan yang rawan terjadi bencana gempa bumi bahkan berpotensi tsunami. Patahan atau yang biasa disebut sesar tarahan berada di Lampung Selatan sepanjang kurang lebih 40 km dari Tarahan sampai dengan Natar saat ini dalam kondisi aktif (Suharno, 2018). Patahan (sesar tarahan) yang berada di Tarahan tersebut memicu gempa magnitudo (M) 3,8 pada koordinat 5.72 LS dan 105.36 BT tepatnya berada di laut pada jarak 25 km Barat Daya Lampung Selatan dengan kedalaman hiposenter 4 km (dangkal) pada Senin, 27 Januari 2020 (BMKG). Sampai dengan saat ini potensi akan terjadinya bencana alam akan terus mengancam keselamatan masyarakat, untuk itu diperlukannya upaya mitigasi bencana.

2.1.1.7 Jasa Ekosistem

2.1.1.7.1 Kondisi Jasa Layanan Lingkungan

Dalam konteks ekologi dan lingkungan, konsep daya dukung dan daya tampung juga dapat diterapkan pada jasa ekosistem. Jasa ekosistem adalah manfaat yang diberikan oleh ekosistem kepada manusia, seperti penyediaan air bersih, penyerapan karbon, regulasi iklim, pengendalian banjir, dan sebagainya.

Jasa Layanan Lingkungan mengacu pada kapasitas ekosistem untuk menyediakan dan mempertahankan berbagai jasa ekosistem secara berkelanjutan. Ini mencakup kapasitas ekosistem untuk menyediakan berbagai keuntungan ekosistem, misalnya, produktivitas air bersih dari sumber air, habitat bagi berbagai spesies, dan penyediaan bahan pangan dan bahan baku. Jasa Layanan Lingkungan mencerminkan batas maksimum pemanfaatan manusia terhadap jasa-jasa ekosistem tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas ekosistem tersebut. Ini berarti bahwa pemanfaatan jasa ekosistem tidak boleh melebihi kemampuan ekosistem untuk mempertahankan integritas dan fungsi-fungsinya.

2.1.1.7.2 Fungsi Penyediaan

Fungsi penyediaan merupakan salah satu pengelompokan daya dukung lingkungan yang didapatkan dengan melakukan berbagai overlay jenis peta

hingga ketelitian skala 1:500.000, peta yang menjadi dasar dalam kegiatan overlay peta tersebut antara lain Peta Tutupan Lahan, Peta Penggunaan Lahan, Peta Pola Ruang, dan Peta Ekoregion. Peta-peta tersebut satu-persatu diberi penilaian oleh para ahli dari berbagai bidang terkait. Fungsi penyediaan terdiri dari lima jenis Daya Dukung Lingkungan diantaranya yaitu, fungsi penyediaan pangan, fungsi penyediaan air bersih, fungsi penyediaan serat atau fiber, fungsi penyediaan bahan bakar dan fungsi penyediaan sumberdaya genetik.

1. Fungsi Penyediaan Pangan

Fungsi penyediaan pangan di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 5 kelas, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Luasan tiap kelas penyediaan pangan pada tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.16

Tabel 2.12 Luas Klasifikasi Fungsi Penyediaan Pangan di Kab. Lampung Selatan

KECAMATAN	Luas (Ha)					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
BAKAUHENI	23,19	72,00	484,70	58,37	8.780,12	9.418,37
CANDIPURO	-	-	767,37	925,58	-	1.692,95
JATI AGUNG	-	28,95	-	408,78	1.652,88	2.090,61
KALIANDA	5.423,90	584,96	3.778,44	2.146,81	7.304,31	19.238,41
KATIBUNG	24,92	88,70	218,20	5.097,49	1.373,67	6.802,97
KETAPANG	14,11	5.648,92	3.675,18	2.056,45	10.102,91	21.497,57
MERBAU MATARAM		2.696,00	-	2.166,00	-	4.862,01
NATAR	104,37	2.223,24		-	9.734,42	12.062,03
PALAS					52.791,96	52.791,96
PENENGAHAN	-	-	25.352,89	159,98	14.107,84	39.620,72
RAJABASA	-	-	-	15.268,74	-	15.268,74
SIDOMULYO	90,49	1.714,72	-	7.497,78	978,41	10.281,40
SRAGI	-	-	7.120,26	195,71	482,37	7.798,34
TANJUNG BINTANG	-	-	-	15.212,79	-	15.212,79
TANJUNG SARI	-	29,68	92,27	194,38	2.025,52	2.341,85
WAY PANJI	-	-	-	262,08	-	262,08
WAY SULAN	-	-	-	709,88	-	709,88
Grand Total	5.680,98	13.087,16	41.489,31	52.360,82	109.334,42	221.952,68

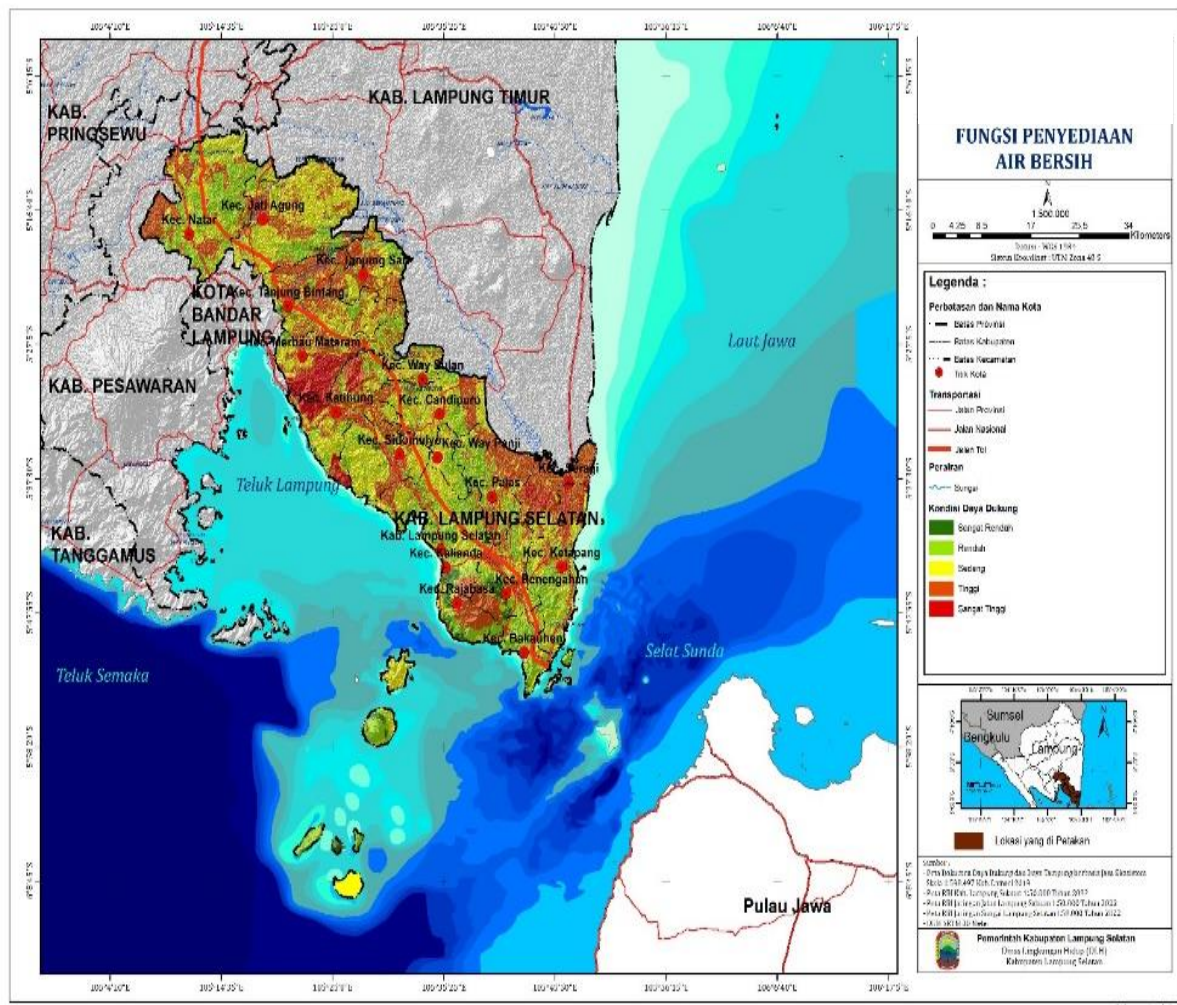
Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025 – 2045 Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Klasifikasi Fungsi Penyediaan paling besar pada kelas sangat tinggi, hingga 49,26% atau sebesar 109.334,42 Ha. Kelas sangat tinggi dapat dilihat

KECAMATAN	Luas (Ha)					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
BAKAUHENI	1.335,37	124,49	6.955,88	235,99	766,65	9.418,37
CANDIPURO	88,74	821,87	713,35	2,09	66,90	1.692,95
JATI AGUNG	-	1.653,65	436,96	-	-	2.090,61
KALIANDA	2.206,82	3.207,93	5.014,36	8.036,59	-	18.465,71
KATIBUNG	1.096,99	3.805,12	1.817,08	27,54	56,25	6.802,97
KETAPANG	56,29	8.799,97	8.985,46	668,35	2.987,51	21.497,57
MERBAU	119,22	971,32	1.115,65	-	2.655,82	4.862,01
MATARAM	-	9.734,42	1.447,40	879,94	0,28	12.062,03
PALAS	-	16.739,55	16.629,14	18.589,85	833,43	52.791,96
PENENGAHAN	56,39	267,77	18.160,57	20.927,61	208,38	39.620,72
RAJABASA	-	2.585,46	12.683,28	-	-	15.268,74
SIDOMULYO	3,44	990,94	1.082,78	7.329,24	875,00	10.281,40
SRAGI	330,12	4.178,61	738,60	2.551,02	-	7.798,34
TANJUNG BINTANG	-	3.372,93	11.839,86	-	-	15.212,79
TANJUNG SARI	-	21,24	264,05	1.810,10	246,47	2.341,85
WAY PANJI	-	0,25	261,83	-	-	262,08
WAY SULAN	-	-	98,25	611,64	-	709,88
Grand Total	5.293,36	57.275,52	88.244,47	61.669,94	8.696,68	221.179,98
%	2,39	25,90	39,90	27,88	3,93	100,00

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025 – 2045 Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Gambar 2.18 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Berdasarkan gambaran persebaran kelas penyediaan air bersih dapat dilihat pada Gambar diatas. Fungsi penyediaan air bersih di Kabupaten Lampung Selatan didominasi oleh kelas sedang sebesar 39,90 % atau sebesar 88.244,47 ha. Sedangkan untuk kelas sangat rendah hanya sebesar 2,39% . sedangkan untuk kelas rendah dan kelas tinggi nilainya hampir sama yaitu 25,90% dan 27,88 %.

3. Fungsi Penyediaan Serat atau Fiber

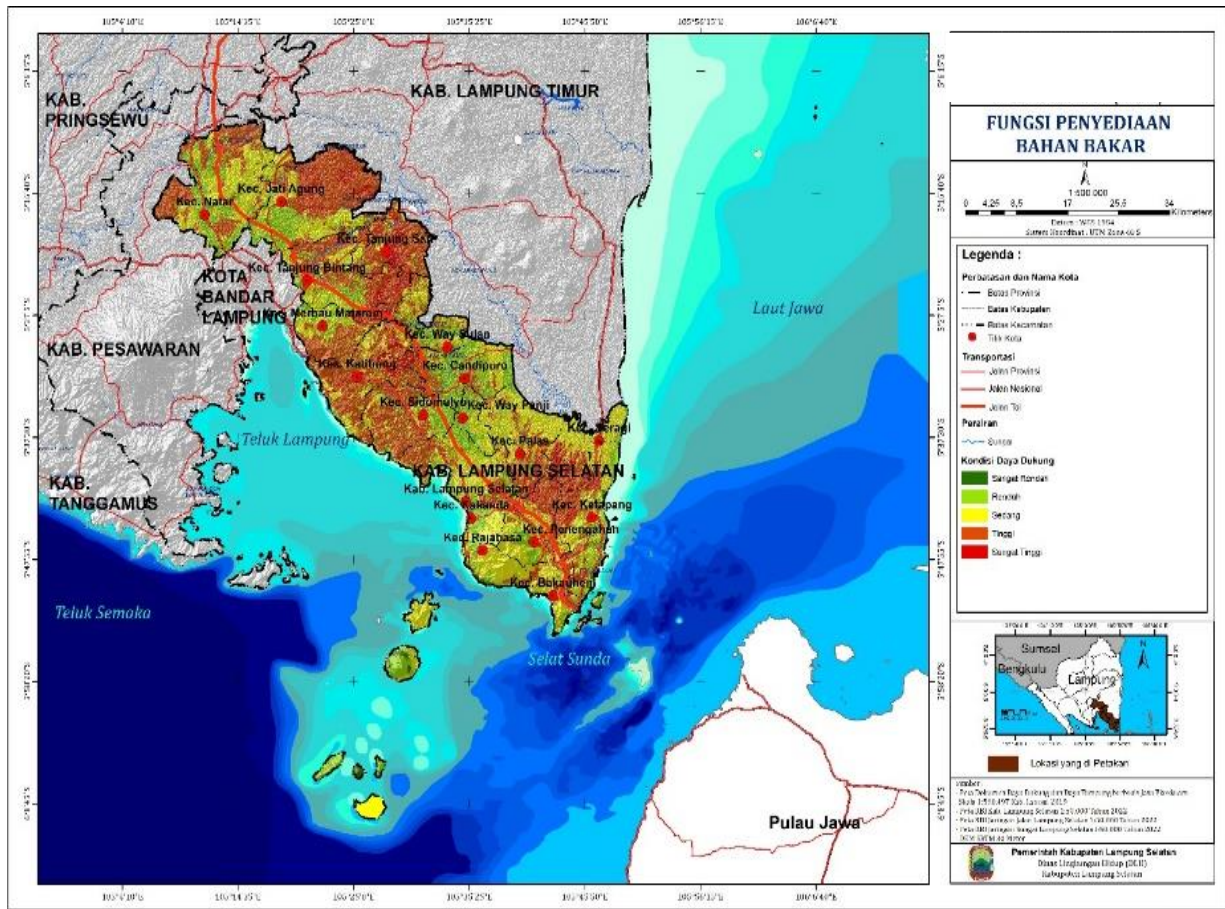
Fungsi penyediaan Serat atau Fiber di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 5 kelas, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Luasan tiap kelas penyediaan pangan pada tiap Kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.15 Luas Klasifikasi Fungsi Penyediaan Serat/fiber di Kab. Lampung Selatan

KECAMATAN	LUAS (Ha)					
	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Grand Total
BAKAUHENI	98,25	-	1,52	8.478,80	839,81	9.418,37
CANDIPURO	605,71	-	139,35	85,31	95,56	1.692,95
JATI AGUNG	241,62	-	-	1.412,03	436,96	2.090,61
KALIANDA	2.770,28	277,00	286,27	6.714,06	9.190,80	19.238,41
KATIBUNG	1.775,77	76,55	-	1.088,33	3.862,32	6.802,97
KETAPANG	1.329,01	1.154,73	3.259,79	6.902,08	8.850,62	21.496,23
MERBAU MATARAM	1,09	-	2.655,82	1.069,75	1.135,34	4.862,01
NATAR	-	-	-	9.734,92	2.327,11	12.062,03
PALAS	-	-	19.871,60	32.920,36	-	52.791,96
PENENGAHAN	107,95	-	19.650,34	4.590,37	15.272,05	39.620,72
RAJABASA	-	-	-	15.268,74	-	15.268,74
SIDOMULYO	-	-	875,00	2.269,48	7.136,92	10.281,40
SRAGI	198,90	-	2.427,31	1.591,58	3.580,55	7.798,34
TANJUNG BINTANG	-	-	-	3.404,67	11.808,11	15.212,79
TANJUNG SARI	60,79	27,74	-	1.742,18	511,14	2.341,85
WAY PANJI	262,08	-	-	-	-	262,08
WAY SULAN	-	-	157,25	270,49	282,14	709,88
Grand Total	7.451,45	1.536,03	49.324,25	98.310,16	65.329,45	221.951,34
%	3,36	0,69	22,22	44,29	29,43	100,00

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025 – 2045 Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Gambar 2.19 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Bakar (Fuel) Kayu dan Fosil



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Tabel 2.16 Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh)

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021*	2022*	2023*
1	Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh)	*	*	*	81,09	82,95

*data pada tahun tersebut tidak tersedia

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2024

4. Fungsi Penyediaan Sumberdaya Genetik

Fungsi penyediaan Sumberdaya Genetik di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 5 kelas, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Kelas wilayah pada fungsi penyediaan sumberdaya genetik paling besar terdapat pada kelas sedang, kelas sedang pada fungsi penyediaan ini sebesar 67,93% atau sebesar 150.769,43 Ha. Sedangkan kelas tinggi dan sangat tinggi hanya sebesar 14,64% dan 4,59%. Meskipun demikian kelas rendah dan sangat rendah juga memiliki proporsi yang lebih kecil, yaitu 11,11% dan 1,73%.

2.1.1.7.3 Kerentanan Kapasitas Terhadap Perubahan Iklim

1. Penanganan Emisi Rendah Karbon

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Lampung Selatan bersumber dari kegiatan Transportasi, Energi, Industri, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Pertanian. Belum ada studi terkait gas rumah kaca yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan salah satu penyebab terjadinya kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi. Pada dasarnya gas rumah kaca, seperti CO₂ dan CH₄ adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Emisi GRK ialah hasil dari lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area dan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan data KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 bahwa pertumbuhan emisi BAU baseline gas rumah kaca Provinsi Lampung dari tahun 2010 hingga tahun 2020 secara umum mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan pertambahan jumlah emisi GRK hingga menjadi sebesar 27.940.994,05 ton CO₂eq di tahun 2020 atau sebesar 311% dari emisi tahun 2010 atau setara dengan emisi GRK sebanyak 21.153.489,37 ton CO₂ eq. Akan tetapi berdasarkan data hasil input pemantauan evaluasi dan pelaporan RAD GRK secara keseluruhan, aksi-aksi mitigasi yang telah dilaksanakan di berbagai sektor terkait di Provinsi Lampung pada tahun 2017 dapat mencapai rencana target mitigasi yaitu sebesar 7.180.869 ton CO₂ equivalen, sehingga total penurunan emisi yang dicapai adalah sebesar 14.590.292,79 ton CO₂ equivalen yang disumbang paling besar oleh sektor energi. Berikut ialah detail emisi GRK BAU tahun 2010 dan 2020 serta jumlah penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Lampung dari tahun 2019.

Tabel 2.17 Emisi GRK dan Target Mitigasi Penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung

SEKTOR	BAU 2010	PEP 2012 (ton CO ₂ e)	PEP 2013 (ton CO ₂ e)	PEP 2014 (ton CO ₂ e)	PEP 2015 (ton CO ₂ e)	PEP 2016 (ton CO ₂ e)
1. LANDBASE	4.614.965,92	439.682,00	483.897,00	207.584,00	614.925,06	307.416,07
Pertanian	4.034.415,23	0	0*	0*	0*	0*
*Kehutanan & Lahan	580.550,69	439,682	483,897	207,584	614,925	307,416
2. ENERGI	2.228.266,30	1.643.554,80	10.251,27	21.158,05	1.909.911,82	20.177.806,43
*Energi	597.798,30	1.628.592,70	82,85	82,85	1.885.422,41	20.161.588,15
*Transport	1.630.465	14.662,10	10.168,42	21,075,20	23.499,41	16.248,28
3. PENGOLAHAN LIMBAH	781.931,17	65.880	75.230	43,76	27,92	17,40

SEKTOR	PEP 2017 (ton CO ₂ e)	PEP 2018 (ton CO ₂ e)	TARGET MITIGASI 2019	PEP 2019 (ton CO ₂ e)	KET
1. LANDBASE	4.289.248,75	4.146.535,76	3.832.642,91	410.443,24	Tidak Mencapai Target
*Pertanian	2.241,27	382,87	2.047.439	1.008,59	
*Kehutanan & Lahan	4.287,007	4.146.152,89	1.785.204	409.434,65	
2. ENERGI	10.299.568,48	717,98	5.792.901,00	18.814,92	Tidak Mencapai Target
*Energi	10.299.324,88	717,98	3.819,495	102,92	
*Transport	243,60	0,00	1.973.406	18.712,00	
3. PENGOLAHAN LIMBAH	1.475,564	326.350	310,80	66,56	Tidak Mencapai Target

Sumber : Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, 2021

2.1.1.7.4 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam Kabupaten Lampung Selatan dilihat dari total luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan luas lahan pertambangan yang ada. Berikut adalah gambaran mengenai efisiensi pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Lampung Selatan.

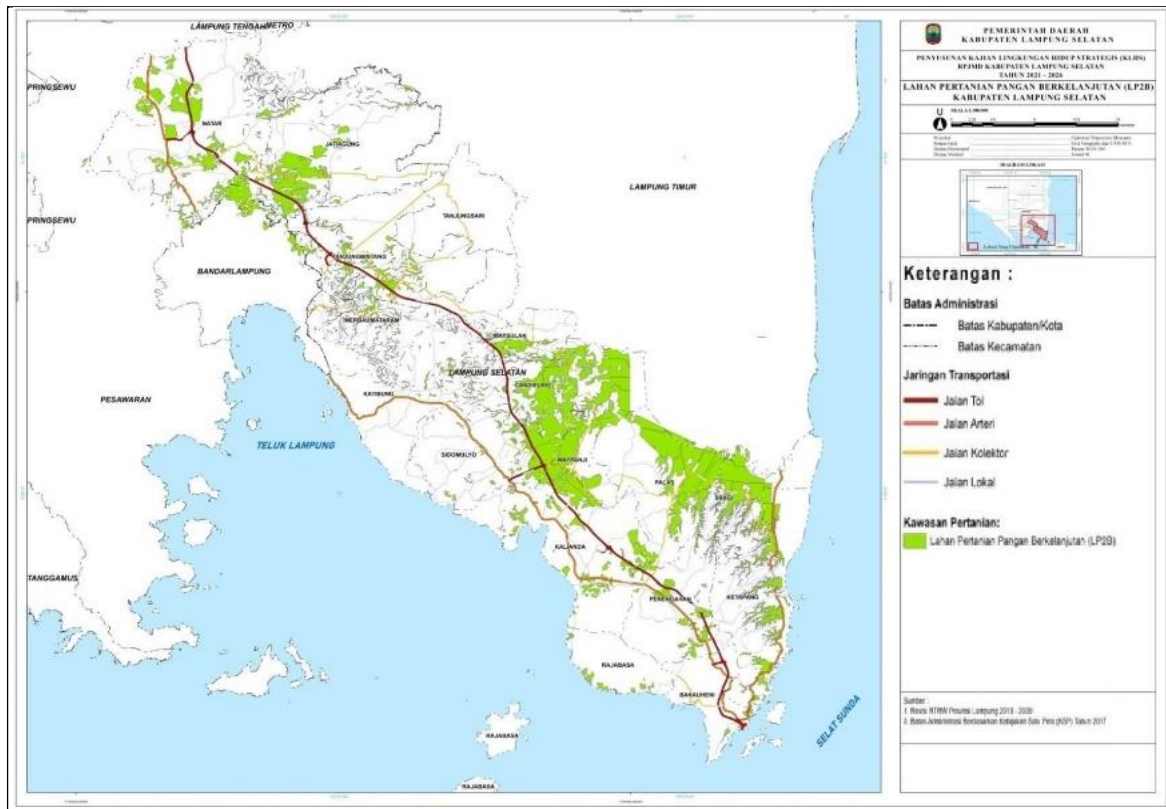
Tabel 2.18 Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	LP2B		Lahan Cadangan	
			Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)
1	Natar	25.088	3.207	12,78	491	1,96
2	Jati Agung	16.447	3.364	20,45	515	3,13
3	Tanjung Bintang	12.972	1.638	12,63	251	1,93
4	Tanjung Sari	10.322	593	5,74	91	0,88
5	Katibung	18.862	819	4,34	125	0,66
6	Merbau Mataram	11.394	1.183	10,38	181	1,59
7	Way Sulan	4.654	1.596	34,29	245	5,26
8	Sidomulyo	15.899	2.286	14,38	350	2,20
9	Candipuro	8.490	4.470	52,66	685	8,07
10	Way Panji	3.845	1.923	50,01	295	7,67
11	Kalianda	17.982	2.483	13,81	380	2,11
12	Rajabasa	10.039	404	4,02	62	0,62
13	Palas	16.557	4.818	29,10	738	4,46
14	Sragi	9.344	2.356	25,21	361	3,86
15	Penengahan	12.496	1.855	14,84	284	2,27
16	Ketapang	10.860	2.642	24,33	405	3,73
17	Bakauheni	5.713	415	7,26	64	1,12
	Total	210.974	36.052	17,09	5.523	2,62

Sumber: Dokumen LP2B Kabupaten Lampung Selatan

Dari Tabel di atas diketahui bahwa luasan wilayah LP2B terluas berada di Kecamatan Palas (4.818 Ha), Candipuro (4.470 Ha) dan Jati Agung (3.364 Ha). Jika berdasarkan persentase luas LP2B terhadap luas wilayah kecamatan maka persentase LP2B terbesar berada di Kecamatan Candipuro (52,66%), Way Panji (50,01%) dan Way Sulan (34,29%).

Gambar 2.20 Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lampung Selatan



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Potensi pertambangan yang dimiliki Kabupaten Lampung Selatan meliputi logam mineral, bukan logam mineral dan batu. Jenis bahan tambang yang banyak terdapat di Kabupaten Lampung Selatan adalah jenis batuan. Adapun rincian izin kegiatan tambang yang tercatat di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19 Kegiatan Tambang Kabupaten Lampung Selatan

Nama Perusahaan	Lokasi Tambang	Komoditas	Luas_Ha
CV. Batu Serasi Alam Raya	Katibung	Andesit	4,96
CV. Minatama	Sidomulyo	Zeolit	14,87
CV. Sumber Batu Niaga	Katibung	Andesit	5,00
CV. Way Lunik	Desa Pardasuka Kec. Katibung	Andesit	5,03
PT. Agung Jaya Abadi	Katibung	Andesit	2,03
Pt. Asia Sumber Daya Teknologi	Tanjung Bintang	Bijih Besi	201,16

Nama Perusahaan	Lokasi Tambang	Komoditas	Luas_Ha
PT. Bangun Lampung Jaya	Sidomulyo	Andesit	59,55
PT. Batu Dewata Alam Persada	Ketapang	Andesit	5,00
PT. Batu Makmur	Katibung	Andesit	4,99
PT. Batu Makmur	Tanjung Bintang	Andesit	19,80
PT. Cahaya Batu Mulia	Sidomulyo	Andesit	4,26
PT. Cemerlang Bumi Makmur	Dsa Talang Baru Kec.Sidomulyo	Zeolit	5,99
PT. Gunung Patsean Sumber Rejeki	Ketapang	Andesit	14,91
PT. Hong Tai Mining	Tanjung Bintang	Bijih Besi	189,89
PT. Ilham Fajar Pratama	Desa Sabah Balau, Kec. Tanjung Bintang,	Bijih Besi	8,33
PT. Sinar Batu Sakti Lestari	Katibung	Andesit	4,28
PT. Sumber Batu Berkah	Katibung	Andesit	4,96
PT. Sumber Batu Berkah	Katibung	Andesit	5,12
PT. Sumber Jaya Prima Kencana	Katibung	Andesit	19,88
PT. Wahana Bumi Selatan	Rajabasa	Andesit	4,02
PT. Wahana Bumi Selatan	Rajabasa	Pasir Besi	237,28
PT. Wastika Guna Corp	Desa Lematang Kec.Tanjung Bintang	Bijih Besi	81,69
Sdr. Basais Sutami	Katibung	Andesit	4,93
Sdr. Samsul	Katibung	Andesit	5,03
Sdr. Sdr. Sutopo	Natar	Gamping (Batu Kapur)	2,09
Total			1.062,17

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2045

2.1.1.7.5 Keanekaragaman Hayati

A. Cagar Alam Kepulauan Krakatau

Kabupaten Lampung Selatan memiliki Cagar Alam (CA) Kepulauan Krakatau terletak pada 6°03'15" LS - 6°10'30" LS dan 105°21'15" BT - 105°27'45" BT, terletak di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kawasan ini hanya memiliki 1 (satu) desa penyangga yang merupakan pulau terdekat dari kawasan yang berpenghuni yaitu Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Kepulauan Krakatau terletak di Selat Sunda, yaitu antara ujung barat Pulau Jawa dan ujung selatan Pulau Sumatera, berupa gugus 4 Pulau yang terdiri dari Pulau Sertung, Pulau Panjang, Pulau Rakata dan Pulau Anak Krakatau, serta perairan berupa lautan di sekitarnya yang keseluruhan memiliki luasan 11.630 Ha. Secara umum vegetasi di Kepulauan Krakatau masih dalam tingkat perkembangan dan pengkayaan jenis. Pola perkembangan antara satu pulau dengan pulau lainnya sangat berbeda. Dari keempat pulau tersebut, Pulau Rakata adalah pulau yang memiliki perkembangan vegetasi yang mapan dengan tipe komunitas yang lebih lengkap.

1. Potensi Flora

Pada vegetasi pantai (coastal vegetation) dengan formasi pes-caprae (*Ipomoea pes-caprae*) tersebar mulai dari lingkungan pantai sampai ke daratan sebelum masuk ke daerah formasi hutan pantai. Jenis-jenis tumbuhan yang banyak ditemukan antara lain: *Ipomoea pes-caprae*, *Canavalia maritima*, *Vigna marina*, *Spinifex littoralis*, dan *Wedelia biflora*.

Formasi *barringtonia* ditemukan di bagian belakang formasi *pescaprae* atau terkadang sampai ke daerah pantai. Jenis yang mendominasi formasi ini adalah *keben* (*Barringtonia asiatica*) dan *ketapang* (*Terminalia catappa*). Jenis tumbuhan lain yang juga ditemukan dalam formasi ini adalah *Waru* (*Hibiscus tiliaceus*), *Pandan* (*Pandanus tectoris*), *Mengkudu* (*Morinda citrifolia*), *Erythrina orientalis*, *Ficus fulva*, *Ficus septica*, *Macaranga tanarius*, *Hernandia peltata*, *Calophyllum inophyllum*, *Desmodium umbellatum*, dan *Melastoma affine*.

Formasi cemara merupakan formasi peralihan antara formasi hutan pantai dengan daerah pedalaman. Jenis tumbuhan yang mendominasi adalah Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*). Lebih dalam lagi memasuki pedalaman (Inland vegetation) dengan formasi hutan *neonauclea*. Untuk di Pulau Rakata sebagai Pulau tertinggi dan terluas dari keempat pulau lainnya didominasi oleh jenis *Neonauclea calycina* yang merupakan spesies dengan kanopi yang dominan di antara pohon-pohon yang ada di hutan pedalaman terutama dari elevasi antara 45 – 550 m dpl. Pada selang elevasi tersebut dijumpai adanya asosiasi dengan jenis lain seperti *Vernonia arborea*, *Macaranga tanarius*, dan *Pipturus argenteus*. Dan untuk formasi hutan pedalaman Pulau Sertung didominasi oleh 2 tipe inland forest yaitu didominasi *Dysoxylum densiflorum* dan *Timonius compressicaulis*. Begitu juga di Pulau Panjang didominasi oleh *Dysoxylum gaudichaudianum* dan lapisan strata ke dua banyak diisi oleh *Timonius compressicaulis*, *Ficus montana*, dan *Ficus tinctoria*. Tumbuhan bawah dan semak pada formasi hutan ini banyak diisi oleh jenis *Ficus fulva*, *Ficus septica*, *Ficus fistulosa*, *Macaranga tanarius*, *Buchanania arborescens*, *Euphorbia odoratum*, *Lantana camara*, *Saccharum spontaneum*, *Cyrtandra sulcata*, dan *Schefflera polybotrya*.

Sedangkan untuk di Pulau Anak Krakatau setelah erupsi pada tahun 2018 mengakibatkan Pulau ini menjadi tidak bervegetasi lagi yang artinya proses suksesi alami di pulau ini akan kembali dimulai.

2. Potensi Fauna

Kelompok fauna yang terdapat di Kepulauan Krakatau terdiri dari mamalia, reptil dan aves. Kelompok mamalia umumnya jenis tikus dan kalong. Kelompok reptil selain biawak, penyu hijau, penyu sisik, juga ditemukan jenis *Ular sanca*. Kelompok lain yang memiliki peranan cukup penting dalam kelangsungan ekosistem di Kepulauan Krakatau adalah berbagai serangga. Kupu-kupu jenis *Troides helena* yang merupakan jenis dilindungi cukup mudah ditemukan di kawasan ini. Kelompok fauna yang memiliki peranan paling penting dalam proses penyerbukan dan distribusi vegetasi yaitu kelompok aves. Keberadaan burung-burung tersebut dapat

menjadi agen dalam penyebaran bagi tumbuhan. Dari berbagai penelitian tentang burung yang dilakukan di kepulauan Krakatau, setidaknya ada 63 jenis yang ditemukan. Keberadaan burung-burung tersebut dalam setiap periode pengamatannya selalu mengalami peningkatan jumlah jenis dan kelimpahannya.

Pada tahun 2013 sampai 2017, ditemukan 41 jenis burung dan 27 jenis diantaranya telah berhasil didokumentasikan. Cekakak sungai (*Todirhampus chloris*), kekep babi (*Artamus leucorhynchus*) dan merbah cerukcuk (*Pycnonotus goiavier*) menjadi jenis yang paling umum dijumpai di Kepulauan Krakatau. Populasi ketiga jenis tersebut merupakan yang terbanyak dan memiliki angka peningkatan yang signifikan setiap periode pengamatan.

3. Terumbu Karang

Secara umum ekosistem terumbu karang ditemukan di setiap perairan dari pulau. Ekosistem terumbu karang yang ditemukan di kisaran kedalaman 1 – 25 meter dan termasuk ekosistem terumbu karang laut dangkal (walau ada beberapa bagian dari perairan Kawasan mencapai kedalaman lebih dari 250 meter). Namun demikian, masing-masing ekosistem terumbu karang pada pulau-pulau tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing.

4. Permasalahan

Masalah pengawetan sangat terkait dengan masalah perlindungan dan pengamanan. Beberapa diantaranya yang menjadi penyebab antara lain adanya berbagai kegiatan manusia di dalam kawasan diantaranya nelayan yang mengambil ikan dengan menggunakan bahan peledak. Permasalahan lain yang perlu juga ditindaklanjuti adalah pengambilan ikan dan satwa jenis burung oleh masyarakat yang apabila tidak secara ketat diawasi akan menyebabkan kepunahan sumber daya di dalamnya. Selain itu adanya animo masyarakat untuk berkunjung dengan tujuan wisata ke kawasan ini yang bukan hanya dari dalam negeri melainkan juga wisatawan dari mancanegara.

B. Kawasan Hutan

Kabupaten Lampung Selatan secara umum memiliki beberapa potensi keanekaragaman hayati, diantaranya Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi. Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi tersebut tersebar di beberapa kecamatan yakni Jati Agung, Tanjung Bintang, Katibung, Merbau Mataram, Candipuro, Tanjung Sari, Rajabasa, Bakauheni, Ketapang, Penengahan, Sragi, Kalianda dan Palas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.20 Luas Eksisting Kawasan Lindung di Kabupaten Lampung Selatan

Kecamatan	Kawasan	Luas (Ha)
Kec. Candipuro	HP Way Ketibung I REG 5	15,97
Kec. Jati Agung	HP Way Gedong Wani REG 40	10613,78
Kec. Katibung	HP Way Ketibung I REG 5	1007,01
Kecamatan	Kawasan	Luas (Ha)
Kec. Merbau Mataram	HP Way Gedong Wani REG 40	1545,66
Kec. Tanjung Bintang	HP Way Gedong Wani REG 40	1033,19
Kec. Tanjung Sari	HP Way Gedong Wani REG 40	9089,73
Kec. Katibung	HL Batu Serampok REG 17	3562,10
Kec. Merbau Mataram	HL Batu Serampok REG 17	3030,53
Kec. Way Sulan	HL Batu Serampok REG 17	81,62
Kec. Kalianda	HL Gunung Rajabasa REG 3	908,08
Kec. Penengahan	HL Gunung Rajabasa REG 3	1226,72
Kec. Raja Basa	HL Gunung Rajabasa REG 3	2996,86
Kec. Ketapang	HL Pantai Timur	184,39
Kec. Sragi	HL Pantai Timur	710,19
Kec. Katibung	HL Way Buatan REG 6	246,85
Kec. Sidomulyo	HL Way Buatan REG 6	737,69
Kec. Bakauheni	HP Pematang Taman REG 2	282,80
Kec. Ketapang	HP Pematang Taman REG 2	465,12
Kec. Penengahan	HP Pematang Taman REG 2	495,40
Kec. Ketapang	HP Way Pisang REG 1	2368,20
Kec. Palas	HP Way Pisang REG 1	1445,62
Kec. Penengahan	HP Way Pisang REG 1	2710,51
Kec. Sragi	HP Way Pisang REG 1	2113,60

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2045

2.1.1.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lampung Selatan merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kondisi lingkungan di wilayah tersebut. IKLH ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kualitas air, kualitas udara, kualitas lahan, dan pengelolaan sampah. Dengan memantau IKLH secara berkala, pemerintah dapat mengetahui kondisi lingkungan terkini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat Lampung Selatan.

Tabel 2.21 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	*	63,17	63,67	61,99	60,55

Sumber: KLHS RPJPD Lampung Selatan, 2024 (diolah)

Nilai IKLH mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Terdapat peningkatan dari tahun 2019 ke 2020, namun kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2023.

2.1.1.9 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Lampung Selatan merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan pulih dari berbagai jenis bencana. IKD ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kesiapsiagaan menghadapi bencana, kapasitas penanggulangan bencana, hingga kemampuan pemulihan pasca bencana.

Tabel 2.22 Indeks Ketahanan Daerah

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Ketahanan Daerah					

Sumber: BPBD Kabupaten Lampung Selatan

2.1.1.10 Indeks Ketahanan Pangan Daerah

Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IKPD) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu daerah dalam menyediakan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh penduduknya. Indeks ini mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari produksi pangan lokal, ketersediaan pangan di pasaran, hingga daya beli masyarakat.

Tabel 2.23 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Daerah

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	10,43	12,33	8,79	13,06	7,61

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

2.1.2 Demografi

Dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan sangat dibutuhkan data mengenai kependudukan. Apalagi jika dikaitkan dengan dwifungsi penduduk dalam pembangunan, yaitu sebagai fungsi subjek dan fungsi objek. Fungsi subjek bermakna bahwa penduduk adalah pelaku pembangunan, dan fungsi objek bermakna bahwa penduduk menjadi target dan sasaran pembangunan yang dilakukan. Kedua fungsi tadi harus berjalan seiring dan sejalan secara integral.

Penduduk Lampung Selatan menurut data tahun 2020 berjumlah 1.063,3 ribu jiwa yang meningkat rata-rata sebesar 1,50% per tahun sejak tahun 2010. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk Lampung Selatan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan rata-rata Provinsi Lampung yang sebesar 1,65 persen per tahun (BPS Provinsi Lampung, 2024). Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa Kecamatan Jati Agung merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar yaitu sebesar 1,65 persen per tahun dan merupakan satu-satunya kecamatan dengan persentase laju pertumbuhan penduduk di atas 1,5%. Sementara itu terdapat beberapa kecamatan lainnya yang memiliki persentase laju pertumbuhan penduduk di atas rata-rata Kabupaten Lampung Selatan yaitu Kecamatan Tanjung Bintang (1,20%), Kecamatan Penengahan (1,07%), Kecamatan Katibung (1,03%), Kecamatan Merbau

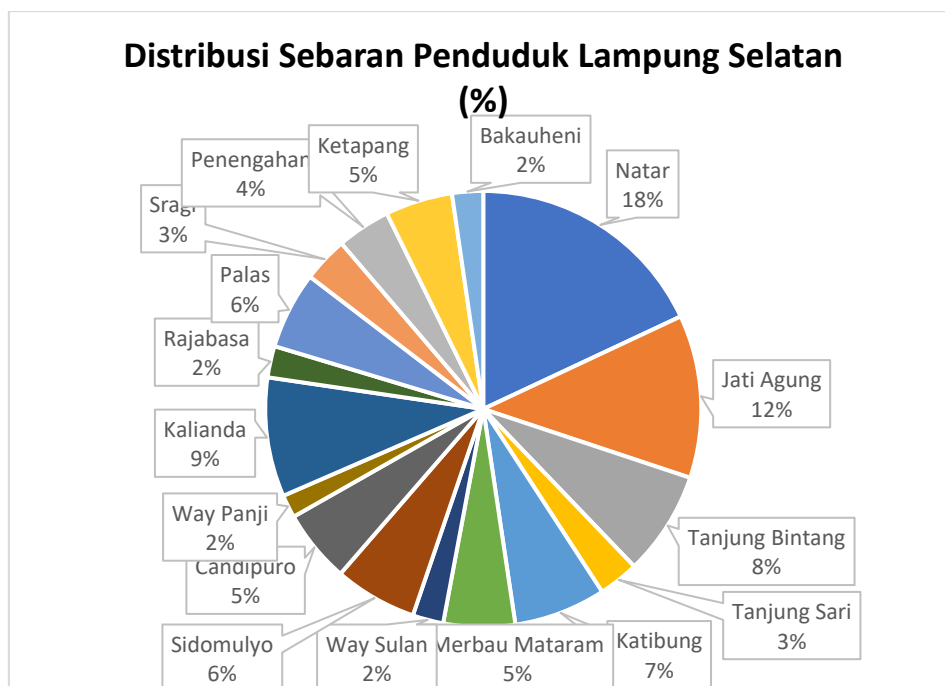
Mataram (1,32%), Kecamatan Rajabasa (1,18%) dan Kecamatan Bakauheni (1,03%). Sedangkan Kecamatan Way Panji merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan terkecil yaitu sebesar 0,32% per tahun.

Tabel 2.24 Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Persentase	Laju Pertumbuhan Penduduk
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Natar	198.665	18,04	1,53
2	Tanjung Bintang	86.969	7,90	2,09
3	Kalianda	98.673	8,96	0,67
4	Sidomulyo	68.356	6,21	1,62
5	Katibung	75.091	6,82	0,97
6	Penengahan	44.236	4,02	1,08
7	Palas	63.931	5,80	1,21
8	Jati Agung	125.035	11,35	2,11
9	Ketapang	55.724	5,06	1,67
10	Sragi	36.916	3,35	0,61
11	Rajabasa	25.629	2,33	0,09
12	Candipuro	60.293	5,47	1,39
13	Merbau Mataram	58.454	5,31	1,51
14	Bakauheni	25.068	2,28	1,01
15	Tanjung Sari	33.887	3,08	1,34
16	Way Sulan	25.580	2,32	1,13
17	Way Panji	18.870	1,71	1,19
Lampung Selatan		1.101.376	100,00	1,39

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Tabel di atas juga menunjukkan Kecamatan Natar merupakan kecamatan dengan populasi penduduk terbesar, karena lokasi Kecamatan Natar yang berdekatan dengan ibukota provinsi Lampung, Bandar Lampung, dan juga merupakan tempat lokasi bandara terbesar di Provinsi Lampung, Bandara Internasional Radin Inten II. Ditambah, dengan semakin padatnya penduduk Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan banyak yang mencari alternatif hunian ke daerah pinggiran Kota Bandar Lampung, seperti di Kecamatan Natar. Begitu juga dengan Kecamatan Jati Agung, dengan populasi penduduk lebih dari seratus ribu jiwa, merupakan tetangga dari Kota Bandar Lampung yang juga merupakan daerah alternatif investasi bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.



Gambar 2.21 Distribusi Penduduk Lampung Selatan, 2023
Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2024

Sementara Gambar di atas menunjukkan data sebaran penduduk di Lampung Selatan tahun 2023. Terlihat bahwa Kecamatan Natar memiliki porsi terbesar dibandingkan kecamatan lainnya, diikuti oleh Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Kalianda. Sementara itu, proporsi jumlah penduduk terendah berada pada Kecamatan Rajabasa, Bakauheni, Way Panji dan Way Sulan dengan rata-rata distribusi luas berada pada kisaran 2 persen.

Tabel 2.25 Kepadatan Penduduk Lampung Selatan, 2023

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk per Km ²
	(1)	(2)
1	Natar	929
2	Tanjung Bintang	670
3	Kalianda	611
4	Sidomulyo	558
5	Katibung	427
6	Penengahan	333
7	Palas	373
8	Jati Agung	760
9	Ketapang	513
10	Sragi	451
11	Rajabasa	255
12	Candipuro	712
13	Merbau Mataram	513

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk per Km ²
	(1)	(2)
14	Bakauheni	439
15	Tanjung Sari	328
16	Way Sulan	550
17	Way Panji	491
Lampung Selatan		549

Sumber: BPS Lampung Selatan 2024, data diolah

Kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan penduduk di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Salah satu bagian dari kepadatan penduduk di suatu wilayah berdasarkan Kajian Kependudukan, 2023, adalah kepadatan penduduk aritmatika, yang menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.

Berdasarkan Tabel di atas rata-rata kepadatan penduduk aritmatika di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar 549 jiwa/km², yang artinya setiap 1 kilometer persegi luas wilayah Kabupaten Lampung Selatan dihuni oleh 549 jiwa. Kecamatan Natar dan Kecamatan Jati Agung memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu lebih dari 10% dan kepadatan penduduk aritmatika juga yang terbesar yaitu lebih dari 929 jiwa/km². Hal ini wajar karena populasi di kedua kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang paling dekat dengan ibukota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, yang saat ini diproyeksikan sebagai daerah alternatif bagi masyarakat ibukota untuk berinvestasi dan tempat tinggal.

Sementara Kecamatan Kalianda yang merupakan ibukota Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan memiliki kepadatan penduduk sebesar 8,83% dan kepadatan aritmatika sebesar 611 jiwa/km². Sedangkan presentase kepadatan penduduk terkecil dengan tingkat kepadatan aritmatika terkecil adalah Kecamatan Rajabasa, dengan kepadatan penduduk aritmatika sebesar 255 jiwa/km².

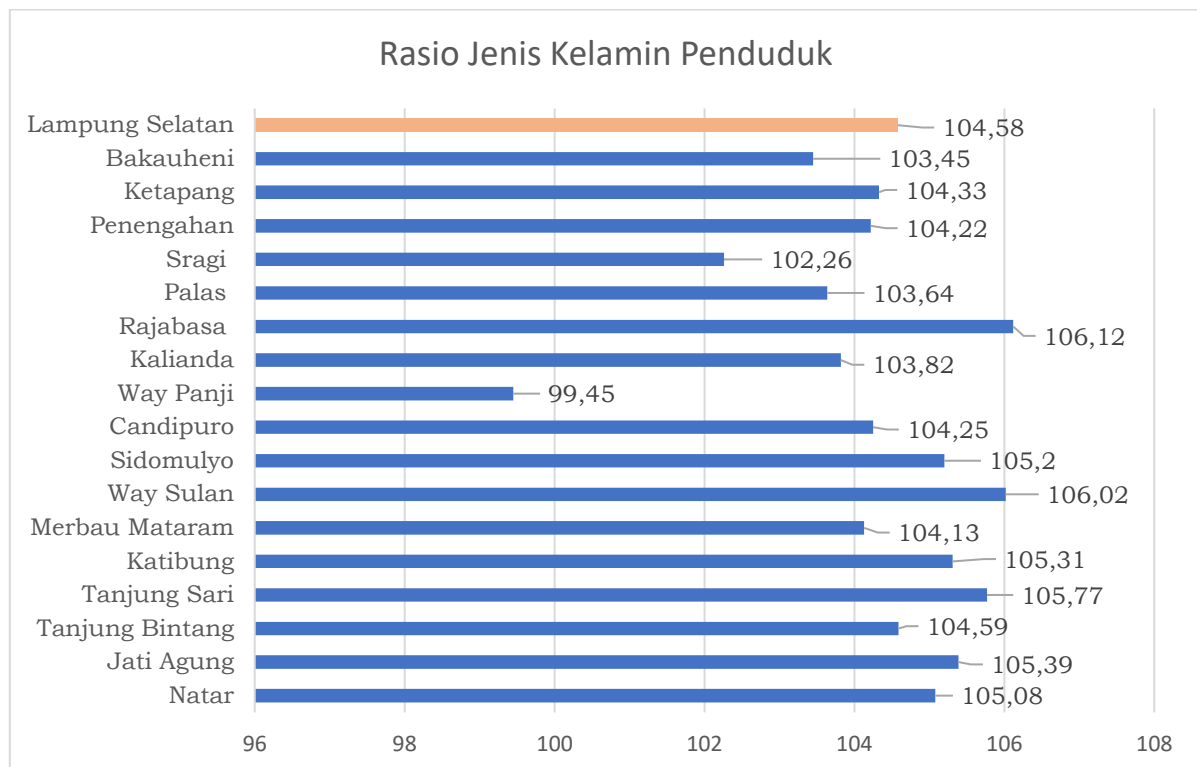
Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0–4	42.737	40.159	82.896
5–9	51.164	48.237	99.401
10–14	53.314	50.212	103.526
15–19	36.830	35.842	72.672
20–24	46.435	44.503	90.938
25–29	44.225	41.703	85.928
30–34	42.367	40.711	83.078
35–39	43.043	43.215	86.258
40–44	45.213	44.081	89.294
45–49	39.169	38.507	77.676
50–54	33.265	32.064	65.329
55–59	25.245	25.897	51.142
60–64	20.954	21.178	42.132
65–69	14.785	13.581	28.366
70–74	9.880	9.230	19.110
75+	11.583	12.047	23.630
Lampung Selatan	560.209	528.465	1.101.376

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum di Kabupaten Lampung Selatan, jumlah anak-anak dengan rentang usia sampai dengan 10 tahun relatif lebih banyak dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Pada kelompok umur usia produktif, 20 sampai dengan 45 tahun, jumlahnya cukup mendominasi dengan jumlah berkisar 40 ribuan jiwa di setiap kelompok umurnya. Untuk kelompok lanjut usia, relatif lebih sedikit dengan kelompok umur di atas 70 tahunan menjadi kelompok umur dengan jumlah penduduk terkecil, yaitu hanya berkisar 19.000an jiwa.

Gambar 2.22 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, 2023



Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa secara umum rasio jenis kelamin penduduk laki-laki di Kabupaten Lampung Selatan lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, kecuali Kecamatan Way Panji. Pada gambar di atas juga diketahui bahwa sebagian besar kecamatan memiliki sex ratio atau rasio jenis kelamin lebih dari 100 persen, kecuali Kecamatan Way Panji. Beberapa kecamatan memiliki sex ratio di atas rata-rata sex ratio Kabupaten Lampung Selatan, di antaranya Kecamatan Rajabasa yang memiliki sex ratio tertinggi di antara kecamatan lainnya.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun). Dalam penghitungannya nilai PDRB didasarkan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan (harga pada tahun tertentu).

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat perubahan tingkat ekonomi antar periode. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa geliat perekonomian Kabupaten Lampung Selatan cenderung stabil di angka 5% lebih dari tahun 2016 sampai tahun 2019 yang mencapai 5,13 persen. Namun, di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga -1,73 persen. Konstraksi ini disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19.

Tabel 2.27 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

Lapangan Usaha		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,07	1,02	0,63	2,69	0,12
B	Pertambangan dan Penggalian	5,83	-0,46	-4,76	2,11	1,94
C	Industri Pengolahan	6,21	-4,10	3,07	2,31	2,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	8,47	4,58	4,52	4,80	2,91
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,08	3,73	2,45	5,25	4,48
F	Konstruksi	7,74	-3,49	5,48	7,24	8,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,20	-1,22	4,52	11,03	13,35
H	Transportasi dan Pergudangan	6,04	-15,16	0,11	13,12	11,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,85	-4,09	0,40	10,73	11,55
J	Informasi dan Komunikasi	7,81	8,71	5,91	0,91	4,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,32	4,52	3,14	-1,77	0,70
L	<i>Real Estate</i>	5,14	-1,82	2,26	2,29	1,47
M,N	Jasa Perusahaan	4,50	-1,68	1,53	14,8	1,81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,86	4,90	4,03	-0,77	1,48
P	Jasa Pendidikan	7,94	2,54	1,30	2,50	2,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,66	9,73	3,43	-0,10	3,70
R,S, T,U	Jasa Lainnya	7,89	-4,25	-1,18	25,20	15,32
	Produk Domestik Regional Bruto	5,13	-1,73	2,6	4,81	4,82

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2024

Sepanjang tahun 2023, beberapa sektor mengalami kontraksi. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Jasa Lainnya dan Perdagangan Besar dan Eceran yang masing-masing tumbuh 15,32% dan 13,35%. Lalu ada sektor Akomodasi Makan dan Minum yang mengalami pertumbuhan sebesar 11,55%.

Tabel 2.28 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional 2019-2023

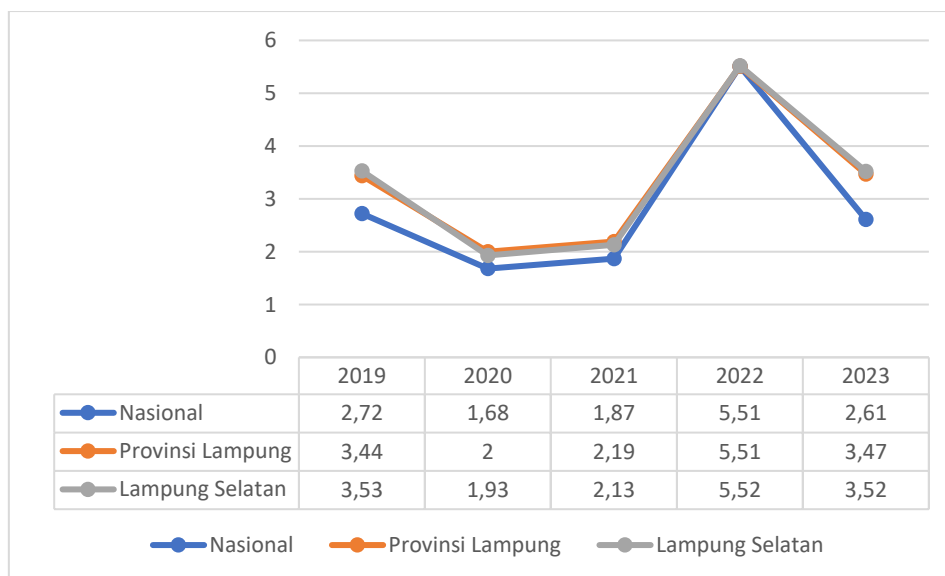
Tahun	Lampung Selatan	Lampung	Nasional
2019	5,13	5,26	5,02
2020	-1,73	-1,67	-2,07
2021	2,68	2,79	3,69
2022	4,81	4,28	5,31
2023	4,82	4,55	5,05

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2024

Pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan kembali mengalami kenaikan. Hal tersebut tidak terlepas dari segala upaya pemulihan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Pada Tahun 2023 terjadi kenaikan mencapai 4,82 persen, melampaui capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 4,55 persen, namun masih berada di bawah capaian Nasional sebesar 5,05 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh aktivitas perekonomian masyarakat yang berangsur normal serta pembangunan infrastruktur yang semakin intensif di Kabupaten Lampung Selatan.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Dalam lima tahun terakhir, laju inflasi Kalianda cenderung stabil di bawah angka 4 persen. Namun pada Tahun 2022, terjadi kelonjakan tingkat inflasi yang terjadi di daerah, Provinsi Lampung hingga Nasional. Inflasi Kalianda pada Tahun 2023 merujuk inflasi Kota Bandar Lampung sebagai *sister city* adalah sebesar 3,52 persen, lebih tinggi dari inflasi Provinsi Lampung dan nasional yang sebesar 3,47 persen. Pada Tahun 2025, berbagai upaya penekanan laju inflasi oleh Pemerintah diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga inflasi Kalianda diharapkan tetap stabil di angka proyeksi 3 ± 1 persen di tengah belum stabilnya perekonomian tidak hanya lokal, tapi juga nasional dan global.



Gambar 2.23 Laju Inflasi Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional, 2019-2023

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2024

Pada Tahun 2022, seluruh wilayah mengalami peningkatan inflasi hingga di atas 5 persen, dimana Kabupaten Lampung Selatan sebesar 5,52 persen. Pada Tahun 2023, sebagai hasil upaya pengendalian inflasi daerah, inflasi Kabupaten Lampung Selatan turun menjadi 3,52 persen, lebih tinggi dari inflasi Provinsi Lampung yang sebesar 3,47 persen dan Nasional yang sebesar 2,61 persen.

2.2.1.3 Rasio Gini

Rasio Gini atau Koefisien Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Koefisien Gini (Gini Rasio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Tabel 2.29 Gini Rasio Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Barat	0,296	0,295	0,281	0,284	0,274

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Tanggamus	0,314	0,293	0,265	0,261	0,256
Lampung Selatan	0,331	0,299	0,268	0,260	0,257
Lampung Timur	0,302	0,315	0,284	0,283	0,315
Lampung Tengah	0,308	0,304	0,291	0,299	0,285
Lampung Utara	0,309	0,301	0,275	0,284	0,300
Way Kanan	0,299	0,311	0,283	0,283	0,281
Tulangbawang	0,322	0,279	0,292	0,287	0,284
Pesawaran	0,31	0,288	0,299	0,251	0,287
Pringsewu	0,295	0,31	0,277	0,272	0,306
Mesuji	0,286	0,308	0,272	0,280	0,285
Tulang Bawang Barat	0,316	0,272	0,282	0,261	0,274
Pesisir Barat	0,33	0,281	0,322	0,290	0,315
Kota Bandar Lampung	0,316	0,359	0,344	0,369	0,381
Kota Metro	0,342	0,3	0,309	0,299	0,289
Provinsi Lampung	0,329	0,327	0,323	0,314	0,324

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2023

Nilai rasio gini Provinsi Lampung pada tahun 2023 mencapai 0,324. Angka tersebut berada di atas angka gini rasio Kabupaten Lampung Selatan yang hanya mencapai 0,257. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Lampung Selatan masih lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung.

Jika dilihat secara keseluruhan pada tahun pengamatan (2019-2023), pada tahun 2020-2023 nilai gini rasio Kabupaten Lampung Selatan berada di bawah Provinsi Lampung. Fakta ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Selatan sejak tahun 2019 telah terjadi perubahan yang berdampak pada peningkatan pemerataan pendapatan penduduk. Hal ini diperkuat oleh tingkat perubahan gini rasio Kabupaten Lampung Selatan yang sejak tahun 2020 menunjukkan perubahan nilai gini rasio yang lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Lampung.

Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, nilai Indeks Gini Ratio Kabupaten Lampung Selatan masih berada pada peringkat 2 atau tepat berada dibawah Kota Tanggamus dengan nilai indeks Gini Ratio sebesar 0,256.

2.2.1.4 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Tabel 2.30 Presentase Penduduk Miskin

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Barat	12,92	12,52	12,82	11,71	11,17
Tanggamus	12,05	11,68	11,81	10,98	10,52
Lampung Selatan	14,31	14,08	14,19	13,14	12,79
Lampung Timur	15,24	14,62	15,08	13,98	13,80
Lampung Tengah	12,03	11,82	11,99	10,96	10,65
Lampung Utara	19,90	19,30	19,63	18,41	17,17
Way Kanan	13,07	12,90	13,09	11,76	11,02
Tulang Bawang	9,35	9,33	9,67	8,42	8,04
Pesawaran	15,19	14,76	15,11	13,85	12,89
Pringsewu	10,15	9,97	10,11	9,34	9,14
Mesuji	7,47	7,33	7,54	6,84	6,73
Tulang Bawang Barat	7,75	7,39	8,32	7,44	7,25
Pesisir Barat	14,48	14,29	14,81	13,84	13,49
Bandar Lampung	8,71	8,81	9,11	8,21	7,77
Metro	8,68	8,47	8,93	7,87	7,28
Provinsi Lampung	12,62	12,34	12,62	11,57	11,11

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan (Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan secara umum presentase penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan masih di atas rata-rata Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir. Namun demikian, presentase ini masih lebih

baik dibandingkan beberapa kabupaten lainnya, seperti Lampung Utara, Lampung Timur dan Pesisir Barat.

2.2.1.4.1 Kesenjangan Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Lampung Selatan pada 2023 mencapai 133,67 ribu orang (12,79 persen) berkurang sebesar 2 ribu orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada 2022 yang tercatat sebesar 136,21 ribu orang (13,14 persen). Garis kemiskinan pada 2023 sebesar Rp508.494.

Tabel 2.31 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin serta Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2019	389.236	144,44	14,31	2,32	0,58
2020	422.328	143,33	14,08	2,52	0,60
2021	439.421	145,85	14,19	2,37	0,60
2022	470.857	136,21	13,14	1,87	0,41
2023	508.494	133,67	12,79	2,16	0,55

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2024

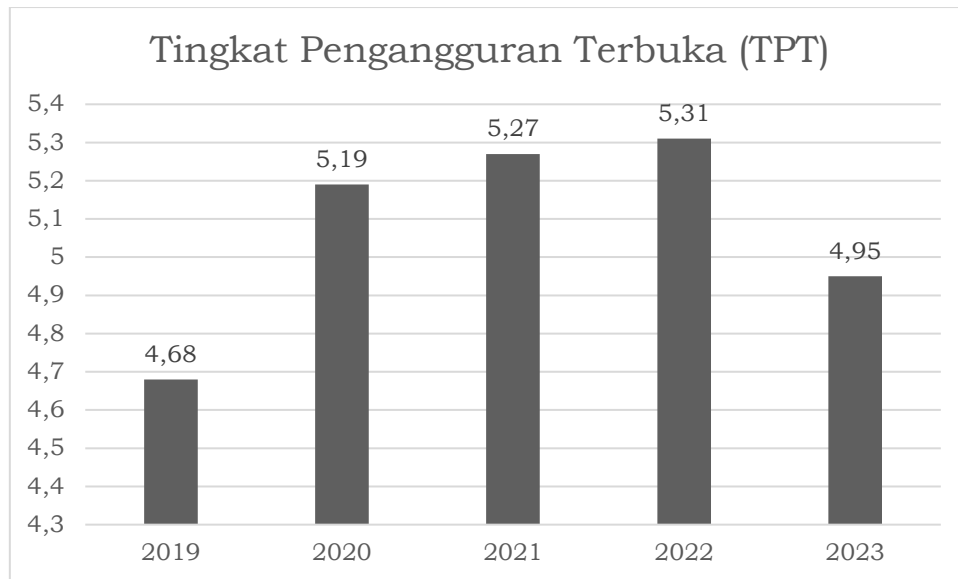
Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Hingga tahun 2023, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan cenderung stabil di angka 2,16% dan pada indeks keparahan kemiskinan berada pada level 0,55%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan masih cukup tinggi, dimana angka kemiskinan masih di atas rata-rata garis kemiskinan Provinsi Lampung, yang sebesar 12,79% di tahun 2023.

2.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Selatan dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya angkatan kerja dan rendahnya penawaran kerja yang terserap terutama tingkat pendidikan SMK dan diploma serta perampangan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. TPT Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,36 persen dari Tahun 2022 yang sebesar 5,31 persen menjadi 4,95 persen. Hal ini menjadi pencapaian yang cukup baik mengingat pada tiga tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan, terutama akibat dampak Pandemi Covid-19. Penurunan ini merupakan hasil dari upaya bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan stakeholders, termasuk penyelenggaraan Job Fair pada Tahun 2022 dan 2023. Jika dilihat dari dominasi jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tidak lulus SD/belum pernah sekolah dan lulusan SD sederajat yang sebesar 214.192 jiwa atau 40,15 persen dari total angkatan kerja, maka dapat dikatakan bahwa kualitas Angkatan kerja Lampung Selatan masih tampak rendah.



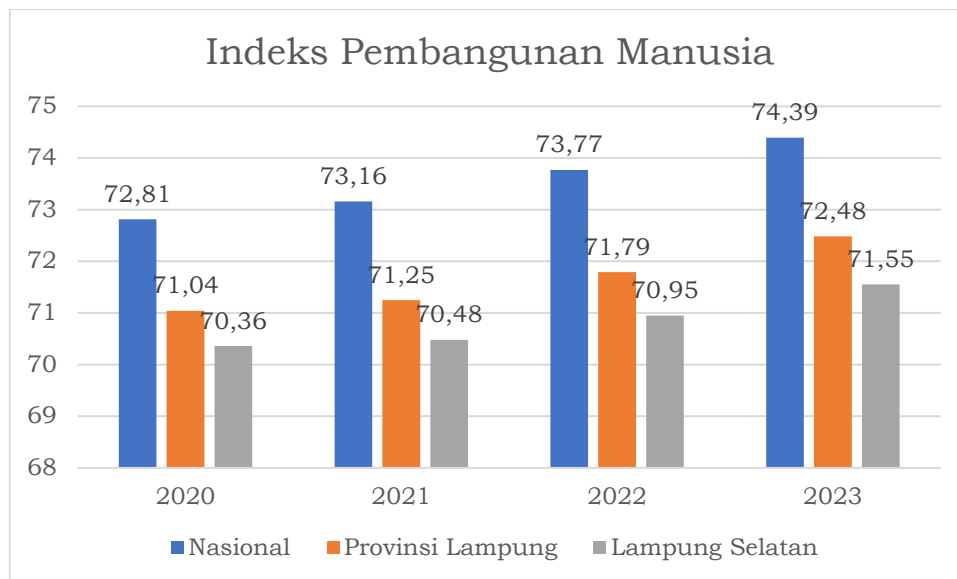
Gambar 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka, 2019-2023

Sumber: Lampung Selatan dalam Angka 2024

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dan berkesinambungan. Dalam kerangka pembangunan, penduduk merupakan sumber utama modal pembangunan. Penduduk berperan dan berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam semua proses kegiatan pembangunan. Peranan dan partisipasi penduduk sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas penduduk itu sendiri. Kuantitas penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang terkendali menjadi pendorong kelangsungan pembangunan. Sedangkan kualitas penduduk yang tinggi menjadi modal dasar peningkatan kemajuan pembangunan. Salah satu Indikator lainnya yang digunakan untuk melihat kuantitas dan kualitas penduduk ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH); pendidikan diukur dari dua komponen yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; dan komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah).



Gambar 2.25 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2023

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Lampung Selatan mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Sensus Penduduk 2020 yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) telah berdampak atas dasar perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Lampung Selatan dengan data Sensus Penduduk 2020, sejak Tahun 2020 sudah mencapai kategori tinggi, dengan nilai pada Tahun 2023 sebesar 71,55, namun secara peringkat justru turun menjadi peringkat ke-delapan.

Pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kualitas pendidikan. Seseorang dengan pendidikan tinggi akan memiliki peluang yang besar dalam hidupnya dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah, misalnya di bidang pekerjaan. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan mendorong perbaikan di bidang lain seperti tingkat kesehatan yang lebih baik dan kesejahteraan secara ekonomi. Mengingat begitu pentingnya pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah dalam agenda pembangunan jangka panjang periode 2025-2045 dengan terus berupaya meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dan menengah.

Upaya percepatan pencapaian IPM tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas teknis, melainkan juga harus terintegrasi dengan peran kecamatan, kelurahan, dan pemerintahan desa. Fokusnya harus lebih ditekankan pada perbaikan sarana dan prasarana sekolah, puskesmas/puskesmas pembantu dengan seluruh jaringan kerjanya. Selain itu, melalui berbagai program pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan, juga menysasar peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar. Dimensi pengetahuan/pendidikan pada IPM dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas.

2.2.1.6.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah merupakan salah satu indikator tingkat pendidikan masyarakat pada suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah dapat diartikan sebagai Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Tabel 2.32 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019-2022

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Barat	7,6	7,85	8,06	8,07	8,20
Tanggamus	6,96	7,21	7,22	7,34	7,35
Lampung Selatan	7,68	7,69	7,70	7,72	7,77
Lampung Timur	7,57	7,59	7,6	7,77	8,04
Lampung Tengah	7,51	7,57	7,58	7,59	7,64
Lampung Utara	8,19	8,2	8,21	8,34	8,35
Way Kanan	7,35	7,39	7,7	7,71	7,72
Tulang Bawang	7,22	7,23	7,49	7,55	7,56
Pesawaran	7,47	7,6	7,7	7,71	7,77
Pringsewu	8,01	8,19	8,38	8,39	8,40
Mesuji	6,6	6,61	6,88	7,08	7,09
Tulang Bawang Barat	7,1	7,13	7,24	7,39	7,72
Pesisir Barat	7,59	7,82	8,01	8,19	8,53
Kota Bandar Lampung	10,9	10,92	10,93	10,95	10,96
Kota Metro	10,61	10,64	10,96	10,97	10,98

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Lampung	7,82	7,92	8,05	8,08	8,18

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan memiliki angka rata-rata lama sekolah yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jenjang pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas. Hingga tahun 2023, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lampung Selatan mencapai 7,77 yang memiliki arti bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan hingga SMP kelas VIII.

Lebih jauh, jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2023 menempati urutan ke-12. Sementara di atasnya adalah Kabupaten Pesawaran dan Lampung Timur dengan angka rata-rata lama sekolah 8,04 dan 7,7 tahun.

2.2.1.6.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebuah indikator yang menunjukkan rata-rata lama (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh seorang anak dalam menempuh pendidikan formal sejak usia tertentu. HLS sering digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kualitas dan aksesibilitas pendidikan di suatu daerah atau negara.

Tabel 2.33 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Selatan, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah	12,33	12,50	12,52	12,54	12,64

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan

Lebih lanjut, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Selatan terus mengalami peningkatan dari sebesar 12,33 pada tahun 2019 menjadi 12,64 pada tahun 2023.

2.2.1.6.3 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program

pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2.34 Angka Harapan Hidup di Lampung Selatan (LF SP2020), 2020-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Usia Harapan Hidup (Tahun)	*	73,79	73,85	74,03	74,22

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2024

*data menggunakan LF SP2020

Angka harapan hidup Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan peningkatan sepanjang lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Selatan terus terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hingga tahun 2023, angka harapan hidup Kabupaten Lampung Selatan mencapai 74,22 tahun.

2.2.1.6.4 Pengeluaran per Kapita

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Selain itu sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian, hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping sebagai konsumen akhir produk barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor industri lain.

Trend pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Lampung Selatan kembali mengalami peningkatan dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023 setelah sebelumnya mengalami penurunan di Tahun 2020. Pada Tahun 2019 pengeluaran per kapita sebesar 9.978 ribu rupiah/orang/tahun, menurun pada Tahun 2020 menjadi sebesar 9.875 ribu rupiah/orang/tahun. Penurunan yang relatif kecil merupakan akibat dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian secara global menurun yang tentunya juga berdampak pada Kabupaten Lampung Selatan dan mengindikasikan peningkatan daya beli masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan pada Tahun 2021, rata-rata pengeluaran kembali meningkat sebagai dampak dari upaya pemulihan ekonomi menjadi sebesar 9.931 ribu

rupiah/orang/tahun. Dan pada Tahun 2023 kembali meningkat hingga mencapai angka 10.617 ribu rupiah/orang/tahun.

Tabel 2.35 Rata-rata pengeluaran per Kapita Kabupaten Lampung Selatan (Ribu Rupiah/Tahun), 2019-2023

Tahun	Rata-rata pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Tahun)
2019	9.978
2020	9.875
2021	9.931
2022	10.226
2023	10.617

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2024

2.2.2 Kesejahteraan Sosial dan Budaya

2.2.2.1 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan dalam Pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari indeks pemberdayaan gender, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan untuk pembangunan di bidang anak diukur melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Tabel 2.36 Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lampung Selatan, 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,40	59,59	59,27	59,37	59,59
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,54	89,60	89,61	89,78	89,96

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2024

Dilihat dari data, maka tergambar bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Lampung Selatan. Peningkatan nilai IDG mengindikasikan pemberdayaan gender mulai diperhatikan melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen, dalam pengambilan keputusan terkait kedudukan dan jabatan professional, serta

sumbangan pendapatan perempuan dalam perekonomian. Walaupun demikian, angka tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan IDG Nasional yang mencapai 76,59 pada Tahun 2023. Ini berarti bahwa peran aktif perempuan dalam pembangunan di kabupaten Lampung Selatan masih harus lebih didukung, karena peran perempuan cukup memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Indikator yang digunakan untuk mengukur IPG sama dengan indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Menurut Badan Pusat Statistik, nilai IPG berkisar antara 0-100. Ketika angka IPG mendekati 100 maka ketimpangan pembangunan gender semakin rendah, dan sebaliknya ketika nilai IPG semakin jauh dari angka 100 maka ketimpangan pembangunan gender semakin lebar. Dari data pada Tabel di atas terlihat bahwa ketimpangan pembangunan gender semakin mendekati angka 100.

2.2.2.2 Pembangunan Pemuda

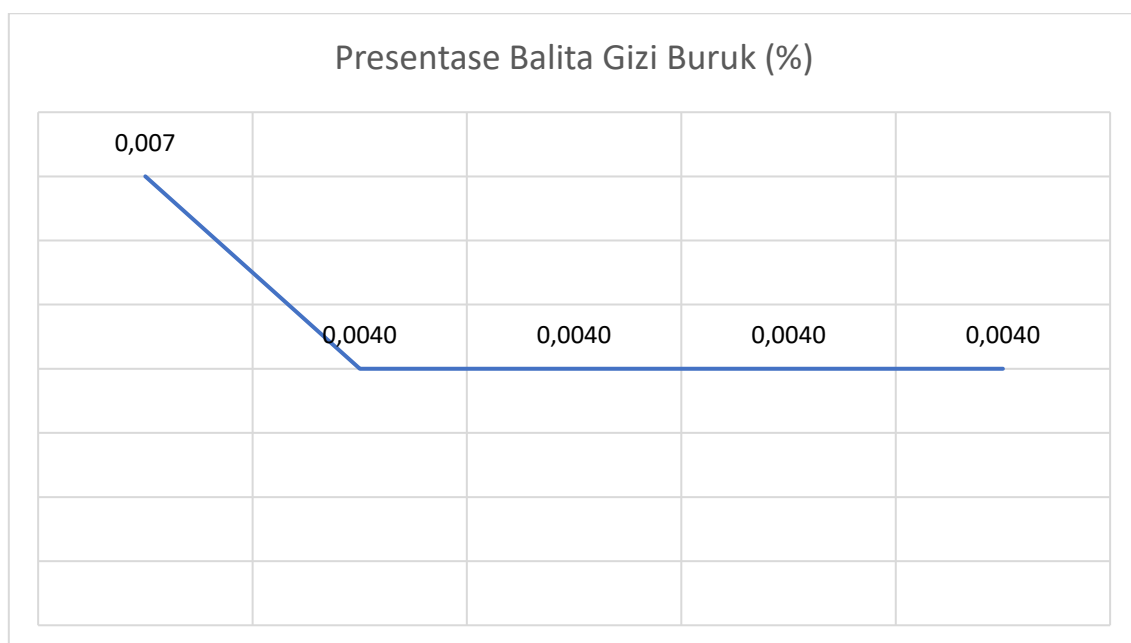
Masalah krisis moral yang dialami pemuda telah meluas dan dapat mengancam masa depan bangsa (dekadensi moral) seperti pengangguran, tindak kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pornografi, perilaku seks bebas, prostitusi, HIV/AIDS, perilaku LGBT dan paham radikalisme. Hal-hal tersebut menyebabkan belum optimalnya potensi pemuda dalam mengaktualisasikan dirinya. Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan di Lampung Selatan belum optimal.

Merujuk pada dokumen RPJPD Provinsi Lampung Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Lampung tahun 2020 sebesar 49,53 persen, masih dibawah rata-rata nasional yang sebesar 51 persen. Merujuk data Statistik Pemuda Tahun 2022, persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 23,39 persen dari jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut 39,50 persen pemuda di Lampung telah tamat pendidikan SMP, 37,30 persen tamat SMA dan 8,23 persen tamat perguruan tinggi. Sehingga dapat diketahui bahwa potensi pemuda di Provinsi Lampung belum maksimal, yang pada akhirnya menimbulkan fenomena tawuran, *bullying*, balapan liar, dan sebagainya.

2.2.2.3 Balita Gizi Buruk

Balita gizi kurang adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan gabungan dari istilah gizi buruk dan gizi kurang dengan Z score < -2 standar deviasi. Balita pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) yang merupakan gabungan dari istilah sangat pendek dan pendek dengan Z score < -2 standar deviasi. Balita kurus adalah Status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang merupakan gabungan dari istilah sangat kurus dan kurus dengan Z score < -2 standar deviasi. Z Score merupakan nilai simpangan berat badan atau tinggi badan dari nilai berat badan atau tinggi badan normal menurut baku pertumbuhan WHO.

Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Cara perhitungan *underweight* adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U). Berikut adalah standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: Batas gizi buruk pada balita adalah < -3.0 SD baku WHO.



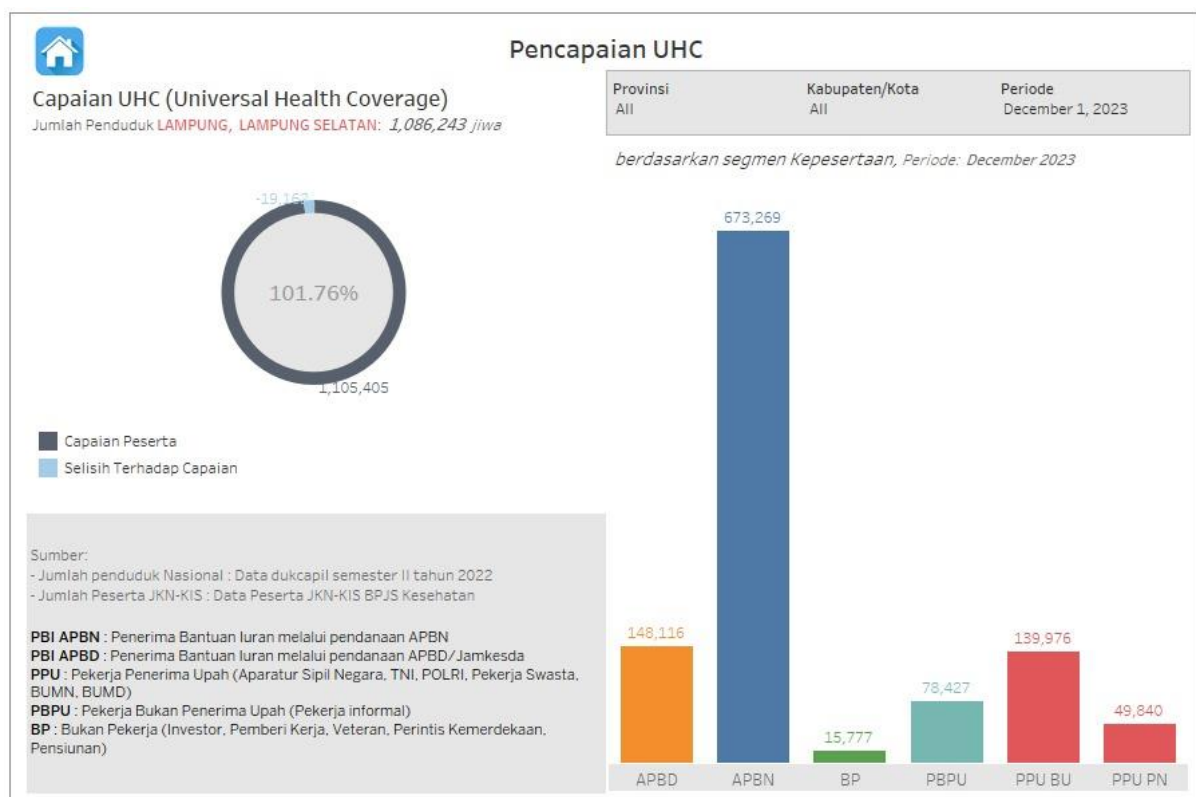
Gambar 2.26 Presentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2023 (data diolah)

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa presentase gizi buruk di Kabupaten Lampung Selatan berada di bawah ambang batas atas standar batas gizi buruk menurut WHO dan Kementerian Kesehatan RI, yaitu berada pada posisi 0,7 persen di tahun 2019, dan turun hingga hanya mencapai 0,4 persen sampai dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa program kesehatan di Lampung Selatan berjalan dengan baik.

Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas di dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Pembangunan berkelanjutan memerlukan usaha konkrit untuk mengurangi kemiskinan serta mencari solusi menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi.

2.2.2.4 UHC Lampung Selatan

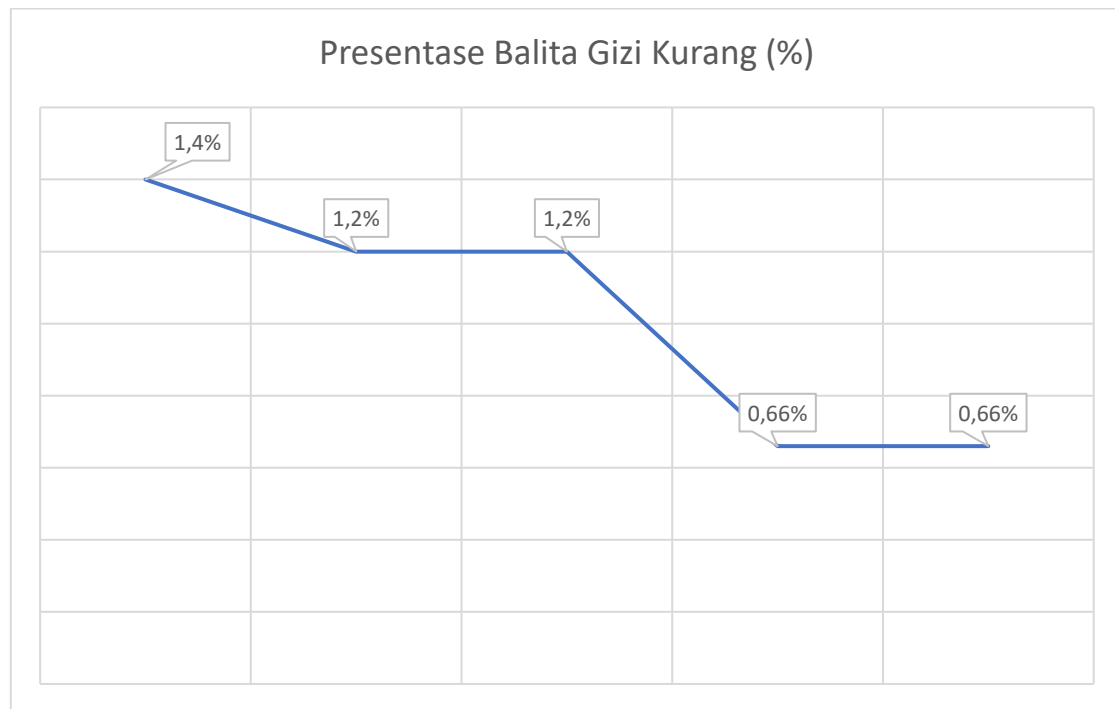
Berdasarkan data UHC Kabupaten Lampung Selatan memperoleh capaian UHC sebesar 1.086.243 Jiwa dengan ketercapaian hingga mencapai 101.76%.



Gambar 2.27 Presentase Capaian UHC Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.2.2.5 Balita Gizi Kurang

Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Berikut adalah standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: batas gizi kurang pada balita yaitu antara < -2.0 SD sampai dengan -3.0 SD baku WHO.



Gambar 2.28 Presentase Balita Gizi Kurang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Sementara itu, gambar di atas menunjukkan presentase gizi kurang di Kabupaten Lampung Selatan yang juga mengalami tren menurun selama lima tahun terakhir. Data di atas juga mengindikasikan bahwa presentase balita gizi kurang di Lampung Selatan berada di bawah ambang batas atas yang telah ditetapkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan RI.

2.2.2.6 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas

(42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah.

Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:

1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan Kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan.
2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat.
3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu.
5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.

Tabel 2.37 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Ibu (AKI)	42,7	38,03	62,33	29,43	41,24

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan fluktuatif sepanjang lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa di

Kabupaten Lampung Selatan terus terjadi peningkatan dan penurunan kualitas kesehatan Masyarakat khususnya ibu hamil. Hingga tahun 2023, Angka Kematian Ibu Kabupaten Lampung Selatan mencapai 41,24% per tahun.

2.2.2.7 Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010.

Tabel 2.38. Prevalensi Stunting di Kabupaten Lampung Selatan

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi Stunting	37,7	3,61	2,42	2,04	-15,69

Sumber: Dinas Kesehatan Lampung Selatan

Dapat dilihat pada tabel diatas penurunan prevalensi sangat signifikan, hal tersebut adalah hasil dari kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam pengentasan permasalahan Stunting di Kabupaten Lampung Selatan.

2.2.2.8 Insidensi Tuberkulosis (TB)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.

Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting:

1. Penemuan Kasus: ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.
2. Pengobatan Kasus: ini merujuk pada kemampuan sistem Kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis (TB).

Tabel 2.39. Insidensi Tuberkulosis di Kabupaten Lampung Selatan

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>case detection rate</i>) (%)	67	37,00	41,00	54,00	43,24
Angka Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment succes rate</i>) (%)	99	100	96,20	96,40	96,40

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

Tabel diatas adalah data cakupan penemuan kasus tuberkulosis di Kabupaten Lampung Selatan, pada tahun 2023 Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (*case detection rate*) sebesar 43,24% cenderung menurun dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 54,00% dengan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) secara yang cenderung statis yaitu sebesar 96,40%.

2.2.2.9 Penyakit Menular Lainnya

Penyakit menular atau penyakit infeksi adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi (seperti virus, bakteri atau parasit), bukan disebabkan faktor fisik atau kimia. Cara penularan penyakit ini melalui 2 cara, yaitu: 1) Media langsung dari orang ke orang; dan 2) Media udara.

Tabel 2.40 Jumlah Penderita Penyakit Menular Tahun 2019-2023

No	Nama Penyakit	2019	2020	2021	2022	2023
1	Muntaber/Diare	18.397	13.045	27.443	28.048	28.048
2	Demam Berdarah	457	462	246	264	264
3	Infeksi Saluran Pernafasan	1.830	1.389	1.101	972	972
4	Campak	29	13	2	20	20
5	Malaria	105	36	-	-	-
6	HIV/AIDs	-	1.165	904	1.125	897

Sumber: Dinas Kesehatan Lampung Selatan, 2023

2.2.2.10 Angka Kesakitan

Tabel 2.41 Angka Kesakitan

Keterangan	2022		2023	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Angka Kesakitan Kabupaten Lampung Selatan	13,40	16,11	5,18	5,82

Sumber: Dinas Kesehatan Lampung Selatan, 2023

2.3 Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produktivitas merupakan salah satu indikator paling penting dalam aktivitas ekonomi. Produktivitas merupakan kunci pendorong vital dalam pertumbuhan ekonomi, yakni sebagai daya ungkit (*leverage*) bagi pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Salah satu kriteria yang sering digunakan untuk mengetahui keadaan perekonomian di suatu daerah adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.

Sektor berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 (tujuh belas) sektor/lapangan usaha, yaitu Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan, Pertambangan Dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik Dan Gas, Pengadaan Air, Sampah Dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar Dan Eceran, Transportasi Dan Pergudangan, Informasi Dan Komunikasi, Jasa Keuangan Dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Selatan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari tahun 2019-2023 (Milyar rupiah) adalah sebesar 30.267,88; 29.743,30; 33.528,67 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 44.685; 44.293,00; 46.090,82; 51.480,77; 55.759,40. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas total daerah per sektor/lapangan usaha (ADHK dan ADHB) di Kabupaten Lampung Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.42 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023
(Milyar Rupiah)

Kategori	PDRB KAB. LAMPUNG SELATAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (Milyar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.402,26	8.487,56	8.541,41	8.770,85	8.781,34
B. Pertambangan dan Penggalian	496,62	494,35	470,82	480,76	490,10
C. Industri Pengolahan	7.228,93	6.932,86	7.145,69	7.311,10	7.487,11
D. Pengadaan Listrik dan Gas	40,17	42,01	43,91	46,02	47,36
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	36,10	37,44	38,36	40,38	42,19
F. Konstruksi	3.911,88	3.775,26	3.982,00	4.270,41	4.622,69
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.956,56	3.908,45	4.085,04	4.535,51	5.141,10
H. Transportasi dan Pergudangan	1.807,87	1.533,74	1.535,38	1.736,79	1.932,07
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	406,38	389,75	391,31	433,31	483,35
J. Informasi dan Komunikasi	1.084,56	1.179,04	1.248,75	1.260,15	1.316,87
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	497,50	519,98	536,33	526,84	530,54
L. Real Estate	703,50	690,68	706,30	722,44	733,08
M,N. Jasa Perusahaan	24,64	24,22	24,59	28,24	28,75
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	603,45	633,04	658,55	653,47	663,15
P. Jasa Pendidikan	715,56	733,76	743,31	761,93	781,25
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	173,31	190,16	196,69	196,50	203,77
R,S,T,U. Jasa Lainnya	178,59	171,00	168,98	211,55	243,96
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	30.267,88	29.743,30	30.517,40	31.986,26	33.528,67

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2024

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Dari Tabel 2.39 di atas dapat diketahui bahwa jumlah PDRB Kabupaten Lampung Selatan atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha relatif meningkat dari tahun ke tahun, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor unggulan yang mampu memberikan sumbangan terbesar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2019 hingga 2023, yakni dengan persentase kontribusi sebesar 26,78% dari total keseluruhan PDRB ADHK. Selanjutnya sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 23,41% dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang memberikan kontribusi sebesar 14,75%.

Tabel 2.43 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023
(Milyar Rupiah)

Kategori	PDRB KAB. LAMPUNG SELATAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (Milyar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.732,05	13.060,98	13.278,98	14.381,35	14.932,24
B. Pertambangan dan Penggalian	714,48	724,57	703,48	746,49	784,92
C. Industri Pengolahan	10.963,94	10.639,86	11.257,90	12.209,23	13.055,06
D. Pengadaan Listrik dan Gas	49,82	51,84	54,18	59,36	61,76
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	54,60	57,91	59,39	65,33	70,71
F. Konstruksi	5.701,95	5.491,43	5.967,11	6.863,53	7.553,84
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.447,10	5.513,37	5.765,84	7.100,18	8.224,55
H. Transportasi dan Pergudangan	2.847,09	2.337,56	2.346,16	2.981,97	3.587,64
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	669,46	645,11	656,61	744,90	841,44
J. Informasi dan Komunikasi	1.231,14	1.335,51	1.384,55	1.409,59	1.489,74
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	752,42	782,15	851,07	909,99	920,19
L. Real Estate	956,67	959,50	983,29	1.044,98	1.103,09
M,N. Jasa Perusahaan	38,50	38,60	39,52	47,17	51,24
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	973,55	1.033,60	1.072,00	1.092,68	1.121,73
P. Jasa Pendidikan	1.043,18	1.098,40	1.134,38	1.204,35	1.266,53
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	246,21	272,54	287,39	296,18	311,25
R,S,T,U. Jasa Lainnya	263,21	250,07	248,95	323,50	383,48
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	44.685,37	44.293,00	46.090,82	51.480,77	55.759,40

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2023

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan serta dapat juga digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Dari Tabel 2.40 di atas, jumlah PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan menurut lapangan usaha cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor unggulan yang mampu memberikan sumbangan terbesar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2019 hingga 2024, yakni dengan persentase kontribusi sebesar 30% dari total keseluruhan PDRB ADHB. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap perekonomian baik terhadap struktur, laju pertumbuhan ekonomi maupun terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 2.44 Kontribusi Sektor PDRB berdasarkan Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023

Kategori	DISTRIBUSI PDRB KAB. LAMPUNG SELATAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,76%	28,54%	27,99%	27,42%	26,19%
B. Pertambangan dan Penggalian	1,64%	1,66%	1,54%	1,50%	1,46%
C. Industri Pengolahan	23,88%	23,31%	23,42%	22,86%	22,33%
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,13%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
F. Konstruksi	12,92%	12,69%	13,05%	13,35%	13,79%
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,07%	13,14%	13,39%	14,18%	15,33%
H. Transportasi dan Pergudangan	5,97%	5,16%	5,03%	5,43%	5,76%
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,34%	1,31%	1,28%	1,35%	1,44%
J. Informasi dan Komunikasi	3,58%	3,96%	4,09%	3,94%	3,93%
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64%	1,75%	1,76%	1,65%	1,58%
L. Real Estate	2,32%	2,32%	2,31%	2,26%	2,19%
M,N. Jasa Perusahaan	0,08%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,99%	2,13%	2,16%	2,04%	1,98%
P. Jasa Pendidikan	2,36%	2,47%	2,44%	2,38%	2,33%
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,57%	0,64%	0,64%	0,61%	0,61%
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,59%	0,57%	0,55%	0,66%	0,73%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2024

Kaitan dengan produktivitas dimana sektor yang memberikan kontribusi dan membuat daya ungkit (*leverage*) bagi pertumbuhan ekonomi adalah sektor/lapangan usaha, yaitu Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan, Pertambangan Dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik Dan Gas, Pengadaan Air, Sampah Dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar Dan Eceran, Transportasi Dan Pergudangan, Informasi Dan Komunikasi, Jasa Keuangan Dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung stabil walaupun sempat terjadi penurunan hingga tahun 2020, namun kembali mencapai di angka 30% di tahun 2020. Sementara, sektor industri pengolahan mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sedangkan sektor konstruksi serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu hingga tahun 2019, namun terjadi penurunan di tahun 2020 yang disebabkan lesunya perekonomian karena Pandemi Covid-19.

Tabel 2.45 Sektor Basis berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,97	0,99	1,00	1,01	1,02
B. Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29
C. Industri Pengolahan	1,33	1,32	1,27	1,23	1,24
D. /Electricity and Gas	1,01	0,76	0,75	0,74	0,78
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya	1,22	1,20	1,20	1,20	1,18
F. Konstruksi	1,27	1,25	1,28	1,31	1,29
G. Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	1,05	1,04	1,04	1,05	1,12
H. Transportasi dan Pergudangan	1,17	1,16	1,15	1,12	1,01
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,96	0,95	0,93	0,90	0,90
J. Informasi dan Komunikasi	0,77	0,74	0,73	0,73	0,73
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,84	0,83	0,82	0,82	0,82
L. Real Estat	0,77	0,77	0,77	0,76	0,76
M,N. Jasa Perusahaan	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59
O. Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
P. Jasa Pendidikan	0,84	0,83	0,82	0,81	0,79
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,68	0,64	0,63	0,62	0,63

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2024

Sektor basis merupakan sektor unggulan, dimana sektor yang bersangkutan bisa memenuhi kebutuhan dalam maupun luar daerah dan sangat berpotensi positif pada perekonomian daerah apabila dikembangkan dengan tepat. Berdasarkan Tabel 2.42 di atas diperoleh data bahwa sektor basis di Kabupaten Lampung Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat 6 sektor ($LQ > 1$), yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya; Sektor Konstruksi; serta Sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan, sedangkan 11 sektor lainnya termasuk sektor non basis.

Berdasarkan kondisi ini kaitannya dengan produktivitas daerah bahwa sektor -sektor yang menjadi sektor basis merupakan sektor kuat disebabkan karena nilai yang lebih besar dari satu ($LQ > 1$). Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor tersebut potensial dalam menunjang perekonomian Kabupaten Lampung Selatan (mampu memenuhi kebutuhan internal) dan mempunyai

kemampuan untuk ekspor/memenuhi kebutuhan daerah lain. Sedangkan yang menjadi sektor non basis yaitu sektor-sektor yang nilainya lebih kecil dari satu ($LQ < 1$) sehingga menyebabkan sektor-sektor ini mempunyai kecenderungan untuk impor dari daerah lain. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dengan adanya ekspor maka Kabupaten Lampung Selatan akan memperoleh pendapatan. Dengan adanya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di Kabupaten Lampung Selatan, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru.

2.3.1.2 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita. Indikator pendapatan per kapita dapat juga digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah berdasarkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, apabila disertai dengan upaya pengendalian jumlah penduduk. PDRB ADHK per kapita menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan per kepala atau per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Tabel 2.46 PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2023 (Rp/Jiwa)

Tahun	PDRB ADHB Per Kapita	PDRB ADHK Per Kapita
2019	44.129.169	29.891.130
2020	41.704.922	28.005.367
2021	42.846.721	28.369.435
2022	47.210.058	29.332.760
2023	50.461.132	30.342.760

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2024 (data diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa trend laju pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2020 mengalami penurunan, namun kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2021

sampai 2023, baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2023 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 50.461.132, sementara berdasarkan harga konstan mencapai Rp. 30.342.766. PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain dipengaruhi inflasi yang berdampak terhadap daya beli, juga karena pola distribusi pendapatan regional Lampung Selatan yang tidak mutlak merata.

2.3.1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

Tabel 2.47 Kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pembentukan PMTB (% PDRB)	37,45	36,41	36,57	35,01	35,29

Sumber: Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Dapat dilihat pada tabel diatas merupakan kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Pengeluaran atas dasar harga konstan, pada tahun 2019 kontribusi PMTB adalah sebesar 37,45% dan berangsur-angsur turun hingga pada tahun 2023 hanya sebesar 35,29%.

2.3.1.4 Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat

terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan.

Tabel 2.48 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	0,20	0,21	0,56	3,30	2,54

Sumber: Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Dapat dilihat pada Tabel diatas bahwa kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan terjadi kenaikan secara signifikan, pada tahun 2019 kontribusi ekspor barang dan jasa sebesar 0,20% terhadap PDRB dan terakhir pada tahun 2023 melonjak menjadi 2,54% dan merupakan penurunan dari sebelumnya tahun 2022 yang sebesar 3,30%.

Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu daerah dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan maka pendapatan negara juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.

2.3.1.5 Jumlah Wisatawan Mancanegara

Menurut *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO), wisatawan mancanegara adalah setiap orang yang berkunjung ke suatu negara di luar tempat tinggalnya untuk beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya

kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 bulan. Definisi ini mencakup dua kategori tamu mancanegara yaitu:

- a. Wisatawan (*tourist*) adalah setiap pengunjung yang datang ke suatu tempat dan tinggal di tempat tersebut tidak lebih dari dua belas 12 bulan dengan maksud kunjungan antara lain: berlibur, rekreasi dan olahraga bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar, dan keagamaan.
- b. Pelancong (*excursionist*) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal ditempat tersebut kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk cruise passenger yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu tempat dengan menggunakan kapal atau kereta api, dan mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

Tabel 2.49 Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Wisatawan Mancanegara	213	135	6.229	64	17

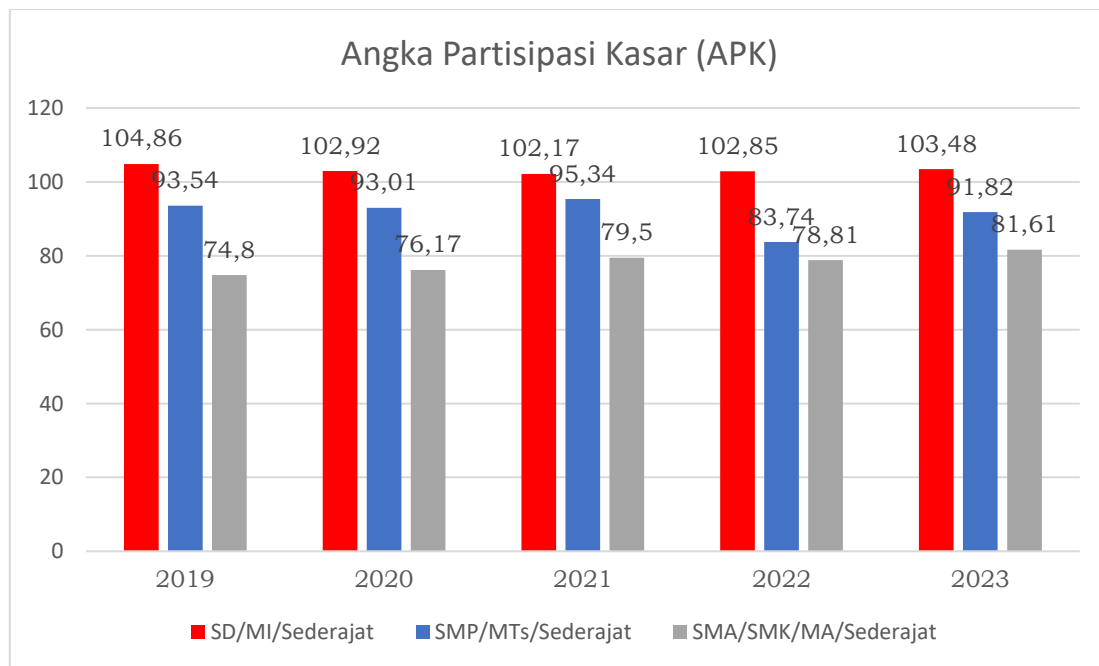
Sumber: Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Dapat dilihat dari tabel diatas menunjukkan data kunjungan wisatawan mancanegara Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan penurunan secara drastis dari tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 6.229 terjadi penurunan hingga hanya 17 kunjungan pada tahun 2023.

2.3.2 Daya Saing SDM

2.3.2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Daya saing SDM dapat dicerminkan oleh beberapa indikator, diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam kelompok usia. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

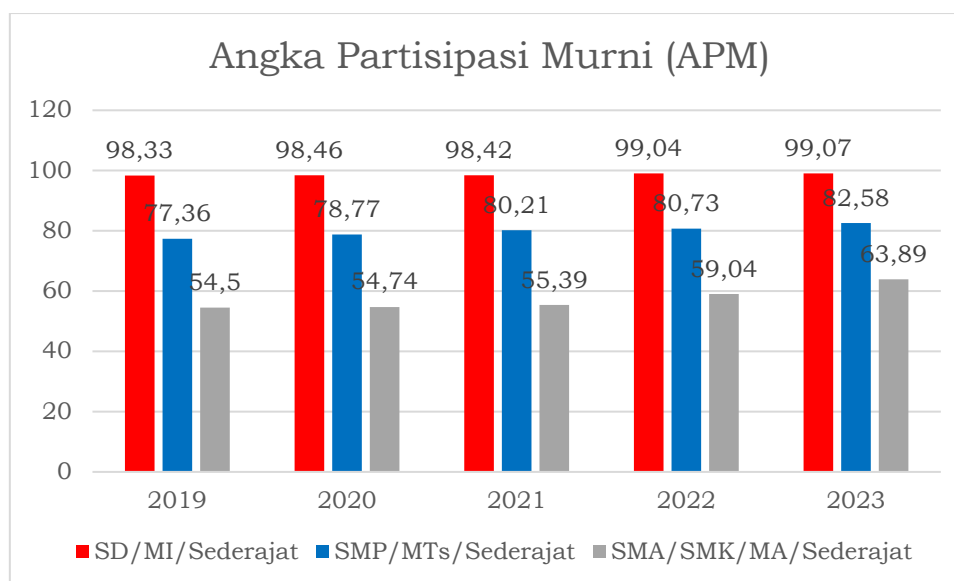


Gambar 2.29 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2019-2023
Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2024

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 APK kelompok sekolah dasar di Kabupaten Lampung Selatan berada pada angka 104,86 dan menurun pada tahun berikutnya sebesar 2,74 poin dan berada pada nilai APK 104,86 di tahun 2019. Tren negatif ini terus berlanjut hingga tahun 2021 yang mencapai posisi 102,17. Hal serupa terjadi pada jenjang sekolah menengah pertama yang pada tahun 2019 berada pada angka 93,54 melemah hingga 0,53 poin pada tahun 2023 menjadi APK Sekolah Menengah Pertama 84,74. Berbeda dengan kelompok sebelumnya, APK pada kelompok menengah atas justru mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, APK kelompok SLTA/MA sederajat tercatat sebesar 74,8 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 hingga mencapai nilai APK 81,61.

2.3.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan Dasar dan Menengah pertama yang masih bersekolah pada jenjang Pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2.30 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2019-2023
Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2024

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa APM di kelompok sekolah dasar cenderung terjadi peningkatan APM hingga tahun 2023 terhadap tahun sebelumnya yakni dari nilai APM 98,33 di tahun 2019. Pada kelompok sekolah menengah pertama terjadi tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2023, dimana APM kelompok sekolah menengah pertama mencapai 82,58. Sama halnya dengan kelompok sekolah menengah pertama, APM sekolah menengah atas tahun 2019 berkisar di angka 54,5, namun pada tahun 2023 meningkat relatif besar hingga mencapai 63,89. Hal ini tentu menggembirakan bagi pemerintah daerah, karena dapat dianggap berhasil dalam meningkatkan akses pendidikan kepada masyarakat.

2.3.2.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. APS ini juga memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. APS di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	07 – 12 (Sekolah Dasar)	99,82	99,78	100	99,80	99,72
2	13–15 (Sekolah Menengah Pertama)	98,32	94,76	93,31	93,42	93,98
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/MA)	59,04	65,90	71,83	71,93	72,36

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Lampung Selatan pada rentang usia 7-12 memiliki tren stabil selama rentang waktu 2019-2023, yaitu berkisar di angka 99%. Namun persentase APS usia Sekolah Dasar di Lampung Selatan masih sedikit lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata APS Provinsi Lampung. Selaras dengan kondisi ini pada rentang usia 13-15 tahun menunjukkan tren yang juga fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2019 APS berada pada angka 98,32 dan kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun berikutnya dan berada pada APS 94,76 poin. Penurunan APS pada kelompok SMP/MTs sederajat ini berlangsung hingga tahun 2023 yang mencapai APS 93,98. Sementara, APS pada kelompok sekolah menengah atas bergerak stabil, pada tahun 2021 diketahui APS kelompok SLTA/MA sederajat berada pada posisi 71,83 dan sedikit meningkat pada tahun 2022 menjadi 72,36. Walaupun peningkatan yang relatif kecil, namun APS kelompok SLTA/MA sederajat Lampung Selatan ini berada di atas rata-rata APS Provinsi Lampung.

2.3.2.4 Minat Baca

Minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Seseorang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkan dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadaran sendiri atau dorongan dari luar.

Sedangkan tujuan membaca adalah untuk mendapatkan informasi. Informasi yang dimaksud disini mencakup informasi bisa tentang fakta dan kejadian sehari-hari sampai informasi tingkat tinggi tentang teori-teori serta penemuan dan temuan ilmiah yang canggih. Tujuan ini mungkin berkaitan dengan keinginan pembaca untuk mengembangkan diri, tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Makna atau arti (meaning) erat sekali berhubungan dengan maksud tujuan atau intensif kita dalam membaca.

Tabel 2.51 Persentase Jumlah Masyarakat yang Minat Membaca di Perpustakaan

Indikator	2021	2022	2023
Minat Baca Masyarakat	90%	67,55%	66%

Sumber: LKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung Selatan, 2023

2.3.2.5 Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah di Kabupaten Lampung selatan pada tahun 2019 terdapat 0,17 persen pada jenjang sekolah menengah pertama dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 0,005 persen. Angka yang sama pula terjadi pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 APS kembali meningkat menjadi 0,06 dan di tahun 2023 kondisi ini meningkat hingga mencapai 1,33. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52 Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Putus Sekolah	0,17	0,005	0,005	0,06	1,33

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2023

2.3.2.6 Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan, angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Angka Kelulusan di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53 Angka Kelulusan (AL) Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	95,03	99,35	98,26	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	94,40	99,13	98,19	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Lampung Selatan pada kedua jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengalami penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2020 angka kelulusan sekolah dasar ada pada angka 99,35 persen dan sekolah menengah pertama ada pada angka 99,13 persen dan pada tahun berikutnya masing-masing mengalami penurunan 1,09 persen dan 0,94 persen menjadi 98,26% pada jenjang sekolah dasar dan 98,19 persen pada jenjang sekolah menengah pertama. Namun, pada tahun 2019, AL mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 100 persen untuk ke dua jenjang pendidikan. Hal

ini mengindikasikan bahwa di tahun 2019, semua siswa di kedua jenjang tersebut berhasil lulus sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan di Lampung Selatan berhasil dalam meluluskan semua siswanya.

2.3.2.7 Angka Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase

Rasio Ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif. Penduduk muda atau penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggung nya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun atau lebih dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun kerja. Penduduk berusia 15 sampai 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif dan memiliki potensi ekonomi dalam pembangunan.

Tabel 2.54 Angka Ketergantungan, 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Ketergantungan	*	*	*	47,31	48,51

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2024

*data pada tahun tersebut tidak tersedia

2.3.2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah sebuah indikator penting yang menggambarkan seberapa aktif penduduk usia produktif dalam dunia kerja. Sederhananya, TPAK menunjukkan persentase penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang sudah, sedang, atau mencari pekerjaan.

Tabel 2.55 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

No	Indikator	Tahun					
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
		2021		2022		2023	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	85,29	45,84	84,88	45,80	87,63	44,36

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2024

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Fasilitas pendidikan dapat dilihat dari jumlah sekolah di setiap jenjang pendidikan, dari Taman Kanak-Kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), di setiap Kecamatan.

Tabel 2.56 Jumlah Sekolah di Setiap Jenjang Pendidikan di Setiap Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Wilayah	TK			SD			SMP			SMA		
	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
Natar	64	0	64	67	59	8	29	6	23	10	2	8
Jati Agung	41	0	41	52	44	8	29	6	23	10	1	9
Tanjung Bintang	28	1	27	41	37	4	12	3	9	1	1	0
Tanjung Sari	7	0	7	15	15	0	4	3	1	4	1	3
Katibung	6	0	6	30	30	0	7	3	4	2	1	1
Merbau Mataram	17	0	17	29	29	0	11	4	7	3	1	2
Way Sulan	8	0	8	9	8	1	4	1	3	3	1	2
Sidomulyo	13	0	13	37	34	3	10	6	4	4	1	3
Candipuro	12	1	11	26	25	1	10	3	7	3	1	2
Way Panji	6	0	6	9	9	0	3	1	2	0	0	0
Kalianda	19	1	18	45	42	3	12	7	5	7	2	5
Rajabasa	3	0	3	18	18	0	4	2	2	2	1	1
Palas	5	0	5	38	38	0	6	4	2	2	1	1
Sragi	7	0	7	19	19	0	5	4	1	1	1	0
Penengahan	7	0	7	30	30	0	3	2	1	2	1	1
Ketapang	9	0	9	26	26	0	6	4	2	4	1	3
Bakauheni	5	0	5	11	9	2	4	3	1	1	1	0
Lampung Selatan	257	3	254	502	472	30	159	62	97	59	18	41

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Lampung Selatan jumlah sekolah di setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan tidak mengalami perubahan yang signifikan baik sekolah negeri maupun swasta. Di Tahun 2023, penambahan hanya sebanyak 1 sekolah untuk jenjang pendidikan SD, 4 sekolah untuk jenjang pendidikan SMP, 5 sekolah untuk jenjang pendidikan SMA, 7 sekolah untuk jenjang pendidikan SMK, dan untuk Perguruan Tinggi jumlahnya tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 5 Perguruan Tinggi.

Dari total sekolah seperti yang tersaji pada tabel di atas, semua bangunan sekolah di setiap jenjang pendidikan di Lampung Selatan dalam kondisi baik, atau dengan kata lain telah mencapai 100 persen untuk kategori kondisi bangunan sekolah baik.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.57 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Uraian	Jumlah
Jumlah Penduduk Usia Sekolah Dasar	99.008
Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar	496
Rasio	50,01

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2023 mencapai 50,01. Artinya, dari setiap 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar di Lampung Selatan, terdapat kurang lebih 50 jumlah sekolah yang dapat menampung.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini

mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.

Tabel 2.58 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Uraian	Jumlah
Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Menengah	35.264
Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah	146
Rasio	41,40

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2023 mencapai 41,40 Artinya, dari setiap 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan Menengah di Lampung Selatan, terdapat kurang lebih 41 jumlah sekolah yang dapat menampung.

Selain infrastruktur pendidikan, infrastruktur Kesehatan juga menjadi bagian penting untuk menjadi perhatian dalam rencana pembangunan. Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Jumlah fasilitas pelayanan Posyandu di Kabupaten Lampung Selatan terus meningkat namun jangkauan pelayanan belum optimal, ini ditunjukkan dari belum maksimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan. Hal ini disebabkan pembiayaan kesehatan belum menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Lampung Selatan khususnya masyarakat miskin yang belum mempunyai kartu jaminan kesehatan.

Tabel 2.59 Rasio Posyandu Per-Satuan Balita, 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Posyandu per-satuan balita	0,06	0,09	0,33	1,1	1,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

Tabel di atas menunjukkan, masih rendahnya rasio posyandu terhadap jumlah balita. Diketahui bahwa pada tahun 2019, rasio ini hanya sebesar 0,06. Artinya, dari 1.000 balita yang ada di Kabupaten Lampung Selatan hanya terdapat kurang lebih 1 posyandu saja. Namun angka ini mengalami peningkatan hingga tahun 2023 telah mencapai 1,1.

Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kebutuhan dasar masyarakat. Sebagai ujung tombak program-program kesehatan tentu saja rasio pelayanan unit kesehatan terhadap satuan penduduk menjadi salah satu tolak ukur dalam hal ketercapaian program kesehatan. Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2019 tercatat puskesmas per-1000 penduduk sebesar 0,032, Poliklinik per-1000 penduduk 0,052, dan puskesmas pembantu 0,075. Pada tiap tahunnya rasio ini mengalami trend peningkatan yang positif. Pada tahun 2020 telah tercatat rasio puskesmas per-1000 penduduk sebesar 0,03, Poliklinik per-1000 penduduk 0,05, dan puskesmas pembantu 0,087.

Tabel 2.60 Rasio Pelayanan Unit Kesehatan Per-Satuan Penduduk, 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio puskesmas per-satuan penduduk	0,032	0,031	0,034	0,034	0,031
2	Rasio Poliklinik per-satuan penduduk	0,052	0,051	0,044	0,061	0,050
3	Puskesmas Pembantu per-satuan penduduk	0,075	0,075	0,085	0,085	0,087

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk dari tahun 2019 sampai dengan 2023 terhitung konstan di angka 0,003, hal ini terjadi karena jumlah rumah tidak bertambah dan jumlah pertumbuhan penduduk cenderung sangat sedikit, sehingga rasio Rumah Sakit per jumlah penduduk statis di angka 0,003. Berikut adalah tabel jumlah dan rasio rumah sakit penduduk tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 2.61 Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk, 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Sakit	3	3	3	3	3
2	Jumlah Penduduk	982.885	992.763	1.002.285	1.045.662	1.064.301
3	Rasio	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam meningkatkan kegiatan perekonomian dalam hal distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Secara umum jaringan jalan di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari jaringan jalan Nasional, Jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan kabupaten dengan total ruas panjang jalan sepanjang 1.499,30 km dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.62 Panjang Jalan di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020-2023 (km)

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Panjang Jalan	1.240,41	1.284,78	1.284,78	1.204

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Ketersediaan panjang jalan di Kabupaten Lampung Selatan relatif tidak berkembang, bahkan ada penurunan jumlah panjang jalan terutama dari jalan nasional dan provinsi. Sementara panjang jalan kabupaten selama lima tahun terakhir juga tidak bertambah.



Gambar 2.31 Panjang Jalan Menurut Permukaan Jalan
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan 2024

Sedangkan panjang jalan menurut permukaan jalan di Kabupaten Lampung Selatan dengan kondisi permukaan sudah di aspal terus menunjukkan peningkatan pada 2020 panjang jalan yang sudah diaspal sepanjang 1.013,80 Km sementara pada tahun 2021 panjang jalan yang sudah diaspal telah mencapai 1.061,80 Km. Pada tahun 2022 tidak ditemukan data panjang jalan menurut kondisi permukaan jalan.

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dilintasi oleh 5 (lima) jaringan jalan yang merupakan lintasan jalan yang dominan bagi pergerakan kendaraan baik lokal, regional maupun lintas terusan, yaitu:

- 1) Jalan Lintas Tengah, melintasi dari Bakauheni-Bandar Lampung-Kotabumi-Bukit Kemuning-Blambangan Umpu-Batas Sumatera Selatan sepanjang 318,95 Km

- 2) Jalan Lintas Barat, melintasi Bakauheni-Kalianda-Bandar Lampung-Kotabumi-Bukit Kemuning-Liwa-Krui-Pugung Tampak-Batas Bengkulu sepanjang 430,33 Km
- 3) Jalan Lintas Pantai Timur, melintasi dari Bakauheni-Ketapang-Labuhan Maringgai-Sukadana-Menggala-Pematang Panggang-Batas Sumatera Selatan sepanjang 294,04 km, dan
- 4) Jalan Lintas Pantai Barat, melintasi Bakauheni-Bandar Lampung-Pringsewu-Kota Agung-Bengkunat-Biha-Krui-Pugung Tampak-Batas Bengkulu, sepanjang 416,48 km.
- 5) Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,94 km yang merupakan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Penyelenggara angkutan umum jalan raya di Kabupaten Lampung Selatan dikategorikan sebagai angkutan lokal, yaitu berupa angkutan pedesaan. Angkutan pedesaan di Kabupaten Lampung Selatan melayani 9 lintasan trayek dengan jumlah armada 336 unit. Terminal merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sampai saat ini Kabupaten Lampung Selatan memiliki dua terminal penumpang dengan terminal tipe C, yaitu Terminal Kalianda dan Terminal Bunut.

Lebih jauh, Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani.

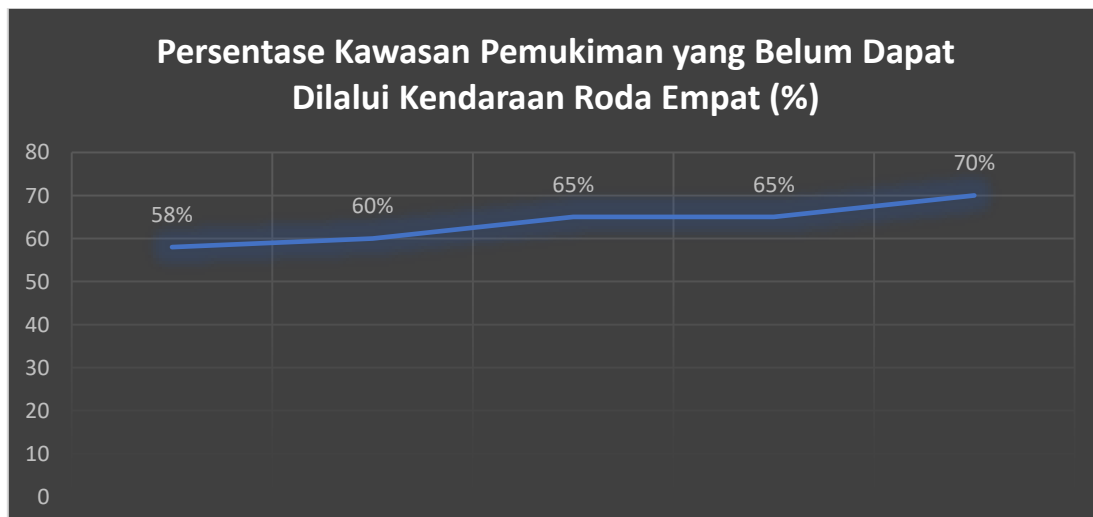
Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.



Gambar 2.32 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk, 2019-2023
Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2024

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk di Lampung Selatan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hingga tahun 2023, rasio ini telah mencapai angka 709,87. Artinya setiap 1 km panjang jalan di Kabupaten Lampung Selatan melayani sekitar 710 jiwa penduduk.

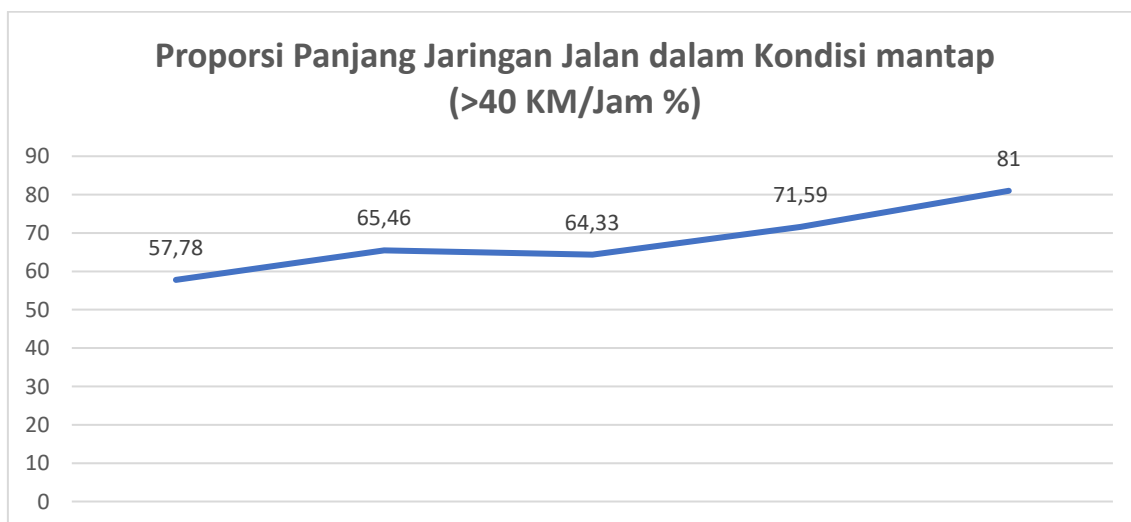
Dari gambar di bawah ini dapat terlihat bahwa presentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 cenderung meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Tampak bahwa di tahun 2019 terdapat 58 persen pemukiman penduduk yang belum dapat dilalui oleh kendaraan roda 4, dan proporsi ini meningkat hingga ke level 70 persen di tahun 2023.



Gambar 2.33 Persentase Kawasan Pemukiman yang belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat, 2019-2023

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan

Dari gambar di bawah ini dapat diketahui bahwa persentase jalan kabupaten Lampung Selatan dalam kondisi mantap atau dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata 40 Km/jam mengalami peningkatan yang signifikan.



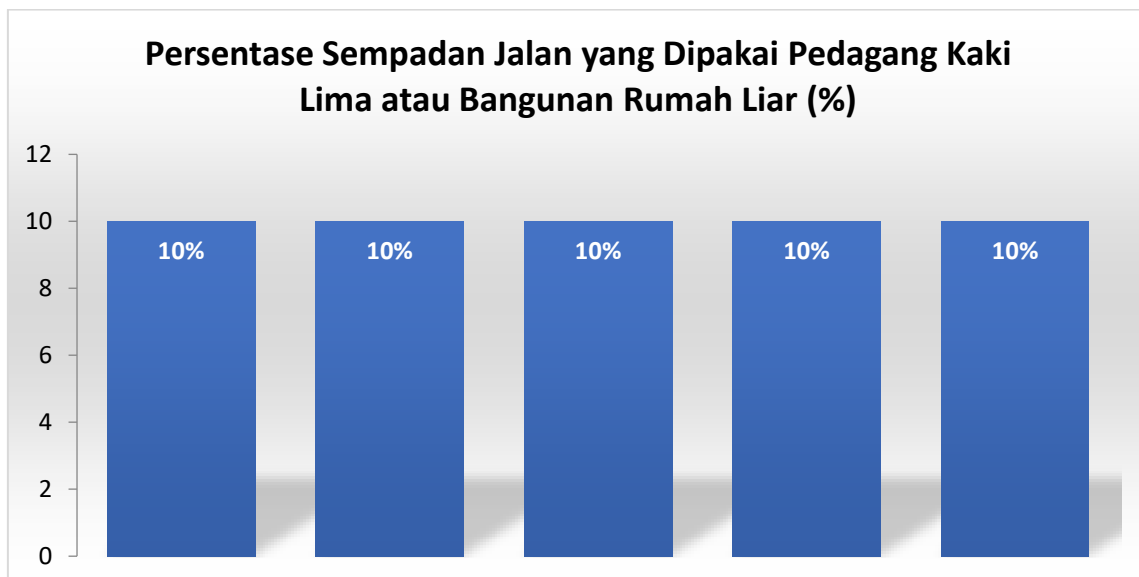
Gambar 2.34 Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (> 40 KM/Jam), 2019-2023

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Gambar di atas menunjukkan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Lampung Selatan untuk periodisasi 2019-2023. Data yang tersaji menunjukkan secara umum adanya tren

peningkatan panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap, yakni pada tahun 2019 terdapat 57,78 persen Panjang jaringan dalam kondisi mantap, dan meningkat hingga 65,46 persen pada tahun 2020. Kemudian panjang jaringan dalam kondisi mantap ini pun kembali meningkat di tahun 2021 yang mencapai 71,59 persen dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan hampir 10 persen sehingga mencapai 81 persen.

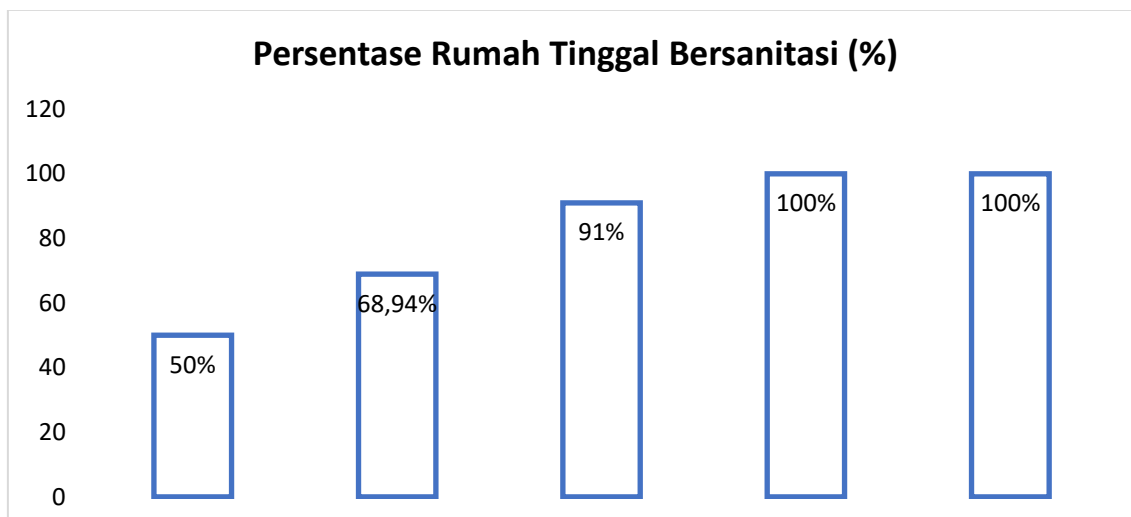
Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun terakhir ini cenderung stabil, yaitu sebesar 10 persen.



Gambar 2.35 Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar, 2019-2023

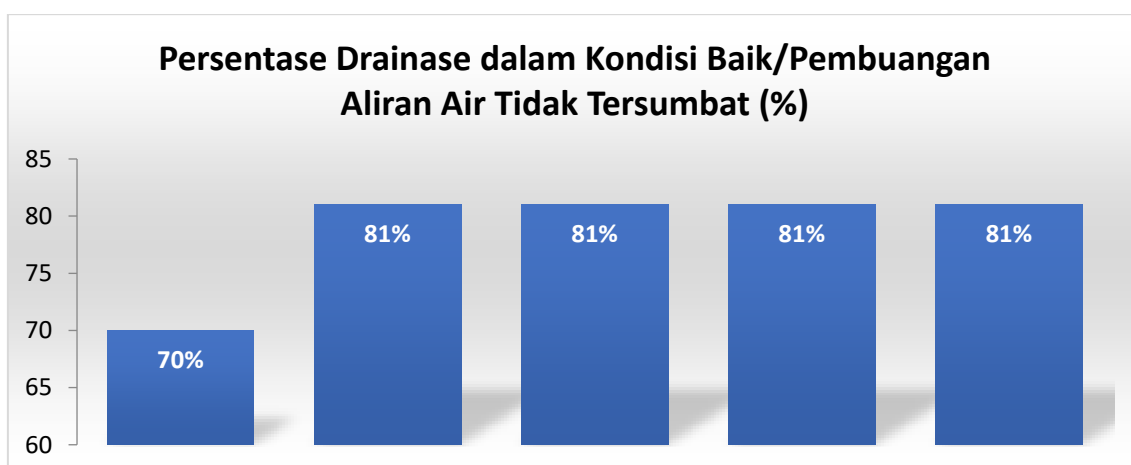
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, 2024 (data, diolah)

Gambar di bawah ini menunjukkan persentase rumah tinggal masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan yang telah memiliki akses sanitasi selama 2019-2023. Dari gambar dapat diketahui bahwa persentase rumah tinggal bersanitasi mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2019 proporsinya hanya 50 persen dan meningkat dua kali lipat di tahun 2022 dan 2023 yaitu telah mencapai 100 persen.



Gambar 2.36 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi, 2019-2023
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, 2024 (diolah)

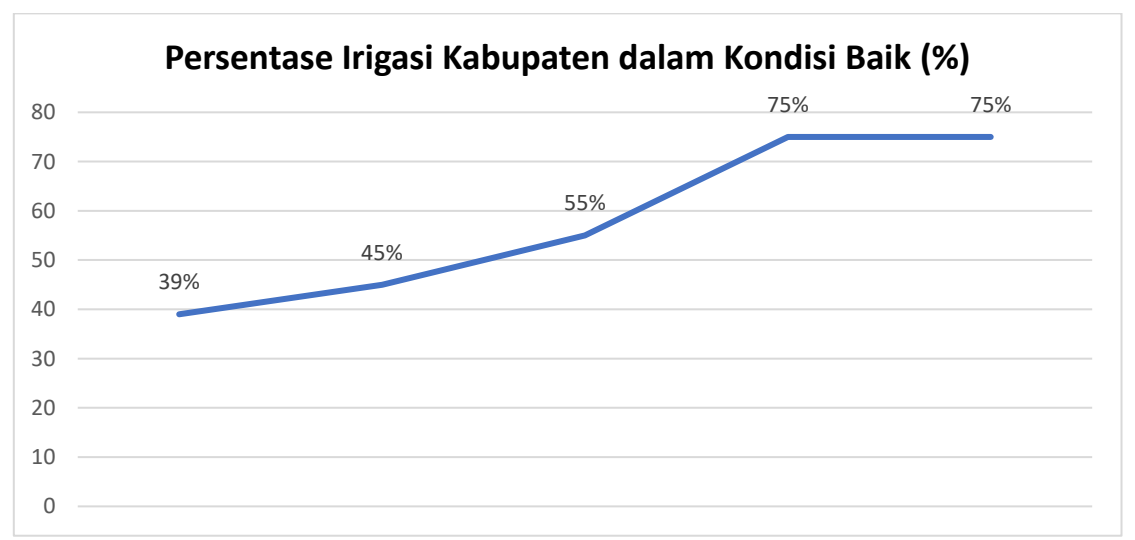
Gambar di bawah ini menunjukkan persentase drainase dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir. Dapat diketahui melalui grafik bahwa pada tahun 2019 persentase drainase dengan status baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat adalah sebesar 70 persen. Persentase ini mengalami peningkatan di tahun-tahun selanjutnya yaitu menjadi 81 persen hingga tahun 2023.



Gambar 2.37 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat, 2019-2023
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Grafik di bawah ini menunjukkan persentase irigasi kabupaten Lampung Selatan dalam kondisi baik. Terjadi peningkatan yang

signifikan terhadap persentase irigasi kabupaten ini. Dimana pada tahun 2019 persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik hanya mencapai 39 persen, dan meningkat hampir dua kali lipat di tahun 2023, yang mencapai 75 persen.

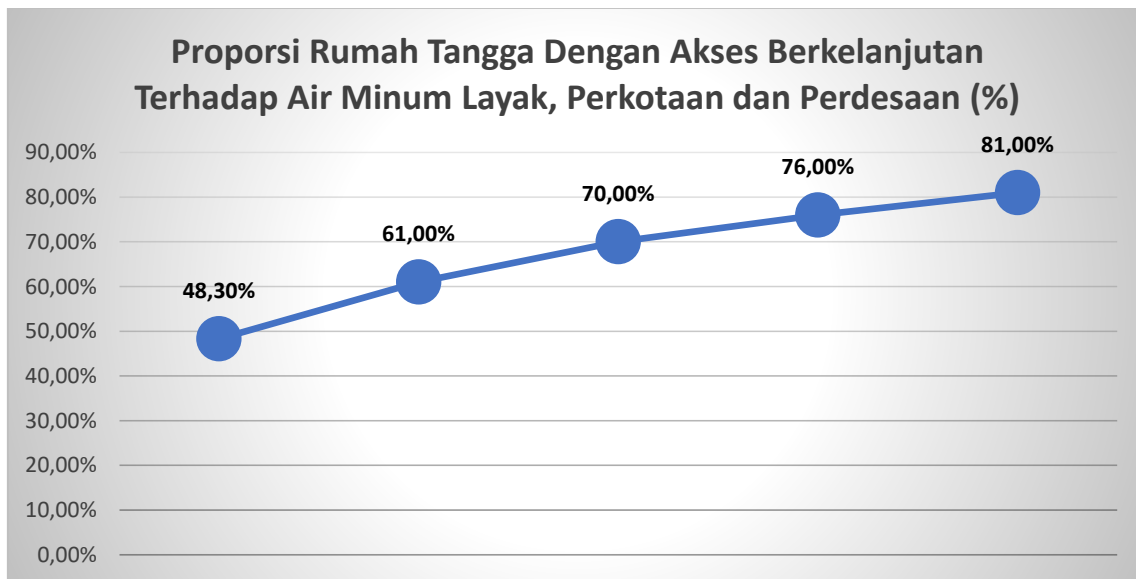


Gambar 2.38 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik, 2019-2023
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Tabel 2.63 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Utama yang Digunakan Tahun 2023

Sumber Air Minum Utama	%
Air Kemasan/Isi Ulang	29,67
PDAM/leding	1,64
Sumur Bor/Pompa	12,87
Sumur / Mata Air Terlindungi	37,36
Sumur / Mata Air Tidak Terlindungi	19,00
Lainnya	0,18

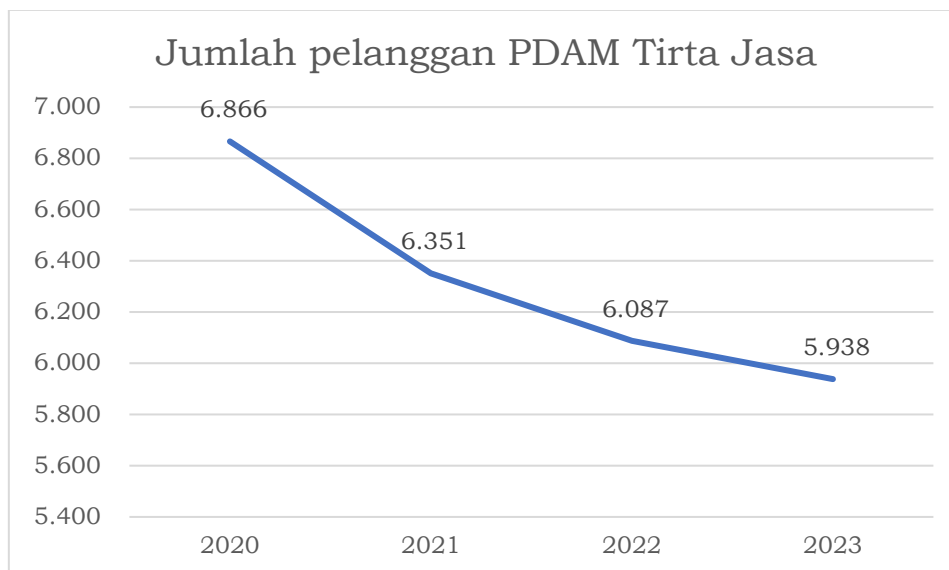
Sumber: Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi, Tahun 2023



Gambar 2.39 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan, 2019-2023
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan

Grafik di atas menunjukkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan tahun 2019-2023. Dari grafik dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan yang cukup tajam terhadap proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, yakni pada tahun 2019 proporsinya hanya mencapai 48,3 persen, dan meningkat dengan tajam hingga tahun 2023 yang telah mencapai 81 persen.

Kebutuhan air bersih untuk konsumsi masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan juga dipenuhi oleh PDAM Tirta Jasa, jumlah rumah tangga pelanggan menunjukkan peningkatan, sebagai berikut:



Gambar 2.40 Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Pelanggan PDAM Tirta Jasa Tahun 2020—2023

Sumber: Statistik Kesejahteraan Lamsel, BPS 2024

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1 Indeks Demokrasi Indonesia

IDI merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak tahun 2009 (IDI 2009). Pada tahun 2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat perluasan konsep demokrasi yang digunakan. Pada IDI 2009 s.d 2020 konsep demokrasi hanya dilihat dari ranah politik, sedangkan pada IDI metode baru, demokrasi tidak hanya mencakup ranah politik, tetapi juga mencakup ranah ekonomi dan sosial. Selain itu, metode baru juga menghitung nilai IDI pada tingkat pusat. IDI 2021 merupakan IDI pertama yang dihitung dengan menggunakan metode baru.

Tabel 2.64 Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Lampung Selatan

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021*	2022*	2023*
1	Indeks Demokrasi Indonesia	72,56	72,79	80,18	78,32	78,37

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2024

*metode baru perhitungan IDI

2.3.4.2 Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari IDSD adalah memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD 2023 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2023 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing. Penyusunan IDSD 2023 dilaksanakan melalui tujuh tahapan, yaitu menyusun kerangka konseptual, mengidentifikasi indikator, mengumpulkan data, mengolah data, melakukan standardisasi data, pembobotan pilar daya saing, dan menghitung skor akhir dengan agregasi. Capaian skor IDSD Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2023 sebesar 3,16 masih dibawah rata-rata Nasional dan rata-rata Provinsi.

Tabel 2.65 Capaian Skor IDSD Kabupaten Lampung Selatan, 2023

NAMA PROVINSI	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL*	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
PROV. LAMPUNG	4,16	2,76	3,66	3,70	3,84	3,48	2,12	3,41	2,10	4,55	3,81	2,80	3,36
RATA-RATA KAB/KOTA	4,11	2,46	4,40	3,22	3,81	3,22	2,61	3,06	1,61	4,21	3,07	1,64	3,25
LAMPUNG BARAT	4,42	1,98	4,41	3,37	3,68	3,25	2,85	2,72	0,88	3,82	2,70	0,88	2,91
TANGGAMUS	4,02	2,33	3,81	2,72	3,76	3,08	2,69	3,04	1,42	4,16	2,73	0,99	2,90
LAMPUNG SELATAN	3,97	2,06	4,69	3,23	3,82	2,97	2,26	3,38	1,66	4,62	2,60	2,67	3,16
LAMPUNG TIMUR	3,93	2,45	4,37	3,56	3,92	3,14	1,81	2,76	-	4,59	2,73	1,51	-
LAMPUNG TENGAH	3,90	2,32	4,31	3,38	3,85	3,04	1,89	3,09	2,28	4,83	2,97	1,54	3,12
LAMPUNG UTARA	-	2,79	4,19	2,74	3,81	3,14	2,67	3,13	1,48	4,35	3,09	1,84	-
WAY KANAN	4,21	2,50	4,49	3,31	3,82	3,03	2,03	3,01	-	4,11	2,43	0,72	-
TULANGBAWANG	4,01	2,14	4,54	3,52	3,86	3,03	1,97	2,99	0,82	4,33	3,74	1,30	3,02
PESAWARAN	4,10	2,55	4,31	3,24	3,80	3,15	2,34	2,93	-	4,19	3,24	1,48	-
PRINGSEWU	4,31	2,81	4,45	3,13	3,89	3,40	3,34	3,10	0,58	4,02	2,53	2,23	3,15
MESUJI	4,05	1,87	4,62	3,65	3,73	2,59	1,83	2,31	-	3,97	4,01	0,74	-
TULANG BAWANG BARAT	4,12	2,64	4,48	3,25	3,86	2,92	1,91	3,23	-	4,02	3,28	0,61	-
PESISIR BARAT	4,06	1,76	3,49	3,30	3,38	3,07	2,48	2,77	-	3,60	2,24	0,76	-
BANDAR LAMPUNG	3,90	3,01	4,88	2,92	3,97	4,04	4,20	3,67	2,74	4,74	3,38	3,59	3,75
METRO	4,54	3,74	4,90	2,94	3,99	4,38	4,88	3,73	2,65	3,75	4,33	3,69	3,96

Keterangan :		
Pilar 1: Institusi	Pilar 5: Kesehatan	Pilar 9: Sistem keuangan
Pilar 2: Infrastruktur	Pilar 6: Keterampilan	Pilar 10: Ukuran pasar
Pilar 3: Adopsi TIK	Pilar 7: Pasar produk	Pilar 11: Dinamisme bisnis
Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro	Pilar 8: Pasar tenaga kerja	Pilar 12: Kapabilitas inovasi

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023

2.3.4.3 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKU) adalah sebuah ukuran atau metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan hidup antar umat beragama di suatu wilayah, baik itu tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. IKU memberikan gambaran kuantitatif mengenai sejauh mana masyarakat yang berbeda agama dapat hidup berdampingan secara harmonis, saling menghormati, dan bekerja sama.

Tabel 2.66 Indeks Kerukunan Umat Beragama

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	*	*	71,54	73,33	*

Sumber: Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lampung Selatan, 2023

2.3.4.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi investasi dalam pengembangan ekonomi. Secara khusus, ICOR mengukur jumlah modal tambahan yang diperlukan untuk menghasilkan tambahan output ekonomi. ICOR digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi efisiensi investasi suatu negara atau sektor tertentu. Semakin rendah nilai ICOR, semakin efisien investasi tersebut, karena itu berarti bahwa output ekonomi yang lebih tinggi dapat dihasilkan dengan modal yang lebih sedikit. Sebaliknya, nilai ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak modal dibutuhkan untuk menghasilkan peningkatan output yang sama, yang bisa mengindikasikan adanya ineffisiensi dalam alokasi modal. Penggunaan ICOR dapat membantu pemerintah atau pelaku ekonomi untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan investasi mereka, serta untuk

merencanakan strategi pengembangan ekonomi yang lebih efisien dalam jangka panjang.

Tabel 2.67 Incremental Cash Output Ratio, Kabupaten Lampung Selatan 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021*	2022*	2023*
1	ICOR	7,58	-20,15	13,74	7,53	7,34

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

*Angka Sementara

2.3.4.5 Penanaman Modal

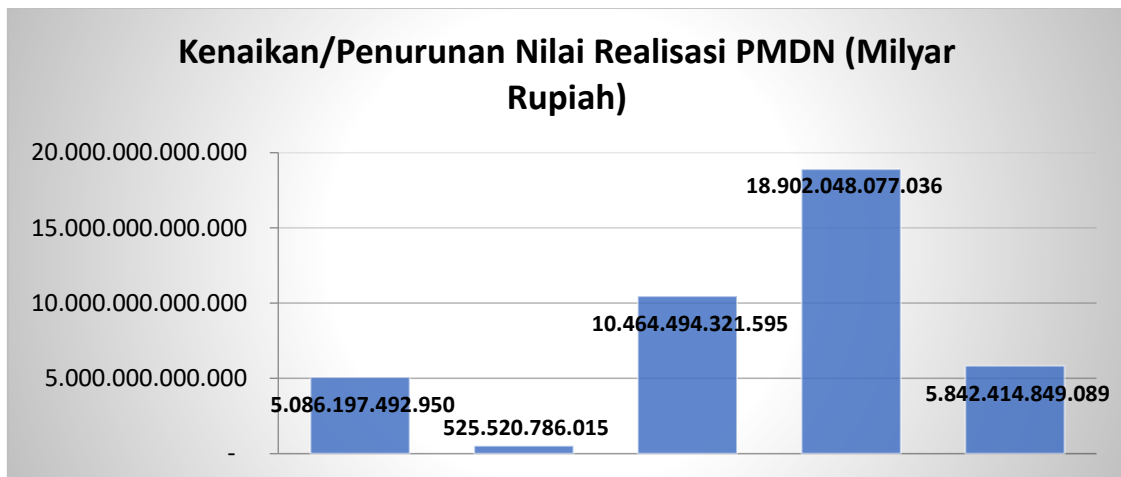
Jumlah nilai investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Lampung Selatan selama periode 2019-2023 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tercatat hingga tahun 2020 nilai investasi PMDN dan PMA telah mencapai 41.153 miliar rupiah yang terdiri dari 41.139 miliar investasi PMDN dan 13 miliar lebih investasi PMA.

Tabel 2.68 Jumlah Nilai Investasi Tahun 2020-2023

No	Indikator	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PMA	359.720	795.557	56.143	395.537
2	Jumlah PMDN Fasilitasi	740.745	311.430	329.169	789.916
3	Jumlah PMDN Non Fasilitasi Skala Besar	735.368	262535	278.128	0
4	Jumlah PMDN Non Fasilitasi Skala Menengah	0	28.432	11.699	0
5	Jumlah PMDN Non Fasilitasi Skala Kecil	5.367	20.462	39341	0
6	Jumlah	1.100.455	1.106.987	385.311	1.194.452

Sumber data: DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan

Secara umum, rata-rata nilai realisasi PMDN mengalami peningkatan selama perodesasi 2020-2023. Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 1,2 Triliun rupiah.



Gambar 2.41 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah), 2019-2023
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan, 2024 (diolah)

Capaian kinerja investasi di Kabupaten Lampung Selatan tentu sangat bergantung pada tingkat kenyamanan investasi. Upaya yang dilakukan adalah dengan menekan angka kriminalitas dan kepastian hukum investasi. Angka kriminalitas merupakan indikator yang selalu diupayakan untuk disusutkan, walaupun tidak mungkin untuk mencapai angka nol. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Selain itu kondisi daerah yang sering terjadi konflik akan mempengaruhi arus investasi di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan muncul keraguan dan penolakan bagi investor untuk melakukan investasi. Berbagai bentuk kejahatan atau tindak kriminal seperti penipuan, pencurian, perampokan, maupun kekerasan serta kejahatan asusila berpotensi terjadi.

2.3.4.6 Kriminalitas

Berdasarkan data yang di dapat dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lampung Selatan yang disajikan pada Tabel dibawah ini, BPS Kabupeten Lampung Selatan mencatat Tindak Pidana atau Konflik yang terjadi pada tahun 2018-2020 cenderung meningkat, dimana jumlah konflik ini di nilai masih tinggi yaitu mencapai angka 229 di tahun 2020, sehingga dengan keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab

itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di Kabupaten Lampung Selatan guna memberikan rasa aman kepada warga masyarakat.

Tabel 2.69 Jumlah Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Tingkat Kepolisian di Kabupaten Lampung Selatan, 2021-2023

Kesatuan	Jumlah Tindak Pindana			Penyelesaian Tindak Pidana		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Reskrim	276	503	440	201	50	220
Narkoba	121	86	79	121	43	99
Natar	71	84	115	61	3	109
Tj. Bintang	45	56	110	42	32	69
KSKP Bakauheni	26	11	15	26	1	65
Kalianda	21	27	53	20	-	70
Katibung	35	38	39	24	10	53
Penengahan	29	33	88	27	19	51
Palas	16	22	22	11	-	35
Candipuro	43	19	34	19	11	20
Sidomulyo	34	30	28	25	6	34
Sragi	11	17	10	1	3	2
Jati Agung	29	56	129	36	20	48
Merbau Mataram	35	25	25	20	19	37
Jumlah	792	1.007	1.187	634	217	912

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2024

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan perkembangan kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Presentasi Penerbitan e-KTP

mengalami perlambatan atau penurunan dikarenakan ketidaktersediaan blangko e-KTP di Kabupaten Lampung Selatan yang dapat dikatakan kendala teknis yang ada diluar kewenangan pemerintah kabupaten.

2.4.1 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan dan keberhasilan reformasi dalam sistem hukum suatu negara. Indeks ini mengukur sejauh mana suatu negara telah melakukan perubahan dan peningkatan dalam sistem hukumnya untuk mencapai tujuan seperti perlindungan hak asasi manusia, keadilan, transparansi, efisiensi hukum, dan kepastian hukum.

Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2023 tercatat sebesar 45,02. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:

- a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.
- b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%.
- c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reuiu, dengan bobot 35%.
- d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%.

Berdasarkan kategori yang telah diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM, Kabupaten Lampung Selatan masuk dalam Kategori Buruk.

2.4.2 Indeks Reformasi Birokrasi

Hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) untuk Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 adalah 55,53 atau masuk dalam kategori CC. Angka tersebut masih mengacu pada delapan area perubahan, dimana target IRB tahun 2022 Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan

sebesar 71,00. Sedangkan untuk tahun 2023, berdasarkan aturan yang baru, Indeks RB Kabupaten Lampung Selatan adalah 70,91 dengan nilai RB General sebesar 59,62 dan nilai RB Tematik sebesar 11,29.

2.4.3 Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 3 (tiga) tahun. Berikut adalah capaian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 2.70 Indeks Inovasi Daerah

Tahun	Nilai	Predikat
2021	48,49	Inovati
2022	59,92	Inovatif
2023	62,06	Sangat Inovatif

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kab. Lampung Selatan, 2024

2.4.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.

Capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2023 mendapatkan predikat

“baik” dengan nilai indeks 2,74, meningkat dari Tahun 2022 yang sebesar 1,75. Hal ini menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang telah mempersiapkan langkah-langkah diantaranya melakukan sosialisasi Peraturan Bupati tentang SPBE, pembuatan peta rencana SPBE, dan meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik berbasis elektronik.

2.4.5 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.

Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Capaian Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2023 mendapatkan predikat “Cukup dengan Catatan” dengan nilai indeks sebesar 2,5 atau kategori “C-“

2.4.6 Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional adalah alat atau metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat integritas atau kejujuran suatu negara. Integritas dalam konteks ini mencakup berbagai aspek seperti anti-korupsi, transparansi, akuntabilitas pemerintah, penegakan hukum yang adil, serta tata kelola yang baik dan bersih.

Indeks Integritas Nasional memberikan gambaran yang komprehensif tentang keadaan integritas suatu negara dan bisa digunakan sebagai alat untuk membandingkan kinerja antar negara. Hasil dari indeks ini dapat memberikan masukan berharga untuk perbaikan kebijakan, perencanaan strategis, serta pembangunan kapasitas dalam upaya meningkatkan integritas pemerintahan dan mendorong tata kelola yang lebih baik.

Capaian Indeks Integritas Nasional Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar 68,77. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Selatan perlu meningkatkan perilaku anti korupsi dan integritas.

2.4.7 Jumlah Penduduk Ber-KTP

Jumlah penduduk ber KTP di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan, dari 635.539 jiwa di tahun 2019 menjadi 782.289 jiwa di tahun 2023.



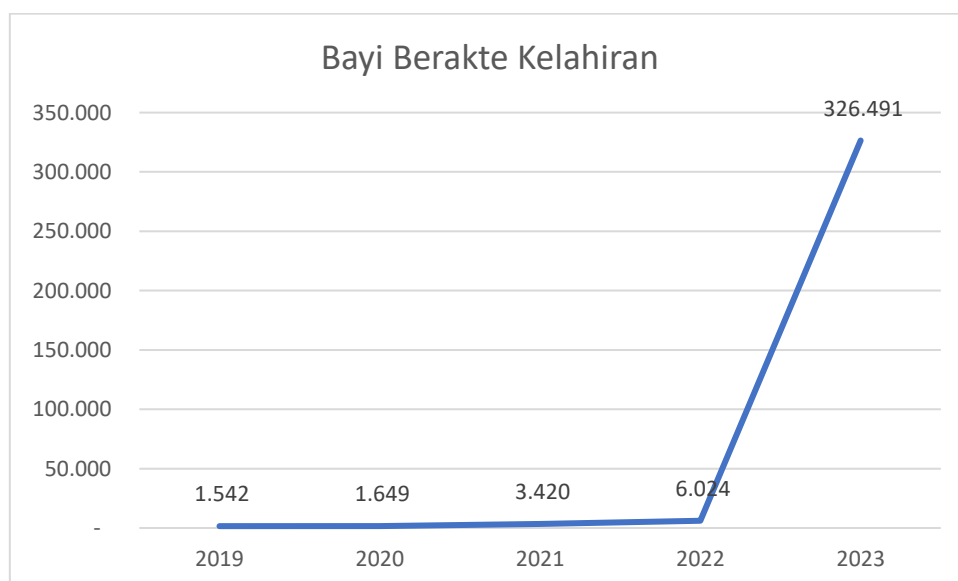
Gambar 2.42 Jumlah Penduduk Ber-KTP, 2019-2023

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.4.8 Jumlah Bayi Berakte Kelahiran

Begitu juga jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran di Lampung Selatan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019

jumlah ini adalah sebesar 1.542 bayi dan meningkat empat kali lipatnya di tahun 2023 menjadi 6.024 bayi.

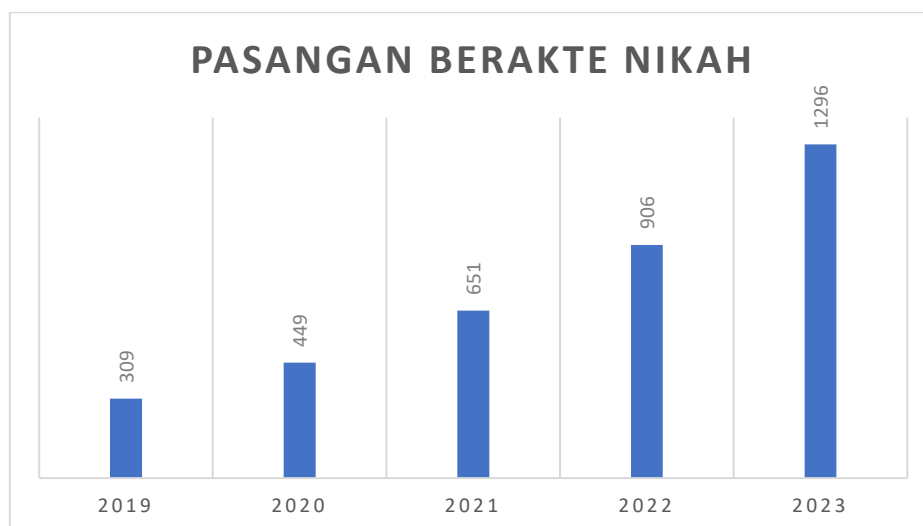


Gambar 2.43 Jumlah Bayi Berakte Kelahiran, 2019-2023

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, 2024

2.4.9 Jumlah Pasangan Berakte Nikah

Jumlah pasangan yang telah memiliki akte nikah juga meningkat di Lampung Selatan. Hingga tahun 2020, jumlah pasangan berakte nikah telah mencapai 906.



Gambar 2.44 Jumlah Pasangan Berakte Nikah, 2019-2023

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, 2021 (diolah)

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Berdasarkan hasil dari evaluasi RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2005-2025 menghasilkan kesimpulan capaian hasil Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan diantaranya:

- 1) Pada periode pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2005-2025 tekanan yang paling besar bersumber dari faktor eksternal yaitu bencana alam, krisis global dan bencana Kesehatan.
- 2) Adanya transisi peraturan dan perundang-undangan dalam penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan, membuat evaluasi RPJPD mengalami kesulitan terutama dalam penetapan indikator/tolok ukur.
- 3) Pelaksanaan RPJPD di dorong oleh faktor internal diantaranya pemekaran kecamatan, pembangunan jalan tol, peningkatan status bandara, dan adanya pinjaman dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Dari hasil analisis evaluasi RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2005-2025 yang telah dilakukan sebelumnya maka dihasilkan saran atau rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

1. Tekanan pencapaian RPJPD yang bersumber dari faktor eksternal mengisyaratkan bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu melakukan penguatan fundamental ekonomi untuk menopang seluruh aspek pembangunan. Fundamental yang perlu dibangun diantaranya adalah sektor pertanian untuk menopang ketahanan pangan, sektor industri untuk mendorong percepatan pembangunan, dan sektor pariwisata sebagai sektor pengungkit secara spasial.
2. Penyusunan RPJPD pada periode selanjutnya perlu menjadikan aspek-aspek pembangunan secara lengkap menjadi sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Tabel 2.71 Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJP				Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)				(6)		(7)
					2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	Penghambat	Pendorong	
Misi 1: Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarakan falsafah Pancasila	Terwujudnya masyarakat kabupaten Lampung Selatan yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, dan beradab	Rata-Rata Lama Sekolah	6.52	7.77	100%	0%	100%	100%	Pendapatan masyarakat yang masih rendah	Adanya bantuan dana bos	Mendorong kesadaran masyarakat untuk menuntaskan Wajib Belajar sembilan tahun
		Rasio jumlah murid dan sekolah	225.5895	*****	100%	0%	0%		Keterbatasan anggaran pembangunan sarana pendidikan	tersedianya DAK untuk pembangunan fasilitas pendidikan	peningkatan fasilitas sekolah

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJP				Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
		Rasio jumlah murid dan guru	21.01109	****	100%	100%	0%		recruitmen guru memerlukan mekanisme panjang	Ketersediaan guru honorer	menambah jumlah guru melalui jalur P3K maupun CPNS
		Rasio jumlah kriminalitas tertangani	97%	****	100%	0%	100%		keterbatasan jumlah aparat penegak hukum	meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kriminalitas	sosialisasi dan pencegahan tindak kriminalitas
Misi 2: Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing	terwujudnya masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan sejahtera	Pertumbuhan Ekonomi	4.29%	4.91%	100%	100%	0%	100%	guncangan ekonomi faktor eksternal	kawasan industri Lampung	penguatan ekonomi lokal
		PDRB Perkapita	Rp3,344,573	Rp. 50.461.132	100%	100%	100%		Perekonomian didominasi oleh sektor pertanian	tumbuhnya sektor industri	Mendorong pertumbuhan sektor industri

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJP				Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9.1	4.95	100%	100%	100%	0%	keterbatasan serapan tenaga kerja	serapan tenaga kerja di sektor industri besar	Mendorong pertumbuhan sektor industri
		Tingkat Kemiskinan (%)	29%	13%	100%	100%	100%	0%	Rendahnya pendapatan masyarakat dan faktor inflasi yang menekan daya beli masyarakat	Stimulus bantuan sosial yang meningkatkan daya beli masyarakat sebagian	menyelesaikan akar masalah kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat
		Rasio Gini	0.343	0.257	0%	100%	0%	100%	Jenjang pendidikan masyarakat sebagian besar masih rendah	sebagian masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kemampuan melalui pendidikan	mendorong program peningkatan keahlian masyarakat kelas menengah kebawah melalui pelatihan kerja

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJP				Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
		Penduduk Perempuan yang Bekerja	6309	10568	0%	100%	100%		Keterbatasan waktu perempuan untuk bekerja	Pemahaman tentang kesetaraan gender sudah meningkat	mendorong partisipasi perempuan dalam dunia kerja
		IPM	66.53	71.55	100%	0%	100%	100%	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat	mendorong peningkatan IPM melalui peningkatan empat indeks pembentuk IPM
		Angka Harapan Hidup	66.306	74.22	100%	100%	100%	100%	sebagian masyarakat berpendapatan rendah	kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat semakin meningkat	penguatan program JKN

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJP				Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
		Konsumsi Rumah Tangga (juta/tahun)	6,087	17.426	100%	100%	100%		Rendahnya pendapatan masyarakat dan faktor inflasi yang menekan daya beli masyarakat	peningkatan bertahap pendapatan masyarakat	stimulus dan penetrasi pasar untuk menjaga daya beli masyarakat
		Fertilitas	70.40	2,33	100%	100%	100%		masih banyak penduduk yang tidak melaksanakan program keluarga berencana	tingkat pendidikan penduduk mulai naik	optimisasi program KB
		angka kematian bayi	25.5	17.67	100%	100%	100%		masih minimnya fasilitas kesehatan di daerah kepulauan	angka kemiskinan rendah	peningkatan sarpras kesehatan di daerah terpencil

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJP				Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
		Indeks Pembangunan Gender	0	89.780	100%	100%	100%	0%		Peran perempuan dalam rumah tangga sulit digantikan	Mendorong peningkatan peran perempuan melalui peningkatan soft skill
		Indeks Pemberdayaan Gender	0	59.37	100%	100%	100%	0%		Peran perempuan dalam rumah tangga sulit digantikan	Mendorong peningkatan peran perempuan melalui peningkatan soft skill
		LQ Sektor Petanian	1.18	****	0%	0%	100%		sektor ekonomi didominasi oleh sektor pertanian	Masyarakat secara bertahap meninggalkan sektor pertanian dan menuju pada sektor industri	Mendorong industrialisasi sektor pertanian

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJP				Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
		LQ Sektor Industri	0.08	****	100%	100%	0%		Sektor industri rentan terhadap guncangan ekonomi eksternal	Sebagian pelaku industri berbasis sektor pertanian yang menopang kebutuhan pokok masyarakat	penguatan sektor industri berbasis pertanian
		LQ Sektor Jasa Keuangan	0.90	****	0%	100%	0%		Perkembangan jasa keuangan sulit diakses masyarakat	perkembangan industri membutuhkan pendanaan dari sektor perbankan	kebijakan inklusi keuangan
		Panjang Jalan Aspal (Km)/Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah	1,220.90	1,543.64	0%	100%	100%		keterbatasan anggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan	adanya dana DAK untuk pembangunan infrastruktur	peningkatan pendapatan daerah

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJP				Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
		Rasio Elektrifikasi	0.11	****	100%	100%	100%		Kondisi geografis merupakan daerah kepulauan	PLN gencar membangun infrastruktur	mendorong perkembangan penggunaan IT
		Sebaran Menara BTS perkecamatan	5	****	100%	100%	100%		sebagian wilayah adalah daerah pantai dan pegunungan	masyarakat menerima dengan baik pemasangan menara BTS	mendorong investor untuk meningkatkan kualitas jaringan melalui menara BTS
		Rumah Tangga pelanggan PDAM	12,362	****	0%	100%	100%		Pembangunan infrastruktur penyaluran air yang lambat	Daerah perkotaan sudah dapat mengakses jalur PDAM	peningkatan infrastruktur jaringan air
		OPINI BPK	WDP	WTP	100%	100%	100%	100%	Banyaknya aset pemerintah daerah yang belum tercatat dengan baik	Proses audit oleh BPK yang semakin meningkatkan akurasi laporan keuangan dan aset	penguatan akuntabilitas keuangan daerah

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJP				Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
		Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik (Kominfo)	2	****	100%	100%	100%		Kualitas SDM Kurang memadai	adanya kebijakan satu data	mengintegrasikan semua layanan ke dalam aplikasi
		PMTB	2,867.54	****	100%	100%	100%		Proses perizinan yang melalui proses yang cukup panjang	potensi ekonomi yang besar	penyederhanaan perizinan berusaha
Misi 3: Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan	Rasio tindak Pidana Tertangani	0.97	****	100%	0%	100%		keterbatasan jumlah aparat penegak hukum	komitmen penegakan hukum oleh POLRI	pelibatan masyarakat untuk pencegahan tindakan melawan hukum
		Jumlah Perda Disahkan	30	****	100%	100%	100%		Penyesuaian peraturan daerah membutuhkan waktu	adanya agenda prolegda	pemetaan penyesuaian peraturan daerah

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJP				Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
		tingkat partisipasi pemilukada	80%	****	100%	100%	100%		sebagian pemuda sedang mengenyam pendidikan di luar daerah dan bekerja di luar daerah	tingginya kesadaran pemuda dalam partisipasi politik	mendorong peningkatan peran pemuda dalam partisipasi politik
		jumlah konflik	0	****	0%	0%	0%		informasi konflik yang simpang siur	tingginya toleransi masyarakat	meningkatkan toleransi masyarakat dalam berkehidupan sosial
		Jumlah Kasus ASN terlibat politik praktis	0	****	0%	0%	0%		sulitnya membuktikan keterlibatan ASN dalam politik praktis	tingginya kesadaran ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis	meningkatkan integritas pegawai
Misi 4: Mewujudkan masyarakat kabupaten	Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan yang aman dan damai	Jumlah Tindak Pidana (kasus)	2,293	****	0%	100%	0%		keterbatasan jumlah aparat penegak hukum	komitmen penegakan hukum oleh POLRI	pelibatan masyarakat untuk pencegahan tindakan melawan hukum

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJP				Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
Lampung Selatan aman dan damai											
		Jumlah hansip per kecamatan (orang)	10	****	100%	100%	100%		rendahnya gaji hansip	tingginya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	meningkatkan kesejahteraan hansip
		Jumlah Pos Ronda Per Kecamatan (unit)	3	****	100%	100%	100%		pegeseran struktur masyarakat ke arah struktur perkotaan	tingginya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	memberikan insentif ronda

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJP				Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
		Rasio jumlah Satpol PP dan jumlah penduduk	1%	****	100%	100%	100%		APBD terbebani untuk memberikan gaji kepada satpol PP jika terlalu banyak personil	jumlah penduduk terus bertambah	recruitmen secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBD
Misi 5: Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan	Indeks Wlliamson	0.08	****	100%	100%	0%		Keterbatasan anggaran untuk melakukan pembangunan infrastruktur	adanya program swadaya pembangunan infrastruktur	peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur
		Jumlah Produktivitas Padi Terhadap Jumlah Penduduk	0.35	****	100%	100%	0%		Berkurangnya jumlah lahan sawah	adanya program LP2B	Peningkatan pengawasan konfersi lahan pertanian

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJP				Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	349	****	100%	100%	100%		rendahnya pendapatan masyarakat di kawasan perdesaan	tingginya semangat gotong royong masyarakat	meningkatkan program bedah rumah tidak layak huni
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70%	****	100%	100%	100%		tata ruang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat	adanya program perizinan terpadu	mensosialisasikan peraturan tentang IMB dan PBG
		Persentase Jalan dalam kondisi baik	0.29	****	0%	100%	100%	100%	Faktor cuaca yang tidak menentu	adanya anggaran untuk perbaikan jalan	peningkatan kualitas infrastruktur jalan
Misi 6: Mewujudkan kabupaten Lampung Selatan yang asri dan lestari	Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan yang asri dan lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (DLH)	0	****	100%	100%	100%	0%	perkembangan jumlah penduduk dan industri terus meningkat	adanya pengendalian lingkungan oleh pemerintah daerah	meningkatkan pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup secara berkala

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJP				Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
		shift-share Pertanian	1525.80	****	100%	0%	0%		Berkurangnya jumlah lahan sawah	adanya program LP2B	Peningkatan pengawasan konferensi lahan pertanian
		shift-share Pertambangan	25.23	****	100%	100%	100%		Rumitnya izin pertambangan	adanya kebijakan penyederhanaan izin usaha	mendorong kebijakan penyederhanaan izin usaha
		Luas lahan pertanian (tanaman pangan)	200,701	****	100%	100%	100%		kebutuhan lahan permukiman terus meningkat	adanya kebijakan kesesuaian tata ruang	meningkatkan sosialisasi pemanfaatan ruang
		Ketersediaan TPA	36	****	100%	100%	100%		Produksi sampah terus meningkat	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	meningkatkan pengelolaan sampah menjadi produk bernilai jual
Misi 7: Mewujudkan kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah pantai dan pegunungan	Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah pantai dan pegunungan	Jumlah Tangkapan Ikan (ton)	20,548.87		100%	100%	0%	100%	faktor cuaca yang tidak menentu	harga BBM yang terus meningkat	peningkatan perawatan dan pemulihan trumbu karang

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJP				Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
n yang masju	n yang maju										
		PDRB sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan	11,951.92	****	100%	0%	100%	100%	Terjadinya gagal panen akibat hama	luas lahan pertanian di Kabupaten Lampung Selatan masih luas	meningkatkan sosialisasi dan pendampingan penanganan hama
		Rasio Bencana terhadap Bencana yang tertangani	100	****	100%	100%	100%		Faktor alam yang tidak menentu	Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Peningkatan kewaspadaan bencana
		Rasio Hutan Lindung terhadap Luas Hutan	0.30		100%	100%	100%		kebutuhan lahan permukiman terus meningkat	adanya kebijakan kesesuaian tata ruang	meningkatkan sosialisasi pemanfaatan ruang

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJP				Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
		Rasio Hutan Konservasi terhadap Luas Hutan	30%	****	100%	100%	100%	100%	kebutuhan lahan permukiman terus meningkat	adanya kebijakan kesesuaian tata ruang	meningkatkan sosialisasi pemanfaatan ruang
		Luas Lahan Hutan Produksi (ha)	54,896.76	****	100%	100%	100%		kebutuhan lahan permukiman terus meningkat	adanya kebijakan kesesuaian tata ruang	meningkatkan sosialisasi pemanfaatan ruang
		Jumlah Destinasi Wisata Pegunungan (destinasi)	3		100%	100%	100%	100%	tingginya biaya pengelolaan wisata	faktor alam yang mendukung	mengembangkan dan promosi pariwisata
Misi 8: Mewujudkan kabupaten Lampung Selatan berperan aktif dalam pergaulan antar daerah dan nasional	Terwujudnya peran aktif Kabupaten Lampung Selatan dalam pergaulan antar regional, nasional, dan internasional	NET Ekspor (Perindustrian dan Perdagangan) Juta rupiah	988.13		100%	100%	0%		Faktor ekonomi eksternal yang tidak menentu	Meningkatnya jumlah pelaku ekspor	Peningkatan kualitas dan kuantitas komoditas ekspor

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Terhadap Sasaran Pokok RPJP				Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
		Jumlah MOU (Bagian Hukum Setda)	1	****	100%	100%	100%	100%		ada upaya kerjasama pembangunan yang sama antar lembaga negara	meningkatkan kerjasama pembangunan
		Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	0.033	****	100%	100%	100%	100%	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak dan retribusi	Sebagian masyarakat sudah taat pajak	meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
		ICOR	14.3	7.53	100%	100%	0%		Mahalnya biaya investasi	Adanya program penyederhanaan perizinan pendirian usaha	peningkatan kualitas investasi dan penyederhanaan perizinan berusaha
82%		82%	74%	72%							
Tinggi		Tinggi	Tinggi	Tinggi							

Sumber : Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025

Berdasarkan tabel Hasil Evaluasi RPJPD 2005- 2025 diatas memperlihatkan Tingkat capaian kinerja RPJPD 2005-2025 yang cukup tinggi yakni sebesar 72%. Pencapaian kinerja RPJPD 2005-2025 Disebabkan membaiknya fundamental ekonomi jika dibandingkan pada pencapaian kinerja pada tahun terakhir di tahun 2023 khususnya pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat hingga mencapai 4,91% dan rasio gini yang terus mengalami penurunan hingga 0.256 dan ICOR hingga mencapai 7.5.

2.6 Trend Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Bonus demografi adalah fenomena di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dalam suatu negara melebihi jumlah penduduk yang bergantung (anak-anak dan lansia). Di Indonesia, bonus demografi telah berlangsung sejak sekitar tahun 2010 dan diperkirakan akan berlangsung hingga sekitar tahun 2030-2035. Namun, situasi ini dapat bervariasi berdasarkan proyeksi populasi yang digunakan dan faktor-faktor lainnya. Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi, di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif. Jika bonus demografi ini bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah maka kondisi ini akan menjadi modal penting untuk membangun untuk menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045. Namun sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi boomerang dan menjadi beban bagi negara.

Ketika kita korelasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2025-2045 yang akan dirancang lagi, maka bonus demografi ini harus dijadikan referensi untuk memproyeksikan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan 20 tahun ke depan.

Tabel 2.72 Proyeksi Jumlah Penduduk Lampung Selatan 2025-2045 per Kecamatan

NO	NAMA KECAMATAN	Kondisi 2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Natar	193.446	192.339	192.894	193.449	194.004	194.559
2	Jati Agung	138.637	170.916	210.161	249.406	288.651	327.896
3	Tanjung Bintang	86.431	93.018	102.808	112.598	122.388	132.178
4	Tanjung Sari	33.309	36.360	40.335	44.310	48.285	52.260
5	Katibung	75.578	81.329	88.809	96.289	103.769	111.249
6	Merbau Mataram	60.809	69.350	80.880	92.410	103.940	115.470
7	Way Sulan	25.172	27.310	29.810	32.310	34.810	37.310
8	Sidomulyo	68.920	78.729	90.324	101.919	113.514	125.109
9	Candipuro	59.157	62.493	66.513	70.533	74.553	78.573
10	Way Panji	18.576	19.985	21.575	23.165	24.755	26.345
11	Kalianda	97.305	104.203	112.608	121.013	129.418	137.823
12	Rajabasa	26.197	29.250	33.005	36.760	40.515	44.270
13	Palas	62.859	67.921	73.821	79.721	85.621	91.521
14	Sragi	36.769	39.902	43.417	46.932	50.447	53.962
15	Penengahan	44.880	51.075	58.650	66.225	73.800	81.375
16	Ketapang	54.914	58.580	63.200	67.820	72.440	77.060
17	Bakauheni	25.144	25.766	26.796	27.826	28.856	29.886
	Jumlah	1.108.102	1.208.526	1.335.606	1.462.686	1.589.766	1.716.846

Sumber: BPS (Data Diolah), 2023

Tabel 2.73 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tahun					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Laki-Laki	566.001	583.962	628.864	673.766	718.668	763.570
2	Perempuan	542.134	560.919	607.879	654.840	701.800	748.761
3	Rasio	104,40	104,11	103,45	102,89	102,40	101,98

Sumber: BPS (Data Diolah) 2023

Tabel 2.74 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Tahun					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	0-4	82.896	100.068	102.597	105.126	107.655	110.184
2	5-9	99.401	97.992	101.267	104.542	107.817	111.092
3	10-14	103.526	93.468	98.262	103.057	107.851	112.645
4	15-19	72.672	89.480	92.345	95.209	98.074	100.938
5	20-24	90.938	89.274	89.359	89.444	89.529	89.614
6	25-29	85.928	88.757	90.820	92.883	94.946	97.009
7	30-34	83.078	86.137	88.630	91.124	93.617	96.110
8	35-39	86.258	88.951	93.158	97.365	101.572	105.780
9	40-44	89.294	83.091	87.651	92.211	96.770	101.330
10	45-49	77.676	75.419	81.312	87.204	93.097	98.989
11	50-54	65.329	63.422	69.029	74.636	80.242	85.849
12	55-59	51.142	53.133	58.463	63.793	69.123	74.452
13	60-64	42.132	41.357	46.143	50.929	55.715	60.501

No	Kelompok Umur	Tahun					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
14	65-69	28.366	29.878	33.696	37.513	41.331	45.149
15	70-74	19.110	18.895	21.926	24.956	27.986	31.017
16	75+	23.630	18.531	20.801	23.070	25.340	27.610
17	Angka Ketergantungan		47,28	47,50	47,71	47,90	48,07

Sumber: BPS (Data Diolah), 2023

Melalui Bonus demografi dan trend proyeksi demografi jangka panjang maka menjadi gambaran bahwa ada jumlah besar tenaga kerja produktif di Kabupaten Lampung Selatan. Ini berarti ada potensi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan lapangan kerja dan keterlibatan lebih banyak orang dalam kegiatan ekonomi. Untuk itu sudah saatnya Kabupaten Lampung Selatan memiliki pandangan untuk mengembangkan potensi daerahnya pada bidang industri dan jasa, yang memfokuskan pada pengembangan industri dan jasa. Hal ini selaras dengan arah kebijakan nasional yang memproyeksikan berbagai proyek strategis nasional seperti: Bakauheni Harbour City (BHC), Bandara *Aerocity*, Kawasan Industri Katibung, dan Proyek Strategis lainnya. Selain itu, dari hasil proyeksi PDRB sektor Industri Pengolahan pada tahun 2045 akan menyumbang 27% dari PDRB Kabupaten Lampung Selatan.

Perekonomian yang memfokuskan pada pengembangan industri dan jasa berkembang daripada daerah yang memfokuskan perekonomiannya pada bidang pertanian. Fenomena ini lebih dikenal dengan istilah perubahan struktur ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan karena berbagai faktor seperti: Pertama, faktor teknologi, sektor industri dan jasa seringkali lebih canggih secara teknologi daripada sektor pertanian. Penggunaan teknologi canggih dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kedua, Industri dan jasa seringkali memiliki potensi untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar daripada pertanian. Dalam skala ekonomi yang lebih besar, biaya per unit produksi cenderung lebih rendah, yang dapat meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, Sektor industri dan

jasa seringkali membutuhkan tenaga kerja yang lebih terampil dan terdidik dibandingkan dengan sektor pertanian yang kebanyakan masih menggunakan cara konvensional. Solusinya, Kabupaten Lampung Selatan harus berpikir untuk berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan sektor-sektor ini. Keempat, nilai tambah, sektor industri dan jasa seringkali memiliki nilai tambah yang lebih tinggi daripada pertanian. Ini berarti mereka menghasilkan produk atau layanan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi, secara makro hal ini yang dapat meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk mendukung perubahan jumlah penduduk, dibutuhkan dukungan sarana prasarana infrastruktur. Sarana prasarana infrastruktur merupakan suatu dasar atau kerangka pada suatu permukiman yang bermanfaat sebagai komponen pelayan masyarakat yang berfungsi mendukung segala aktifitas yang ada di permukiman tersebut melalui fasilitas-fasilitas yang disiapkan. Sarana Infrastruktur itu sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) macam:

1. Sarana prasarana yang bersifat fisik merupakan bangunan pendukung permukiman yang terlihat.
2. Sarana prasarana yang bersifat sistem, dimana sarana prasarana ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tetapi karena sistemnya yang berjalan baik.

Untuk menunjang perkembangan jumlah penduduk maka diperlukan proyeksi kebutuhan sarana prasarana lingkungan. Dalam memproyeksikan kebutuhan sarana prasarana ini merujuk pada SNI 03-1733-2004, Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

Tabel 2.75 Proyeksi Kebutuhan Listrik (Kwh)

Kecamatan	2025	2030	2035	2040	2045
Natar	288.509	289.341	290.174	291.006	291.839
Jati Agung	256.374	315.242	374.109	432.977	491.844
Tanjung Bintang	139.527	154.212	168.897	183.582	198.267
Tanjung Sari	54.540	60.503	66.465	72.428	78.390
Katibung	121.994	133.214	144.434	155.654	166.874
Merbau Mataram	104.025	121.320	138.615	155.910	173.205
Way Sulan	40.965	44.715	48.465	52.215	55.965
Sidomulyo	118.094	135.486	152.879	170.271	187.664
Candipuro	93.740	99.770	105.800	111.830	117.860
Way Panji	29.978	32.363	34.748	37.133	39.518
Kalianda	156.305	168.912	181.520	194.127	206.735
Rajabasa	43.875	49.508	55.140	60.773	66.405
Palas	101.882	110.732	119.582	128.432	137.282
Sragi	59.853	65.126	70.398	75.671	80.943
Penengahan	76.613	87.975	99.338	110.700	122.063
Ketapang	87.870	94.800	101.730	108.660	115.590
Bakauheni	38.649	40.194	41.739	43.284	44.829
Jumlah	1.812.789	2.003.409	2.194.029	2.384.649	2.575.269

Sumber: BPS (Data Diolah) 2023

Tabel 2.76 Proyeksi Kebutuhan Air Minum

No	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/tahun)					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Natar	141.215.434	145.897.493	157.602.642	169.307.791	181.012.940	192.718.088
2	Jati Agung	101.204.937	104.560.431	112.949.166	121.337.901	129.726.636	138.115.371
3	Tanjung Bintang	63.094.484	65.186.409	70.416.222	75.646.035	80.875.848	86.105.661
4	Tanjung Sari	24.315.278	25.121.462	27.136.921	29.152.380	31.167.839	33.183.298
5	Katibung	55.171.867	57.001.114	61.574.233	66.147.351	70.720.470	75.293.588
6	Merbau Mataram	44.390.570	45.862.359	49.541.831	53.221.303	56.900.775	60.580.246
7	Way Sulan	18.375.487	18.984.734	20.507.853	22.030.971	23.554.089	25.077.207
8	Sidomulyo	50.311.308	51.979.401	56.149.635	60.319.869	64.490.102	68.660.336
9	Candipuro	43.184.756	44.616.565	48.196.089	51.775.613	55.355.137	58.934.660
10	Way Panji	13.560.188	14.009.782	15.133.767	16.257.752	17.381.737	18.505.722
11	Kalianda	71.032.869	73.387.995	79.275.809	85.163.624	91.051.439	96.939.253
12	Rajabasa	19.123.810	19.757.868	21.343.014	22.928.160	24.513.305	26.098.451
13	Palas	45.887.289	47.408.702	51.212.235	55.015.768	58.819.301	62.622.834
14	Sragi	26.841.443	27.731.383	29.956.232	32.181.082	34.405.931	36.630.781
15	Penengahan	32.762.108	33.848.350	36.563.955	39.279.560	41.995.165	44.710.770
16	Ketapang	40.087.366	41.416.480	44.739.266	48.062.051	51.384.836	54.707.622
17	Bakauheni	18.355.120	18.963.692	20.485.122	22.006.552	23.527.982	25.049.412

Sumber: BPS (Data Diolah) 2023

Tabel 2.77 Proyeksi Timbunan Sampah

Timbunan Sampah per Kecamatan (ton)	2025	2030	2035	2040	2045
	Jumlah Sampah (ton/5 tahun)	Jumlah Sampah (ton/5 tahun)	Jumlah Sampah (ton/5 tahun)	Jumlah Sampah (ton/5 tahun)	Jumlah Sampah (ton/5 tahun)
Natar	245.713	246.422	247.131	247.840	248.549
Jati Agung	218.345	268.481	318.616	368.752	418.887
Tanjung Bintang	118.830	131.337	143.844	156.351	168.857
Tanjung Sari	46.450	51.528	56.606	61.684	66.762

Timbunan Sampah per Kecamatan (ton)	2025	2030	2035	2040	2045
	Jumlah Sampah (ton/5 tahun)	Jumlah Sampah (ton/5 tahun)	Jumlah Sampah (ton/5 tahun)	Jumlah Sampah (ton/5 tahun)	Jumlah Sampah (ton/5 tahun)
Katibung	103.898	113.453	123.009	132.565	142.121
Merbau Mataram	88.595	103.324	118.054	132.783	147.513
Way Sulan	34.889	38.082	41.276	44.470	47.664
Sidomulyo	100.576	115.389	130.202	145.014	159.827
Candipuro	79.835	84.970	90.106	95.241	100.377
Way Panji	25.531	27.562	29.593	31.625	33.656
Kalianda	133.119	143.857	154.594	165.331	176.069
Rajabasa	37.367	42.164	46.961	51.758	56.555
Palas	86.769	94.306	101.844	109.381	116.918
Sragi	50.975	55.465	59.956	64.446	68.936
Penengahan	65.248	74.925	84.602	94.280	103.957
Ketapang	74.836	80.738	86.640	92.542	98.444
Bakauheni	32.916	34.232	35.548	36.864	38.179
Jumlah	1.543.892	1.706.237	1.868.581	2.030.926	2.193.271

Sumber: BPS (Data Diolah), 2023

Tabel 2.78 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Posyandu)

No	Kecamatan	Kebutuhan Sarana Kesehatan Posyandu					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Natar	155	160	173	186	198	211
2	Jati Agung	111	115	124	133	142	151
3	Tanjung Bintang	69	71	77	83	89	94
4	Tanjung Sari	27	28	30	32	34	36
5	Katibung	60	62	67	73	77	83
6	Merbau Mataram	49	50	54	58	62	66
7	Way Sulan	20	21	22	24	26	27
8	Sidomulyo	55	57	62	66	71	75
9	Candipuro	47	49	53	57	61	65
10	Way Panji	15	15	17	18	19	20
11	Kalianda	78	80	87	93	100	106
12	Rajabasa	21	22	23	25	27	29
13	Palas	50	52	56	60	64	69
14	Sragi	29	30	33	35	38	40
15	Penengahan	36	37	40	43	46	49
16	Ketapang	44	45	49	53	56	60
17	Bakauheni	20	21	22	24	26	27

Sumber: BPS (Data Diolah), 2023

Tabel 2.79 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Puskemas)

No	Kecamatan	Kebutuhan Sarana Kesehatan Puskemas					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Natar	6	7	7	8	8	9
2	Jati Agung	5	5	5	6	6	6
3	Tanjung Bintang	3	3	3	3	4	4
4	Tanjung Sari	1	1	1	1	1	2
5	Katibung	3	3	3	3	3	3
6	Merbau Mataram	2	2	2	2	3	3
7	Way Sulan	1	1	1	1	1	1
8	Sidomulyo	2	2	3	3	3	3
9	Candipuro	2	2	2	2	3	3
10	Way Panji	1	1	1	1	1	1
11	Kalianda	3	3	4	4	4	4
12	Rajabasa	1	1	1	1	1	1
13	Palas	2	2	2	2	3	3

No	Kecamatan	Kebutuhan Sarana Kesehatan Puskesmas					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
14	Sragi	1	1	1	1	2	2
15	Penengahan	1	2	2	2	2	2
16	Ketapang	2	2	2	2	2	2
17	Bakauheni	1	1	1	1	1	1

Sumber : BPS (Data Diolah), 2023

Tabel 2.80 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Tempat Praktik Dokter)

No	Kecamatan	Kebutuhan Sarana Kesehatan Tempat Praktik Dokter					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Natar	39	40	43	46	50	53
2	Jati Agung	28	29	31	33	36	38
3	Tanjung Bintang	17	18	19	21	22	24
4	Tanjung Sari	7	7	7	8	9	9
5	Katibung	15	16	17	18	19	21
6	Merbau Mataram	12	13	14	15	16	17
7	Way Sulan	5	5	6	6	6	7
8	Sidomulyo	14	14	15	17	18	19
9	Candipuro	12	12	13	14	15	16
10	Way Panji	4	4	4	4	5	5
11	Kalianda	19	20	22	23	25	27
12	Rajabasa	5	5	6	6	7	7
13	Palas	13	13	14	15	16	17
14	Sragi	7	8	8	9	9	10
15	Penengahan	9	9	10	11	12	12
16	Ketapang	11	11	12	13	14	15
17	Bakauheni	5	5	6	6	6	7

Sumber: BPS Diolah, 2023

Tabel 2.81 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (TK)

No	Kecamatan	Kebutuhan Sarana Pendidikan TK					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Natar	155	160	173	186	198	211
2	Jati Agung	111	115	124	133	142	151
3	Tanjung Bintang	69	71	77	83	89	94
4	Tanjung Sari	27	28	30	32	34	36
5	Katibung	60	62	67	73	77	83
6	Merbau Mataram	49	50	54	58	62	66
7	Way Sulan	20	21	22	24	26	27
8	Sidomulyo	55	57	62	66	71	75
9	Candipuro	47	49	53	57	61	65
10	Way Panji	15	15	17	18	19	20
11	Kalianda	78	80	87	93	100	106
12	Rajabasa	21	22	23	25	27	29
13	Palas	50	52	56	60	64	69
14	Sragi	29	30	33	35	38	40
15	Penengahan	36	37	40	43	46	49

No	Kecamatan	Kebutuhan Sarana Pendidikan TK					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
16	Ketapang	44	45	49	53	56	60
17	Bakauheni	20	21	22	24	26	27

Sumber: BPS Diolah, 2023

Tabel 2.82 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (SD)

No	Kecamatan	Kebutuhan Sarana Pendidikan SD					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Natar	121	125	135	145	155	165
2	Jati Agung	87	90	97	104	111	118
3	Tanjung Bintang	54	56	60	65	69	74
4	Tanjung Sari	21	22	23	25	27	28
5	Katibung	47	49	53	57	61	64
6	Merbau Mataram	38	39	42	46	49	52
7	Way Sulan	16	16	18	19	20	21
8	Sidomulyo	43	45	48	52	55	59
9	Candipuro	37	38	41	44	47	50
10	Way Panji	12	12	13	14	15	16
11	Kalianda	61	63	68	73	78	83
12	Rajabasa	16	17	18	20	21	22
13	Palas	39	41	44	47	50	54
14	Sragi	23	24	26	28	29	31
15	Penengahan	28	29	31	34	36	38
16	Ketapang	34	35	38	41	44	47
17	Bakauheni	16	16	18	19	20	21

Sumber: BPS Diolah, 2023

Tabel 2.83 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (SMP)

No	Kecamatan	Kebutuhan Sarana Pendidikan SMP					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Natar	40	42	45	48	52	55
2	Jati Agung	29	30	32	35	37	39
3	Tanjung Bintang	18	19	20	22	23	25
4	Tanjung Sari	7	7	8	8	9	9
5	Katibung	16	16	18	19	20	21

No	Kecamatan	Kebutuhan Sarana Pendidikan SMP					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
6	Merbau Mataram	13	13	14	15	16	17
7	Way Sulan	5	5	6	6	7	7
8	Sidomulyo	14	15	16	17	18	20
9	Candipuro	12	13	14	15	16	17
10	Way Panji	4	4	4	5	5	5
11	Kalianda	20	21	23	24	26	28
12	Rajabasa	5	6	6	7	7	7
13	Palas	13	14	15	16	17	18
14	Sragi	8	8	9	9	10	10
15	Penengahan	9	10	10	11	12	13
16	Ketapang	11	12	13	14	15	16
17	Bakauheni	5	5	6	6	7	7

Sumber: BPS Diolah, 2023

Tabel 2.84 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (SMA)

No	Kecamatan	Kebutuhan Sarana Pendidikan SMA					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Natar	40	42	45	48	52	55
2	Jati Agung	29	30	32	35	37	39
3	Tanjung Bintang	18	19	20	22	23	25
4	Tanjung Sari	7	7	8	8	9	9
5	Katibung	16	16	18	19	20	21
6	Merbau Mataram	13	13	14	15	16	17
7	Way Sulan	5	5	6	6	7	7
8	Sidomulyo	14	15	16	17	18	20
9	Candipuro	12	13	14	15	16	17
10	Way Panji	4	4	4	5	5	5
11	Kalianda	20	21	23	24	26	28
12	Rajabasa	5	6	6	7	7	7
13	Palas	13	14	15	16	17	18
14	Sragi	8	8	9	9	10	10
15	Penengahan	9	10	10	11	12	13
16	Ketapang	11	12	13	14	15	16
17	Bakauheni	5	5	6	6	7	7

Sumber: BPS Diolah, 2023

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045 harus selaras dengan Rencana Pembangunan Tata Ruang Wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan telah disusun dan diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, namun seiring dengan pesatnya pembangunan dan dinamika yang ada, ditambah dengan kebijakan yang berubah ditingkat pusat juga provinsi dan daerah, aturan tersebut telah ditinjau melalui Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan di awal Tahun 2019. Hasilnya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 15 Tahun 2012 tentang Pemutakhiran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022-2042.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.

Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana sesuai arahan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Lebih lanjut, dalam Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah masuk kedalam koridor ekonomi wilayah 1 (Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi).

2.7.1 Rencana Pengembangan Wilayah

Rencana pengembangan wilayah mengacu pada rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah;
- b. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- d. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- e. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
 - 2) memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL);
 - 3) harus berhirarki dan/atau berjejaring di dalam ruang wilayah kabupaten serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan; dan
 - 4) mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten, yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang menunjang keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan
- f. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka panjang menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- g. Mengacu pada ketentuan perundang-undangan lainnya.

Arah pengembangan wilayah di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan koridor pengembangan wilayah Provinsi Lampung diantaranya :



- Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah, termasuk pengembangan wilayah metropolitan dan sistem angkutan umum masal perkotaan;
- Memantapkan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung pada kawasan kota baru lampung;
- Bagian dari Kawasan strategis Pariwisata Teluk Lampung;
- Pengembangan Bakauheni Harbour City (BHC)
- Pembangunan Kawasan Kesehatan Internasional di Bandara Radin Intan (Aerotropolis);
- Pengembangan sport center;

- Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Krakatau Lampung Selatan.

Selaras dengan arah pengembangan wilayah Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Selatan, arah pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Selatan pada 2025-2045 diantaranya adalah :

- Pengembangan kawasan perkotaan, wilayah metropolitan dan sistem angkutan umum masal perkotaan;
- Memantapkan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung pada kawasan Kota Baru Lampung;
- Pengembangan Bakauheni Harbour City (BHC);
- Pembangunan Kawasan Kesehatan Internasional di Bandara Radin Intan (Aerotropolis);
- Pengembangan sport center Jati Agung;
- Pengembangan Tol Lematang-Panjang;
- Pengembangan Kawasan Industri Katibung dan Kawasan Industri Way Pisang;
- Pemekaran Wilayah Kabupaten Lampung Selatan; dan
- Kabupaten Lampung Selatan masuk dalam pengembangan Koridor ekonomi Wilayah I Lampung sebagai Hub Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Ketahanan Pangan, Industri berbasis inovasi, dan Teknologi.

Rencana Pengembangan	Detail Pengembangan	Desain
<p>Pembangunan kawasan terintegrasi pariwisata Bakauheni</p>	<p>Program Kolaborasi antara Pemprov Lampung, ASDP dan Utama Karya dengan luas \pm 251,05 Ha di wilayah Bakauheni yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Krakatau dan sekitarnya Akan dilengkapi dengan Dermaga Kapal Pesiar (Yacht Marina) dan akan menjadi <i>Hub Laut Utama</i> menuju Kawasan Wisata Teluk Lampung (Gunung Anak Krakatau, Pulau Tegal Mas, Pahawang, Kiluan dll) hingga Kawasan Pariwisata Pantai Barat Lampung.</p>	 <p>Program Kolaborasi antara Pemprov Lampung, ASDP dan Utama Karya dengan luas \pm 251,05 Ha di wilayah Bakauheni yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Krakatau dan sekitarnya</p> <p>Akan dilengkapi dengan Dermaga Kapal Pesiar (Yacht Marina) dan akan menjadi <i>Hub Laut Utama</i> menuju Kawasan Wisata Teluk Lampung (Gunung Anak Krakatau, Pulau Tegal Mas, Pahawang, Kiluan dll) hingga Kawasan Pariwisata Pantai Barat Lampung.</p> <p>Kepemilikan Lahan ASDP = 57,2 Ha PK = 15,2 Ha Pemprov = 178,6 Ha</p>

Kota Baru Lampung dan Sport Centre Jati Agung		
Aero city Raden Intan		

Sumber: RTRW Provinsi Lampung, 2023

2.7.2 Sistem Pusat Permukiman

Rencana pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi setiap wilayah dalam pengembangan kabupaten secara keseluruhan dalam lingkup Kabupaten Lampung Selatan. Pengembangannya dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan secara berhirarki sesuai potensi yang dimiliki setiap pusat kegiatan, atau didasarkan pada arah kebijakan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pusat kegiatan di wilayah kabupaten terdiri atas:

- 1) PPK atau Pusat Pelayanan Kota;
Pusat Pelayanan Kota (PPK) merupakan Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
- 2) SPPK atau Sub Pusat Pelayanan Kota;
Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) merupakan Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
- 3) PPL atau Pusat Pelayanan Lingkungan
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan yang melayani lingkungan permukiman kota

Dari hasil analisis yang dilakukan, sistem perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan fungsinya terdiri atas Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sistem perkotaan Kabupaten Lampung Selatan direncanakan sebagai berikut.

- 1) Pusat Pelayanan Kota adalah Kecamatan Kalianda dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pariwisata dan perdagangan dan jasa.
- 2) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), meliputi:
 - Natar-Jati Agung dengan fungsi utama sebagai perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan provinsi, pusat pendidikan;
 - Bakauheni dengan fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi dan pariwisata;
 - Tanjung Bintang dengan fungsi utama sebagai pusat industri, pusat perdagangan dan jasa, pertanian dan perkebunan;
 - Sidomulyo dengan fungsi utama sebagai pertanian, perdagangan dan jasa;

- Ketapang dengan fungsi utama kawasan minapolitan, pertanian, pariwisata, dan industri; dan
- Katibung dengan fungsi utama pertanian, industri, perikanan dan Perkebunan.

3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), meliputi:

- Palas dengan fungsi pertanian, permukiman dan perikanan;
- Candipuro dengan fungsi pertanian, permukiman dan perkebunan;
- Merbau Mataram dengan fungsi pertanian, terminal batubara dan industri;
- Tanjung Sari dengan fungsi pertanian, permukiman dan peternakan;
- Way Sulan dengan fungsi pertanian dan perkebunan;
- Way Panji dengan fungsi pertanian, peternakan dan perikanan;
- Penengahan dengan fungsi pertanian, dan perikanan budidaya;
- Sragi dengan fungsi pertanian, peternakan dan perikanan; dan
- Rajabasa dengan fungsi pariwisata, perkebunan, kawasan lindung, sumber energi.

2.7.3 Sistem Jaringan Prasarana

Sistem jaringan prasarana dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten, meliputi:

2.7.3.1 Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan prasarana di Kabupaten Lampung Selatan berupa sistem jaringan transportasi darat yang menunjang terhadap aktivitas dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan rencana pengembangan yang terpadu dengan sistem rencana tata ruangnya agar aktivitas masyarakat berjalan secara sinergis. Fungsi utama sistem jaringan transportasi adalah menunjang kegiatan pemindahan manusia dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam

pengembangan wilayah, sistem transportasi berfungsi untuk menjembatani keterkaitan fungsional antar kegiatan sosial ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan. Sesuai dengan fungsi tersebut, maka pengembangan sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan tata ruang Kabupaten Lampung Selatan.

Fungsi utama sistem jaringan transportasi adalah menunjang kegiatan pemindahan manusia dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam pengembangan wilayah, sistem transportasi berfungsi untuk menjembatani keterkaitan fungsional antar kegiatan sosial ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan. Sesuai dengan fungsi tersebut, maka pengembangan sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan tata ruang Kabupaten Lampung Selatan.

A. Jalan Umum

Jalan Umum Meliputi :

(a) jalan arteri berupa jalan arteri primer meliputi:

- ✓ ruas Jalan Way Skp. Bunut (Bts. Kab. Lamsel/Kab.Lamtim)
Sp. Bakauheni;
- ✓ ruas Jalan Sukamaju - Sp. Kalianda; dan
- ✓ ruas Jalan Sp. Kalianda – Bakauheni.

(b) Jalan kolektor berupa jalan kolektor primer meliputi :

- ✓ ruas jalan Way Galih – Bergen
- ✓ ruas Jalan Sp. Korpri – Sukadamai
- ✓ ruas Jalan Sukadamai – Kibang
- ✓ ruas Jalan Sp. Sidomulyo - Belimbing Sari
- ✓ ruas Jalan Way Baka – Totoharjo
- ✓ ruas Jalan Zainal Abidin Pagaralam (Kalianda);
- ✓ ruas Jalan Kalianda - Kunjir - Gayam; dan
- ✓ ruas Jalan Gayam – Ketapang.
- ✓ ruas Jalan Pesisir
- ✓ ruas Jalan Tj Heran – Penengahan ; dan

- ✓ ruas jalan Trans Ketapan Umbul Dana
- (c) Jalan lokal berupa jalan lokal primer meliputi :
 - ✓ Jalan Komarudin – Jalan Padat Karya
 - ✓ Jalan kusuma bangsa;
 - ✓ Jalan Kedaton.
- (d) Jalan lingkungan yang tersebar diseluruh kecamatan.

B. Jalan Tol

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Jalan TOL merupakan jalan nasional yang dikembangkan untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan dengan syarat pengguna jalan harus membayar biaya tol. Berdasarkan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang dimulai pada tahun 2015 memberikan dampak cukup signifikan yaitu menurunnya biaya logistik dan juga berdampak pada kenaikan volume perdagangan dan investasi yang akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan kenaikan pendapatan masyarakat. Pembangunan jalan tol ini telah menjadi salah satu solusi dalam pengembangan wilayah melalui konektivitas darat yang semakin mudah terjangkau. Selain itu, dengan adanya jalan tol semakin menambah volume kedatangan wisatawan domestik khususnya dari luar Provinsi Lampung. Sehingga dampaknya adalah semakin menggeliatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung.

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Jalan Tol Trans Sumatera yang melalui Provinsi Lampung direncanakan memiliki panjang ± 240 Km terbentang dari Bakauheni hingga Pematang Panggang. Terdapat rencana peningkatan konektivitas ruas provinsi yang terhubung dengan 4 exit tol

salah satunya adalah exit tol Kotabaru(Jl. Mayjen H.M Ryacudu, Bandar Lampung-Lampung Selatan) sepanjang 5 Km. Peningkatan ruas jalan tersebut dilakukan karena adanya dampak dari peningkatan kendaraan yang dapat menyebabkan kemacetan. Pembangunan Jalan TOL Bakauheni yang merupakan bagian dari 8 ruang Trans Sumatera yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Sampai saat ini telah terdapat 7 exit Tol yang terdiri dari Exit TOL Bakauheni Utara, Bakauheni Selatan, Kalianda, Sidomulyo, Lematang, Kotabaru dan Natar di Kabupaten Lampung Selatan.

C. Terminal Penumpang

Terminal merupakan tempat awal dan akhir dari operasi transportasi atau trayek. Sehingga terminal transportasi merupakan titik simpul dalam jaringan transportasi yang memiliki fungsi sebagai pelayanan umum. Terminal juga memiliki peran sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan, dan pengoperasian lalu lintas. Dalam konteks tata ruang, terminal memiliki peranan penting bagi efisiensi kehidupan kota khususnya pada bidang transportasi.

Menurut petunjuk teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), berdasarkan jenis angkutannya, terminal dibedakan menjadi dua jenis yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Terminal penumpang merupakan sarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sedangkan terminal barang merupakan sarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

Menurut fungsinya terminal adalah untuk mengendalikan arus kendaraan dan penumpang umum sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan penduduk untuk bergerak atau berhubungan dengan berbagai kegiatannya. Adapun tipe terminal yang akan

diterapkan sesuai dengan tipologi terminal yang diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 tahun 1995.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, rencana pengembangan terminal di wilayah Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

- ✓ Terminal tipe A berada di Terminal Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;
- ✓ Terminal tipe penumpang B di Kecamatan Kalianda;
- ✓ Terminal penumpang tipe C di Bunut Kecamatan Sragi; dan
- ✓ Terminal Terpadu Intermoda Stasiun Branti-Raden Inten II di

D. Terminal Barang

Terminal barang yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan berupa terminal agribisnis di Kawasan Industri Way Pisang.

E. Jembatan Timbang

Jembatan Timbang Way Urang di Kabupaten Lampung Selatan.

F. Jembatan

Rencana jembatan terdapat meliputi rencana pembangunan jembatan antar pulau yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang melintasi Selat Sunda. Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Lampung Selatan khususnya dan Provinsi Lampung umumnya dengan memperlancar arus barang dan orang dari dan ke pulau Sumatera. Rencana ini merupakan rencana Pemerintah.

Selain itu, direncanakan pula jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang di Kabupaten Lampung Selatan meliputi angkutan barang dan angkutan orang. Angkutan barang hanya memiliki dua trayek yaitu:

- ✓ Kecamatan Ketapang – Bakauheni – Kalianda – Bandar Lampung; dan
- ✓ Kecamatan Kalianda – Bakauheni – Palas – Sragi – Ketapang – Kalianda.

Sedangkan trayek angkutan penumpang meliputi:

- ✓ Kecamatan Ketapang – Bakauheni – Kalianda – Bandar Lampung;
- ✓ Kecamatan Kalianda – Bandar Lampung;
- ✓ Kecamatan Kalianda – Ketapang;
- ✓ Kecamatan Kalianda – Rajabasa;
- ✓ Kecamatan Kalianda – Sidomulyo
- ✓ Kecamatan Kalianda – Bakauheni; dan
- ✓ Kecamatan Kalianda – Palas.

Selain dari trayek yang sudah ada akan dikembangkan trayek utama, trayek pendukung yang saling menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan, termasuk pengembangan trayek baru antar kabupaten dan antar provinsi melalui terminal rejosari, dari terminal rejosari menuju Bakauheni, stasiun, dan bandara udara. Bentuk kegiatan transportasi ini pada dasarnya merupakan jasa yang melayani pergerakan masyarakat dari kegiatan-kegiatan sosial ekonomi penduduk. Oleh karena itu pelayanan dari sistem transportasi kabupaten secara keseluruhan harus mencerminkan keadaan struktur sosial ekonomi kabupaten yang bersangkutan serta fungsi dari kawasan kabupaten secara keseluruhan, atau dapat pula sebaliknya. Suatu pengembangan dari sistem transportasi dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan kabupaten pada setiap kawasan yang dikembangkan. Konsep pengembangan untuk transportasi pada wilayah perkotaan Kabupaten Lampung Selatan adalah:

- ✓ Peningkatan konstruksi dan sistem rambu-rambu serta median jalan
- ✓ Peningkatan kelas/ kualitas jalan dan perbaikan kondisi jalan

- ✓ Pengembangan dan peningkatan jumlah armada angkutan sesuai dengan kebutuhan
- ✓ Pengembangan dan peningkatan fasilitas pendukung transportasi



Gambar 2.45 Sistem Jaringan Infrastruktur Transportasi

2.7.3.2 Sistem Jaringan Kereta Api

Dalam rencana Induk Perkeretaapian Nasional telah direncanakan pengembangan perkeretaapian nasional sampai tahun 2030. Selain itu, tujuan dari Rencana Induk Perkeretaapian Nasional adalah sebagai landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional serta menjadi rujukan

dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan.

Penyelenggaraan perkeretaapian nasional diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui perwujudan visi perkeretaapian nasional tahun 2030 yaitu mewujudkan perkeretaapian yang berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan mampu menjawab tantangan perkembangan. Pewujudan dari visi penyelenggaraan perkeretaapian nasional tersebut, maka pengembangan perkeretaapian nasional diarahkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan perkeretaapian nasional yang mandiri dan berdaya saing, menerapkan prinsip-prinsip “*good govemance*” serta didukung oleh sumber daya manusia perkeretaapian yang unggul, industri yang tangguh, iklim investasi yang kondusif, pendanaan yang kuat dengan melibatkan peran swasta.
2. Mewujudkan perkeretaapian yang berteknologi modem, daya angkut besar, berkecepatan tinggi dan ramah lingkungan.
3. Mewujudkan pelayanan prasarana dan sarana perkeretaapian yang handal dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional, dan terintegrasi dengan moda lain, serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peranan Angkutan Perkeretaapian Nasional dalam Tataran Transportasi Nasional adalah untuk memberikan layanan transportasi yang menyeluruh kepada masyarakat maka layanan moda ini harus terintegrasi dengan layanan moda lain seperti moda udara, moda darat dan moda laut. Bentuk- bentuk layanan ini akan terus dikembangkan pada masa yang akan datang, sehingga layanan kereta api tidak lagi

identik dengan perjalanan antarkota, tetapi akan semakin berkembang menjadi layanan kereta menuju bandara (*airport railway*), layanan kereta api perkotaan (*urban transport railway*) dan layanan kereta api menuju pelabuhan (*port railway*).

Transportasi perkeretaapian ke depan diharapkan dapat berperan sebagai penghubung antara simpul-simpul transportasi seperti terminal, pelabuhan dan bandara serta dapat menghubungkan pusat-pusat kegiatan industri dan pertambangan dengan pelabuhan sebagai outlet bongkar muat perdagangan barang. Selain itu, perkeretaapian nasional juga diharapkan mampu berperan dalam mendukung keterhubungan wilayah (*domestic connectivity*) serta distribusi logistik nasional.

Sasaran pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Sumatera adalah mewujudkan Trans Sumatera Railways dan menghubungkan jalur kereta api eksisting yang sudah ada yaitu di Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung menjadi jaringan jalur kereta api yang saling terhubung. Sampai dengan tahun 2030 direncanakan akan dibangun secara bertahap prasarana perkeretaapian meliputi jalur dan fasilitas operasi kereta api, diantaranya meliputi:

1. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antarkota pada lintas utama Banda Aceh-Sigli-Bireun-Lhokseumawe, LangsaBesitang, Binjai-Besitang, Rantauprapat -Duri-Dumai, DuriPekanbaru, Pekanbaru-Muaro, Pekanbaru-Rengat, Rengat-Jambi, Jambi-Betung, Betung-Simpang, Tarahan-Bakauheni, Sei MangkeBandar Tinggi-Kuala Tanjung, shortcut Tegineneng-Tarahan, Muaro Kalaban-Muaro, jalur ganda Kertapati-Prabumulih, Pematang Siantar-Danau Toba, reaktivasi Belawan-Gabion, reaktivasi Padang-Pulo Aer, reaktivasi Naras-Sungai Limau serta reaktivasi Muaro Kalaban-Logas.

2. Pengembangan dan layanan kereta api perkotaan yaitu meliputi kota: Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Bandar Lampung dan Batam.
3. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan pusat kota dengan bandara yaitu: Kualanamu (Medan), Minangkabau (Padang), Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang) dan Hang Nadim (Batam).
4. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumber daya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan meliputi: Lhokseumawe, Belawan, Kuala Tanjung (Sumatera Utara), Tanjung Api-api (Sumatera Selatan), Dumai (Riau), Teluk Bayur (Sumatera Barat), Pelabuhan Panjang (Lampung), Tarahan (Lampung), Bakauheni (Lampung).
5. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera (interkoneksi).
6. Pengembangan sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan serta sistem teknologi penunjang keselamatan.
7. Pengembangan sistem penyimpanan material (termasuk pergudangan) serta peralatan penunjang prasarana perkeretaapian (konstruksi, pengujian dan perawatan).
8. Pengembangan peralatan/ fasilitas penanganan kecelakaan kereta api, penanganan perlintasan sebidang.
9. Pengembangan stasiun kereta api termasuk fasilitas park and ride pada pusat-pusat kegiatan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/ kota.

Spesifikasi teknis dasar untuk jaringan kereta api eksisting di koridor Sumatera secara umum menggunakan lebar jalan rel 1067 mm. Pengembangan jalur kereta api dengan menggunakan lebar gauge yang berbeda seperti yang telah terbangun di wilayah Aceh (1435 mm) tetap dimungkinkan berdasarkan kajian maupun kebijakan. Secara umum, rencana kereta api mengikuti ketentuan tersebut diatas sesuai dengan

rencana induk perkereta-apian. dan rencana jaringan kereta api di Kabupaten Lampung Selatan meliputi:

- a. Jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang
 - ✓ jalur Tegineneng - Bakauheni; dan
 - ✓ Jalur menuju bandara
- b. Stasiun kereta api, berupa stasiun penumpang yang meliputi :
 - ✓ Stasiun Gedungratu;
 - ✓ Stasiun Branti;
 - ✓ Stasiun Relunghelok;
 - ✓ Stasiun Karangsari;
 - ✓ Stasiun Sabahbalau; dan
 - ✓ Pemindahan Stasiun Rejosari ke Kawasan sekitar Bandara Radin Inten.

2.7.3.3 Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, meliputi:

1. pelabuhan Bakauheni berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan antar Pulau Sumatera – Pulau Jawa (Provinsi Banten).
2. pelabuhan Ketapang dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan arus penyeberangan pada Pelabuhan Bakauheni.
3. pelabuhan penyeberangan lokal yang berfungsi sebagai penghubung antara daratan dengan pulau-pulau terluar, meliputi Canti – Pulau Sebesi – Pulau Sebuku.
4. pembangunan jembatan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang melintasi Selat Sunda.

2.7.3.4 Sistem Jaringan Transportasi Laut

Berdasarkan Permen ATR/Ka.BPN No 11 Tahun 2021 tentang Sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan laut, dapat meliputi:

1. pelabuhan utama yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta
2. pelabuhan pengumpul yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi;
3. Pelabuhan pengumpan, meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan regional yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan/atau
 - b. pelabuhan pengumpan lokal yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
4. terminal umum yaitu bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam

jangka waktu tertentu dan kompetensi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk Kerjasama lainnya;

Selain itu, pemerintah daerah kabupaten dapat merencanakan pelabuhan pengumpan lokal yang diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. terminal khusus yaitu terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya; dan/atau
6. Pelabuhan perikanan, meliputi:
 - a. pelabuhan perikanan samudera yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A;
 - b. pelabuhan perikanan nusantara yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B;
 - c. pelabuhan perikanan pantai yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C; dan/atau

- d. pangkalan pendaratan ikan yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka di Kabupaten Lampung Selatan sistem jaringan transportasi laut meliputi:

1. Pelabuhan pengumpul berupa Pelabuhan Bakauheni.
2. Pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
 - Pelabuhan Ketapang;
 - Pelabuhan Canti;
 - Pelabuhan Pulau Sebuk;
 - Pelabuhan Sebalang di Kecamatan Katibung;
 - Pelabuhan Kalianda;
 - Pelabuhan Legundi; dan
 - Pelabuhan Pulau Sebesi.
3. Terminal khusus berupa terminal khusus Banding Resort di Kecamatan Rajabasa yang berfungsi sebagai pendukung pariwisata.
4. Pelabuhan perikanan
Pengembangan Pelabuhan perikanan terdiri dari:
 - Pengembangan dermaga perikanan;
 - Pengembangan Pelabuhan perikanan Pantai (PPP); dan
 - Pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI)

2.7.3.5 Sistem Jaringan Transportasi Udara

Sistem jaringan transportasi udara berupa bandar udara umum dan bandar udara khusus, yang meliputi:

1. Bandar udara pengumpul, dapat meliputi:

- Bandar udara pengumpul skala layanan primer;
- Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder; dan/atau
- Bandar udara pengumpul skala tersier.

2. bandar udara pengumpan; dan/atau bandar udara khusus.

Dari kriteria tersebut, di Kabupaten Lampung Selatan diketahui terdapat bandar udara dan ruang udara untuk penerbangan. Bandar udara adalah berupa bandara pengumpul Radin Inten II Kabupaten Lampung Selatan. Bandara Raden Intan II adalah merupakan satu-satunya bandara yang melayani penerbangan komersial di Propinsi Lampung. Bandara Raden Intan terletak di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan yang berjarak lebih kurang 28 km dari Bandar Lampung. Dalam rangka pengembangan bandara sebagai pintu gerbang lalu lintas udara di Propinsi Lampung tahun 1996/1997 dilakukan perpanjangan landasan runway dari 1.050m menjadi 2.200m, sehingga mampu didarati pesawat sejenis Boeing 737. Rencana ini disesuaikan dengan Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura sebagai penyelenggara ketatabandarudaraan di Indonesia.

Selain pengembangan sarana penunjang bandara untuk aktivitas penerbangan, perlu pula dilakukan upaya pengamanan kawasan sekitar bandara agar tidak membahayakan aktivitas penerbangan, serta penataan dan pengaturan kawasan keselamatan operasi penerbangan, terutama yang menyangkut jenis kegiatan dan pengaturan ketinggian bangunan.

2.7.4 Sistem Jaringan Energi

Pemerataan pelayanan terhadap kebutuhan listrik tersebut perlu diusahakan semaksimal mungkin mengingat salah satu indikator berkembangnya suatu kota atau wilayah adalah terpenuhinya kebutuhan akan penerangan/listrik. Jenis pembangkit yang disediakan untuk tiap kawasan tidak harus sama, melainkan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, kemungkinan pencapaian hasil yang maksimal

dengan biaya yang terjangkau. Hal tersebut dapat dilakukan, mengingat telah terdapat berbagai penelitian mengenai berbagai macam sumber energi yang dapat digunakan untuk mengantisipasi kesulitan penyediaan listrik oleh PT. PLN. Rencana sistem jaringan energi yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan meliputi:

1. Jaringan minyak dan gas bumi meliputi:

Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi berupa pengembangan jaringan distribusi melalui Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan yang ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan industri Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.

2. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:

a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:

- pemanfaatan dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Unit 3 dan 4 yang terdapat di Kecamatan Ketibung;
- pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Merbau Mataram;
- pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di PLTP Rajabasa;
- pengembangan dan peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di PLTD Kalianda, PLTD Pulau Sebesi dan PLTD Tarahan;
- pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Gas terdapat di Rajabasa
- Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang ditetapkan di PLTMG Lampung Peaker di Kabupaten Lampung Selatan;
- pengembangan Panel Surya sebagai upaya pengadaan energi listrik secara swadaya dari sekelompok penduduk

yang jarak antar rumahnya berdekatan terutama pada pemukiman yang terdapat di pulau – pulau di Kabupaten Lampung Selatan; dan

- Pengembangan pada pulau-pulau kecil atau gugus pulau serta daerah terpencil di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya Pulau Sebuku dan Pulau Sebesi dilaksanakan dengan sistem pembangkit tenaga air skala kecil, tenaga surya, tenaga angin dan tenaga diesel dengan lebih mengutamakan potensi energi yang ada di daerahnya atau disebut juga dengan Program Desa Mandiri Energi.

b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, berupa:

(1) jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, meliputi:

- ✓ pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tenaga Ekstra Tinggi (SUTET) dengan tegangan 500kV merupakan interkoneksi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa
- ✓ pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tenaga Tinggi (SUTT) dengan tegangan 275 kV yang menghubungkan GI Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan dengan GI Sutami di Kota Bandar Lampung.
- ✓ pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tenaga Tinggi (SUTT) dengan tegangan 150 kV yang menghubungkan GI Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan dengan GI Sutami di Kota Bandar Lampung, GI Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan dengan GI Sri Bawono di Kabupaten Lampung Timur, GI Teluk Betung di Kota Bandar Lampung dengan GI Natar di Kabupaten Lampung Selatan, dan GI Natar

di Kabupaten Lampung Selatan dengan GI Tegineneng di Kabupaten Lampung Tengah.

- ✓ Pengembangan jaringan baru yang menghubungkan GI Bakauheni dengan GI Ketapang, GI Ketapang dengan GI Kalianda, dan Jaringan GI Tataan dengan GI Natar.
- (2) jaringan distribusi tenaga listrik berupa:
- ✓ Peningkatan gardu induk eksisting, yaitu: GI Tarahan dengan kapasitas 2 x 30 MVA; GI Natar dengan kapasitas 1 x 30 MVA; dan GI Kalianda dengan kapasitas 1 x 30 MVA.
 - ✓ Pengembangan gardu induk baru, yaitu:
GI Ketapang dengan kapasitas 1 X 30 MVA .Rencana pengembangan gardu induk baru ini berada di Kecamatan Ketapang dan sumber energi listrik ini berasal dari jaringan gardu induk Kalianda dengan transmisi listrik 150 Kv dan GI Bakauheni dengan kapasitas 1 X 30 MVA.

2.7.5 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan untuk memberikan pelayanan komunikasi melalui jaringan telekomunikasi terrestrial terdiri dari jaringan mikro digital, serat optik, mikro analog serta kabel laut, yang akan dikembangkan secara menerus. Potensi permintaan jaringan telepon bersumber pada jumlah rumah tangga dan jumlah peruntukan lainnya seperti industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, sekolah, jasa dan perdagangan, dan sektor lainnya.

1. Jaringan Tetap

Rencana jaringan tetap berupa pengembangan jaringan kabel, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon saluran tetap dan pusat otomatisasi sambungan telepon di Kota Kalianda;
- b. pengembangan sambungan telepon kabel yang diarahkan menjangkau seluruh pusat pelayanan dan wilayah pelayanannya di Kabupaten Lampung Selatan terutama di Kecamatan Kalianda, Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Jatiangung, dan Kecamatan Natar;
- c. peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada Kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan;
- d. penyediaan sarana warung telepon (wartel) dan telepon umum pada lokasi strategis, mudah diakses publik dan kawasan pusat kegiatan masyarakat; dan
- e. pengembangan sistem jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah dengan sistem ducting dan terpadu dengan sistem jaringan bawah tanah lainnya.

2. Jaringan Bergerak

Rencana pengembangan jaringan bergerak, meliputi:

- a. mendorong pihak operator seluler untuk menyelenggarakan pemanfaatan menara telekomunikasi bersama (sharing tower) dalam rangka efisiensi ruang;
- b. melakukan penataan menara Base Transceiver Station (BTS) dengan penyusunan master plan menara BTS bersama pihak operator dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
- c. mengembangkan menara telekomunikasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan perlu terus ditingkatkan, khususnya penambahan jumlah jaringan telekomunikasi, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pelayanan telepon umum, mengingat berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan masih perlu dilakukan penambahan jaringan telekomunikasi. Adapun kebutuhan paling tinggi terdapat di Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Katibung dan Kalianda.

2.7.6 Sistem Sumber Daya Air

Kabupaten Lampung Selatan termasuk dalam Wilayah Sungai (WS) Way Sekampung yang merupakan wilayah sungai strategis provinsi yang menghubungkan Kabupaten Tanggamus – Kabupaten Pringsewu – Pesawaran – Lampung Selatan. Selain itu, Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Lampung Selatan meliputi:

- a. CAT Metro – Kota Bumi terdapat di Kecamatan Natar, Kecamatan Jati Agung, sebagian Kecamatan Tanjung Sari, sebagian Kecamatan Tanjung Bintang, sebagian Kecamatan Merbau Mataram, sebagian Kecamatan Way Sulan, sebagian Kecamatan Katibung, sebagian Kecamatan Sidomuyo, sebagian Kecamatan Kalianda, sebagian Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Way Panji, Kecamatan Palas, Kecamatan Seragi, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni.
- b. CAT Kalianda terdapat di sebagian Kecamatan Sidomuyo, Sebagian Kecamatan Kalianda dan sebagian Kecamatan Rajabasa.

Rencana pengembangan sistem sumber daya air di Kabupaten Lampung Selatan yaitu pengembangan jaringan irigasi ditujukan untuk mengairi areal pertanian potensial di Kabupaten Lampung Selatan. Luas DAS Bandar-Lampung Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas 54.260 Ha yang terdiri dari 29 sub DAS, sedangkan luas DAS Sekampung di Kabupaten Lampung Selatan adalah 192.380 Ha.

Untuk rencana pengembangan DAS di Kabupaten Lampung Selatan adalah:

- Melakukan kegiatan konservasi sumber daya lahan dan air serta pemeliharaan jaringan DAS untuk menjamin tersedianya air untuk keperluan pertanian;
- Pengembangan daerah aliran sungai dapat dilakukan secara terpadu dengan program penyediaan air;
- Pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) Way Sekampung (DAS) Bandar Lampung- Kalianda dengan Sub DAS Way Galih, Way Tarahan, Way Sebalam, Way Lubuk, Way Pisang II, Way Sragi, Way Katibung dan Way Sulan yang secara umum, sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk mengairi (irigasi) sawah dengan pembuatan dam-dam.

Rencana sistem sumber daya air yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan meliputi:

1. Sistem Jaringan Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Di Kabupaten Lampung Selatan dalam pemenuhan akan air irigasi di layani oleh irigasi rawa yang sumbernya berada di Kecamatan Sragi, Palas, bagian timur Kecamatan Candipuro dan Way Sulan, dengan luas potensi area nya adalah 29.160 Ha dengan fun ct sebesar 27.490 Ha. Di kabupaten Lampung Selatan memiliki 2 (dua) DAM, yaitu DAM Way Sulan dan DAM Way Pisang. Lokasi DAM Way Sulan terdapat di Kecamatan Way Sulan, sedangkan DAM Way Pisang terdapat di Kecamatan Sragi. DAM Way Pisang selain berfungsi untuk mengairi sawah juga berfungsi sebagai pengendali banjir.

Sistem jaringan irigasi di Kabupaten Lampung Selatan meliputi:

- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah pusat utuh kabupaten/kota meliputi DI Way Kandis seluas kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) hektar;
- b. DI kewenangan pemerintah provinsi utuh kabupaten/kota meliputi:
 - (1) DI Way Ketibung seluas kurang lebih 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) hektar;
 - (2) DI Way Sulan seluas kurang lebih 1.124 (seribu seratus dua puluh empat) hektar;
 - (3) DI Way Negara Ratu seluas kurang lebih 1.032 (seribu tiga puluh dua) hektar.
 - (4) Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah provinsi meliputi Utuh kabupaten/kota meliputi DI Way Katibung seluas kurang lebih 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) hektar, DI Way Sulan seluas kurang lebih 1.124 (seribu seratus dua puluh empat) hektar, DI Way Negara Ratu seluas kurang lebih 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) hektar.

DI kewenangan pemerintah kabupaten meliputi D.I. Way Jembat Baru, D.I. Way Sedap Dare, D.I. Way Limus, D.I. Way Ketileng, D.I. Way Ruguk, D.I. Way Sri Basuki, D.I. Way Rengas, D.I. Way Supi, D.I. Way Sumur, D.I. Way Asin, D.I. Way Legundi I, D.I. Way Legundi II, D.I. Way Penengahan I, D.I. Way Penengahan II, D.I. Way Tubamati, D.I. Way Sendang Sari, D.I. Way Asahan Hulu, D.I. Way Asahan, D.I. Way Pahibungan, D.I. Way Kelau I, D.I. Way Kelau II, D.I. Way Kelau III, D.I. Way Kelau IV, D.I. Way Kerinjing, D.I. Way Tebing Cepa, D.I. Way Kuripan, D.I. Way Pancur Timah, D.I. Way Kekiling I, D.I. Way Kekiling II, D.I. Way Cidatuan, D.I. Way Cempaka, D.I. Way Sededer, D.I. Way Tetaan, D.I. Way Hamkawoan, D.I. Way Kanggalan, D.I. Way Jejur, D.I. Way Keroncong, D.I. Way Bamban, D.I. Way Pisang Hulu, D.I. Way Curup, D.I. Way Pisang I, D.I. Way Serpong, D.I. Way Bojong, D.I. Way Cugung I, D.I. Way Cugung II, D.I. Way Kunjir I, D.I. Way

Kunjir II, D.I. Way Merak, D.I. Way Muli Kiri, D.I. Way Muli Kanan, D.I. Way Pangkul, D.I. Way Rajabasa, D.I. Way Sabah Bajau, D.I. Way Memata, D.I. Way Sumpuk, D.I. Way Belajung, D.I. Way Gersik, D.I. Way Lappai Tengah, D.I. Way Canggung, D.I. Way Betung, D.I. Way Sumur Dewa, D.I. Way Butok, D.I. Way Pelita Dewa, D.I. Way Hamsari, D.I. Way Cermin, D.I. Way Samoja, D.I. Way Negeri Pandan, D.I. Way Sukaratu Kiri, D.I. Way Sukaratu Kanan, D.I. Way Tabu, D.I. Way Tajimalela I, D.I. Way Tajimalela II, D.I. Way Pematang I, D.I. Way Pematang II, D.I. Way Pematang III, D.I. Way Sobah Limbang, D.I. Way Sumur Kumbang, D.I. Way Nyimut, D.I. Way Kesugihan I, D.I. Way Kesugihan II, D.I. Way Buah Berak, D.I. Way Kedaton, D.I. Way Tutung, D.I. Way Cunggu, D.I. Way Tanjung Iman, D.I. Way Mahima, D.I. Way Tengkujuh, D.I. Way Maja, D.I. Way Kupang Curup, D.I. Way Kupang, D.I. Way Buha, D.I. Way Suban, D.I. Way Tanjung Harapan, D.I. Way Batu Agung, D.I. Way Kertosari, D.I. Way Semambo, D.I. Way Panas dan D.I. Sumber Sari Mandah.

2. Sistem Pengendalian Banjir

Sistem pengendalian daya rusak air terdapat di Rawa Sragi Kecamatan Sragi, Kecamatan Palas, Kecamatan Candipuro, dan Kecamatan Sidomulyo.

2.7.7 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

2.7.7.1 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/ BPN No 1 Tahun 2018, sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:

(1) jaringan perpipaan, yang dapat meliputi:

- (a) unit air baku;
- (b) unit produksi;
- (c) unit distribusi, dan/atau
- (d) unit pelayanan.

(2) Bukan jaringan perpipaan, yang dapat meliputi:

- (a) sumur dangkal;
- (b) sumur pompa;
- (c) bak penampungan air hujan;
- (d) terminal air; dan/atau
- (e) bangunan penangkap mata air.

Sistem jaringan air minum berupa perpipaan pada kota di Kabupaten Lampung Selatan direncanakan secara terintegrasi dan sistematis ditujukan untuk melayani pusat – pusat kegiatan dan pusat – pusat pelayanan melalui pemanfaatan PDAM yang melayani Kecamatan Kalianda, Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Katibung dan Kecamatan Natar.

Sedangkan sistem bukan jaringan perpipaan direncanakan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan terutama wilayah perdesaan berupa :

- ✓ bak penampung air hujan direncanakan di seluruh wilayah terutama wilayah kurang air.
- ✓ pemanfaatan potensi air tanah di Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Katibung, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan
- ✓ Palas; dan
- ✓ pemanfaatan embung di Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Jatiagung, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Katibung.

2.7.7.2 Sistem Jaringan Persampahan

Rencana pengembangan sistem utilitas persampahan ditinjau berdasarkan analisis sistem pengelolaan dan jumlah timbunan/produksi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Lampung Selatan. Perkiraan Jumlah timbunan sampah di Kabupaten Lampung Selatan serta kebutuhan sarana pendukungnya di Kabupaten Lampung Selatan pasti akan meningkat.

Jumlah itu akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sebagai langkah antisipatif dalam pengelolaan sampah di masa yang akan datang. Rencana sistem persampahan kota sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Rencana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi pengembangan TPA dengan sistem pengolahan sanitary landfill di Kecamatan Candipuro.
- b. Rencana Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi
 - Peningkatan Kualitas TPS; dan
 - Pengembangan TPS.
- c. Rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi pengembangan TPST dengan fasilitas 3R di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 2 (dua) sistem, yaitu:

1. Sistem Pengelolaan Sampah Secara Individu.

Pengelolaan sampah secara individu sudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara pembakaran dan ditimbun untuk mengurangi volumenya dan pembuangan akhir berupa penimbunan sisa pembakaran serta sampah lainnya yang tidak dapat dibakar. Sistem ini dapat dilakukan di wilayah yang belum dapat dilayani oleh sistem pengelolaan terpadu.

Pengembangan prasarana persampahan dapat dikelola masyarakat sebagai kewajiban dan peran serta dalam pengelolaan sampah melalui:

- penyediaan tempat pembuangan, pemilahan/pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir sampah individual; dan
 - penyediaan tempat pembuangan, pemilahan/pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir sampah komunal.
2. Rencana sistem jaringan persampahan terpadu di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

Sistem pengelolaan sampah terpadu dikelola oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk menampung sampah dari sarana dan prasarana perkotaan. Pengembangan prasarana persampahan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sampah Daerah.

Untuk menunjang pengelolaan sampah secara terpadu yang akan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, maka prasarana pendukung yang diperlukan adalah:

- Penyediaan kotak-kotak/ tempat sampah
- Penyediaan alat-alat pengumpulan dan pengangkutan sampah
- Unit Usaha Daur Ulang dan Produksi Kompos (UDPK)
- Unit Pemrosesan Akhir

Mengingat komposisi sampah yang umumnya dihasilkan terdiri dari 80 % sampah organik dan 20% sampah anorganik, maka cara yang akan diterapkan dalam sistem pengelolaan sampah baik secara individual maupun terpadu di Kabupaten Lampung Selatan adalah:

- Pengurangan di sumber untuk aspek timbulan sampah sehingga jumlah sampah yang dihasilkan akan berkurang.
- Pemilahan sampah yang ekonomis dalam aspek pewadahan/ pemilahan.
- Pengomposan dan daur ulang dalam proses pengolahan.

Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode pengolahan sampah yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-lembaga yang terkait dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan aspek ekonomi yang mencakup upaya

meningkatkan retribusi sampah dan mengurangi beban pendanaan pemerintah serta peningkatan aspek legal dalam pengelolaan sampah.

2.7.7.3 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Jalur evakuasi bencana di Kabupaten Lampung Selatan adalah seluruh jalur evakuasi bencana tersebut mengikuti jaringan jalan yang telah ada menuju tempat yang lebih aman. Selain itu akan mempersiapkan lokasi-lokasi penampungan sementara pada saat terjadi bencana di masing-masing Kecamatan. Jalur dan ruang evakuasi bencana di Kabupaten Lampung Selatan meliputi:

1. jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Katibung mengikuti pola jaringan jalan menuju Bukit Tarahan;
2. jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Sidomulyo dievakuasi menuju sekitar Jalan Lintas Sumatera;
3. jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Kalianda dievakuasi menuju kawawan perkantoran kabupaten;
4. jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Rajabasa dievakuasi menuju gunung Rajabasa;
5. jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Ketapang dievakuasi di sekitar menara siger di Kecamatan Bakauheni;
6. jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Bakauheni dievakuasi di sekitar menara siger di Kecamatan Bakauheni;
7. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Way Sulan dan Candipuro mengikuti pola jaringan jalan menuju Kecamatan Candipuro dan dievakuasi di Kantor Kecamatan Candipuro;
8. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Way Panji mengikuti pola jaringan jalan menuju Kecamatan Sukoharjo dan dievakuasi di sekitar kantor kecamatan Way Panji;

9. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Palas mengikuti pola jaringan jalan Kecamatan Candipuro dan dievakuasi di Kantor Kecamatan Palas;
10. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Sragi mengikuti pola jaringan jalan menuju Bangunrejo dan dievakuasi di Kantor Kecamatan Ketapang;
11. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Bakauheni mengikuti pola jaringan jalan menuju Menara Siger;
12. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Rajabasa mengikuti pola jaringan jalan menuju Banding dan dievakuasi di Kantor Kecamatan Rajabasa;

2.7.8 Kawasan Pertambangan dan Energi

Didasarkan data hasil penelitian serta keberadaan wilayah izin usaha pertambangan yang sudah ada, hampir seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi dan indikasi adanya bahan galian. Karena sifatnya yang insitu (potensi galiannya tidak dapat dipindahkan) dan berada dibawah tanah, maka sangat sulit membatasi wilayah/Kawasan peruntukan pertambangan. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas :

- a. Wilayah usaha pertambangan, yang diarahkan dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Wilayah pertambangan rakyat, yang diarahkan dikembangkan di Kecamatan Katibung, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Palas.

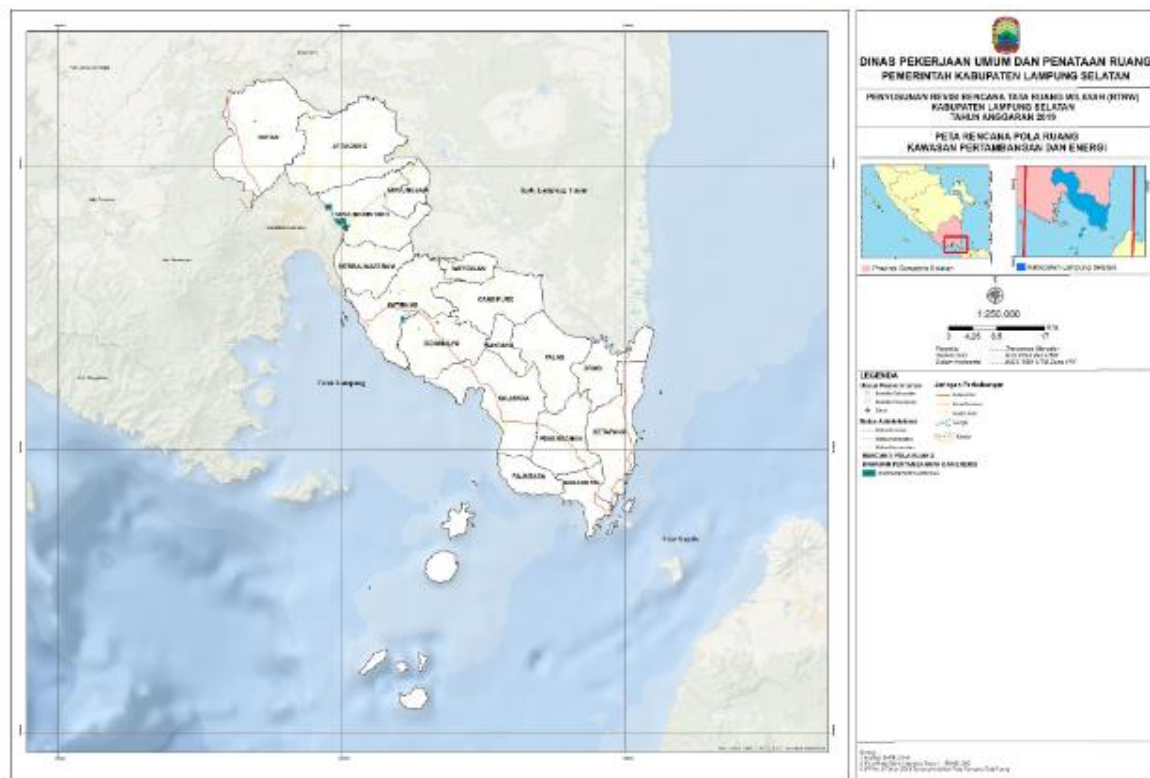
Untuk kawasan yang memiliki potensi pertambangan namun berada di Kawasan hutan lindung, pengaturan perubahan peruntukan kawasan hutan tersebut mengacu pada UU No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Tabel 2.85 Sebaran dan Luas Rencana Kawasan Pertambangan dan Energi, 2023

Kecamatan	Luas (Ha)
Katibung	97,97
Ketapang	18,56
Merbau mataram	0,18
Natar	12,03
Rajabasa	4,52
Sidomulyo	35,43
Tanjung Bintang	382,39

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Gambar 2.46 Peta Kawasan Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: RTRW Lampung Selatan 2011-2031

2.7.9 Kawasan Peruntukan Industri;

Secara umum, persyaratan lokasi industri, yaitu :

1. Daya dukung lahan yang memadai
2. Didukung oleh suplai air, listrik dan jaringan telekomunikasi yang memadai

3. Adanya kemudahan dalam sistem perangkutan, baik transportasi darat, transportasi laut maupun transportasi udara
4. Tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat terhadap lingkungan sekitarnya
5. Tidak mencemari lingkungan sekitarnya
6. Tidak terletak di kawasan yang berfungsi lindung

Untuk menghindari dampak lingkungan, kegiatan industri yang akan dikembangkan perlu dilakukan dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan serta memperhatikan pengolahan limbah industri mengikuti baku mutu lingkungan yang berlaku. Sedangkan untuk melayani kegiatan masyarakat yang bekerja/berkunjung di lingkungan industri, pada tiap sentra industri akan dikembangkan pusat pelayanan yang dilengkapi sarana dan prasarana kota yang memadai dengan jenis pelayanan sesuai arahan rencana struktur tata ruang kotanya.

Tabel 2.86 Sebaran dan Luas Rencana Kawasan Industri, 2023

Kecamatan	Luas (Ha)
Bakauheni	236,14
Kalianda	0,30
Katibung	1.460,85
Ketapang	922,44
Merbau mataram	1820,43
Natar	440,10
Sidomulyo	1252,32
Tanjung Bintang	1901,37
Tanjung Sari	295,49

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 2023

2.7.10 Kawasan Pariwisata

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan diarahkan untuk pengembangan potensi wisata alam dengan menekankan kegiatan perjalanan wisata yang aktif, di mana wisatawan terlibat secara fisik dan emosional dalam suatu kegiatan tertentu, bukan

sekedar perjalanan wisata pasif. Sehingga pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung Selatan tidak semata-mata pada kegiatan berwisata yang mengandung aktivitas secara fisik namun juga pengkayaan wawasan pengetahuan (*gaining insight*). Secara kawasan, rencana kawasan pariwisata direncanakan di Kecamatan Kalianda seluas 650 hektar.

Pengembangan kegiatan wisata ini hendaknya disusun dan didukung oleh pengembangan dermaga wisata Banding di kecamatan Rajabasa. Pengembangan dermaga ini diharapkan mampu mengembangkan kegiatan wisata di Kabupaten Lampung Selatan. Selain jenis kegiatan wisata alam, buatan dan budaya, pada Kabupaten Lampung Selatan juga akan dikembangkan wisata kuliner yang berlokasi pada Kecamatan Kalianda. Selain itu, akan dikembangkan kegiatan agrowisata, yang akan dikembangkan pada kawasan Way Pisang.

Adapun arahan pengembangan kawasan pariwisata wisata alam dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan daya tarik dan destinasi wisata bahari;
- b. pengembangan edukasi dan partisipasi untuk wisatawan dan masyarakat setempat;
- c. pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata bahari meliputi akomodasi, rumah makan, transportasi, dan beberapa fasilitas umum lainnya yang tidak melebihi daya dukung lingkungan;
- d. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaannya di bidang pariwisata;
- e. integrasi kegiatan wisata bahari dengan pemanfaatan ruang lainnya yang memiliki potensi strategis meliputi perikanan budi daya, perikanan tangkap, konservasi dan alur laut;

- f. pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- g. pengembangan daya tarik wisata didasarkan pada adaptasi dan mitigasi bencana Untuk lebih mengintegrasikan aktivitas wisata di Kabupaten Lampung selatan.

2.7.11 Kawasan Pemukiman Perkotaan

Kawasan permukiman di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari Kawasan permukiman dan kawasan permukiman perkotaan.

Tabel 2.87 Sebaran dan Luas Kawasan Pemukiman Perdesaan

No	Kecamatan	Luas Kawasan Permukiman Pedesaan (Ha)
1	Kecamatan Bakauheni	61,89
2	Kecamatan Candipuro	2.906,39
3	Kecamatan Jati Agung	919,17
4	Kecamatan Kalianda	1.154,90
5	Kecamatan Katibung	838,25
6	Kecamatan Ketapang	1.099,73
7	Kecamatan Merbau Mataram	333,77
8	Kecamatan Natar	1.873,26
9	Kecamatan Palas	5.276,21
10	Kecamatan Panengahan	634,43
11	Kecamatan Rajabasa	90,80
12	Kecamatan Sidomulyo	862,05
13	Kecamatan Sragi	2.038,21
14	Kecamatan Tanjung Bintang	1.643,89
15	Kecamatan Tanjung Sari	479,18
16	Kecamatan Way Panji	639,25
17	Kecamatan Way Sulan	634,87
Total		21.486,26

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Tabel 2.88 Sebaran dan Luas Kawasan Perkotaan

No	Kecamatan	Luas Kawasan Permukiman Perkotaan (Ha)
1	Kecamatan Bakauheni	172,34
2	Kecamatan Jati Agung	927,16
3	Kecamatan Kalianda	693,14
4	Kecamatan Ketapang	12,96
5	Kecamatan Natar	1.154,43
6	Kecamatan Panengahan	63,62
7	Kecamatan Sidomulyo	803,60
8	Kecamatan Tanjung Bintang	452,13
Total		4.279,39

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, 2024

Adapun arahan pengembangan kawasan perumahan di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut.

1. Penyediaan kawasan perumahan kepadatan sedang dan rendah
2. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan
3. Pengembangan kawasan perumahan perkotaan yang terpadu dengan Kawasan perdagangan dan jasa
4. Pengendalian kawasan perumahan berdasarkan risiko kerentanan bencana
5. Penataan permukiman kumuh di sempadan pantai dan pusat perkotaan.
6. Penerapan ketentuan tata bangunan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB serta GSB terhadap jalan,
7. Pembangunan kawasan permukiman perkotaan yang efisien dan integrasi dengan sistem transportasi
8. Pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan dilengkapi dukungan sarana prasarana permukiman yang memadai.
9. Pengembangan kawasan pendidikan dan pemanfaatan permukiman ruang di sekitarnya yang mendukung aktivitas pendidikan.

2.7.12 Kawasan Strategis Dari Sudut Pandang Pertumbuhan



Kawasan Bakauheni

Kawasan Bakauheni memiliki nilai sangat strategis sebagai pintu gerbang Sumatera dari arah Jawa. Selain itu kawasan ini harus dipersiapkan terkait perkembangan wilayah akibat tersambungannya Sumatera dengan Jawa melalui pembangunan Jembatan Selat Sunda, melalui penataan ruang dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini kewenangannya ada pada Pemerintah Provinsi. Kawasan ini dikembangkan dengan konsep integrasi waterfront city. Pengembangan ini direncanakan lebih lanjut pada masterplan atau kajian lebih lanjut.

Kawasan Kalianda

Merupakan kawasan yang selain berfungsi sebagai kawasan pemerintahan, kawasan ini juga akan memiliki fungsi sebagai kawasan kota modern yang dapat menyokong aktivitas perumahan dan perdagangan, serta menjadi kawasan wisata. Untuk mewujudkan fungsi tersebut perlu disusun suatu perencanaan khusus kota modern Kalianda. Dengan pengembangan kota kalianda sebagai Kota Modern, tentunya akan menjadi pemuncu pertumbuhan kawasan perkotaan Kabupaten Lampung Selatan secara keseluruhan.

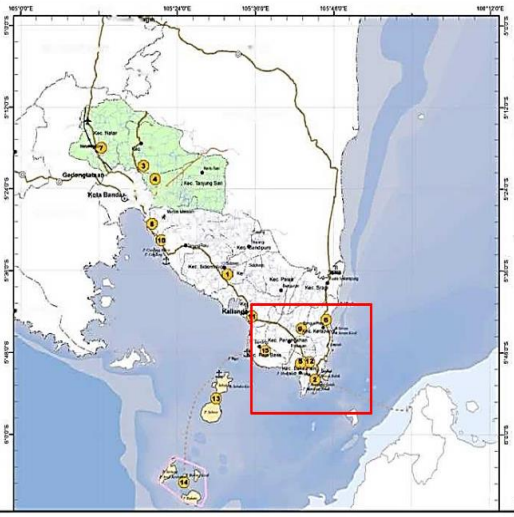
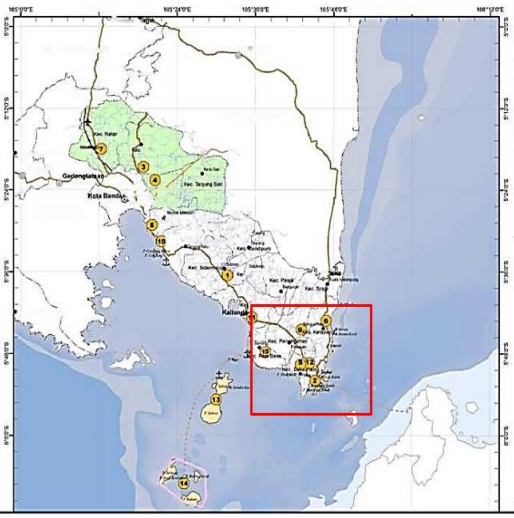
Kawasan Strategis Natar

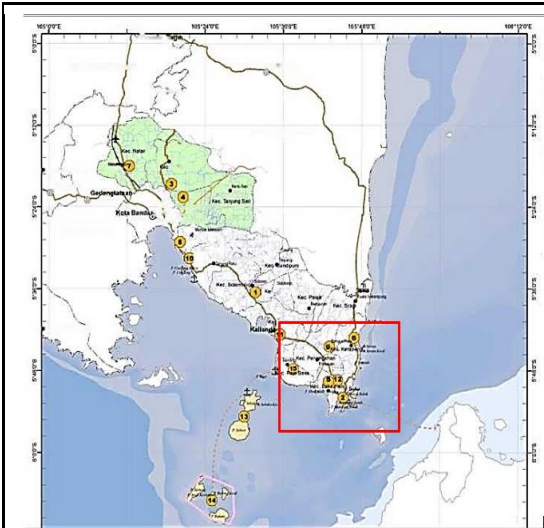
Natar merupakan salah satu kecamatan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan bahwa Natar memiliki kelengkapan infrastruktur dan sarana yang dapat mendukung aktivitas masyarakat yang ada disekitarnya. Natar juga terlingkup sebagai salah satu wilayah yang berada dalam konstelasi Metropolitan Bandar Lampung. Pembangunan/Pengembangan Bandara Branti (Bandara Raden Intan II) sebagai Bandara Embarkasi Haji dan Bandara Internasional Provinsi Lampung merupakan faktor lain yang dapat mendorong fungsi strategis kecamatan Natar. Dengan demikian Natar ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dengan Kabupaten Lampung Selatan dari sudut pandang kepentingan ekonomi dengan fungsi pengembangan fungsi perdagangan dan pengembangan Bandara dengan fungsi sebagai Embarkasi Haji dan Bandara Internasional

Kawasan Pulau Sebesi dan Sebu

Kawasan ini merupakan kawasan pulau dengan pemandangan alam yang indah, sehingga dapat menarik para wisatawan dan menjadi daerah tujuan wisata. Kedua pulau tersebut dapat menjadi kawasan wisata spesial interest yang bertujuan menjaring wisatawan dari golongan menengah keatas. Untuk mendukung rencana tersebut diperlukan perencanaan kawasan wisata Pulau Sebesi dan Pulau Sebu.

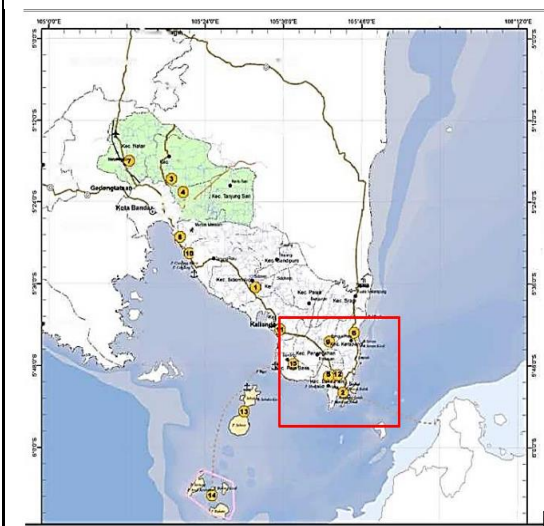
2.7.13 Kawasan Strategis Lainnya di Kabupaten Lampung Selatan

	<p><u>Kawasan Industri Katibung</u></p> <p>Katibung merupakan kawasan yang di dorong untuk pertumbuhan kegiatan industri. Selain itu untuk mendukung pengembangan kegiatan industri pada kawasan ini direncanakan adanya terminal peti kemas. Pengembangan kawasan industri ini sangat dimungkinkan mengingat pada kawasan ini memiliki pembangkit Listrik tenaga uap (PLTU) tarahan yang menjadi salah satu sumber energi utama bagi Provinsi Lampung. Selain itu pada kawasan ini juga akan dikembangkan Pelabuhan tetes tebu. Untuk pengembangan lebih lanjut, pada kawasan ini perlu dipersiapkan rencana pengembangan yang terpadu dan dukungan pengembangan infrastruktur Kawasan</p>
	<p><u>Kawasan Merbau Mataram</u></p> <p>Untuk mengembangkan perekonomian kabupaten Lampung Selatan, pada Kecamatan Merbau Mataram akan dibangun Kawasan tracking batubara dari Kabupaten Muara Enim berupa Pelabuhan/Terminal Batubara. Kawasan ini merupakan terminal komoditas pertambangan terutama batu bara yang datang dari Sumatera Selatan untuk pemenuhan kebutuhan energi, baik di Provinsi Lampung maupun secara nasional. Disamping itu, terminal Batubara ini akan di dukung dengan pengembangan pelabuhan khusus batubara di Katibung (Sebalang atau Tarahan) oleh PT. Bukit Asam, dengan jalur kereta api khusus.</p>



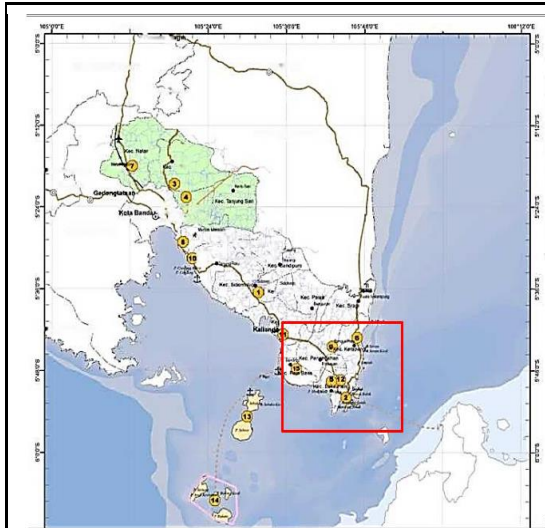
Kawasan Agropolitan Sidomulyo dan Terminal Agribisnis Penengahan

Kawasan agropolitan merupakan satu kesatuan kawasan yang saling terkait dalam pengembangan kegiatan pertanian. Sidomulyo, ditetapkan sebagai Kawasan agropolitan. Pada dasarnya agropolitan adalah suatu konsep pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat di perkotaan. Pengembangan agropolitan berarti mengembangkan kawasan perdesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas- fasilitas kota/modern yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan. Mendorong penduduk untuk berusaha dan menanamkan modal di daerah perdesaan. Hal ini membuka peluang tumbuhnya penyediaan kebutuhan- dasar seperti lapangan kerja, akses permodalan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan kebutuhan sosial-ekonomi dapat terpenuhi di desa. Pada dasarnya kawasan Agropolitan harus memenuhi kriteria yang antara lain mempunyai skala ekonomi yang besar, sehingga produktif untuk dikembangkan;



Kawasan strategis dari sudut pandang sosial budaya

- 1) Kawasan Perkantoran Provinsi Kawasan ini merupakan kawasan pusat perkantoran dan pemerintahan Provinsi Lampung yang berada di Kecamatan Tanjung Bintang.
- 2) Kawasan Pendidikan ITERA dan sekitarnya



Kawasan strategis pendayagunaan SDA dan Daya dukung lingkungan hidup

1. Kawasan Gunung Raja Basa selain memiliki fungsi kawasan lindung juga memiliki potensi panas bumi yang dapat digunakan sebagai bahan pembangkit listrik panas bumi atau yang lebih dikenal dengan pembangkit listrik tenaga geothermal (PLTG).
2. Kawasan Krakatau dan Sekitarnya merupakan kawasan cagar alam laut (CAL) Krakatau merupakan kawasan yang dilindungi. CAL Krakatau merupakan World Heritage (warisan dunia) yang patut di jaga kelestariannya. Sebagai Cagar Alam Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan, selain dikembangkan sebagai obyek wisata minat khusus (special interest). Kawasan ini juga dijadikan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).

Sumber: diolah, 2023

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Permasalahan

3.1.1 Permasalahan Karakteristik Wilayah

3.1.1.1 Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

Risiko Bencana Alam

Kabupaten Lampung Selatan, seperti banyak daerah di Indonesia, memiliki kondisi geografi yang berpotensi terhadap berbagai jenis bencana alam. Berikut adalah beberapa bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah tersebut dan faktor geografis yang mempengaruhinya: banjir, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami, gunung api, dan kekeringan. Faktor geografis seperti topografi, jenis tanah, dan lokasi geografis yang berdekatan dengan laut dan pegunungan mempengaruhi jenis bencana alam yang mungkin terjadi di Kabupaten Lampung Selatan.

Lampung Selatan merupakan kabupaten yang menduduki urutan ke-53 dari kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki indeks risiko bencana cukup tinggi. Berdasarkan data BMKG, bahwa tipologi struktur tanah dibawah wilayah Provinsi Lampung yaitu sepanjang pantai barat dan pesisir Lampung Selatan merupakan lapisan lempengan patahan yang rawan terjadi bencana gempa bumi bahkan berpotensi tsunami. Oleh karenanya diperlukan upaya mitigasi bencana alam dalam menghadapinya.

Risiko Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan mengacu pada kemampuan suatu negara, daerah, atau individu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkesinambungan secara terus-menerus. Dalam konteks ini, faktor-faktor seperti produksi pangan, distribusi, aksesibilitas, dan keamanan pangan menjadi penting. Ketahanan pangan juga mencakup aspek keberlanjutan dalam mempertahankan sistem pangan yang dapat

mengatasi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi harga pangan, atau gangguan dalam pasokan pangan.

Prevalensi ketidakcukupan pangan mengacu pada ukuran seberapa banyak populasi dalam suatu wilayah atau negara yang mengalami kekurangan pangan dalam periode tertentu. Ini adalah indikator penting dalam mengukur tingkat kelaparan atau ketidakamanan pangan di suatu tempat. Secara khusus, prevalensi ketidakcukupan pangan dapat dihitung dengan mengidentifikasi jumlah individu atau rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap jumlah pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar mereka. Angka prevalensi ini sering kali dihitung dalam persentase populasi yang terkena dampak, seperti misalnya persentase penduduk suatu negara yang mengalami kelaparan atau ketidakcukupan pangan setiap tahunnya.

Kabupaten Lampung Selatan saat ini memiliki Tingkat Prevalensi Ketidakcukupan Pangan sebesar 7,61 pada tahun 2023. Nilai ini cukup rendah dibandingkan nilai-nilai sebelumnya, namun nilai-nilai tersebut fluktuatif. Kombinasi dari beberapa faktor seperti bencana alam, perubahan iklim atau faktor-faktor lain dapat menyebabkan prevalensi ketidakcukupan pangan meningkat di Kabupaten Lampung Selatan.

3.1.1.2 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan Ekonomi yang rendah

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan ekonomi suatu negara dan sering kali dianggap sebagai indikator utama kemakmuran. Pertumbuhan ekonomi dapat mengarah pada peningkatan pendapatan per kapita, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, biasanya terjadi penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan dalam gaji dan penghasilan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan sebelum Covid-19 memiliki rata-rata diatas nasional seperti terlihat pada tahun 2019

sebesar 5,13 persen pertahun untuk Kabupaten Lampung Selatan, dan 5,02 untuk nasional. Sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung, masih lebih rendah dari Kabupaten Lampung Selatan sebesar 5,26 persen. Pasca pandemi, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan sebesar 4,82 persen. Nilai tersebut lebih rendah dari nasional akan tetapi lebih tinggi dari Provinsi Lampung. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan dan begitu juga Provinsi Lampung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini diperlukan strategi-strategi baru dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Inflasi yang Meningkat

Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan umum dan terus-menerus dalam harga-harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dalam suatu ekonomi tertentu. Ini berarti bahwa daya beli uang (nilai uang) secara umum menurun seiring waktu, sehingga jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli barang dan jasa yang sama meningkat. Untuk mengukur inflasi, pemerintah dan lembaga statistik menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang mencatat perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga rata-rata. Otoritas moneter seperti Bank Indonesia sering berusaha untuk mengendalikan inflasi dengan berbagai kebijakan moneter, seperti menaikkan suku bunga atau mengatur jumlah uang yang beredar di pasar.

Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh otoritas moneter saja akan tetapi sangat diperlukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah, karena penyebab inflasi bisa disebabkan oleh tarif pajak, infrastruktur, rantai pasok yang tidak efisien, dan adanya penimbunan barang-barang kebutuhan pokok. Inflasi daerah Kabupaten Lampung Selatan saat ini mengacu pada inflasi Kota Bandar Lampung jika menggunakan perhitungan IHK. Pada tahun 2023, inflasi Kota Bandar Lampung sebesar 3,52 persen, dan nilai ini cukup tinggi.

Rasio Gini yang Meningkat

Rasio Gini adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan di dalam suatu populasi atau negara. Nilai Gini berkisar antara 0 (distribusi sempurna yang merata) hingga 1 (distribusi yang sangat tidak merata). Semakin tinggi nilai Gini, semakin tidak merata distribusi pendapatan atau kekayaan dalam populasi. Rasio Gini dihitung dengan membandingkan luasan kurva Lorenz. Kurva ini menunjukkan akumulasi persentase total pendapatan (atau kekayaan) yang diperoleh oleh kelompok tertentu dari populasi. Jika distribusi sempurna (keadilan absolut) maka ini adalah garis miring.

Rasio Gini sangat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, maka kecenderungan nilai Rasio Gini akan meningkat juga. Saat ini Rasio Gini di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 0,257 pada tahun 2023. Nilai ini cenderung masih menggambarkan tingkat ketimpangan yang rendah. Kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi harus diantisipasi dampaknya terhadap Rasio Gini yang masih bisa ditoleransi.

Tingkat Kemiskinan yang Turun Melambat

Tingkat kemiskinan mengacu pada persentase atau jumlah individu atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini dapat ditetapkan berdasarkan penghasilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tingkat kemiskinan sering kali diukur dengan membandingkan pendapatan rumah tangga dengan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait seperti BPS.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Dari tahun 2019 tingkat kemiskinan pada nilai 14,31 persen dan turun setiap tahunnya hingga tahun 2023 menjadi 12,79 persen. Kondisi ini menunjukkan trend yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Namun, butuh waktu yang lama jika ingin mencapai tingkat kemiskinan yang rendah sehingga mencapai dibawah 5 persen. Fluktuasi ekonomi yang cenderung stagnan juga akan berdampak pada pelambatan penurunan tingkat kemiskinan.

Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan aktif dan siap bekerja, namun belum berhasil menemukan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Individu yang mengalami pengangguran cenderung memiliki pendapatan yang rendah atau bahkan tidak ada pendapatan sama sekali. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat secara langsung meningkatkan jumlah rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kebijakan ekonomi yang efektif sering kali berusaha untuk mengurangi tingkat pengangguran agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

TPT Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 4,95 persen. Nilai TPT yang mendekati empat persen menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dalam kategori rendah, akan tetapi nilai tersebut untuk wilayah perkotaan atau negara maju. Distribusi PDRB Kabupaten Lampung Selatan berada di sektor pertanian yaitu sebesar 26,78 persen, bermakna bahwa sebagian besar tenaga kerja masih bekerja di sektor pertanian. Upah sektor pertanian memiliki kecenderungan lebih rendah dari sektor lainnya, sehingga berpengaruh pada tingginya tingkat kemiskinan. Oleh karenanya diperlukan penurunan tingkat kemiskinan yang lebih rendah lagi dengan didorong dengan peningkatan sektor industri.

Indeks Pembangunan Manusia yang Masih Rendah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komparatif yang digunakan untuk menilai dan membandingkan tingkat pembangunan manusia di berbagai negara atau wilayah. IPM mengukur tiga dimensi utama pembangunan manusia: kesehatan diukur melalui angka harapan hidup saat

lahir, pendidikan dinilai melalui kombinasi rata-rata lama sekolah untuk orang dewasa berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah untuk anak-anak usia masuk sekolah, dan ketiga adalah standar hidup yang diukur menggunakan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita.

IPM Kabupaten Lampung Selatan bernilai 71,55 pada tahun 2023, lebih rendah dari Provinsi Lampung dan Nasional. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 sebesar 7,77 dan lebih tinggi dari Provinsi Lampung sebesar 8,18. Harapan Lama sekolah di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 12,64 sedangkan Provinsi Lampung 12,77. Umur harapan hidup Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023 sebesar 74,22 lebih besar dari Provinsi Lampung sebesar 74,17. Dimensi terakhir yaitu rata-rata pengeluaran perkapita, kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 10.617.000,- sedangkan Provinsi lebih tinggi Rp.10.769.000,-.

Ketiga dimensi menjadi permasalahan yang tidak bisa diabaikan dan diselesaikan dalam Pembangunan dua puluh tahun mendatang. Perlu sinergi kerjasama antar dinas dan *stakeholders*, mengingat peningkatan IPM akan mencerminkan kualitas SDM di Kabupaten Lampung Selatan. Kualitas SDM yang meningkat akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan sehingga kesejahteraan meningkat.

3.1.1.3 Permasalahan Aspek Daya saing

PDRB Perkapita yang Rendah

PDRB per kapita adalah singkatan dari "Produk Domestik Regional Bruto per kapita". Ini adalah ukuran ekonomi yang menunjukkan nilai rata-rata dari produk domestik bruto (PDRB) suatu wilayah (seperti negara atau provinsi) per orang. PDRB per kapita dihitung dengan membagi total PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduknya.

PDRB perkapita Lampung Selatan umumnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, meski laju pertumbuhannya bervariasi. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2023 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 50.461.132,-, masih diatas

Provinsi namun masih dibawah nasional sebesar 74.964.700,-. Perlu strategi yang tepat dalam upaya mendekati besaran nasional.

Rendahnya Kontribusi Ekspor terhadap PDRB

Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Secara umum, ekspor mengacu pada proses pengiriman barang atau jasa melintasi batas negara untuk dijual atau ditukar dengan mata uang atau barang lainnya. Aktivitas ekspor merupakan bagian penting dari perdagangan internasional dan berperan dalam menghasilkan pendapatan bagi negara, menggerakkan perekonomian, serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global.

Pengembangan industri di Kabupaten Lampung Selatan harus berorientasi ekspor dan menjadi bagian rantai pasok global. Kontribusi sektor industri di Kabupaten Lampung Selatan sudah cukup tinggi yaitu 23,41 persen akan tetapi sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi rendah. Sektor industri yang ada di Kabupaten Lampung Selatan mendukung sektor pertanian, namun hasil produksi masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan nasional. Kontribusi ekspor masih rendah di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 2,54 persen dari PDRB, sangat jauh dibandingkan dengan nasional sebesar 21,75 persen. Beberapa negara maju, distribusinya bahkan mendekati nilai 100 persen bahkan negara Singapura di atas 100 persen.

Sektor Pariwisata Belum Sebagai Penggerak Pembangunan

Kabupaten Lampung Selatan memiliki luasan pantai yang sangat panjang dan memiliki beberapa pulau sangat indah. Kondisi alam tersebut sangat berpotensi sebagai tempat pengembangan pariwisata. Peningkatan wisatawan dalam negeri terus mengalami peningkatan dengan terbangunnya jalan tol Sumatera yang mempermudah akses, namun akses ini harus didukung hingga akses jalan di tingkat kabupaten. Fasilitas lainnya yang harus ditingkatkan adalah fasilitas akomodasi yang baik hingga hotel berbintang yang masih kurang.

Selain wisatawan dalam negeri, Kabupaten Lampung Selatan juga telah dikunjungi wisatawan mancanegara. Pulau Krakatau yang sangat terkenal di mancanegara telah menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya, akan tetapi jumlah kunjungannya masih sangat rendah sebanyak 17 orang yang datang ke Kabupaten Lampung Selatan. Perlu dicari solusi pengembangan wisata lainnya yang dapat menarik minat wisatawan mancanegara.

ICOR yang Tidak Efisien.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah rasio yang digunakan dalam ekonomi untuk mengukur jumlah tambahan modal yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit tambahan output atau produk bruto domestik (PDB). Dalam konteks ini, "incremental" mengacu pada penambahan atau pertambahan. Secara matematis, ICOR dihitung dengan membagi peningkatan investasi (biasanya dalam bentuk modal fisik seperti infrastruktur atau peralatan) dengan peningkatan output yang dihasilkan. Rasio ini memberikan gambaran tentang efisiensi investasi modal dalam meningkatkan produksi ekonomi suatu negara atau wilayah.

ICOR yang lebih rendah menunjukkan bahwa tambahan output yang signifikan dapat dicapai dengan jumlah investasi yang lebih kecil, sehingga menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam penggunaan modal. Sebaliknya, ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa jumlah investasi yang lebih besar diperlukan untuk mencapai tambahan output yang sama, yang mungkin menandakan rendahnya efisiensi investasi. ICOR sering kali digunakan sebagai indikator dalam perencanaan ekonomi dan analisis kebijakan untuk mengukur produktivitas dan efisiensi penggunaan modal dalam suatu ekonomi.

Nilai ICOR Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar 7,53 tidak jauh dari nilai provinsi dan nasional. Ketidakefisienan investasi terjadi karena beberapa penyebab seperti: teknologi dan inovasi yang rendah, infrastruktur yang buruk, korupsi dan birokrasi yang tinggi, Pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang rendah, dan ketidak stabilan

politik dan ekonomi. Oleh karenanya diperlukan upaya yang kuat dan konsisten dalam mengurangi penyebabnya.

3.1.1.4 Permasalahan Pelayanan Umum

Indeks Pelayanan Publik yang Masih Rendah

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah suatu indikator atau metode pengukuran yang digunakan untuk menilai kualitas dan efisiensi layanan publik yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. IPP memberikan gambaran tentang seberapa baik pemerintah atau lembaga publik dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, administrasi publik, dan lain sebagainya. Beberapa komponen yang sering diperhitungkan dalam Indeks Pelayanan Publik antara lain: aksesibilitas, kualitas, responsif, efisien, dan partisipasi.

Capaian Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2023 mendapatkan predikat “Cukup dengan Catatan” dengan nilai indeks sebesar 2,5 atau kategori “C-”.

3.1.2 Permasalahan Lingkungan

Dalam dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045, terdapat beberapa permasalahan, diantaranya :

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan
Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan belum meningkat, masih adanya penurunan
	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, belum mengalami peningkatan
	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, belum adanya peningkatan dan masih mengalami penurunan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan di daerah masih meningkat
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan belum meningkat
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak belum mengalami peningkatan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat belum meningkat
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA / sederajat masih dibawah target
	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah belum mengalami peningkatan
	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, belum menurun secara optimal
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) masih mengalami peningkatan
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Dinas Kesehatan Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk target masih tinggi
	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk target masih tinggi
	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun masih meningkat diharapkan terus menurun
	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun belum mengalami penurunan
	Prevalensi tekanan darah tinggi masih mengalami penurunan, bahkan belum terlaksana
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun belum mengalami penurunan
	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri masih mengalami peningkatan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan
	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis
	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir belum menurun
	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR) belum terjadi penurunan
	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk mengalami penurunan dan dalam hal ini diharapkan untuk meningkat
	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun bahkan masih mengalami peningkatan
	Terdapat kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat masih dibawah target
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat masih dibawah target
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA / sederajat masih dibawah target
	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun belum mengalami peningkatan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) masih dibawah target
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi masih memiliki nilai yang rendah
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan belum meningkat
	Masih adanya peningkatan proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan
	pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir
	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir masih terjadi peningkatan
	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun belum mengalami penurunan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA / sederajat masih dibawah target
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah belum mengalami peningkatan
	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern belum mengalami peningkatan
	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam masih mengalami penurunan
Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga tidak mengalami peningkatan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	PDB per kapita belum tercapai
	Tingkat produktivitas tenaga kerja yang masih rendah di tengah persaingan global semakin meningkat
	Masih menurunnya proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin
	Upah rata-rata per jam pekerja tidak mengalami peningkatan
	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur tidak mengalami penurunan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan
	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) meningkat
	Tidak meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Belum meningkat secara optimalnya kondisi jalan mantap
	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri tidak terlaksana
	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam masih mengalami penurunan
Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur masih tinggi
	Belum menurunnya proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas
	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan berdasarkan rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban belum optimal, perlindungan anak dan hak anak
	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, belum adanya peningkatan dan masih mengalami penurunan
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Penurunan proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik
	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs belum meningkat
	Menurunnya persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan
	Terjadinya penurunan jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik(SIRuSa)
	Tidak Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak belum mengalami peningkatan.
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak masih rendah
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak masih rendah
	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau belum terlaksananya kapasitas prasarana yang ada dan diharapkan dapat meningkat
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak belum mengalami peningkatan.
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
	Kualitas air sungai belum meningkat dan belum membaik masih mengalami penurunan
	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum terinternalisasikan
	Stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi belum mempunyai jumlah yang banyak
	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan dana belum mencapai target
	Beberapa danau belum dikelola dan tingkat erosinya masih tinggi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan
	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya belum meningkat masih dibawah target
Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan belum tercapai untuk meningkat masih di bawah target
	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) belum mencapai target menurun
	Persentase sampah perkotaan yang tertangani belum meningkat secara optimal
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) mengalami penurunan
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan masih tinggi
	Masih adanya peningkatan proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun
	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) data belum mencapai target untuk meningkat menjadi 4,0
	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui data belum tercapai untuk meningkat di daerah masih mengalami penurunan
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) masih rendah
	Penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan belum meningkat secara optimal
	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) tidak meningkat secara optimal

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan
	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih rendah
	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) belum meningkat secara optimalnya
	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan berdasarkan rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban belum optimal, perlindungan anak dan hak anak

sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2045

3.1.3 Permasalahan Daerah

Berdasarkan analisis *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 26 Februari 2024 dan Konsultasi Publik maka dipetakan beberapa masalah daerah yang dihadapi yakni sebagai berikut:

1. Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan belum meningkat, masih adanya penurunan.
2. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, belum mengalami peningkatan.
3. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, belum adanya peningkatan dan masih mengalami penurunan.
4. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan di daerah masih meningkat
5. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan belum meningkat.

6. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak belum mengalami peningkatan.
7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat belum meningkat.
8. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA /sederajat masih dibawah target.
9. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah belum mengalami peningkatan.
10. Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, belum menurun secara optimal.
11. Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk target masih tinggi.
12. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun masih meningkat diharapkan terus menurun.
13. Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun belum mengalami penurunan
14. Prevalensi tekanan darah tinggi masih mengalami penurunan, bahkan belum terlaksana
15. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun belum mengalami penurunan
16. Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri masih mengalami peningkatan
17. Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis
18. Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir belum menurun
19. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR) belum terjadi penurunan

20. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk mengalami penurunan dan dalam hal ini diharapkan untuk meningkat
21. Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun bahkan masih mengalami peningkatan
22. Terdapat kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan

3.2 Isu Strategis

3.2.1 Isu Strategis Megatrend Global

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sementara itu, adanya pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru (new normal). Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi.

Perubahan-perubahan tersebut meliputi (i) perkembangan demografi global, (ii) geopolitik dan geoekonomi, (iii) disrupsi teknologi, (iv) peningkatan urbanisasi dunia, (v) peningkatan peran perdagangan internasional, (vi) perubahan keuangan internasional, (vii) peningkatan penduduk kelas menengah (middle class), (viii) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, (ix) perubahan iklim, dan (x) pemanfaatan luar angkasa (space economy) (RPJPN, 2023).



Gambar 3.1 Arah Pembangunan Indonesia Emas 2045

3.2.2 Isu Strategis Kabupaten

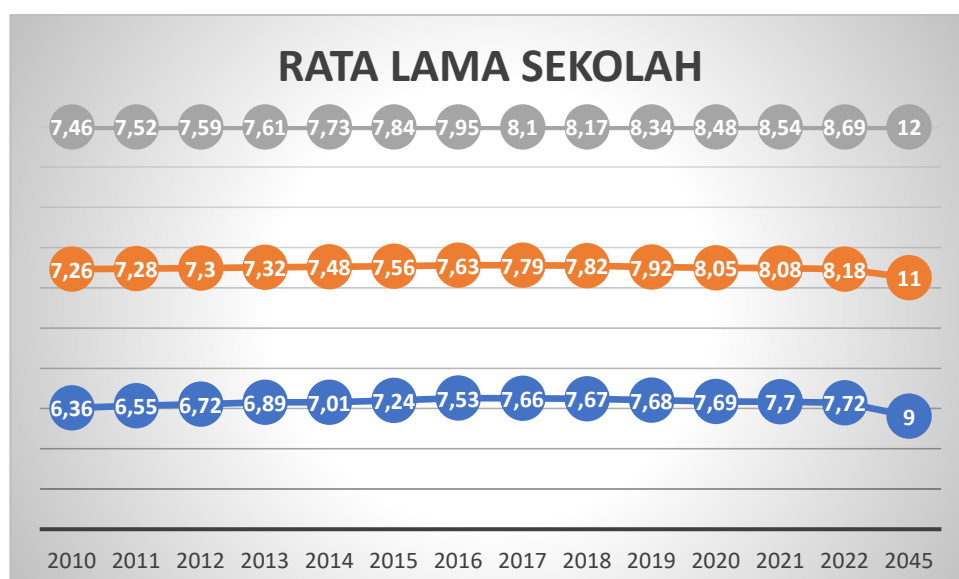
Secara umum isu strategis Kabupaten Lampung Selatan dibagi dalam 3 aspek yakni: Transformasi Lampung Selatan, Landasan Transformasi dan Kerangka Implementasi Transformasi. Transformasi Lampung Selatan mencakup 3 aspek yakni pembangunan sosial yang adaptif dan Pembangunan ekonomi yang adaptif.

- A. Landasan Transformasi mencakup 2 aspek yakni supremasi hukum dan stabilitas dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan pangan dan ekologis
- B. Kerangka Implementasi Transformasi mencakup 3 aspek yakni mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesinambungan Pembangunan
- C. Transformasi Lampung Selatan yakni transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola



3.2.2.1 Isu Strategis SDM Unggul

RLS (Rata Lama Sekolah) merupakan sektor pembentuk IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Di Kabupaten Lampung Selatan RLS mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Namun, hingga tahun 2022 IPM Lampung Selatan masih di bawah RLS Provinsi Lampung yang mencapai 7,72 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan tingkat pembangunan manusia di wilayah Lampung Selatan masih rendah dibandingkan dengan pembangunan manusia di Provinsi Lampung.

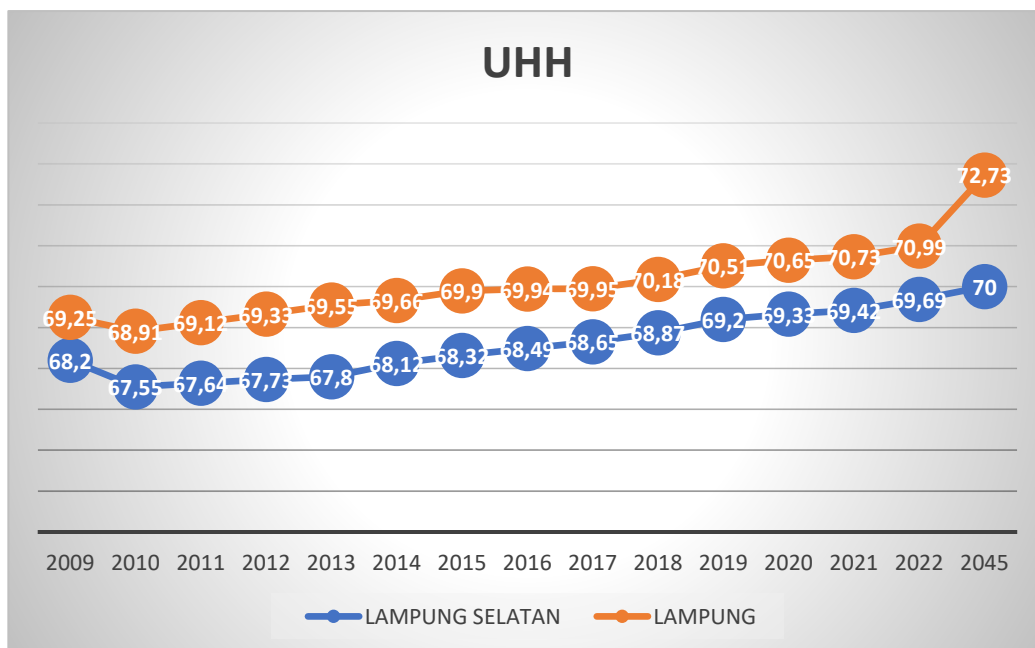


Gambar 3.2 RLS Kabupaten Lampung Selatan 2011-2022

Untuk itu perlu dilakukan identifikasi kegiatan yang sudah tepat dan yang belum agar selanjutnya dapat diambil kebijakan yang lebih sesuai terkait sektor-sektor pendukung IPM. Masih diperlukan banyak usaha untuk meningkatkan nilai IPM Kabupaten Lampung Selatan.

3.2.2.2 Isu Strategis Kesehatan Unggul

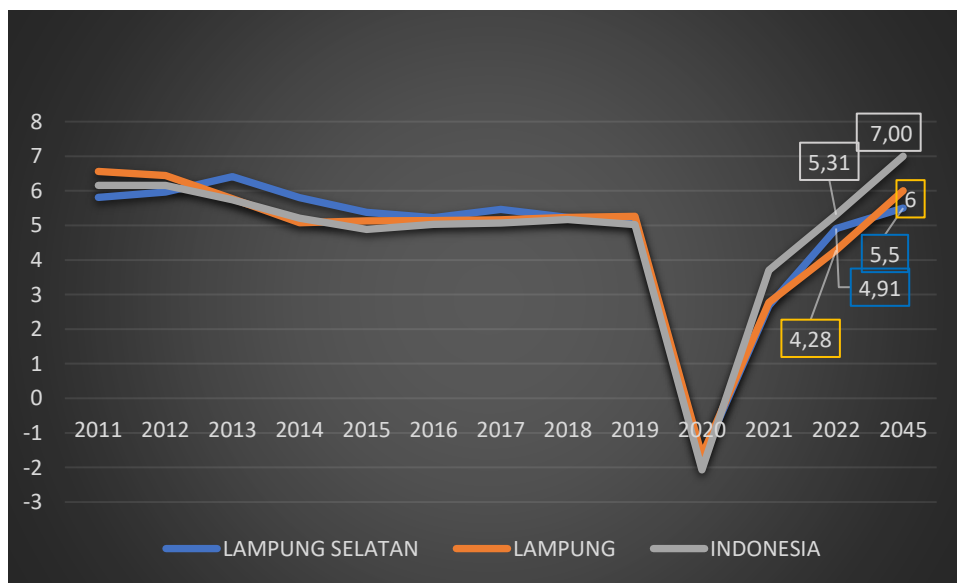
UHH (Usia Harapan Hidup) dipengaruhi oleh banyak unsur sangat terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Untuk mencapai Usia Harapan Hidup (UHH) yang baik, maka angka kematian bayi harus di bawah rata-rata nasional dan menurun setiap tahun, demikian juga prevalensi gizi buruk, gizi kurang, stunting dan gizi lebih pada balita. Selain itu, anak-anak perlu diberi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, imunisasi dasar lengkap. Selain itu, suatu daerah harus menyediakan pelayanan ramah anak di Puskesmas, harus menyediakan lembaga pelayanan Kespro remaja, penanganan NAPZA, HIV/AIDS, kesehatan jiwa anak dan remaja, dan disabilitas. Perhatian juga harus ditujukan pada anak dari keluarga miskin untuk memperoleh akses peningkatan kesejahteraan, pada rumah tangga dengan akses air bersih, serta kawasan tanpa rokok.



Gambar 3.3 UHH Kabupaten Lampung Selatan 2009-2045

3.2.2.3 Isu Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat perubahan tingkat ekonomi antar periode. Gambar 3.4 menunjukkan bahwa geliat perekonomian Kabupaten Lampung Selatan cenderung stabil di angka 5% lebih dari tahun 2016 sampai tahun 2019 yang mencapai 5,13 persen. Namun, di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga -1,73 persen. Konstraksi ini disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19.



Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Selatan 2011-2022

Sepanjang tahun 2022, beberapa sektor mengalami kontraksi. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran dan jasa perusahaan yang masing-masing tumbuh 11,98% dan 14,80%. Lalu ada sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 14,75%.

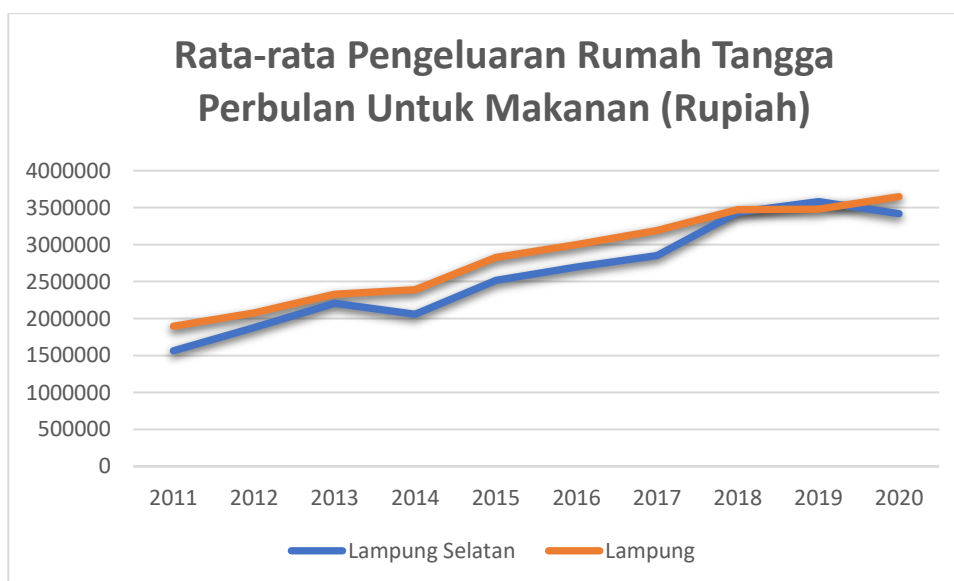
Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2022 berada pada urutan ke-2. Pertumbuhan tertinggi adalah Kota Bandar Lampung dengan pertumbuhan sebesar 4,95% sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lampung Timur dengan tingkat pertumbuhan 2,02%.

3.2.2.4 Isu Strategis Ketahanan Pangan

Sektor yang berperan dalam peningkatan perekonomian terutama adalah pertanian secara luas (pertanian dan perkebunan, peternakan,

perikanan, dan ketahanan pangan), Ketahanan pangan adalah sebuah kondisi ketika semua orang pada segala waktu menerima akses secara fisik, sosial ataupun ekonomi untuk mendapatkan pangan bagi seluruh anggota rumah tangga dengan kondisi pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya setempat. Terdapat tiga indikator yang menjadi subsistem pada ketahanan pangan yaitu subsistem penyediaan pangan, distribusi, dan konsumsi yang ketiganya saling mempengaruhi secara berkesinambungan. Menurut Badan Ketahanan Pangan (2005), terdapat empat aspek yang membentuk ketahanan pangan, yaitu:

1. Ketersediaan pangan, yakni tersedianya pangan secara fisik pada daerah yang didapatkan dari produksi domestik, impor ataupun bantuan pangan tapi ketersediaannya lebih diutamakan dari produksi domestik.
2. Akses pangan, yaitu kemampuan rumah tangga dalam memperoleh kecukupan pangan, baik berasal dari produksi sendiri maupun pembelian, barter, hadiah, pinjaman, serta bantuan atau dari kelimanya semua.
3. Penyerapan pangan, dilihat dari penggunaan akan pangan oleh anggota keluarga pada masyarakat.
4. Status gizi merupakan outcome dari ketahanan pangan.



Gambar 3.5 Pengeluaran Rumah Tangga Untuk Makanan Kabupaten Lampung Selatan 2011-2020

Jumlah Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 3.417.848 per bulan, hal ini sudah cukup tinggi mendekati Provinsi Lampung yakni sebesar 3.647. 532 per bulan. Hal ini memperlihatkan optimisme ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan di Tengah isu ketahanan pangan dan isu kekeringan dan cuaca yang melanda dunia.

Selain itu jika merujuk pada tabel Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2022 dibawah ini:

Tabel 3.1 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2022

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023*
Ketersediaan	95,33	96,67	95,7	95,89
Keterjangkauan	76,3	76,48	77,92	78,75
Pemanfaatan	69,34	69,29	74,3	76,96
Komposit	79,23	79,66	81,81	83,14

*Angka Sementara

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2023 (data diolah)

Berdasarkan data diatas didapat informasi ketersediaan pangan di Kab. Lampung mencukupi dengan nilai diatas 95 poin. Keterjangkauan pangan berada di atas 75 poin yang berarti tiga per empat wilayah dapat dijangkau dan diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pemanfaatan pangan sebagian besar sudah dilaksanakan namun belum dilakukan optimal dengan nilai di atas 70 poin. Nilai komposit/ Indeks Ketahanan Pangan sebesar 83 persen

pada tahun 2023 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung pada tahun 2023 naik sebesar 2,6% dibandingkan tahun 2022

Selain itu, Nilai Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) Lampung Selatan 2018-2022 memperlihatkan bahwa:

Tabel 3.2 Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Lampung Selatan 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023*
PoU	10,43	12,33	8,79	13,06	14,72

*angka sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Prevalensi ketidakcukupan pangan (PoU) pada tahun 2023 sebesar 14,72 persen dan pada tahun 2022 sebesar 13,06 persen. Artinya, pada tahun 2023 terdapat 14 orang dari 100 orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi untuk hidup normal, aktif, dan sehat.

Tabel 3.3 Komoditas Pertanian di Lampung Selatan 2019-2023

KOMODITAS	2019	2020	2021	2022	2023
Padi	265,878	311,668	330,326	339,942	411,628
Jagung	539,302	705,855	738,178	878,640	769,435
Cabai Besar	12,450	9,161	5,249	4,204	3,323
Bawang Merah	2,469	661	800	680	734
Pisang (ton)	490,784	490,858	490,982	512,370	345,520
Kelapa Dalam	21,814	22,968	20,840	20,742	20,520
Kelapa Sawit	11,640	11,408	9,977	9,918	9,700

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) sebesar 36.052 hektar dikhususkan untuk luas lahan baku sawah. Bila dibandingkan dengan total produksi maka didapat 11,4 ton/ha untuk tahun 2023 dari standar pada umumnya sekitar 6 – 8 ton/ha.

Kabupaten. Lampung Selatan pada tahun 2022 menjadi penghasil padi nomor 3 se-Provinsi Lampung. Kenaikan produksi padi sebesar 21% pada tahun 2023 dengan jumlah produksi sebesar 411,628 ton. Produksi jagung mengalami penurunan sebesar 12% pada tahun 2023. Kab. Lampung Selatan pada tahun 2022 menjadi penghasil jagung nomor 2 se-Provinsi Lampung. Produksi cabai besar menurun sebesar 21% di tahun 2022 dan merupakan komoditas penghasil cabai besar nomor 2 se-Provinsi Lampung. Produksi bawang merah naik sebesar 8% di tahun 2022 dan merupakan penghasil komoditas nomor 1 se-Provinsi Lampung. Pisang adalah komoditas pertanian dengan jumlah produksi sebesar 345.520 ton pada tahun 2023 yang merupakan komoditas unggulan di bidang hortikultura. Produksi komoditas Kelapa dalam sebesar 20.520 ton pada tahun 2023 yang merupakan penghasil terbesar se-Provinsi Lampung. Komoditas Kelapa sawit merupakan komoditas di bidang perkebunan dengan produksi sebesar 9.700 ton di tahun 2023.

Tabel 3.4 Komoditas Perikanan di Lampung Selatan 2019-2023

KOMODITAS	2019	2020	2021	2022	2023
Perikanan Tangkap	30,953.49	31,108.00	31,244.65	31,297.64	32,094.41
Perikanan Budidaya	29,620.27	31,101.28	31,443.94	32,840.22	33,533.76

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Perikanan tangkap merupakan komoditas unggulan kedua terbesar se-Provinsi Lampung dengan nilai produksi sebesar 32.094,41 ton pada tahun 2023 .

Perikanan budidaya merupakan komoditas perikanan ikan air tawar dan ikan air payau dengan jumlah produksi sebesar 33.533,76 ton. Sektor perikanan merupakan komoditas yang potensial untuk dikembangkan sehingga dapat menambah nilai konsumsi gizi.

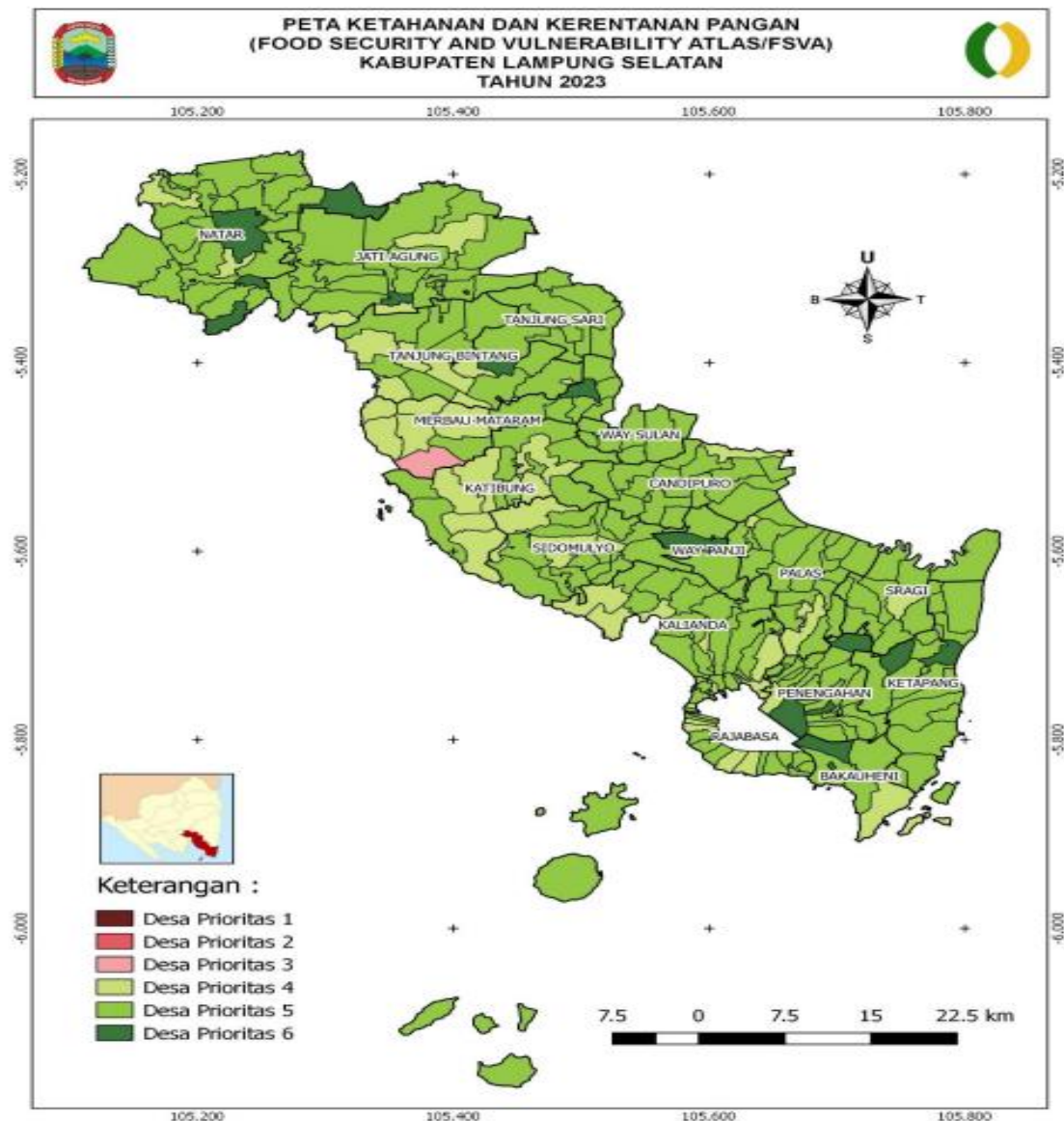
Tabel 3.5 Komoditas Sektor Peternakan di Lampung Selatan 2019-2023

KOMODITAS	2019	2020	2021	2022	2023
Populasi Sapi	146,323	150,930	152,942	138,697	158,476
Populasi Kambing	361,559	362,298	377,434	379,508	379,670
Populasi Ayam Ras Petelur	2,722,9 84	2,649,6 46	2,459,5 25	2,511,0 60	2,571,6 95
Populasi Ayam Ras Pedaging	15,827, 148	13,618, 172	15,997, 461	16,109, 345	16,226, 329
Produksi Daging	1,281,8 76	1,344,7 82	1,559,8 02	1,730,4 24	1,661,2 25
Produksi Telur	21,100, 234	20,725, 208	19,090, 544	21,567, 351	22,051, 161

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Populasi sapi merupakan salah satu komoditas yang berkontribusi dalam pemenuhan konsumsi daging sapi dengan total sebesar 158.476 ekor pada tahun 2023 dengan capaian nomor 3 terbesar se-Provinsi Lampung. Populasi kambing merupakan salah satu komoditas yang dapat menunjang produktivitas daging kambing dengan total 379.670 ekor pada tahun 2023. Populasi ayam ras petelur adalah populasi untuk mendukung produksi telur dengan total sebesar 2.571.695 ekor pada tahun 2023. Populasi ayam ras pedaging adalah salah satu komoditas untuk mendukung produksi daging ayam dengan total sebesar 16.226.329 ekor pada tahun 2023. Produksi daging adalah penunjang komoditas terbesar kedua dengan total produksi sebesar 1.661.225 kg. Produksi telur adalah penunjang komoditas terbesar pertama dengan total produksi sebesar 22.051.161 kg. dalam hal pengaturan perlindungan lahan Kabupaten Lampung Selatan telah mengeluarkan perda no 1 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan.

Selain itu, Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 34.604 ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) sebesar 1.448 Ha sehingga total LP2B Lampung Selatan 36.052 Ha



Gambar 3.6 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Penggunaan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) / Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan disusun untuk memetakan kondisi desa pada setiap kabupaten/kota. Karakteristik desa rentan pangan di Kabupaten Lampung Selatan ditandai dengan (1) Banyaknya penduduk yang memiliki tingkat kesejahteraan terendah, (2) Rasio Sarana Penyedia Pangan terhadap Jumlah Rumah Tangga dan (3) Rasio Luas Lahan Pertanian terhadap Luas Wilayah. Tabel dibawah ini menyajikan perbandingan hasil penyusunan FSVA Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2023 dengan skala prioritas. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi

berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 agak rentan rawan pangan, dan prioritas 3 rentan rawan pangan.

Tabel 3.6 Perbandingan Hasil Penyusunan FSVA Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	2021			2022			2023		
		Prioritas			Prioritas			Prioritas		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Bakauheni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Candipuro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jati Agung	-	1	1	-	-	2	-	-	-
4	Kalianda	-	-	4	-	-	2	-	-	-
5	Katibung	1	-	4	-	2	6	-	-	-
6	Ketapang	-	-	1	-	-	-	-	-	-
7	Merbau Mataram	-	1	1	-	2	1	-	-	1
8	Natar	-	-	1	-	-	1	-	-	-
9	Palas	-	1	1	-	1	1	-	-	-
10	Penengahan	-	-	2	-	-	-	-	-	-
11	Rajabasa	1	-	2	-	1	-	-	-	-
12	Sidomulyo	-	1	2	-	-	1	-	-	-
13	Sragi	-	1	2	-	-	3	-	-	-
14	Tanjung Bintang	-	2	1	-	-	2	-	-	-
15	Tanjung Sari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Way Panji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Way Sulan	-	-	2	-	-	-	-	-	-

No	Kecamatan	2021			2022			2023		
		Prioritas			Prioritas			Prioritas		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
JUMLAH		2	7	24	-	6	19	-	-	1
		33			25			1		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Dari data pada Tabel didapatkan informasi bahwa desa yang mengalami kerentanan tinggi tahun 2021 yaitu prioritas 1 dan 3 di Kecamatan Katibung, prioritas 2 di Kecamatan Tanjung Bintang, dan prioritas 3 di Kecamatan Kalianda. Tahun 2022 terjadi kenaikan di Kecamatan Katibung, Kecamatan Merbau Mataram, serta penurunan di Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Tanjung Bintang. Tahun 2023 tersisa satu desa yang berada di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Merbau Mataram.

Sehingga berdasarkan data diatas Kabupaten Lampung Selatan telah searah dalam penerapan mengenai Kebijakan Ekonomi Biru dengan kriteria:

1. Peningkatan produksi perikanan dengan menjaga ekosistem laut sebagai sumber kehidupan laut. (lingkungan) yang sehat
2. Pengembangan perikanan budidaya di laut dan darat yang berkelanjutan dengan teknologi yang modern. (iptek) yang produktif
3. Menangkap dan membudidayakan hasil perikanan untuk kesejahteraan nelayan dan pembudidaya.

3.2.2.5 Isu Strategis Ekologi Berkelanjutan

Burdon-Sanderson (2020) menyatakan ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan/relasi eksternal antara tanaman dan hewan satu sama lain, serta keberadaannya pada masa lampau dan masa kini. Relasi eksternal tersebut untuk membedakan dengan fisiologi (relasi internal) dan morfologi (struktur). Krebs memperjelas definisi ekologi yaitu pengetahuan ilmiah mengenai interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan suatu organisme (ekologi adalah mengenai dimana organisme ditemukan, berapa jumlahnya, dan mengapa). Sedangkan Ricklefs mendefinisikan

ekologi sebagai ilmu lingkungan alam, terutama mempelajari hubungan mendalam antara organisme dengan lingkungan sekitarnya. Ekologi menganut prinsip keseimbangan dan keharmonisan semua komponen alam. Terjadinya bencana alam merupakan contoh keseimbangan dan keharmonisan alam terganggu. Ekologi memandang makhluk hidup sesuai dengan perannya masing-masing. Semua makhluk hidup di alam memiliki peran yang berbeda dalam menciptakan keharmonisan dan keseimbangan alam.

Dalam mewujudkan lingkungan berkelanjutan utamanya didasari oleh konsep ekologi. Dimana setiap komponen ekologi mulai dari yang terkecil tak boleh luput diperhatikan. Mewujudkan lingkungan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan secara total kualitas hidup, baik sekarang maupun untuk masa depan, dengan memperhatikan tidak hanya ekologis saja, namun juga berbagai hal lain berupa sosial dan ekonomi. Ketiga hal ini, ekologis, sosial dan ekonomi harus diintegrasikan dengan baik untuk mencapai lingkungan yang berkelanjutan. Dalam hal ini ekologi berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan mengenai Indeks Kualitas Air pada tahun 2023 yakni sebesar 50,51 dengan kualitas yang masih dibawah Provinsi Lampung sebesar 57,77.

Tabel 3.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Lampung Selatan Tahun 2021-2023

Parameter	Tahun		
	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air	60,00	55,00	50,51
Indeks Kualitas Udara	87,37	87,89	84,70
Indeks Kualitas Lahan	26,13	26,10	33,12
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,67	61,99	60,55

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan

Sedangkan indeks Kualitas Udara di Kabupaten Lampung Selatan berada Diatas Provinsi Lampung yakni pada tahun 2023 sebesar 84,70 berada diatas Provinsi Lampung yakni sebesar 85,45. Ini menunjukkan bahwa kualitas ekologi Kabupaten Lampung Selatan sudah cukup baik dengan ditopang oleh kualitas udara sedangkan kualitas air perlu ditingkatkan sesuai dengan target capaian pembangunan berkelanjutan, selain itu, rumah

tangga dengan sanitasi mantap juga perlu ditingkatkan meskipun rumah tangga dengan sanitasi baik sudah tercapai hingga 100% di Kabupaten Lampung Selatan.

Penanganan Emisi Rendah Karbon, Terkait, Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Lampung Selatan bersumber dari kegiatan Transportasi, Energi, Industri, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Pertanian. Belum ada studi terkait gas rumah kaca yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan salah satu penyebab terjadinya kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi. Pada dasarnya gas rumah kaca, seperti CO₂ dan CH₄ adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Emisi GRK ialah hasil dari lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area dan dalam jangka waktu tertentu.

3.2.2.6 Isu Strategis Tata Kelola Adaptif

Tata kelola adaptif melibatkan dan mengarahkan kinerja ke arah pencapaian hasil dalam lingkungan yang semakin kompetitif. Secara spesifik kepada Pengelolaan *adaptive governance* yang telah berkembang sebagai pendekatan analitis untuk memahami tata kelola sumber daya alam yang mengambil landasannya dari ketergantungan sistem sosial dan ekologi. Agar adaptif, tata kelola harus mencakup gambaran besar, tidak hanya secara geografis, tetapi juga secara kelembagaan termasuk semua lembaga formal dan informal (Chaffin, Gosnell, & Cosens, 2014). Mencakup beberapa level kerangka kerja pemerintah baik jangka pendek dan jangka panjang, tetapi juga transisi antara negara, sosial yang berbeda, Memungkinkan untuk transformasi. Yang paling penting untuk transformasi adalah pembelajaran sosial, yang berarti orang harus dilibatkan. pengelolaan adaptif merupakan proses yang berkesinambungan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti, masalah lingkungan, geopolitik, sosial, budaya, dan ekonomi. Hal ini tercermin dalam pencapaian akuntabilitas keuangan dan pengelolaan pemerintah melalui opini BPK.

Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan tata Kelola pemerintahan yang baik dengan memperoleh opini WTP dan memperoleh nilai akuntabilitas sebesar B+. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Nilai Akuntabilitas dan Opini BPK Kabupaten Lampung Selatan 2019-2023

Nilai Akuntabilitas		Opini BPK
2019	B	WTP
2020	B	WTP
2021	B	WTP
2022	B	WTP
2023	B	WTP

Selain itu, Kabupaten Lampung Selatan telah memperoleh penilaian RB dengan point 70, atau berhasil melakukan Upaya reformasi birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Tabel Penilaian RB Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks
Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,46	2,46
Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	99,97	5,74
Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2
Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	3	1,2
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3,134	2,51
Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	0,5	0,5
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	66,43	2,66
Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5		
Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	14,14	0,35
Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	2	1
Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	10	0,25
Indeks Reformasi Hukum	2,5	45,02	1,13
Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	1,43	0,71
Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	47,75	1,19
Indeks Sistem Merit	4	134,5	1,31
Indeks Pelayanan Publik	1,5	2,5	0,75
Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	76,63	1,15
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	2,74	4,93
Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	100	2
Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	58	3,08

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks
Opini BPK	5	5	5
Tindak Lanjut Rekomendasi	4	83,9	3,36
Indeks BerAkhlak	4	61,4	2,46
Survei Penilaian Integritas	10	68,77	6,88
Survei Kepuasan Masyarakat	8	87,49	7
Koefisien	10		0
Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0,4	0,23	0,23
Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0,4	0,3	0,3
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0,4	0,33	0,33
Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0,4	0,4	0,4
Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	0,4	0,25	0,25
Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0,6	36,83	0,13
Realisasi Investasi (Capaian Output)	0,6	89,5	0,4
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0,6	85,97	0,43
Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0,6	100	0,6
Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0,6	61,52	0,23
Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	0,81	0,81
Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	2	2
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	2,25	2,25
Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	1,46	1,46
Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	1,47	1,47
Total			70,91

Sumber: Kemen-PAN RB, 2023

Hal ini memperlihatkan bahwa reformasi birokrasi yang telah dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan sangat strategis untuk dilakukan mengingat reformasi birokrasi merupakan kunci tata Kelola yang baik dalam rangka mendorong transformasi ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.

3.2.2.7 Isu Strategis Supremasi Hukum

Supremasi hukum merupakan upaya untuk menegakkan hukum sebagai peraturan tertinggi. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum (rule of law) jika supremasi hukum telah ditegakkan. Tujuan supremasi hukum penting sebagai aturan main dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalam perlindungan hak-hak warga negara. Negara hukum adalah suatu negara yang menempatkan aturan hukum pada tempat yang tertinggi, yang meliputi perlindungan terhadap HAM, pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan

kepada peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan yang jujur, adil, dan berdiri sendiri. Pengertian supremasi hukum adalah upaya untuk menjadikan instrumen hukum dan keadilan sebagai landasan dari keberlangsungan suatu sistem masyarakat. Dalam konsep supremasi hukum, aturan hukum dijadikan sebagai kekuasaan tertinggi yang harus ditegakkan dan dipatuhi oleh tiap elemen pemerintah dan masyarakat. Singkatnya, definisi supremasi hukum dapat diartikan sebagai sebuah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main yang utama dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat yang dilakukan secara jujur dan adil. Hukum adalah kedaulatan tertinggi dalam suatu negara, karena itu aturan tertinggi dalam negara hukum adalah hukum itu sendiri. Penyelenggara pemerintahan negara hanya melaksanakan kehendak hukum, sehingga dalam konteks supremasi hukum, hukum bertindak sebagai komando dan panglima tertinggi dalam negara yang harus dipatuhi. Dalam hal penanganan kasus hukum di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2021 memperlihatkan adanya volatility perubahan penanganan kasus di Kabupaten Lampung Selatan meskipun secara umum mengalami penurunan di Kabupaten Lampung Selatan khususnya mengenai penanganan kasus larian anak di bawah umur, pencurian dengan kekerasan dan penyerobotan tanah untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar berikut.

Perkara	Banyaknya Laporan Perkara di Kabupaten Lampung Selatan									
	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara (Persen)	Sisa	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Esekusi	Grasi
Gugatan	19	68	75	86	12	16	9	5	2	-
Permohonan	1	272	272	100	1	-	1	-	-	-
Kepailitan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadilan Hubungan Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perlawanan/Bantahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gugatan Sederhana	1	26	24	89	3	-	-	-	-	-
Permohonan Konsinyasi	-	1	1	100	-	-	-	-	-	-
Pidana Biasa	50	369	377	90	42	27	24	3	-	-
Pidana Singkat	-	1	1	100	-	-	-	-	-	-
Pidana Cepat	-	22	22	100	-	-	-	-	-	-
Perkara Lalu Lintas	-	4.584	4.584	100	-	-	-	-	-	-
Pidana Anak	-	26	25	96	1	4	3	-	-	-
Pidana Praperadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	71	5.369	5.381	-	59	47	37	8	2	0

Gambar 3.7 Jumlah Kasus Penanganan Hukum Kabupaten Lampung Selatan 2023

3.2.2.8 Isu Strategis Pembangunan Merata

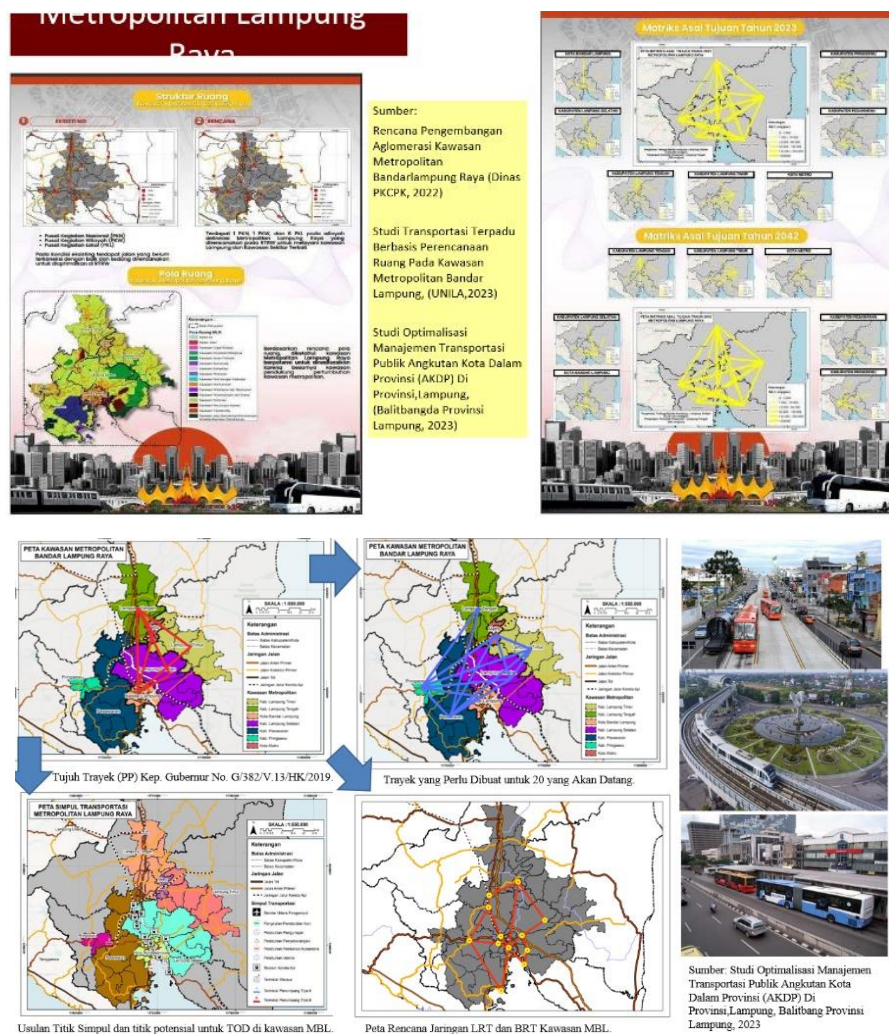
Pemerataan pembangunan bertujuan agar pembangunan dan peningkatan ekonomi tidak hanya berpusat di kota, sedangkan daerah lainnya tertinggal. Pemerataan pembangunan mengembangkan infrastruktur pendidikan, sumber air, jalan, transportasi, pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, perumahan, kesehatan, ketenagalistrikan, dan infrastruktur lainnya dibangun secara merata di seluruh wilayah. Sehingga, semua warga negara dari berbagai lapisan masyarakat dan wilayah dapat merasakan hasil pembangunan yang sama tanpa perlu melakukan urbanisasi. Begitupun di Kabupaten Lampung Selatan kualitas jalan baik pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 215 Km, sedangkan jalan rusak terus mengalami penurunan hingga sebesar 225,6 Km.

Tabel 3.10 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan

Kondisi Jalan	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Lampung Selatan (km)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Baik	700,39	720,52	615,92	630,92	-	415,08
Sedang	68,86	63,54	178,19	180,19	-	255,90
Rusak	70,91	236,57	375,34	419,72	-	225,06
Rusak Berat	400,26	219,81	70,96	53,96	-	308,07
Jumlah	1.240,44	1.240,44	1.240,41	1.284,79	-	1.204,10

Sumber: BPS Lampung Selatan, 2024

Koridor transportasi, jika merujuk pada Tujuh Trayek (PP) Kep. Gubernur No. G/382/V.13/HK/2019, maka akan dibangun Trayek yang Perlu Dibuat untuk 20 yang Akan Datang, Usulan Titik Simpul dan titik potensial untuk TOD di kawasan MBL, Peta Rencana Jaringan LRT dan BRT Kawasan MBL. Maka melihat rencana pengembangan ini, Kabupaten Lampung Selatan akan terkena dampak pemerataan kualitas transportasi yang tentunya akan didukung oleh pemerataan jalan yang akan mendorong pemerataan Pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan



Gambar 3.8 Manajemen Transportasi Publik

Sumber: Studi Optimalisasi Manajemen Transportasi Publik Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Di Provinsi, Lampung, Balitbang Provinsi Lampung, 2023

3.2.2.9 Isu Strategis Pembangunan Merata Berbasis Pariwisata

Pariwisata merupakan industri besar yang berkembang dengan pesat dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan kesempatan berusaha dan kerja yang luas serta beragam. United Nations World Tourism Organization (UNWTO) memperkirakan pada tahun 2020 akan terjadi pergerakan sebanyak 1,6 miliar wisatawan mengunjungi obyek-obyek wisata di dunia dengan perkiraan membelanjakan uang lebih dari USD 5 miliar per hari. Pariwisata kini telah diproyeksikan menjadi mesin pendorong pertumbuhan di berbagai aspek kehidupan; perekonomian, industri, mobilitas sosial dan industri kreatif. Pariwisata telah menjadi tumpuan dalam

pembangunan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan sosial khususnya masyarakat lokal di mana atraksi wisata berada dengan menyediakan lapangan kerja dan usaha baru.

Pariwisata adalah fenomena sosial yang merupakan bagian dari pembangunan. Pembangunan dan pengembangan pariwisata telah menjadi sebuah komitmen dari pemangku kepentingan (stakeholders) pariwisata sebagai tanggung jawabnya untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan pariwisata diproyeksikan untuk dapat memberi keuntungan substansial.

Dalam kaitannya dengan pendekatan ekonomi Ashley, Boyd dan Goodwin (2000) menyatakan bahwa pariwisata memiliki kelebihan, yaitu:

1. Konsumen mendatangi destinasi, dimana pariwisata memberi peluang pada tambahan penjualan barang dan jasa di sekitar lokasi
2. Pariwisata membuka kesempatan penting bagi penganekaragaman ekonomi lokal
3. Pariwisata menawarkan labourintensive dan kesempatan berusaha bagi pengusaha berskala kecil, proporsi yang lebih tinggi bagi pekerja wanita, dan pemanfaatan sumber-sumber alam dan budaya yang bernilai

Besarnya potensi wisatawan ini, berbanding lurus dengan potensi wisata di Kabupaten Lampung Selatan. Seperti pada data kunjungan jumlah wisatawan di Kabupaten Lampung Selatan Pada Tahun 2022 yakni untuk wisatawan domestic sebesar 616.218 Orang dan untuk wisatawan mancanegara sebesar 64 orang. Hal ini memperlihatkan besarnya potensi wisata daerah yang mesti di topang oleh pemerataan pembangunan pada pusat-pusat destinasi wisata. Sehingga diharapkan sektor strategis ini mampu menjadi pengungkit perekonomian daerah dan menjadi sumbu-sumbu ekonomi baru berbasis pemerataan pembangunan.

Tabel 3.11 Jumlah Wisatawan Kabupaten Lampung Selatan, 2019-2023

Wisatawan	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Lampung Selatan (Jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Mancanegara	213	135	6.229	64	17
Domestik	462.800	236.038	443.250	616.728	742.501
Jumlah	463.013	236.173	449.479	616.792	742.518

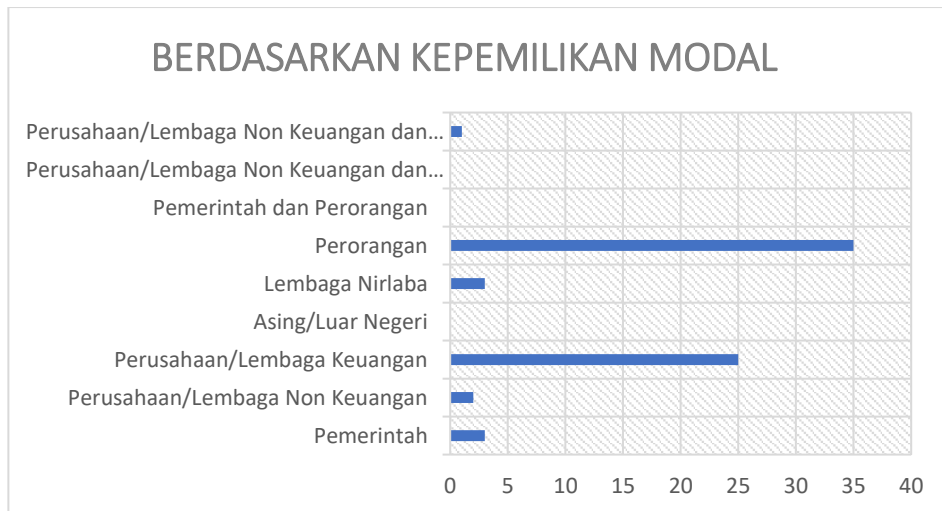
Sumber: BPS Lampung Selatan 2024

3.2.2.10 Isu Strategis Pembangunan Industri dan UMKM

UMKM dan Industri merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada.

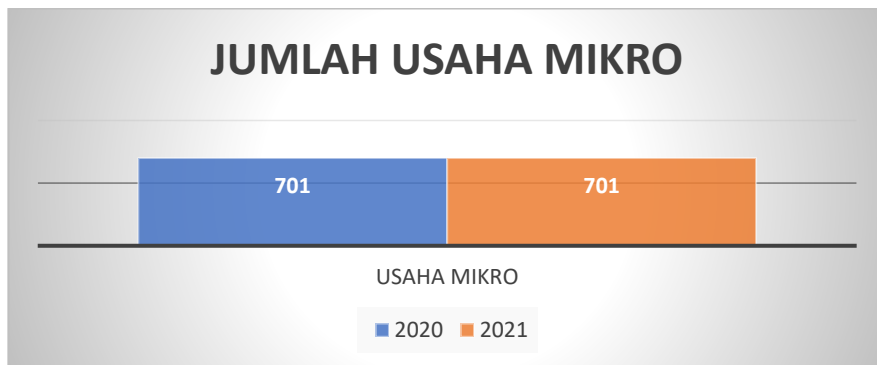
Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah telah menjalankan sejumlah program dukungan UMKM, diantaranya bantuan insentif dan pembiayaan melalui program PEN, Kredit Usaha Rakyat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Digitalisasi pemasaran UMKM, Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR, dan termasuk pula strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui UU Cipta Kerja. Dukungan dan kerjasama serta kolaborasi dalam membangun UMKM dan industri tepat menjadi pilar pembangunan strategis kedepan.

Potensi Industri dan UMKM inipun menjadi pilar pembangunan strategis di Kabupaten Lampung Selatan ditengah tantangan pembangunan dan peran global negara bangsa yang sangat kompleks. Maka industri dan UMKM menjadi pilar penjaga pembangunan strategis khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Adapun perkembangan industri dan UMKM di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Gambar Berikut:



Gambar 3.9 Kepemilikan Modal Usaha Kabupaten Lampung Selatan 2023

Sumber: BPS Lampung Selatan 2024



Gambar 3.10 Jumlah Usaha Mikro Kabupaten Lampung Selatan 2020-2021

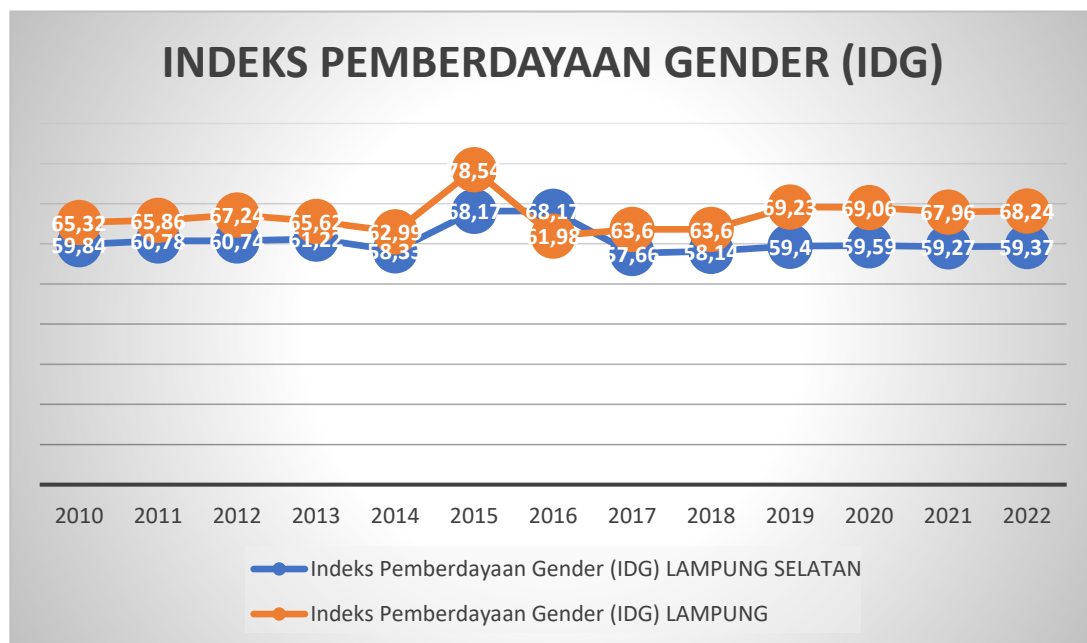
Sumber: BPS Lampung Selatan 2024

Berdasarkan data diatas memperlihatkan bahwa kepemilikan modal industri di Kabupaten Lampung Selatan di dominasi perseorangan sebanyak 35 perusahaan dan terdapat 700 Usaha Mikro di Kabupaten Lampung Selatan sebagai subjek dan objek pembangunan dalam rangka mendorong pembangunan industri strategis berbasis pengusaha lokal.

3.2.2.11 Isu Strategis Pembangunan Sosial

Perempuan dan keterlibatannya dalam pembangunan di Indonesia dinilai masih memiliki angka yang rendah dibandingkan laki-laki. Hal tersebut dibuktikan dalam Global Gender Gap Report tahun 2021 yang menyebutkan ketimpangan gender di Indonesia mencapai nilai 0,688. Hal

tersebut berarti bahwa perempuan dinilai masih tertinggal dalam upaya berpartisipasi pada berbagai aspek pembangunan nasional. Bahkan untuk permasalahan yang terkait perempuan dan anak, seringkali pengambil keputusan berasal dari laki-laki, padahal pihak yang paling memahami solusi yang dibutuhkan adalah perempuan sendiri. Untuk itu, keterlibatan perempuan dalam berbagai posisi strategis pengambil keputusan sangatlah penting. Kesenjangan gender merujuk pada suatu kondisi dimana laki-laki dan perempuan bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak dan kewajibannya (Mansour Fakih, 2000). Idealnya, keberhasilan pembangunan dapat tercapai apabila terdapat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang adil dan setara.



Gambar 3.11 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Lampung Selatan 2010-2022

Sumber: BPS Lampung Selatan 2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2022 sebesar 58,24 di tahun, sedangkan Provinsi Lampung sebesar 59,37. Hal ini memperlihatkan bahwa perlu ada peningkatan pemberdayaan Perempuan khususnya di Gender di Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan inturksi PBB (*United Nations*) yang menyatakan bahwa kesetaraan gender tidak hanya hak asasi manusia yang mendasar, tetapi juga

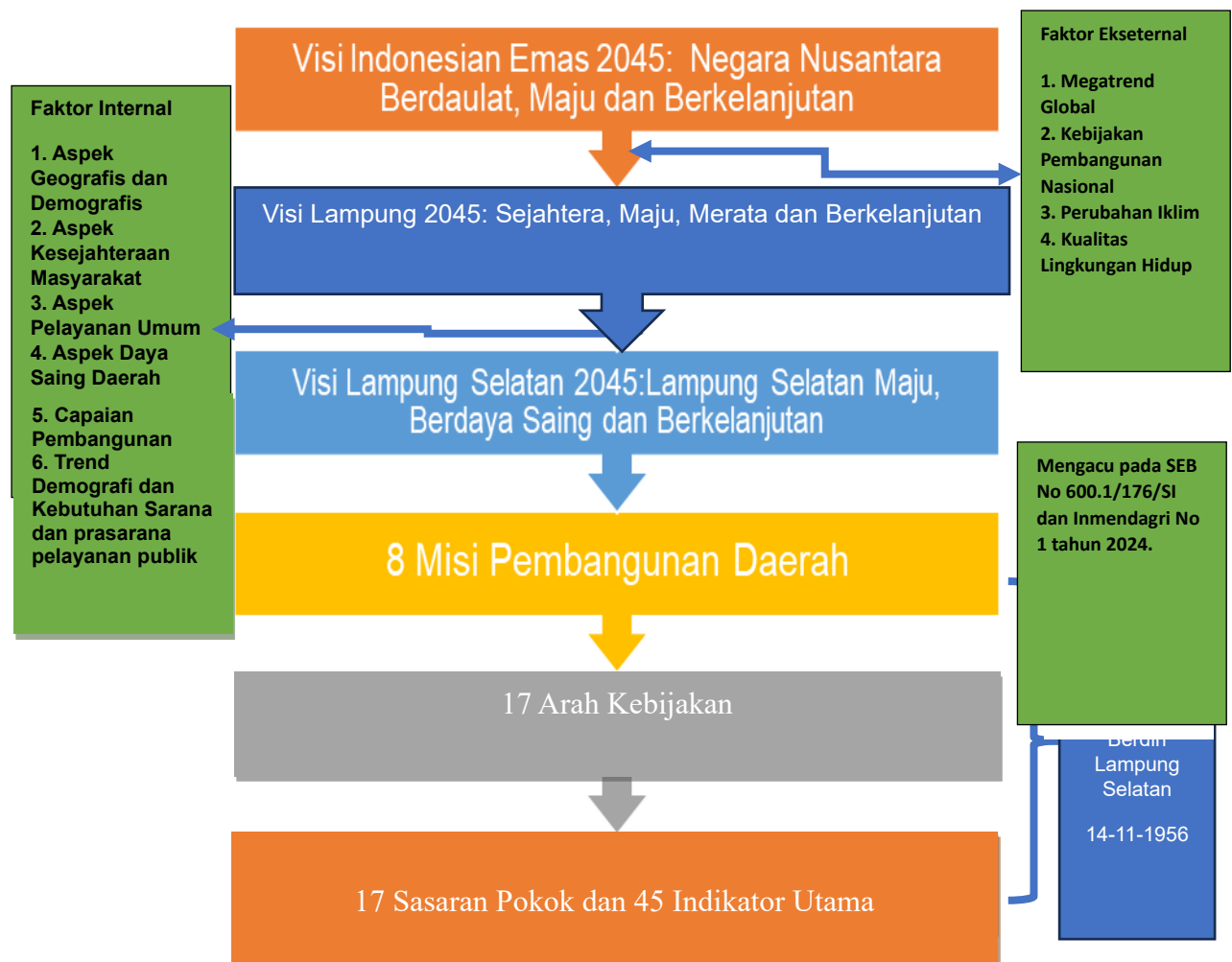
landasan yang diperlukan untuk perdamaian, kesejahteraan dunia dan pembangunan berkelanjutan. Perempuan dan anak berhak atas kesetaraan akses pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan keterwakilan dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi akan mendorong keberlanjutan ekonomi serta partisipasi dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan kemanusiaan secara luas. Mengingat pentingnya kesetaraan gender tersebut, maka kesetaraan gender menjadi salah satu dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) dengan focus utama pada jaminan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak secara global serta dukungan terhadap pembangunan perempuan yang mampu berdaya saing secara unggul dan setara dengan laki-laki.

BAB 4

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi Pembangunan

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana suatu proses pemerintahan dan pembangunan menuju agar dapat eksis, antisipatif, dan berkelanjutan. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan.



Gambar 4.1 Kerangka Berfikir Perumusan Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk masa tahun 2025-2045, Maka Visi Kabupaten Lampung Selatan Adalah:

VISI: Lampung Selatan Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan

“Tagline Lampung Selatan Unggul 2045”

1. Visi **Maju**: Dalam pengertian ini mengacu RPJP Nasional melakukan kriteria bahwa Indonesia maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Maju dalam RPJP Nasional juga bermakna Bahwa Indonesia berdaya, modern, inovatif, tangguh, dan adil. Maka senada dengan itu maju dalam hal ini Kabupaten Lampung Selatan mewakili empat (4) isu strategis: SDM unggul, kualitas kesehatan unggul, ekonomi maju, dan tata kelola adaptif.
2. Visi Berdaya Saing: Dalam pengertian ini, **Berdaya Saing**: berdasarkan KKBI berarti Memiliki Kekhasan, Keunggulan Sektor - Sektor Strategis Pembangunan Sesuai Dengan Potensi dan Keunggulan Daerah. Maka berdaya saing dalam hal ini Kabupaten Lampung Selatan mewakili dua (2) isu strategis: ekologi berkelanjutan dan ketahanan pangan.
3. Visi **Berkelanjutan**: mendorong pengelolaan sumber daya lingkungan dan ekologis secara terus menerus dan berkesinambungan. Maka berkelanjutan dalam hal ini Kabupaten Lampung Selatan mewakili empat (4) isu strategis: pembangunan merata, pembangunan merata berbasis pariwisata, pembangunan industri dan UMKM, dan pembangunan sosial.

4.2 Sasaran Visi

Tabel 4.1 Sasaran Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Lampung dan RPJPD Kabupaten Lampung Selatan

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kabupaten/ Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator Visi	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pendapatan per kapita Negara Maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	30.300	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp. Juta)	52,14 - 52,46	328,03 - 384,39	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp. Juta)	55,63	374,47-385,70
						b. Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,90-5,30	5,52-6,97		Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5-5,5	5,5-6
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15		c.Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	18,50 - 19,40	26-28		b.Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	23,86%	29,75-30,00
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28		d. Indeks Ekonomi Biru	23,43	65,16*		c. Indeks Ekonomi Biru	29,03	64,80-65,16
2	Kemiskinan menuju 0% dan Ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	9,50-10,00	0,50-1,00	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	12,0	2,20-2,00
		b. Rasio Gini (Indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,32		b. Rasio Gini (Indeks)	0,318-0,321	0,256 - 0,266		b. Rasio Gini (Indeks)	0,261	0,266

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kabupaten/ Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator Visi	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		c. Kontribusi PDRB KTI	21,5 (2022)	28,5		c. Persentase Desa Mandiri	1,51	13,0 - 15,13		c. Persentase Desa Mandiri	4,69	21,69-21,88
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (Peringkat)	34 (2023)	15 Besar	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,02	3,76 - 4,00	Peningkatan Daya Saing Daerah	Share PMTB Terhadap PDRB(%)	3,95-4,01	4,32-4,38
						Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap Nasional	2,17	2,50		Kontribusi PDRB Kabupaten Lampung Selatan terhadap Provinsi	14,20-14,34	15,07-15,22
4	Daya saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,54	0,73	Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	73,00	79,00 – 80,00	Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,96	78,36-80,62
						Indeks Modal Manusia	0,54	0,68 - 0,70		Indeks Modal Manusia	0,55	0,66-0,70
5	Intensitas emisi GRK Menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK	62,79	93,17	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,79	93,17

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kabupaten/ Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator Visi	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,99	75,22		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,40	71,48-71,73

4.3 Misi

Di tahun 2045 jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan diproyeksikan mencapai 1.512.237 jiwa. Proyeksi peningkatan jumlah penduduk ini dapat menjadi potensi sekaligus tantangan bagi pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan cita- cita pembangunan 20 Tahun mendatang.

Secara strategis, Dengan jumlah penduduk yang besar maka memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari secara umum terutama dari sisi konsumsi, meskipun hal ini memiliki implikasi meningkatkan kebutuhan pelayanan dasar. Untuk itu pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, perlu melakukan transformasi pembangunan yang dijabarkan dalam 8 Misi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Lampung Selatan.

Misi Ke-1 Transformasi Sosial

Misi ini dilakukan untuk mewujudkan Penciptaan Kualitas Pendidikan dengan penguasaan Teknologi Yang Modern, dan juga untuk mewujudkan status outcome kesehatan yang lebih baik melalui Penyediaan Fasilitas Medis, Kualitas Tenaga Medis yang Modern, serta perlindungan sosial.

Misi Ke-2 Transformasi Ekonomi

Misi ini dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan Ekonomi Daerah melalui IPTEK, inovasi, serta produktivitas dan penerapan ekonomi hijau, dan transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pemerataan kota dan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Misi Ke-3 Transformasi Tata Kelola

Misi ini dilakukan untuk mewujudkan Tata Kelola Yang Kredibel, Transparan, Modern dan mewujudkan kepastian hukum, ketertiban dan keamanan Masyarakat melalui penciptaan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif.

Misi Ke-4 Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan Stabilitas ekonomi makro daerah

Misi ini dilakukan untuk mewujudkan Kualitas Masyarakat yang tertib, dan demokratis dalam rangka penguatan stabilitas fondasi ekonomi makro daerah dengan mewujudkan hukum berkeadilan, keamanan nasional Tangguh, dan demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro, penciptaan daya saing daerah.

Misi Ke-5 Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologis

Misi ini dilakukan untuk Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan lingkungan melalui penciptaan kerukunan beragama dan kebudayaan maju, serta keluarga berkualitas dan kesetaraan gender menuju Masyarakat inklusif, lingkungan hidup berkualitas, ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Misi Ke-6 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan Merata dan dirasakan semua orang dan pembangunan sektor wisata berbasis pemerataan infrastruktur.

Misi Ke-7 Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi ini dilakukan untuk mewujudkan Pembangunan sarana prasarana umum yang ramah lingkungan.

Misi Ke-8 Kestinambungan Pembangunan

Misi ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan berkesinambungan.

4.4 Upaya Super Prioritas (*Game Changer*) Pembangunan Daerah 2025-2045

Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat upaya transformative super prioritas (*Game Changer*) Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 yang diselaraskan dengan RPJPN, antara lain:

Tabel 4.2 *Game Changer* Lampung Selatan

No	Transformasi Daerah	Upaya Super Prioritas (Game Changer) Daerah	
A.	Transformasi Ekonomi	1.	Industrialisasi: hilirisasi hasil pertanian yang didorong oleh riset dan inovasi dengan orientasi ekspor.
		2.	Ketahanan pangan melalui pendekatan terpadu FEW Nexus (food, energy, water) dan jaminan harga hasil pertanian
		3.	Pengembangan <i>blue economy</i> melalui penguatan sektor pariwisata dan penguatan hasil laut yang ramah lingkungan
B.	Transformasi Sosial	4.	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)
		5.	Pemenuhan pelayanan kesehatan primer berstandar, penuntasan <i>stunting</i> , pengendalian penyakit menular, tidak menular dan <i>new emerging disease</i>
		6.	Penanggulangan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
C.	Transformasi Tata Kelola	7.	Digitalisasi Pelayanan Publik berbasis satu data
		8.	Penerapan sistem merit pada birokrasi pemerintahan
D.	Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Berkelanjutan	9.	Percepatan transisi EBT dan jaringan transportasi yang terpadu
		10.	Integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi dalam wilayah dan antar pulau
		11.	Percepatan aktivitas ekonomi pada Kawasan industri
		12.	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir

BAB 5

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Tabel 5.1 Arah Kebijakan Transformasi Sosial

Misi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Penguatan Fondasi Transformasi Sosial	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Nasional	Perwujudan Lampung Selatan Unggul
Misi ke-1: Transformasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan pelayanan dasar, bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. • Efektivitas penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan daya saing Sumber Daya Manusia yang berkualitas. • Kolaborasi penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan daya saing Sumber Daya Manusia yang berkualitas. • Kemiskinan dan ketimpangan semakin menurun 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan Daya saing Sumber Daya Manusia yang berkualitas. • Kemiskinan dan ketimpangan pada kategori rendah
IE1. Kesehatan untuk semua	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, Kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan. • Pemerataan dan peningkatan akses layanan Kesehatan Universal • Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana- 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan tenaga Kesehatan Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga Kesehatan • Percepatan eliminasi penyakit menular 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan • Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas • Percepatan penuntasan stunting dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan Stunting • Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat

Misi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Penguatan Fondasi Transformasi Sosial	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Nasional	Perwujudan Lampung Selatan Unggul
	<p>prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya • Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan • Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga • Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan Stunting 	<p>dan penyakit tropis terabaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan Stunting 	<p>pencegahan Stunting</p>	
IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan

Misi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Penguatan Fondasi Transformasi Sosial	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Nasional	Perwujudan Lampung Selatan Unggul
	<p>dasar dan Pendidikan menengah)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah • Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah) • Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan 	<p>peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah • Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan Peningkatan kualitas pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas 	

Misi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Penguatan Fondasi Transformasi Sosial	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Nasional	Perwujudan Lampung Selatan Unggul
	<p>dunia usaha dan dunia industri (DUDI).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif khusus guru dan tenaga kependidikan <p>Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama</p>	<p>guru dan tenaga kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan <p>Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK,</p>		
IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan • Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & highvalue economy</i>) • peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling • Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan

Misi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Penguatan Fondasi Transformasi Sosial	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Nasional	Perwujudan Lampung Selatan Unggul
	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi • Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan Pendidikan bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan 	<p>pendapatan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan /peningkatan government induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi • Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan, • Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang 	layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, Penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu Kawasan perkotaan.	sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien

Misi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Penguatan Fondasi Transformasi Sosial	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Nasional	Perwujudan Lampung Selatan Unggul
		inklusif dan berbasis kerakyatan <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah 		

Tabel 5.2 Indikator Utama Pembangunan Transformasi Sosial

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD		
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL			
IE.1	Kesehatan untuk Semua			IE.1	Kesehatan untuk Semua			IE.1 Kesehatan untuk Semua			Terwujudnya Kesehatan Masyarakat yang Berkelanjutan
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,4	80,0	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,32	80,00-82,00	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,59	78,22-78,41	
2	Kesehatan Ibu dan Anak			2	Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:			
a.	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	16	a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	138	10-15	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	25,07	9,09-8,62	
b.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat	13,5	5,0	b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat	13,20	3,00 - 4,00	b. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan	7,41	0,33-0,28	

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD		
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL			
	pendek) pada balita (%)				pendek) pada balita (%)			sangat pendek) pada balita (%)			
3	Insidensi Turberkolis (per 100.000 penduduk)	274	76	3	a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (case detection rate) (%)	71,00	93,00 - 95,00	a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (case detection rate) (%)	46,23	92,80-93,00	
					b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	96,91*	98,00*	a. b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	100,00	100,00	
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,0	99,5	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	90,00	98 - 100	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100,00	100,00	

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD		
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL			
IE.2	Pendidikan Berkualitas yang Merata			IE.2	Pendidikan Berkualitas yang Merata			IE.2 Pendidikan Berkualitas yang Merata			Terwujudnya Pendidikan Masyarakat yang Berdaya Saing
5	Hasil pembelajaran			5	Hasil pembelajaran			Hasil pembelajaran			
a.	Rata-rata nilai PISA			a.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*			a. Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional			
	- Membaca	396	485		(i) Literasi Membaca	6,67 - 13,33	66,67 - 73,33	(i) Literasi Membaca	32,35	73,00-73,33	
	- Matematika	404	490		(ii) Numerasi	0,00 - 6,67	60,00 - 66,67	(ii)Numerasi	22,88	63,81-66,67	

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD		
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL			
	- Sains	416	487		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk			
	-				Literasi Membaca	30,75 - 32,75	68,61 - 70,61	Literasi Membaca	55,68	68,60-70,61	
	-				Numerasi	20,35 - 22,35	58,49 - 60,49	Numerasi	62,84	69,09-69,44	
b.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,46	12,0	b.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,97 - 8,98	11,38 - 11,44	b. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,81	12,30-12,91	

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD		
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL			
c.	Harapan lama sekolah	13,37	14,81	c.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,00	14,39 - 14,43	c. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,83	14,82-14,94	
6	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94	60,00	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	7,43	8,36	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	8,85	17,79-18,46	
7	Presentasi pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	61,87	75,00	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	72,42*	80,00*	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	57,23	73,15-75,00	
IE.3	Perlindungan sosial yang adaptif			IE.3	Perlindungan sosial yang adaptif			IE3 Perlindungan sosial yang adaptif			Terwujudnya Perlindungan

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD		
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL			
											Sosial Masyarakat yang Berkelanjutan
8	Tingkat kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	8	Tingkat Kemiskinan (%)	9,50 - 10,00	0,50-1,00	Tingkat Kemiskinan (%)	12,02	2,20-2,00	
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	44,1	99,5	9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	26,69	76,00-80,00	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kabupaten (%)	82,40	83,98-85,00	
10	Persentasi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20,0	60,0	10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	22,00	53,00-55,00	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	22,00	54,65-55,00	

Tabel 5.3 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi

Misi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Perkuatan Fondasi Transformasi Ekonomi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Nasional	Perwujudan Lampung Selatan Unggul
Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan Pemerataan SDM yang berkualitas • Penguatan riset dan inovasi bidang pertanian dalam arti luas dan industri Penyempurnaan fondasi regulasi di bidang ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya tenaga kerja lokal yang berkualitas Produktivitas meningkat • Penguatan Sektor pariwisata sebagai sektor penyangga ekonomi Terwujudnya Kawasan industri yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peluang pengembangan Industri • Pemantapan hilirisasi sumber ekonomi baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya cita-cita keluar dari <i>middle-income trap</i> • Terwujudnya daerah berbasis industri
IE 4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan produk unggulan pertanian, perikanan, dan Jasa Pariwisata • Peningkatkan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan produktivitas produk unggulan dengan peningkatan kualitas serta nilai tambah produk pertanian, perikanan, dan jasa pariwisata yang berstandar • Optimalisasi produktivitas sektor unggulan dengan percepatan pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan produktivitas unggulan secara masif dengan peningkatan kualitas serta nilai tambah produk pertanian, perikanan, dan jasa pariwisata yang berstandar 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan produk unggulan daerah yang berdaya saing nasional • Perwujudan produktivitas sektor unggulan yang sangat inovatif dan diversifikatif

Misi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Perkuatan Fondasi Transformasi Ekonom	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Nasional	Perwujudan Lampung Selatan Unggul
IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan partisipasi pelaku kebijakan tata Kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan implementasi tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis secara merata di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan pelaksanaan prinsip ekonomi hijau dengan nilai ekonomis tinggi
IE 6. Transformasi Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat • Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya a melalui ilmu/rekayasa/ teknologi terapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat • Perluasan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat • Pemantapan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan kualitas akses layanan digital dan mendukung peningkatan masyarakat • Perwujudan teknologi tertapan dengan akses informasi yang meningkatkan produktivitas
IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan ekosistem bisnis pelaku industri lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan ekosistem bisnis pelaku industri lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan ekosistem bisnis pelaku industri lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan Produk unggulan daerah sebagai pemasok utama kebutuhan

Misi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Perkuatan Fondasi Transformasi Ekonom	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Nasional	Perwujudan Lampung Selatan Unggul
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global. • Pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global • Peningkatan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan akses pasar ekspor/global. • Pemantapan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah 	<p>produk akhir pasar domestik dan global</p>
IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan • Penguatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan • Penguatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan kesempatan kerja yang luas dengan prinsip keberlanjutan lingkungan • Perwujudan pembangunan ekonomi antar

Misi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Perkuatan Fondasi Transformasi Ekonom	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Nasional	Perwujudan Lampung Selatan Unggul
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage • Pemenuhan Kebutuhan pangan secara sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal 	<p>merata, inklusif dan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal 	<p>wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal

Tabel 5.4 Indikator Utama Pembangunan Transformasi Ekonomi

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025- 2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025- 2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok		
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD				
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
TRANSFORMASI EKONOMI				TRANSFORMASI EKONOMI								TRANSFORMASI EKONOMI	
IE.4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			IE.4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			IE.4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Terwujudnya pemanfaatan IPTEK dalam Inovasi dan Produktivitas Ekonomi yang berdaya saing		
11	Rasio PDB industri pengolahan (%)	20,8	28	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,50 - 19,40	26,47 – 28,00	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	23,86	29,75-30,00			
12	Pengembangan Pariwisata			12	Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata					
a.	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	8	a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,63	2,77	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,60	2,81-2,89			

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok	
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD			
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
TRANSFORMASI EKONOMI				TRANSFORMASI EKONOMI								TRANSFORMASI EKONOMI
b.	Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar)	18	100	b.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	3,90	9,75	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	33,32	2.888-3.000		
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,9	110	13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,82	2,77-3,10	Proporsi PDRB Jasa Lainnya(%)	0,75	3,02-3,10		
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD				
a.	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,3 (2019)	5	a.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	11,81	18,11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	11,81	17,86-18,25		

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD		
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TRANSFORMASI EKONOMI				TRANSFORMASI EKONOMI							
				b.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	2,36	6,0	Proporsi Jumlah Industri Mikro dan Kecil pada Level Kabupaten (%)	98,84	96,98-100,00	
b.	Rasio kewirausahaan (%)	2,9 (Aug 2022)	8	c.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,62	5,03	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,62	4,8 6-5,03	
c.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1 (2021)	10	d.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,84	3,42	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,35	6,36-7,00	
d.	Return of Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	e.	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	1,91	5,16	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	2,62	5,04-5,16	
15	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5	4	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,86-4,00	1,36-2,38	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,19	2,41-2,38	

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok	
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD			
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
TRANSFORMASI EKONOMI				TRANSFORMASI EKONOMI								TRANSFORMASI EKONOMI
					b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	30*	55*					
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)	55,4	70	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,82*	69,9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	44,60	64,97- 66,00		
17	Tingkat penguasaan IPTEK			17	Tingkat penguasaan IPTEK			Tingkat penguasaan IPTEK				
a.	Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	2,2- 2,3	a.	Indeks Inovasi Daerah	57	66-68	Nilai Indeks Inovasi Daerah	62,68	68,91- 69,26		
b.	Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	75 (2022)	30 besar					Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah	2,81	4,48- 4,60		

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok	
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD			
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
TRANSFORMASI EKONOMI				TRANSFORMASI EKONOMI								TRANSFORMASI EKONOMI
IE.5	Penerapan Ekonomi Hijau			IE.5	Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan Ekonomi Hijau			Terwujudnya keselarasan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan	
18	Tingkat penerapan ekonomi hijau			18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				
a.	Indeks ekonomi hijau (%)	70,8	90,65	a.	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	59,19	74,65	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	59,19	68,86- 69,42		
b.	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70	b.	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	36,00	44,20	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	36,00	43,88- 44,20		

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok		
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD				
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
TRANSFORMASI EKONOMI				TRANSFORMASI EKONOMI								TRANSFORMASI EKONOMI	
IE.6	Transformasi Digital			IE.6	Transformasi Digital			IE.6 Transformasi Digital			Terwujudnya daya saing ekonomi melalui transformasi digital		
19	Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat)	51	20 besar	19	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	5,8	7,3	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	5,8	6,38-6,41			
IE.7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			IE.7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			IE.7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Terwujudnya sinergisitas pembangunan antar regional yang berkelanjutan		
20	Biaya logistic (% PDB)	16,9	9	20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah	5,15	3,83	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah	5,15	4,02-			
		-2019								3,96			

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok	
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD			
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
TRANSFORMASI EKONOMI				TRANSFORMASI EKONOMI								TRANSFORMASI EKONOMI
					Tingkat Provinsi*			Tingkat Kabupaten				
21	Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	29,8	27,2	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,51	35,25-36,5	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	35,12	35,79-35,82		
22	Ekspor barang dan jasa (% PDB)	26	40	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	21,00-23,00	28,5-30,0	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	4,39	26,86-29,55		
IE.8	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			IE.8	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			IE.8 Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Terwujudnya ekonomi kota dan desa yang maju	
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan				

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok	
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD			
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
TRANSFORMASI EKONOMI				TRANSFORMASI EKONOMI								TRANSFORMASI EKONOMI
a.	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,58	48,92	a.	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	18,35	21,00 - 22,00	Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi(%)	12,47	15,07-15,22		
b.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	100	b.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	68,95	100	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	79,17	99,30-100,00		
c.	Persentase Desa Mandiri (%)			c.	Persentase Desa Maju dan Mandiri (%)	1,51	13,0 - 15,13	Persentase Desa Mandiri (%)	4,69	21,69-21,88		

Tabel 5.5 Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola

Misi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Perkuatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Nasional	Perwujudan Lampung Selatan Unggul
Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan fondasi kelembagaan pemerintah, penerapan manajemen risiko pemerintahan, penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan peningkatan kualitas SDM aparatur yang berintegritas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan kelembagaan pemerintah yang kolaboratif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan pelayanan publik yang transparan dan berkualitas.
IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	<ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah • Pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat • Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah • Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi • Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan

Misi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Perkuatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Nasional	Perwujudan Lampung Selatan Unggul
		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan integritas partai politik 	kehidupan demokrasi yang sehat	

Tabel 5.6 Indikator Utama Pembangunan Transformasi Tata Kelola

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok	
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD			
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
TRANSFORMASI TATA KELOLA				TRANSFORMASI TATA KELOLA				TRANSFORMASI TATA KELOLA				
IE.9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif			IE.9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif			IE.9 Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif			Terwujudnya pelayanan publik prima yang berkelanjutan	
24	Indeks materi hukum	0,25	0,49	24	Indeks Reformasi Hukum*	70,00	100*	Indeks Reformasi Hukum*	47,95	87,23-91,00		
25	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2,34	5	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,10	5,00	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,86	4,33-4,42		
26	Indeks pelayanan publik	3,87	5	26	Indeks Pelayanan Publik	4,40	5,00	Indeks Pelayanan Publik	2,63	4,29-4,40		

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok	
		Target RPJPN					Target RPJPD		Target RPJPD			
		Baseline 2025	Target 2045				Baseline 2025		Target 2045	Baseline 2025		Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
TRANSFORMASI TATA KELOLA				TRANSFORMASI TATA KELOLA				TRANSFORMASI TATA KELOLA				
27	Anti Korupsi			27	Anti Korupsi			Anti Korupsi				
a.	Indeks integritas nasional	71,94 -2022	96,98	a.	Indeks integritas nasional (hasil survey penilaian integritas oleh KPK)	71,86	86,56	Indeks integritas nasional	70,22	84,84- 85,68		
b.	Indeks persepsi korupsi	34	60									

Tabel 5.7 Arah Kebijakan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial dan Stabilitas Makroekonomi Daerah

Misi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Perkuatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Nasional	Perwujudan Lampung Selatan Unggul
Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial dan Stabilitas Makroekonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Keamanan Daerah Tangguh, Demikrasi Subtansial dan Stabilitas Makroekonomi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Keamanan Daerah Tangguh, Demikrasi Subtansial dan Stabilitas Makroekonomi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan Keamanan Daerah Tangguh, Demikrasi Subtansial dan Stabilitas Makroekonomi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan Lampung Selatan yang aman, demokratis dan makroekonomi yang stabil
IE 10. Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan pusat-pusat Pertumbuhan ekonomi baru Melalui Peningkatan investasi dan Perluasan kesempatan kerja Dengan memperhatikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kapasitas pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan kesempatan kerja yang luas dengan prinsip

Misi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Perkuatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Nasional	Perwujudan Lampung Selatan Unggul
	keberlanjutan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan • Pemenuhan Kebutuhan pangan secara sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal 	keberlanjutan lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan • Penguatan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal 	keberlanjutan lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan • Pemantapan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal 	keberlanjutan lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan • Perwujudan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal
IE 12. Daya Saing Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas dan Konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan aksesibilitas barang dan jasa sertapemasaran produk produk unggulan daerah • Perwujudan kapasitas tenaga

Misi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Perkuatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Nasional	Perwujudan Lampung Selatan Unggul
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. • Pengembangan dan diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas kelembagaan pada pasar tenaga kerja sektor unggulan dan penerapan standarisasi kualitas pekerja sektor unggulan • Penguatan diversifikasi produk sektor unggulan dengan insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kualitas dan kapasitas tenaga kerja sektor unggulan dengan penerapan dukungan capaian standarisasi kualitas pekerja sektor unggulan • Pemantapan diversifikasi produk sektor unggulan dengan insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi 	<p>kerja sesuai standar pasar tenaga kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan ketersediaan dan distribusi produk unggulan daerah yang bernilai tinggi dan ekonomis dalam pasar barang dan jasa

Tabel 5.8 Indikator Utama Pembangunan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Makroekonomi Daerah

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025- 2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025- 2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok	
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD			
		Baseli ne 2025	Targ et 2045			Baseli ne 2025	Targ et 2045		Baseli ne 2025	Target 2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA				KEAMANAN DAERAH TANGGUH DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI DAERAH				KEAMANAN DAERAH TANGGUH DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI DAERAH				
IE1 0	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			IE1 0	Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah			IE 10 Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah			Terwujudnya Ketertiban Sosial masyarakat yang berkelanjutan	
28	Indeks pembangunan hukum	0,6 (2021)	0,84	28	Tingkat Kriminalitas (Rasio)	122	85	Persentase Penyelesaian Kejahatan(%)	84,19	99,82- 100,00		
					a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (usulan proksi)	70	100	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (usulan proksi)	100	100		
					b) Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM (usulan proksi)	60	80	b) Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM (usulan proksi)	81,1	100		

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025- 2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025- 2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD		
		Baseli ne 2025	Targ et 2045			Baseli ne 2025	Targ et 2045		Baseli ne 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA					KEAMANAN DAERAH TANGGUH DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI DAERAH			KEAMANAN DAERAH TANGGUH DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI DAERAH			
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya (%)	62,8 (2020)	80	29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	71,7	89,08	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	71,70	89,85-90,00	
30	Indeks demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tingg i (>80)	30	Indeks Demokrasi Indonesia	79,36-81,00 (sedan g)	87,01 – 90,00 (tingg i)	Indeks Demokrasi Indonesia	79,36	97,09-97,94	
IE1 1	Stabilitas Ekonomi Makro			IE1 1	Stabilitas Ekonomi Makro			IE 11 Stabilitas Ekonomi Makro			
31	Rasio pajak terhadap PDB (%)	10,0-12,0	18,0-20,0	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,10-1,3	1,9	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,60	1,26-1,31	
32	Tingkat inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	32	Tingkat Inflasi (%)	2,9 – 3,7	1,0 – 3,0	Tingkat Inflasi (%)	2-3	2-3	
33	Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan			33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025- 2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025- 2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD		
		Baseli ne 2025	Targ et 2045			Baseli ne 2025	Targ et 2045		Baseli ne 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA				KEAMANAN DAERAH TANGGUH DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI DAERAH				KEAMANAN DAERAH TANGGUH DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI DAERAH			
a.	Aset perbankan/PDB (%)	66,9	200	a.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	16,2	52,7	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	16,20	38,82- 51,96	
b.	Aset dana pensiun/PDB (%)	7,6	60	b.	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,04*	0,97	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,05	0,08- 0,09	
c.	Aset asuransi/PDB (%)	9,1	20	c.	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	1,7	12,16	Nilai Transaksi Saham Kabupaten Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	368,18	1.255,1 1- 1.887,2 5	
d.	Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57,8	120	d.	Total Kredit/PDRB (%)	15,0	51,0	Total Kredit/PDRB (%)	15,00	20,19- 22,29	
e.	Total kredit/PDB (%)	37,8	80- 90								
34	Inklusi keuangan (%)	91	98	34	Inklusi Keuangan (%)	16,2	52,7	Inklusi Keuangan (%)	85,50	38,82- 51,96	

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025- 2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025- 2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok	
		Target RPJPN					Target RPJPD		Target RPJPD			
		Baseli ne 2025	Targ et 2045				Baseli ne 2025		Targ et 2045	Baseli ne 2025		Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA				KEAMANAN DAERAH TANGGUH DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI DAERAH				KEAMANAN DAERAH TANGGUH DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI DAERAH				
IE1 2	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan			IE1 2	Daya Saing Daerah			IE 12 Daya Saing Daerah			Kepemimpin an dan Pengaruh di Percaturan Nasional Meningkat	
35	Asia Power Index (Diplomatic Influencer)	60,4 (2023)	75,0- 80,0	35	Efektivitas Kerjasama Daerah (%)	NA	100	Indeks Daya Saing Daerah	3,26	4,319- 4,384		

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025- 2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025- 2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD		
		Baseli ne 2025	Targ et 2045			Baseli ne 2025	Targ et 2045		Baseli ne 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA				KEAMANAN DAERAH TANGGUH DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI DAERAH				KEAMANAN DAERAH TANGGUH DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI DAERAH			
36	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	14,16 (2023)	45	36	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	20	100	Incremental Cash Output Ratio (ICOR)	6,98	4,314- 4-4,5	

Tabel 5.9 Arah Kebijakan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologis

Misi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Perkuatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Nasional	Perwujudan Lampung Selatan Unggul
Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang setara dan inklusif 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan Lampung Selatan yang berketahanan sosial budaya dan ekologi yang setara dan inklusif
IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Pemantapan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Perwujudan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal • Pemenuhan hak dan perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal

Misi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Perkuatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Nasional	Perwujudan Lampung Selatan Unggul
		<p>pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan 	<p>anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang</p>	
IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan konsumsi listrik per Kapita • Peningkatan intensitas energi/primer 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Penuntasan dalam pemenuhan konsumsi listrik per Kapita • Percepatan pemenuhan intensitas energi/Primer 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan Konsumsi Listrik per Kapita secara masif • Pemantapan intensitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan Pemenuhan Konsumsi Listrik yang handal • Perwujudan intensitas

Misi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Perkuatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Nasional	Perwujudan Lampung Selatan Unggul
	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan ketidakcukupan konsumsi pangan • Peningkatan kapasitas air baku • Peningkatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan • Percepatan pemenuhan kapasitas air baku • Penataan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan 	<p>energi/primer secara masif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan dalam meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan • Pemantapan kapasitas air baku • Penguatan pembangunan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan 	<p>energi/primer yang handal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan kehandalan dalam konsumsi Pangan • Perwujudan kapasitas air baku yang handal • Pengelolaan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan yang handal
IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat

Misi	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Perkuatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Nasional	Perwujudan Lampung Selatan Unggul
	tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.

Tabel 5.10 Indikator Utama Pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologis

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok	
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD			
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				
IE.13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			IE.13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			IE.13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Terwujudnya kehidupan beragama dan berkebudayaan maju dan berkelanjutan	
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57*	68,15	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	59,10 - 59,12*	68,96 - 69,11	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,16	69,13- 69,89		
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19*	84,2	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,07 – 74,13	81,24 – 81,94	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,07	80,66- 81,02		
IE.14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			IE.14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			IE.14 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif				

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD		
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 (2022)	80	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,21 - 71,21	76,33 - 76,38	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	64,38	77,77-78,55	
				a.	Indeks Perlindungan Anak	64,64 *	83 - 85	Indeks Perlindungan Anak	69,30	84,84-85	
				b.	Indeks Pembangunan Pemuda	49,53 *	75 - 78	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,47	0,295-0,285	
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 (2025)	0,15	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,415 - 0,414*	0,195 - 0,186*				
IE.15	Lingkungan Hidup Berkualitas			IE.15	Lingkungan Hidup Berkualitas			IE.15 Lingkungan Hidup Berkualitas			Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas yang Berkelanjutan
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,7	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,537	0,72	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,54	0,673-0,681	

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok	
		Target RPJPN					Target RPJPD		Target RPJPD			
		Baseline 2025	Target 2045				Baseline 2025		Target 2045	Baseline 2025		Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				
42	Kualitas Lingkungan Hidup			42	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup				
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	72,42 (2022)	76,12	a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	70,99	75,22	Indeks kualitas lingkungan hidup	66,68	71,48-71,73		
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70	b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	5	50	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	1,124	15,99-18,39		
c.	Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah (%)	15	90	c.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	3,40	85,00	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	10,83	46,76-50,50		
		(13% terdaur ulang)	(35% terdaur ulang)									
				d.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	70,99	75,22	Presentase Sampah Terangkut	66,68	71,48-71,73		

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD		
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			
IE.16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			IE.16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			IE.16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Terwujudnya ketahanan dan Kemandirian Sumber daya yang Berkelanjutan
43	Ketahanan energi, air, dan pangan			43	Ketahanan energi, air, dan pangan			Ketahanan energi, air, dan pangan			
a.	Ketahanan Energi			a.	Ketahanan Energi			Ketahanan Energi			
	Indeks ketahanan energi	6,61	8,24		Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	680	2.170	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	104,05	896,1-1003,	
					Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	161	137	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	161,0	142-141	
b.	Ketahanan Pangan			b.	Ketahanan Pangan			Ketahanan Pangan			

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD		
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			
	Prevalensi ketidakcukupan pangan (%)	6,2	2,1		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	6,2	0,42	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	6,97	3,020-2,890	
c.	Ketahanan air			c.	Ketahanan Air			Ketahanan Air			
	Kapasitas tampungan air per kapita (m3/kapita)	63,45	200		Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,44	12,32	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,23	4,542-5,314	
	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	39	100		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	18,72	100	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	18,72	100	
IE.17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			IE.17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045			Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kab. Lampung Selatan		Sasaran Pokok
		Target RPJPN				Target RPJPD			Target RPJPD		
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			
44	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,14	0,11	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	142,55	80,27-79,70	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	160,61	109,4-107,2	
45	Presentasi penurunan emisi GRK (%)			45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
a.	Kumulatif	28,12	51,51	a.	Kumulatif	9,52	30,69	Kumulatif	9,52	28,80-30,69	
b.	Tahunan	32,65	80,89	b.	Tahunan	15,32	71,18	Tahunan	15,32	66,11-71,81	

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 di Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari :

1. Daya saing manusia yang meningkat melalui penciptaan kualitas pendidikan dengan penguasaan teknologi yang modern, dan juga untuk mewujudkan penyediaan fasilitas medis, dan kualitas tenaga medis yang modern dan perlindungan sosial
2. Pendapatan perkapita setara negara maju melalui peningkatan IPTEK, inovasi, dan produktivitas dan menjadikan perkotaan serta desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
3. Kepemimpinan dan pengaruh di percaturan nasional meningkat melalui terwujudnya tata kelola yang kredibel, transparan, modern dan mewujudkan kepastian hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat
4. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang melalui peningkatan ekonomi daerah dan menciptakan daya saing lokal
5. Mewujudkan intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission melalui penciptaan lingkungan hidup yang berkualitas, resiliensi terhadap bencana serta peningkatan dan ketahanan energi, air dan udara.



Gambar 5.1 Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

Tabel 5.11 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Transformasi Sosial	IE 1. Kesehatan Untuk Semua	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,59	78,22-78,41	Terwujudnya Kesehatan Masyarakat yang Berkelanjutan
			Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Kesehatan Ibu dan Anak			
			Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	25,07	9,09-8,62	
			Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar	b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	7,41	0,33-0,28	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			lengkap dengan pendekatan budaya.				
			Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Insidensi Tuberkulosis			
			Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>case detection rate</i>) (%)	46,23	92,80-93,00	
			Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	b. Angka Keberhasilan pengobatan tuberkolosis (<i>treatment succes rate</i>) (%)	100,00	100,00	
			Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100,00	100,00	
			Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.				
			Percepatan eliminasi penyakit menular dan				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			penyakit tropis terabaikan.				
		IE 2. Pendidikan Berkualitas Yang Merata	Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar).	Hasil pembelajaran			Terwujudnya Pendidikan Masyarakat yang Berdaya Saing
			Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan dasar	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional			
			Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	(i)Literasai Membaca	32,35	73,00-73,33	
			Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah	(ii)Numerasi	22,88	63,81-66,67	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.				
			Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk			
			Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	(i)Literasai Membaca	55,68	68,60-70,61	
			Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan	(ii)Numerasi	62,84	69,09-69,44	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).				
			Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,81	12,30-12,91	
			Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,83	14,82-14,94	
			Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,85	17,79-18,46	
			Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja	57,23	73,15-75,00	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)			
			Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).				
			Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada				
			Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi				
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			baik melalui upskilling maupun reskilling.				
		IE 3. Perlindungan Sosial Yang Adaptif	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan ebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan	Tingkat Kemiskinan (%)	12,02	2,20-2,00%	Terwujudnya Perlindungan Sosial Masyarakat yang Berkelanjutan

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	82,4	83,98-85,00	
			Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	22	54,65-55,00	
			Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.				
			Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			decay dalam suatu kawasan perkotaan.				
2	Tranformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	23,73	29,75-30,00	Terwujudnya pemanfaatan IPTEK dalam Inovasi dan Produktivitas Ekonomi yang berdaya saing
			Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Pengembangan Pariwisata			
			Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,60	2,81-2,89	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.				
			Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Menginap di Hotel) (Orang)	33	2.888-3.000	
			Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,82	3,02-3,10	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.				
			Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
			Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada Level Kabupaten (%)	11,81	17,86-18,25	
			Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian.	b. Proporsi Jumlah Industri Mikro dan Kecil pada Level Kabupaten (%)	98,84	96,98-100,00	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Peningkatan produktivitas BUMD.	c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,62	4,8 6-5,03	
				d.Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,35	6,36-7,00	
				e.Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	2,62	5,04-5,16	
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,19	2,41-2,38	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	44,60	64,97-66,00	
				Tingkat penguasaan IPTEK			
				Nilai Indeks Inovasi Daerah	62,68	68,91-69,26	
				Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah	2,81	4,48-4,60	
		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Terwujudnya keselarasan antara pembangunan ekonomi dan

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							lingkungan yang berkelanjutan
			Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	59,19	68,86-69,42	
				b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	36,00	43,88-44,20	
		IE 6. Transformasi Digital	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,80	6,38-6,41	Terwujudnya daya saing ekonomi melalui transformasi digital

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.				
		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	5,15	4,02-3,96	Terwujudnya sinergisitas pembangunan antar regional yang berkelanjutan

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	35,12	35,79-35,82	
			Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	4,39	26,86-29,55	
			Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi				
			monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.				
			Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.				
			Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.				
			Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)				
			Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.				
			Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.				
			Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).				
			Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.				
			Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure)pada kawasan perkotaan				
			Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.				
			Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.				
			Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.				
			Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.				
			City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.				
			Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.				
			Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.				
			Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.				
			Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone yang menginterkoneksi				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Sumatra-Jawa (di Selat Sunda).				
			Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.				
			Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang-Muaraenim-Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi)				
			Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global				
		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Kota dan Desa Mandiri, Inklusif, dan Berkelanjutan			Terwujudnya ekonomi kota dan desa yang Maju
			Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon,	a. Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	12,47	15,07-15,22	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			offsetting, dan pajak karbon.				
			Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	79,17	99,30-100,00	
			Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	c. Persentase Desa Mandiri (%)	4,69	21,69-21,88	
			Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.				
			Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<p>pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbaru; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas;</p>				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.				
			Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<p>infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi</p>				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).				
3	Tranformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	Indeks Reformasi Hukum	47,95	87,23-91,00	Terwujudnya pelayanan publik prima yang Berkelanjuta n
			Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,86	4,33-4,42	
			Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan	Indeks Pelayanan Publik	2,63	4,29-4,40	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.				
			Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	Indeks Integritas Nasional	70,22	84,84-85,68	
			Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Lampung, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Lampung yang profesional dan bebas korupsi.				
			Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital				

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.				
	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah	IE 10. Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Persentase Penyelesaian Kejahatan	84,19	100,00	Terwujudnya ketertiban sosial masyarakat yang berkelanjutan
			Penguatan integritas partai politik	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (usulan proksi)	100	100	
			Penguatan keamanan dan ketertiban untuk	b) Persentase Capaian	81,1	100	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			mengurangi tingkat kriminalitas.	pelaksanaan Aksi HAM (usulan proksi)			
			Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	71,70	89,85-90,00	
				Indeks Demokrasi Indonesia	79,36	97,09-97,94	
		IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,60	1,26-1,31	Terwujudnya stabilitas ekonomi makro yang maju dan berkelanjutan

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.				
			Penguatan Pengendalian Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi (%)	2-3	2-3	
				Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
				a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	16,20	38,82-51,96	
				b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,05	0,08-0,09	
				c. Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	369,18	1.255,11-1.887,25	
				d. Total Kredit/PDRB (%)	15,00	20,19-22,29	
				Inklusi Keuangan (%)	85,50	93,99-94,46	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IE 12. Indeks Daya Saing Daerah	Penguatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,26	4,319-4,384	Terwujudnya daya saing daerah yang berkelanjutan
				Incremental Cash Output Ratio (ICOR)	6,98	4,314-4,5	
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan berkebudayaan Maju	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan pancasila	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,16	69,13-69,89	Terwujudnya kehidupan beragama dan berkebudayaan maju dan berkelanjutan
			Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,07	80,66-81,02	
			Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.				
		IE 14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui	Indeks Pembangunan Keluarga	64,38	77,77-78,55	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		masyarakat inklusif	pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.				Masyarakat Inklusif yang Berkelanjutan
			Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	Indeks Perlindungan Anak	69,30	84,84-85	
			Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,465	0,295-0,285	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,537	0,673-0,681	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas yang Berkelanjutan
			Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	Kualitas Lingkungan Hidup			
			Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	a. Indeks kualitas lingkungan hidup	61,40	71,48-71,73	
				b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	1,12	15,99-18,39	
				c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	10,84	46,76-50,50	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				d. Presentase Sampah Terangkut (%)	37,44	30,93-30,62	
		IE 16. Berketahanan energi, air, dan pangan	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Ketahanan energi, air, dan pangan			Terwujudnya ketahanan dan Kemandirian Sumber daya yang Berkelanjutan
				Ketahanan Energi			
				i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	104,05	896,1-1003,	
				ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	161,00	142-141	
				Ketahanan Pangan			
				Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	6,97	3,020-2,890	
				Ketahanan Air			
				Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,23	4,542-5,314	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman (%)	18,72	100	
		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	160,61	109,4-107,2	Terwujudnya ketangguhan wilayah terhadap perubahan iklim yang berkelanjutan
				Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kumulatif	9,52	28,80-30,69	
				Tahunan	15,32	66,11-71,81	

Tabel 5.12 Sasaran Pokok

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
	Terwujudnya Kesehatan Masyarakat yang Berkelanjutan	IE 1. Kesehatan Untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,59	78,22-78,41	
			Kesehatan Ibu dan Anak			
			a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	25,07	9,09-8,62	
			b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	7,41	0,33-0,28	
			Insidensi Tuberkulosis			
			a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>case detection rate</i>) (%)	46,23	92,80-93,00	
			b. Angka Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment succes rate</i>) (%)	100,00	100,00	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100,00	100,00	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
	Terwujudnya Pendidikan Masyarakat yang Berdaya Saing	IE 2. Pendidikan Berkualitas Yang Merata	Hasil pembelajaran			
			Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional			
			Literasi Membaca	32,35	73,00-73,33	
			Numerasi	22,88	63,81-66,67	
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk			
			Literasi Membaca	55,68	68,60-70,61	
			Numerasi	62,84	69,09-69,44	
			b. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,81	12,30-12,91	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
			c. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,83	14,82-14,94	
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,85	17,79-18,46	
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	57,23	73,15-75,00	
	Terwujudnya Perlindungan Sosial Masyarakat yang Berkelanjutan	IE 3. Perlindungan Sosial Yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	12,02	2,20-2,00	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	82,4	83,98-85,00	
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	22	54,65-55,00	
2	Terwujudnya pemanfaatan IPTEK dalam	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	23,73	29,75-30,00	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
	Inovasi dan Produktivitas Ekonomi yang berdaya saing					
			Pengembangan Pariwisata			
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,60	2,81-2,89	
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Menginap di Hotel) (Orang)	33,32	2.888-3.000	
			Proporsi PDRB Jasa Lainnya (%)	0,75	3,02-3,10	
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
			a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada Level Kabupaten (%)	11,81	17,86-18,25	
			b. Proporsi Jumlah Industri Mikro dan Kecil pada Level Kabupaten (%)	98,84	96,98-100,00	
			c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,62	4,8 6-5,03	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
			d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,35	6,36-7,00	
			e. Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	1,91	5,04-5,16	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,74	2,41-2,38	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	44,60	64,97-66,00	
			Tingkat penguasaan IPTEK			
			Nilai Indeks Inovasi Daerah	62,68	68,91-69,26	
			Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah	2,81	4,48-4,60	
	Terwujudnya keselarasan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan	IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
			a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	59,19	68,86-69,42	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
			b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	36,00	43,88-44,20	
	Terwujudnya daya saing ekonomi melalui transformasi digital	IE 6. Transformasi Digital	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,80	6,38-6,41	
	Terwujudnya sinergisitas pembangunan antar regional yang berkelanjutan	IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	5,15	4,02-3,96	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	35,12	35,79-35,82	
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	4,39	26,86-29,55	
	Terwujudnya ekonomi kota dan desa yang Maju	IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kota dan Desa Mandiri, Inklusif, dan Berkelanjutan			
			a. Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	12,47	15,07-15,22	
			b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian	79,17	99,30-100,00	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
			Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)			
			c. Persentase Desa Mandiri (%)	4,69	21,69-21,88	
3	Terwujudnya pelayanan publik prima yang Berkelanjutan	IE 9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Indeks Reformasi Hukum	47,95	87,23-91,00	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,86	4,33-4,42	
			Indeks Pelayanan Publik	2,63	4,29-4,40	
			Indeks Integritas Nasional	70,22	84,84-85,68	
	Terwujudnya ketertiban sosial masyarakat yang berkelanjutan	IE 10. Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah	Persentase Penyelesaian Kejahatan	84,19	99,82-100,00	
			a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (usulan proksi)	100	100	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
			b) Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM (usulan proksi)	81,1	100	
			Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	71,70	89,85-90,00	
			Indeks Demokrasi Indonesia	79,36	97,09-97,94	
	Terwujudnya stabilitas ekonomi makro yang maju dan berkelanjutan	IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,60	1,26-1,31	
			Tingkat Inflasi (%)	2-3	2-3	
			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
			a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	16,20	38,82-51,96	
			b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,05	0,08-0,09	
			c. Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	369,18	1.255,11-1.887,25	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
			d. Total Kredit/PDRB (%)	15,00	20,19-22,29	
			Inklusi Keuangan (%)	85,50	93,99-94,46	
	Terwujudnya daya saing daerah yang berkelanjutan	IE 12. Indeks Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,26	4,319-4,384	
			Incremental Cash Output Ratio (ICOR)	6,98	4,314-4,5	
5	Terwujudnya kehidupan beragama dan berkebudayaan maju dan berkelanjutan	IE 13. Beragama Maslahat dan berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,16	69,13-69,89	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,07	80,66-81,02	
	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif yang Berkelanjutan	IE 14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga	64,38	77,77-78,55	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
			Indeks Perlindungan Anak	69,30	84,84-85	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,47	0,295-0,285	
	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas yang Berkelanjutan	IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,54	0,673-0,681	
			Kualitas Lingkungan Hidup			
			a. Indeks kualitas lingkungan hidup	61,40	71,48-71,73	
			b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	1,12	15,99-18,39	
			c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	10,84	46,76-50,50	
			d. Presentase Sampah Terangkut (%)	37,44	30,93-30,62	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
	Terwujudnya ketahanan dan Kemandirian Sumber daya yang Berkelanjutan	IE 16. Berketahanan energi, air, dan pangan	Ketahanan energi, air, dan pangan			
			Ketahanan Energi			
			i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	104,05	896,1-1003,	
			ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	161,00	142-141	
			Ketahanan Pangan			
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	6,97	3,020-2,890	
			Ketahanan Air			
			Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,23	4,542-5,314	
			Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman (%)	18,72	100	
	Terwujudnya ketangguhan wilayah terhadap perubahan	IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	160,61	109,4-107,2	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Target 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
	iklim yang berkelanjutan					
			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
			Kumulatif	9,52	28,80-30,69	
			Tahunan	15,32	66,11-71,81	

5.3 Arah Kebijakan Dalam Implementasi Kerangka Transformasi Pada Misi 6

Implementasi transformasi merujuk pada strategi dan langkah yang diambil dalam mencapai transformasi sosial dan ekonomi serta landasan Transformasi. Adapun arah kebijakan sarana prasarana melekat pada Transformasi Sosial dan Transformasi Ekonomi maupun Landasan Transformasi, sedangkan kerangka implementasi transformasi diarahkan pada regulasi yang mendukung pelaksanaannya.

Tabel 5.13 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi 6

Misi	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang merata termasuk pulaupulau kecil	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang merata dan berkelanjutan termasuk pulau-pulau kecil	Pemantapan dan peningkatan kualitas Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan termasuk pulaupulau kecil	Perwujudan Infrastruktur Dasar Kewilayahan yang Tangguh, terintegrasi dan berkelanjutan
	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail	Terbitnya panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang	Rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai Panduan (Rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai Panduan (

	Tata Ruang (RDTR), Standar Pelayanan Minimal, dsb).	(RDTR), Standar Pelayanan Minimal, dsb).	Juknis Provinsi Lampung), Standar Pelayanan Minimal, dsb).	Juknis Provinsi Lampung), , Standar Pelayanan Minimal, dsb).
	Mendorong Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.	Implementasi reforma agraria pada lokasi-lokasi prioritas dan strategis nasional yang terkait pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan	Implementasi reforma agraria juga difokuskan pada wilayah pesisir, pulaupulau kecil, terdepan, dan terluar	Terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah dan kesejahteraan tidak hanya bagi masyarakat

5.4 Misi ke-7 Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Pengembangan sistem pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem yang tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan. Pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan daya dukungnya dan memperhatikan daya regenerasinya khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*). Peningkatan wawasan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Dalam menjaga pembangunan wilayah yang berkualitas ramah lingkungan, diperlukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang diikuti penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

Tabel 5.14 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi 7

Misi	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
MISI ke-7: Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Penguatan pembangunan sarana prasarana dasar dan pengendalian lingkungan	Peningkatan Kualitas pengelolaan sarana prasarana untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan	Pemantapan kelembagaan Pengelolaan Sarana Prasarana Terbangun, lingkungan nyaman dan Berkelanjutan	Perwujudan sarana prasarana infrastruktur wilayah yang tangguh dalam menghadapi perubahan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/lowcost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, 	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/lowcost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan,	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/lowcost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan,	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akseke green/lowcost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik ditingkat pusadan daerah, terutama bagi investasi padasektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi

	industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan.	industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan.	industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan.	birudan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan.
--	--	--	--	--

5.5 Misi Ke 8 Kestinambungan Pembangunan

Kestinambungan pembangunan penting dalam menjaga konsistensi antar waktu dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan perkuatan implementasi dan pembiayaan pembangunan. Guna mewujudkan kestinambungan pembangunan, disiapkan kaidah pelaksanaan yang memastikan kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan, disertai manajemen pembangunan berbasis risiko. Dengan pemangku kepentingan yang beragam, diperlukan pendekatan proses dan pendekatan substansi perencanaan yang tepat. Selanjutnya, dukungan pembiayaan yang memadai dan inovatif serta sektor keuangan yang maju, sangat penting untuk keberhasilan pembangunan.

Tabel 5.15 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi 8

Misi	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
Misi ke 8 Kestinambungan Pembangunan	Penyempurnaan instrumen kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah (non APBD dan	Terbentuknya ekosistem sumber pendanaan pembangunan alternatif dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, transparan,	Sistem pengelolaan sumber pendanaan pembangunan alternatif semakin handal untuk mendukung kemandirian fiskal	Terwujudnya kemandirian fiskal daerah yang tinggi

	Non APBN) yang lebih adaptif	aman dan terpercaya.		
	Keselarasan pembangunan pusat-daerah secara konsisten	Keselarasan pembangunan pusat-daerah secara konsisten	Keselarasan pembangunan pusat-daerah secara konsisten	Keselarasan pembangunan pusat-daerah secara konsisten

5.6 Rincian Sasaran Visi Dan Misi Daerah

5.6.1 Rincian Sasaran Visi Daerah Per Lima Tahun

Visi Tahun 2025-2045 : "Lampung 2045 Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan"									Visi RPJPD Kabupaten Lampung Selatan: "Lampung Selatan Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan"						
No	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target				Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target			
					Th. 2025-2029	Th. 2030-2034	Th. 2035-2039	Th. 2040-2045				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	48,2	52,14 - 52,46	76,82-95,94	158,77-176,23	267,5-296,9	328,03 - 384,39	Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	50,46	55,63	83,51-96,04	157,97-176,93	271,01-298,11	374,47-385,70
		Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,55	4,90-5,30	5,31-6,0	5,90-6,41	6,22-7,0	5,52-6,97	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,82	5-5,5	5,5-6	6-8	6-7	5,5-6
		Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (persen)	18,01	18,50 - 19,40	20,54-21,1	22,36-23,4	24,18-25,70	26-28	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (persen)	23,41%	23,86%	24,54-25,50	26,75-27,00	28,25-28,50	29,75-30,00
		Indeks ekonomi biru (Indeks)	N/A	23,43	40	50	60	65,16*	Indeks ekonomi biru (Indeks)	N/A	29,03	34,76-40,00	49,10-50,00	58,76-60,00	64,80-65,16
2.	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Persentase Penduduk Miskin (persen)	11,11	9,50-10,00	7,50-8,50	4,00-5,00	1,50-2,00	0,50-1,00	Persentase Penduduk Miskin (persen)	12,79	12,0	9,99-9,39	7,33-6,89	5,38-5,06	2,20-2,00
		Indeks Gini (Indeks)	0,324	0,318-0,321	0,290-0,310	0,275-0,280	0,270-0,274	0,256 - 0,266	Indeks Gini (Indeks)	0,257	0,261	0,262	0,263	0,264	0,266
		Persentase Desa Mandiri (persen)	7,46	1,51	4,0 - 5,0	6,0 - 8,0	10,0 - 12,0	13,0 - 15,13	Persentase Desa Mandiri (persen)	0,78	4,69	8,66-10,94	14,40-15,63	19,87-20,70	21,69-21,88
3.	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,02 (2022)	3,02	3,1-3,25	3,26-3,30	3,30-3,75	3,76 - 4,00	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,16	3,26	3,40-3,46	3,67-3,72	3,95-4,01	4,32-4,38

Visi Tahun 2025-2045 : "Lampung 2045 Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan"									Visi RPJPD Kabupaten Lampung Selatan: "Lampung Selatan Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan"						
No	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target				Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target			
					Th. 2025- 2029	Th. 2030- 2034	Th. 2035- 2039	Th. 2040- 2045				2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045
		Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional (persen)	2,15	2,17	2,25	2,33	2,42	2,50	Kontribusi PDRB Lampung Selatan terhadap Provinsi Lampung (persen)	12,35	12,47	12,85-12,98	13,51-13,64	14,20-14,34	15,07-15,22
4.	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Kualitas Sumber Daya Manusia							Kualitas Sumber Daya Manusia						
		- IPM (Indeks)	72,48	73,00	73,01-75,00	75,01-77,00	77,01-78,90	79,00 - 80,00	- IPM (Indeks)	71,55	71,96	71,96-73,61	74,03-75,73	76,17-77,92	78,36-80,62
		- IMM (Indeks)	0,52	0,54	0,57-0,59	0,60-0,62	0,64-0,66	0,68 - 0,70	- IMM (Indeks)	0,52	0,55	0,55-0,57	0,58-0,61	0,62-0,65	0,66-0,70
5.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	14,92	62,79	69,79	72,79	82,79	93,17	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	14,92	69,79	69,79	72,79	82,79	93,17
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,91	70,99	71,84	72,90	73,95	75,22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,55	61,40	67,44-67,69	69,30-68,95	69,96-70,22	71,48-71,73

5.6.2 Rincian Sasaran Visi Daerah Per Tahun

Sasaran Visi	Periode I					Periode II					Periode III					Periode IV					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Peningkatan Pendapatan Perkapita dalam Kategori Tinggi																					
a. PDRB per kapita (Rupiah)	55,63	63,42	72,62	83,51	96,04	109,48	123,72	139,80	157,97	176,93	197,28	220,95	245,25	271,01	298,11	327,92	337,75	351,26	363,56	374,47	385,70
b. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5-5,5	5-5,5	5,5-6	5,5-6	5,5-6	6-7	6-7	6-7	6-7	6,5-8	6,5-8	7-8	6,5-8	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	5,5-6	5,5-6
c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	23,86	24,09	24,31	24,54	25,50	26,00	26,25	26,50	26,75	27,00	27,50	27,75	28,00	28,25	28,50	28,75	29,00	29,25	29,50	29,75	30,00
d. Indeks Ekonomi Biru (Indeks)	23,43	25,60	29,30	34,76	40,00	43,89	46,75	47,89	49,10	50,00	53,46	55,40	57,20	58,76	60,00	61,78	62,65	63,89	64,19	64,80	65,16
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah																					
a. Persentase Penduduk Miskin (%)	12,02	11,30	10,62	9,99	9,39	8,82	8,29	7,80	7,33	6,89	6,48	6,09	5,72	5,38	5,06	4,75	4,47	3,76	2,75	2,20	2,00
b. Rasio Gini (Indeks)	0,261	0,262	0,262	0,262	0,262	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,265	0,265	0,265	0,266	0,266	0,266
c. Persentase Desa Mandiri (%)	4,69	5,79	6,95	8,66	10,94	11,98	12,58	13,84	14,40	15,63	16,77	17,29	18,69	19,87	20,70	20,99	21,02	21,38	21,46	21,69	21,88
Daya Saing Daerah																					
Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,26	3,30	3,35	3,40	3,46	3,51	3,56	3,61	3,67	3,72	3,78	3,83	3,89	3,95	4,01	4,07	4,13	4,19	4,26	4,32	4,38
Kontribusi PDRB Kabupaten Lampung Selatan terhadap Provinsi	12,47	12,60	12,72	12,85	12,98	13,11	13,24	13,37	13,51	13,64	13,78	13,92	14,06	14,20	14,34	14,48	14,63	14,77	14,92	15,07	15,22
Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat																					

Sasaran Visi	Periode I					Periode II					Periode III					Periode IV					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	71,96	72,37	72,78	73,20	73,61	74,03	74,45	74,88	75,31	75,73	76,17	76,60	77,04	77,48	77,92	78,36	78,81	79,26	79,71	80,16	80,62
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,55	0,55	0,56	0,57	0,57	0,58	0,59	0,60	0,60	0,61	0,62	0,63	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,68	0,69	0,70
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca																					
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	69,79	69,79	69,79	69,79	69,79	72,79	72,79	72,79	72,79	72,79	82,79	82,79	82,79	82,79	82,79	93,17	93,17	93,17	93,17	93,17	93,17
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,68	66,93	67,18	67,44	67,69	67,94	68,20	68,45	69,30	68,95	69,21	69,46	69,71	69,96	70,22	70,47	70,72	70,97	71,23	71,48	71,73

5.7 Rincian Sasaran Indikator Utama Pembangunan Daerah

5.7.1 Rincian Sasaran Indikator Utama Pembangunan Daerah Per Lima Tahun

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2045					
Misi ke-1: Transformasi Sosial							Misi ke-1: Transformasi Sosial					
Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045		Sasaran Pokok / Indikator	Baseline 2025	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045
IE.1.	Kesehatan untuk semua											
1)	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,32	75,20-75,80	77,20-77,80	79,20-79,80	80,00-82,00	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,59	75,15-75,34	76,10-56,29	77,05-77,25	78,22-78,41
2)	Kesehatan Ibu dan Anak:						Kesehatan Ibu dan Anak:					
a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	138	100-105	70-75	40-45	10-15	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	25,07	21,36-20,25	16,36-15,51	12,53-11,87	9,09-8,62
b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,20	9,00-10,50	7,50-8,90	5,00-6,00	3,00 - 4,00	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	7,41	4,53-3,84	1,99-1,69	0,87-0,74	0,33-0,28
3)	a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>case detection rate</i>) (%)	71,00	72,00-80,00	81,00-86,00	87,00-92,00	93,00 - 95,00	a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>case detection rate</i>) (%)	46,23	66,44-72,00	79,47-81,00	86,55-87,00	92,80-93,00
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	96,91*	97,18	97,45	97,72	98,00*	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	90,00	91,00-92,00	93,00-94,00	95,00-97,00	98 - 100	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2045					
Misi ke-1: Transformasi Sosial							Misi ke-1: Transformasi Sosial					
Sasaran Pokok/ Indikator	Baseline 2025	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045		Sasaran Pokok / Indikator	Baseline 2025	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045
IE2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata											
5)	Hasil pembelajaran											
a.	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :						Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional					
	(i) Literasi Membaca	6,67 - 13,33	30,00-40,00	41,00-50,00	51,00-60,00	66,67 - 73,33	(i) Literasi Membaca	32,35	37,45-40,00	48,63-50,00	58,49-60,00	73,00-73,33
	(ii) Numerasi	0,00 - 6,67	20,00-30,00	31,00-40,00	41,00-50,00	60,00 - 66,67	(ii) Numerasi	22,88	29,63-30,00	39,32-40,00	48,62-50,00	63,81-66,67
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :						Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk					
	(i) Literasi Membaca	30,75 - 32,75	35,00-45,00	46,00-56,00	56,00-65,00	68,61 - 70,61	(i) Literasi Membaca	55,68	57,36-57,94	60,29-60,89	63,37-64,00	68,60-70,61
	(ii) Numerasi	20,35 - 22,35	30,00-45,00	46,00-50,00	51,00-55,00	58,49 - 60,49	(ii) Numerasi	62,84	63,79-64,11	65,40-65,73	67,05-67,39	69,09-69,44
b.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,97 - 8,98	8,51-9,00	9,01-10,00	10,01-11,00	11,38 - 11,44	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,81	7,87-7,89	8,15-8,23	9,35-9,73	12,30-12,91
c.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,00	13,01-13,40	13,41-13,99	14,00-14,30	14,39 - 14,43	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,83	13,13-13,23	13,64-13,74	14,16-14,27	14,82-14,94
6)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	7,43	7,63	7,83	8,00	8,36	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,85	9,88-10,25	11,87-12,32	14,27-14,80	17,79-18,46
7)	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang	72,42*	75,00	77,00	79,00	80,00*	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang	57,23	59,49-60,26	63,46-64,28	67,69-68,57	73,15-75,00

RPJPD Provinsi Lampung							RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2045					
Misi ke-1: Transformasi Sosial							Misi ke-1: Transformasi Sosial					
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045	Sasaran Pokok / Indikator	Baseline 2025	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045
	Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)						Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)					
IE.3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif											
8)	Tingkat Kemiskinan (%)	9,50 - 10,00	7,50-8,50	4,00-5,00	1,50-2,00	0,50-1,00	Tingkat Kemiskinan (%)	12,02	9,99-9,39	7,33-6,89	5,38-5,06	2,20-2,00
9)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	26,69	30,00-40,00	41,00-55,00	56,00-70,00	76,00-80,00	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	82,40	82,65-82,73	83,06-83,14	83,48-83,56	83,98-85,00
10)	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	22,00	30,00-35,00	36,00-46,00	47,00-52,00	53,00-55,00	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	22,00	33,46-35,00	45,88-46,00	51,77-52,00	54,65-55,00

5.7.2 Rincian Sasaran Indikator Utama Pembangunan Daerah Per Tahun

No	Indikator Utama Pembangunan	Periode I					Periode II					Periode III					Periode IV					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
IE 1	Kesehatan Untuk Semua																					
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,59	74,78	74,97	75,15	75,34	75,53	75,72	75,91	76,10	76,29	76,48	76,67	76,86	77,05	77,25	77,44	77,63	77,83	78,02	78,22	78,41
2	Kesehatan Ibu dan Anak																					
	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	25,07	23,77	22,54	21,36	20,25	19,20	18,20	17,26	16,36	15,51	14,70	13,94	13,21	12,53	11,87	11,26	10,67	10,12	9,59	9,09	8,62
	b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	7,41	6,29	5,33	4,53	3,84	3,26	2,76	2,34	1,99	1,69	1,43	1,21	1,03	0,87	0,74	0,63	0,53	0,45	0,38	0,33	0,28
3	Insidensi Tuberkulosis																					
	a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>case detection rate</i>) (%)	46,23	62,14	64,26	66,44	72,00	73,80	75,65	77,54	79,47	81,00	82,38	83,78	85,20	86,65	87,00	88,13	89,28	90,44	91,61	92,80	93,00
	b. Angka Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment succes rate</i>) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IE 2	Pendidikan Berkualitas yang Merata																					
5	Hasil pembelajaran																					
a.	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional																					
	(i) Literasi Membaca	32,35	33,96	35,66	37,45	40,00	42,00	44,10	46,31	48,62	50,00	52,00	54,08	56,24	58,49	60,00	62,40	64,90	67,49	70,19	73,00	73,33
	(ii) Numerasi	22,88	24,94	27,19	29,63	30,00	32,10	34,35	36,75	39,32	40,00	42,00	44,10	46,31	48,62	50,00	52,50	55,13	57,88	60,78	63,81	66,67
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional																					

No	Indikator Utama Pembangunan	Periode I					Periode II					Periode III					Periode IV					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	(i) Literasi Membaca	55,68	56,23	56,80	57,36	57,94	58,52	59,10	59,69	60,29	60,89	61,50	62,12	62,74	63,37	64,00	64,64	65,29	65,94	66,60	68,60	70,61
	(ii) Numerasi	62,84	63,16	63,47	63,79	64,11	64,43	64,75	65,08	65,40	65,73	66,06	66,39	66,72	67,05	67,39	67,73	68,06	68,40	68,75	69,09	69,44
b.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,81	7,83	7,85	7,87	7,89	7,91	7,99	8,07	8,15	8,23	8,32	8,65	8,99	9,35	9,73	10,12	10,62	11,15	11,71	12,30	12,91
c.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,83	12,93	13,03	13,13	13,23	13,33	13,43	13,53	13,64	13,74	13,85	13,95	14,06	14,16	14,27	14,38	14,49	14,60	14,71	14,82	14,94
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,85	9,18	9,52	9,88	10,25	10,63	11,03	11,44	11,87	12,32	12,78	13,26	13,75	14,27	14,80	15,36	15,93	16,53	17,15	17,79	18,46
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	57,23	57,97	58,73	59,49	60,26	61,05	61,84	62,65	63,46	64,28	65,12	65,97	66,82	67,69	68,57	69,46	70,37	71,28	72,21	73,15	75,00
IE 3	Perlindungan Sosial yang Adaptif																					
8	Tingkat Kemiskinan (%)	12,02	11,30	10,62	9,99	9,39	8,82	8,29	7,80	7,33	6,89	6,48	6,09	5,72	5,38	5,06	4,75	4,47	3,76	2,75	2,20	2,00
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	82,40	82,48	82,56	82,65	82,73	82,81	82,90	82,98	83,06	83,14	83,23	83,31	83,39	83,48	83,56	83,64	83,73	83,81	83,90	83,98	85,00
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	22,00	25,30	29,10	33,46	35,00	37,45	40,07	42,88	45,88	46,00	47,38	48,80	50,27	51,77	52,00	52,52	53,05	53,58	54,11	54,65	55,00
IE 4	IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi																					
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	23,86	24,09	24,31	24,54	25,5	26	26,25	26,5	26,75	27,00	27,5	27,75	28	28,25	28,5	28,75	29	29,25	29,5	29,75	30
12	Pengembangan Pariwisata																					
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,86	1,91	1,97	2,03	2,09	2,15	2,22	2,28	2,35	2,42	2,50	2,57	2,65	2,73	2,81	2,89
	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Menginap di Hotel) (Orang)	33	50	75	112	200	275	350	400	450	500	650	845	1.099	1.428	1.500	1.710	1.949	2.222	2.533	2.888	3.000
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,82	1,87	1,93	1,99	2,30	2,35	2,39	2,44	2,49	2,60	2,63	2,65	2,68	2,71	2,80	2,84	2,88	2,93	2,97	3,02	3,10
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD																					

No	Indikator Utama Pembangunan	Periode I					Periode II					Periode III					Periode IV					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian pada Level Kabupaten	11,81	12,07	12,34	12,61	12,88	13,17	13,46	13,75	14,06	14,37	14,68	15,00	15,33	15,67	16,02	16,37	16,73	17,10	17,47	17,86	18,25
	b. Proporsi Jumlah Industri Mikro dan Kecil pada Level Kabupaten (%)	98,84	98,74	98,64	98,54	98,45	98,35	98,25	98,15	98,05	97,95	97,86	97,76	97,66	97,56	97,47	97,37	97,27	97,17	97,08	96,98	100,00
	c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,62	2,71	2,80	2,89	2,98	3,08	3,18	3,29	3,40	3,51	3,62	3,74	3,87	4,00	4,13	4,26	4,40	4,55	4,70	4,86	5,03
	d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,35	1,46	1,59	1,72	1,87	2,03	2,20	2,39	2,59	2,81	3,05	3,31	3,59	3,90	4,23	4,59	4,98	5,40	5,86	6,36	7,00
	e. Return on Asset (ROA) BUMD (%)*	2,62	2,71	2,81	2,90	3,01	3,11	3,22	3,33	3,45	3,57	3,70	3,83	3,96	4,10	4,24	4,39	4,54	4,70	4,87	5,04	5,16
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,19	4,06	3,94	3,82	3,50	3,40	3,29	3,19	3,10	3,00	2,91	2,82	2,74	2,66	2,51	2,49	2,47	2,45	2,43	2,41	2,38
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	44,60	45,49	46,40	47,33	48,28	49,24	50,23	51,23	52,26	53,30	54,37	55,45	56,56	57,69	58,85	60,02	61,23	62,45	63,70	64,97	66,00
17	Tingkat penguasaan IPTEK																					
	Nilai Index Inovasi Daerah	62,68	63,00	63,31	63,63	63,95	64,26	64,59	64,91	65,23	65,56	65,89	66,22	66,55	66,88	67,22	67,55	67,89	68,23	68,57	68,91	69,26
	Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah	2,81	2,88	2,95	3,02	3,10	3,17	3,25	3,33	3,42	3,50	3,59	3,68	3,77	3,87	3,96	4,06	4,16	4,27	4,38	4,48	4,60
IE 5	Penerapan Ekonomi Hijau																					
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau																					
	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	59,19	59,66	60,14	60,62	61,11	61,60	62,09	62,59	63,09	63,59	64,10	64,61	65,13	65,65	66,18	66,70	67,24	67,78	68,32	68,86	69,42
	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	36,00	36,43	36,87	37,31	37,80	38,37	38,94	39,53	40,12	40,40	40,88	41,38	41,87	42,37	42,80	43,01	43,23	43,45	43,66	43,88	44,20
IE 6	Transformasi Digital																					
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,80	5,83	5,86	5,89	5,92	5,95	5,98	6,01	6,04	6,07	6,10	6,13	6,16	6,19	6,22	6,25	6,28	6,31	6,34	6,38	6,41
IE 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global																					
20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	5,15	5,08	5,02	4,95	4,89	4,82	4,76	4,70	4,64	4,58	4,52	4,46	4,40	4,34	4,29	4,23	4,18	4,12	4,07	4,02	3,96
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	35,12	35,15	35,19	35,22	35,26	35,29	35,33	35,36	35,40	35,43	35,47	35,50	35,54	35,57	35,61	35,65	35,68	35,72	35,75	35,79	35,82

No	Indikator Utama Pembangunan	Periode I					Periode II					Periode III					Periode IV					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	4,39	4,83	5,31	5,85	6,43	7,07	7,78	8,56	9,42	10,36	11,39	12,53	13,78	15,16	16,68	18,35	20,18	22,20	24,42	26,86	29,55
IE 8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi																					
23	Kota dan Desa Mandiri, Inklusif, dan Berkelanjutan																					
	a. Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	12,47	12,60	12,72	12,85	12,98	13,11	13,24	13,37	13,51	13,64	13,78	13,92	14,06	14,20	14,34	14,48	14,63	14,77	14,92	15,07	15,22
	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	79,17	80,12	81,08	82,05	83,04	84,03	85,04	86,06	87,09	88,14	89,20	90,27	91,35	92,45	93,56	94,68	95,81	96,96	98,13	99,30	100,00
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	4,69	5,79	6,95	8,66	10,94	11,98	12,58	13,84	14,40	15,63	16,77	17,29	18,69	19,87	20,70	20,99	21,02	21,38	21,46	21,69	21,88
IE 9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif																					
24	Indeks Reformasi Hukum	47,95	49,48	51,07	52,70	54,39	56,13	57,92	59,78	61,69	63,66	65,70	67,80	69,97	72,21	74,52	76,91	79,37	81,91	84,53	87,23	91,00
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,86	2,92	2,99	3,05	3,12	3,19	3,26	3,33	3,41	3,48	3,56	3,64	3,72	3,80	3,88	3,97	4,05	4,14	4,23	4,33	4,42
26	Indeks Pelayanan Publik	2,63	2,70	2,77	2,84	2,92	2,99	3,07	3,15	3,23	3,32	3,40	3,49	3,58	3,67	3,77	3,87	3,97	4,07	4,18	4,29	4,40
27	Indeks Integritas Nasional	70,22	70,92	71,63	72,35	73,07	73,80	74,54	75,29	76,04	76,80	77,57	78,34	79,13	79,92	80,72	81,53	82,34	83,16	84,00	84,84	85,68
IE 10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial																					
28	Persentase Penyelesaian Kejahatan	84,19	84,95	85,72	86,49	87,27	88,05	88,84	89,64	90,45	91,26	92,08	92,91	93,75	94,59	95,44	96,30	97,17	98,04	98,93	99,82	100,00
	a. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	81,16	81,56	84,82	88,22	91,75	95,42	99,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	71,70	72,49	73,36	74,24	75,13	76,03	76,94	77,87	78,80	79,75	80,70	81,67	82,65	83,64	84,65	85,66	86,69	87,73	88,78	89,85	90,00
30	Indeks Demokrasi Indonesia	79,36	79,86	80,36	80,86	81,37	81,88	82,40	82,91	83,43	83,96	84,48	85,01	85,55	86,08	86,63	95,17	95,65	96,12	96,60	97,09	97,94

No	Indikator Utama Pembangunan	Periode I					Periode II					Periode III					Periode IV					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
IE 11	Stabilitas Ekonomi Makro																					
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,60	0,62	0,65	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,82	0,85	0,89	0,92	0,96	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17	1,22	1,26	1,31
32	Tingkat Inflasi (%)	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	2,25-3,25	2,25-3,25	2,25-3,25	2,25-3,25	2,25-3,25	2,25-3,25	2,25-3,25	2-3	2-3	2-3	2-3
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan																					
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	16,20	17,17	18,20	19,29	20,45	21,68	22,98	24,36	25,82	27,37	29,01	30,75	32,60	34,55	36,63	38,82	41,15	43,62	46,24	49,01	51,96
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	c. Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	369,18	400,56	434,61	471,55	511,63	555,12	602,30	653,50	709,04	769,31	834,70	905,65	982,63	1.066,16	1.156,78	1.255,11	1.361,79	1.477,55	1.603,14	1.739,40	1.887,25
	d. Total Kredit/PDRB (%)	15,00	15,30	15,61	15,92	16,24	16,56	16,89	17,23	17,57	17,93	18,28	18,65	19,02	19,40	19,79	20,19	20,59	21,00	21,42	21,85	22,29
34	Inklusi Keuangan (%)	85,50	85,93	86,36	86,79	87,22	87,66	88,10	88,54	88,98	89,43	89,87	90,32	90,77	91,23	91,68	92,14	92,60	93,07	93,53	94,00	94,47
IE 12	Daya Saing Daerah																					
35	Indeks Daya Saing Daerah	3,26	3,30	3,35	3,40	3,46	3,51	3,56	3,61	3,67	3,72	3,78	3,83	3,89	3,95	4,01	4,07	4,13	4,19	4,26	4,32	4,38
36	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	6,98	6,80	6,63	6,47	6,31	6,15	6,00	5,85	5,70	5,56	5,42	5,28	5,15	5,02	4,90	4,77	4,65	4,54	4,42	4,31	4-4,5
IE 13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju																					
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,16	56,78	57,40	58,03	58,67	59,32	59,97	60,63	61,30	61,97	62,65	63,34	64,04	64,74	65,46	66,18	66,90	67,64	68,38	69,14	69,90
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,07	74,40	74,74	75,07	75,41	75,75	76,09	76,43	76,78	77,12	77,47	77,82	78,17	78,52	78,88	79,23	79,59	79,95	80,30	80,67	81,03
IE 14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif																					
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	64,38	65,02	65,67	66,33	66,99	67,66	68,34	69,02	69,71	70,41	71,11	71,83	72,54	73,27	74,00	74,74	75,49	76,24	77,01	77,78	78,55
	Indeks Perlindungan Anak	69,30	71,38	73,52	75,73	76,76	77,14	77,53	77,92	78,31	79,76	80,16	80,56	80,96	81,37	82,76	83,17	83,59	84,01	84,43	84,85	85,00
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,47	0,47	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29
IE 15	Lingkungan Hidup Berkualitas																					
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,54	0,54	0,55	0,56	0,56	0,57	0,58	0,58	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,67	0,68
42	Kualitas Lingkungan Hidup																					

No	Indikator Utama Pembangunan	Periode I					Periode II					Periode III					Periode IV					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	a. Indeks kualitas lingkungan hidup	66,68	66,9 3	67,1 8	67,44	67,69	67,9 4	68,2 0	68,4 5	69,30	68,95	69,2 1	69,4 6	69,71	69,96	70,22	70,47	70,72	70,97	71,23	71,48	71,73
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	1,12	1,29	1,49	1,71	1,97	2,26	2,60	2,99	3,44	3,95	4,55	5,23	6,01	6,92	7,95	9,15	10,52	12,10	13,91	16,00	18,40
	c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	10,84	11,7 0	12,6 4	13,65	14,74	15,9 2	17,2 0	18,5 7	20,06	21,66	23,3 9	25,2 7	27,29	29,47	31,83	34,37	37,12	40,09	43,30	46,76	50,51
	d. Presentase Sampah Terangkut (%)	37,44	37,0 7	36,6 9	36,33	35,96	35,6 0	35,2 5	34,9 0	34,55	34,20	33,8 6	33,5 2	33,19	32,85	32,53	32,20	31,88	31,56	31,24	30,93	30,62
IE 16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan																					
43	Ketahanan energi, air, dan pangan																					
	Ketahanan Energi																					
	i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	104,05	116, 54	130, 52	146,1 9	163,73	183, 38	205, 38	230, 03	257,6 3	288,55	323, 17	361, 95	405,39	454,0 3	508,5 2	569,5 4	637,8 8	714,4 3	800,1 6	896,1 8	1003, 72
	ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	161,00	160, 00	159, 00	158,0 0	157,00	156, 00	155, 00	154, 00	153,0 0	152,00	151, 00	150, 00	149,00	148,0 0	147,0 0	146,0 0	145,0 0	144,0 0	143,0 0	142,0 0	141,0 0
	Ketahanan Pangan																					
	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	6,97	6,67	6,38	6,11	5,84	5,59	5,35	5,12	4,90	4,69	4,49	4,30	4,11	3,93	3,76	3,60	3,45	3,30	3,16	3,02	2,89
	Ketahanan Air																					
	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,23	0,27	0,31	0,37	0,43	0,50	0,59	0,69	0,81	0,94	1,11	1,29	1,51	1,77	2,07	2,42	2,84	3,32	3,88	4,54	5,31
	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman (%)	18,72	20,5 9	22,6 5	24,92	27,41	30,1 5	33,1 6	36,4 8	40,13	44,14	48,5 5	53,4 1	58,75	64,63	71,09	78,20	86,02	94,62	100,0 0	100,0 0	100,0 0
IE 17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim																					
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	160,61	157, 40	154, 25	151,1 6	148,14	145, 18	142, 27	139, 43	136,6 4	133,91	131, 23	128, 60	126,03	123,5 1	121,0 4	118,6 2	116,2 5	113,9 2	111,6 4	109,4 1	107,2 2
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)																					
	Kumulatif	9,52	10,0 9	10,7 0	11,34	12,02	12,7 4	13,5 0	14,3 1	15,17	16,08	17,0 5	18,0 7	19,16	20,31	21,52	22,82	24,18	25,64	27,17	28,80	30,69
	Tahunan	15,32	16,5 5	17,8 7	19,30	20,84	22,5 1	24,3 1	26,2 6	28,36	30,62	33,0 7	35,7 2	38,58	41,66	45,00	48,60	52,49	56,68	61,22	66,12	71,81

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Visi Lampung Selatan 2045 **Lampung Selatan Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan** hanya mungkin dicapai dengan partisipasi semua pelaku pembangunan. Untuk itu, dokumen RPJPD ini perlu menjadi acuan bagi semua pelaku pembangunan baik instansi pemerintah, swasta, maupun organisasi kemasyarakatan.

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2045 sesuai dengan cita-cita pembangunan.

6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta kesediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku non pemerintah. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Perkuatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

6.1.1.1 Keterkaitan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan Daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD).

Konsistensi antara RPJPD dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD ke RPJMD. Periodisasi RPJMD mengikuti RPJPD. Substansi delapan misi (agenda) pembangunan berikut upaya transformatif prioritas menjadi bagian dari muatan utama RPJPD.
2. RPJPD bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya tranformatif untuk mencapai Lampung Selatan Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan. Hal-hal lain yang bersifat spesifik daerah akan dimuat di dalam RPJMD.
3. Arah kebijakan dan indikator pembangunan dalam RPJPD menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan dalam RPJMD.
4. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan Lampung Selatan pada RPJMD menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan pada RKPD, sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
5. Sasaran dan indikator strategis/program Renstra OPD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja (Renja).
6. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja OPD. Indikator prioritas pembangunan Daerah dilaksanakan melalui Indikator

Kinerja Utama (IKU) OPD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja OPD.

7. Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah juga ditentukan proyek prioritas pembangunan daerah pada RPJMD dan RKPD. Proyek prioritas pembangunan daerah tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan daerah.

6.1.1.2 Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Kembangan

Penyusunan RPJPD dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan nasional.
- Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.

- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.
- Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan nasional terkait dalam satu kesatuan wilayah. Kerangka Kerja Logis menggambarkan hubungan antara *input-proces-output-outcome-impact*. Sasaran utama pembangunan dalam RPJPD yang bersifat *outcome-impact*, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, baik untuk perencanaan pemerintah pusat maupun daerah

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant*, dan *Time-Bound* (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra OPD.

6.1.1.3 Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu dilakukan penguatan pendanaan pembangunan dengan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari

pinjaman dan hibah untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

6.1.2 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan nasional, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.

Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan nasional terbagi menjadi dua bagian.

a. Pengendalian perencanaan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke dokumen Rencana Strategis OPD; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, dan dokumen RKPD ke dokumen rencana

kerja OPD; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

b. Pengendalian pelaksanaan.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan.

Melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan daerah; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Pemerintah Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja daerah terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal OPD.

6.1.3 Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan

keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja OPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan penganggaran, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.1.4 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif menjadi kunci mitigasi risiko atas perubahan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, target RPJP Daerah dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.1.5 Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan. Prinsip dasar komunikasi publik

terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam. Komunikasi publik RPJPD 2025-2045 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan dua pemangku kepentingan utama, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.2 Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi 2045 Lampung Selatan Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital

dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*); Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik dilakukan melalui: (i) optimalisasi dana masyarakat (filantropi, dana sosial korporasi, dan dana keagamaan) untuk pembangunan; (ii) pengembangan inovasi skema-skema pembiayaan syariah untuk sektor publik; (iii) pengembangan pembiayaan berkelanjutan seperti *blue financing*, *green financing*, dan *circular financing* yang mencakup: pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan, struktur pasar, dan pengembangan bursa karbon ataupun bursa tematik lainnya; (iv) inovasi skema pembiayaan sektor non-publik serta (v) penguatan penerapan bauran pendanaan (*blended finance*) yang dapat mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan nonpublik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala nasional dan daerah; (iii) modernisasi pemantauan dan

pengendalian pelaksanaan investasi publik; (iv) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (v) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vi) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik. Peningkatan kapasitas dan optimalisasi peran sektor keuangan yang mencakup: (i) pendalaman sektor keuangan utamanya pengembangan diversifikasi produk, instrumen keuangan dan penjaminannya, penguatan kelembagaan/regulasi (termasuk pembiayaan jangka panjang) dan pasar yang lebih kompetitif, serta penguatan industri jasa keuangan syariah dan integrasinya dalam ekosistem ekonomi syariah; (ii) penguatan peran intermediasi sektor keuangan utamanya peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran kredit/pembiayaan ke berbagai wilayah dan sektor prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk kepada UMKM dan pendampingannya, peningkatan distribusi dan pengelolaan penghimpunan dana masyarakat di luar perbankan; (iii) peningkatan inklusi keuangan yang meliputi: peningkatan edukasi dan sosialisasi keuangan, pengembangan infrastruktur, serta penguatan inovasi dan pemanfaatan teknologi keuangan untuk lebih menjangkau masyarakat, serta peningkatan akses keuangan, terutama pada wilayah dan kelompok masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan formal, termasuk peningkatan peran pemerintah daerah dalam mendukung inklusi keuangan; (iv) penguatan, inovasi, dan pemanfaatan digitalisasi keuangan; serta (v) peningkatan pengawasan, penegakan hukum dan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan. Dalam rangka pencapaian kesinambungan pembangunan melalui pembiayaan Kelembagaan.

Kalianda, 15 Agustus 2024



H. Nanang Ermanto
Bupati Lampung Selatan